

**KUMPULAN SAMBUTAN DAN MAKALAH  
( 1996 – 1997 )  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
PROF. DR. EDI SEDYAWATI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
1997/1998**

**KUMPULAN SAMBUTAN DAN MAKALAH  
( 1996 – 1997 )  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
PROF. DR. EDI SEDYAWATI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
1997/1998**

## KATA PENGANTAR

Sambutan dan makalah-makalah yang terhimpun dalam kumpulan ini telah diajukan dalam berbagai kesempatan. Saya harus memohon maaf kepada para pembaca karena beberapa kali terjadi bahwa bagian-bagian tertentu dari sambutan dan makalah ternyata isinya sama dengan apa yang ada pada sambutan dan makalah lain. Hal ini tak dapat saya hindari karena seringkali memang kesempatan-kesempatan yang mengharuskan saya menulis sambutan dan makalah-makalah tersebut memang berkenaan dengan permasalahan budaya yang saling terkait. Lagipula, kemudahan teknik penulisan dengan menggunakan *word processor* itu ternyata memang sangat menggoda untuk dengan mudah mengalihkan bagian-bagian tertentu dari sebuah *file* ke *file* yang lain. Sekali lagi mohon maaf.

Pada umumnya sambutan dan makalah yang disajikan dalam kumpulan ini bersifat suatu penanggapan terhadap aktualitas permasalahan kebudayaan yang sungguh-sungguh kita hadapi dan membutuhkan penyikapan yang jelas. Setidaknya, saya merasakan urgensi untuk itu. Dalam beberapa sambutan dan makalah memang terdapat pula butir-butir permasalahan budaya yang sebenarnya dapat pula dijadikan suatu pokok kajian ilmiah, yang sudah tentu akan memerlukan upaya tersendiri berupa penghimpunan dan pengolahan data berdasarkan strategi ilmiah tertentu. Mudah-mudahan lontaran-lontaran permasalahan ini dapat mengilhami penelitian-penelitian khusus.

Untuk penghimpunan tulisan-tulisan saya tahun 1996 dan 1997 ini saya berterima kasih kepada Sdr. Nunus Supardi dan Sdr. I Gusti Nyoman Widja yang memprakarsai dan memfasilitasi, serta kepada Sdri. Poppy Savitri Arjana dan Sdr. Kuat Prihatin yang telah menekuni hingga ke pengoreksian naskah siap cetak.

EDI SEDYAWATI

23. Sambutan untuk Pembukaan Widyakarya “Antropologi dan Pembangunan” dan kongres Asosiasi Antropologi Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 1997 .....	40
24. Sambutan pada pembukaan pameran Sejarah Perjuangan Bangsa dari - Pergerakan Nasional sampai Orde Baru, Maluku, 23 September 1997 .....	42
25. Sambutan Pembukaan Pameran Foto Heinz-Gunter Praeger, Gedung Wisma Seni Depdikbud, Jakarta 16 Oktober 1997 .....	44
26. Sambutan Peluncuran Buku Dr. A.A.M. Djelantik: THE BIRTHMARK - MEMOIRS OF A BALINESE PRINCE .....	45
27. Sambutan Pelaksanaan Produksi Pementasan Tari “Kunti Pinilih dan - Gandrung Blambangan” karya Deddy Luthan, 17 Oktober 1997 .....	47
28. Sambutan Pembukaan PEKAN TEMU BUDAYA dalam rangka – Penutupan Dasawarsa Kebudayaan, Yogyakarta, 3 Nopember 1997 .....	48
29. Sambutan Pembukaan PAMERAN WAYANG RUMPOT, Jakarta - 8 Nopember 1997 .....	52
30. Sambutan pameran keramik Hildawati Cs, 12 Desember 1997.....	54
31. Sambutan pada Upacara Pembukaan Festival Musik Tradisi Indonesia tahun 1997, Surabaya, 13 Desember 1997. ....	55
32. Opening Speech “Birth of Modern Art in South East Asia”, Exhibition at – Fukuoka Art Museum, May, 9 <sup>th</sup> , 1998. ....	60

## B. MAKALAH

1. Tantangan Untuk Sepuluh Tahun Lagi, makalah kunci Pertemuan Ilmiah - Arkeologi VII, Cipanas 11-16 Maret 1996 .....	61
2. Disertasi Sukmono : Candi, Fungsi dan Pengertiannya, Ulasan disertasi, disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, Cipanas, 12-15 Maret 1996. 67	
3. Sejarah Arsitektur Indonesia dan Pemahaman Budaya, makalah kunci - Seminar Pengajaran Sejarah Arsitektur, Bandung, 22-23 Maret 1996 .....	71
4. Dance Creativity In Indonesia .....	76
5. Present Situation And Issues Concerning Policy For The Promotion Of Culture (Including The Arts) In Indonesia, The Japan Foundation Asia Center Advisory Panel, Tokyo, March, 25 <sup>th</sup> -26 <sup>th</sup> , 1996 .....	80
6. Karya Citra Bergerak Sebagai Sarana Pembentukan Persepsi, makalah untuk - dialog Perfilman Nasional dalam rangka Hari Film Nasional, Jakarta, - 28-30 Maret 1996 .....	94
7. Kebijakan Perbukuan Pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, - makalah untuk seminar dan lokakarya Bulan Buku Nasional dan Bulan Gemar Membaca 1996, Jakarta, 6 – 7 Mei 1996.....	98
8. Naskah dan Pengkajiannya : Tipologi Pengguna, makalah kunci Simposium Tradisi Tulis Indonesia, Jakarta, 4-5 Juni 1996 , .....	103

9. Spiritualitas Dalam Tinjauan Sejarah Kebudayaan Jawa, makalah pembuka Sarasehan Dimensi Budaya Spiritual dalam Masyarakat Jawa, Kaliurang, 11-13 Juni 1996, .....	108
10. Aspek Pelayanan Masyarakat Dalam Program Pembinaan Kebudayaan, pengarahan tentang kebijaksanaan kebudayaan, Palu, 18-22 Juli 1996, .....	113
11. Pelayanan Masyarakat, Pelestarian dan Penciptaan Dalam Program - Pembinaan Kebudayaan, pengarahan tentang kebijaksanaan kebudayaan, Puncak, 22-25 Juli 1996, .....	118
12. Style And Composition, Keynote Speech for Indonesian Dance Festival Conference, Jakarta, 26 – 31 July 1996 , .....	122
13. Kebudayaan dan Pembangunan, makalah disampaikan pada kuliah perdana Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Denpasar, 2 September 1996, .....	128
14. Bahasa dan Sastra Jawa : Menyongsong Masa Depan dan Menyikapi Hari Ini, makalah kunci Kongres Bahasa Jawa, Malang, 22-26 Oktober 1996, .....	137
15. Transformasi Budaya Jawa Dalam Kerangka Dinamika Antar Pusat, tema sidang kelompok “Indonesia dalam Dinamika Regional”, Kongres Nasional Sejarah, 12-15 November 1996, .....	143
16. Bahasa Bali Dalam Tinjauan Sejarah, makalah kunci Sidang Pleno I Kongres Bahasa Bali II Pesamuhan Agung Bahasa Bali IV, Denpasar, 7-9 November, 1996, .....	155
17. Composing Musik And The Traditional Performing Arts Of Indonesia : A Survey, Tunugan 97, 18 <sup>th</sup> Conference and Festival of the Asian Composers League, Manila, 20-26 January 1997, .....	162
18. Pengindahan Kota Dari Sudut Pandang Negara, makalah Diskusi Panel “Aplikasi Karya-karya Seni pada Pembangunan Proyek Berskala Kota, dan Konferensi Pers Lomba Rancangan Patung Lingkungan Anugerah Adipura Citra Raya 1997, Jakarta, 24 Juni 1997, .....	166
19. Kedudukan Kebudayaan Daerah Dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional Ditinjau Dari Permasalahan Pokok Kebudayaan Indonesia Dewasa Ini, makalah pada Temu Budaya Daerah, Bulan Apresiasi Budaya NTB, Mataram, 22 Juli 1997, .....	169
20. Konsep dan Strategi Pelestarian Warisan Budaya, makalah untuk “International Workshop On Balinese Cultural Heritage”, Denpasar, 29 Juli 1997, .....	175
21. Speech By THE INDONESIAN DELEGATE, draft by Edi Sedyawati as a Chief Delegates to Meeting of Minister of Culture of The Non-Aligned Movement, Medellin, Columbia, September 4 <sup>th</sup> – 5 <sup>th</sup> , 1997, .....	180
22. Cultural Diversity and Presentation In Indonesian Museums, speech for Seminar “Unlocking Museums”, Darwin, September 7 <sup>th</sup> – 13 <sup>th</sup> 1997, .....	185
23. Seni Minang Untuk Muatan Lokal, makalah seminar “Tari Minang untuk Pendidikan”, dalam rangka Gelanggang Tari Sumatera 1997, Padang, 8 Oktober 1997, .....	192

24. Kebijakan Pembinaan Seni Budaya di Indonesia, makalah disampaikan pada Pertemuan Sastrawan Nusantara IX, Pertemuan Sastrawan Indonesia 1997, Sumatera Barat, 6-11 Desember 1997 .....	197
25. Dinamika Budaya di Asia Tenggara Masa Hindu-Budha : Sebuah Kerangka Analisa, makalah Diskusi Ilmiah Arkeologi X, 15-16 Desember 1997, .....	202
26. “Peran Ganda Wanita” Dalam Tinjauan Kebudayaan, makalah disampaikan pada Semiloka “ Retrospeksi Peran Ganda Wanita untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI “, Surakarta, 19-20 Desember 1997.....	207

**A**

**KUMPULAN SAMBUTAN**

**Sambutan untuk  
Pameran CLOSE-UP OF JAPAN  
Jakarta, 1996**

Kami sangat menyambut baik prakarsa Mitsui & Co.Ltd. untuk menghadirkan pameran ini, yang menampilkan salah seorang di antara eksponen terpenting dalam seni rupa masa kini Jepang. Pameran yang disebut dengan nama "Close-up of Japan" ini mudah-mudahan dapat betul-betul menimbulkan "pertemuan jarak dekat" (dalam jarak pandang "close-up") antara kalangan pemirsa di Indonesia dengan dunia seni rupa masa kini Jepang. Pada gilirannya pertemuan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan pula pemahaman antar budaya antara bangsa Jepang dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Adalah suatu yang tepat pula apabila pameran yang beritikad mendekatkan bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang melalui pertemuan budaya ini diselenggarakan di Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud yang tak lama lagi mudah-mudahan akan berkembang menjadi Galeri Nasional, dan ini di masa depan diharapkan tergabung di dalam suatu pusat perkembangan kebudayaan. Silaturahmi budaya, pendalaman pemahaman, dialog pergerakan, adalah kegiatan-kegiatan batiniah yang diharapkan akan selalu terjadi dalam lingkup program pusat perkembangan kebudayaan tersebut. Dan contoh kegiatan yang memungkinkan itu terjadi adalah antara lain pameran Close-up of Japan ini.

Jakarta, 1996



**Sambutan untuk  
Pameran Fotografi Ali Said  
Jakarta, 14 Juni 1996**

Konon, keistimewaan manusia adalah karena ia menciptakan dan menggunakan alat. Sejarah peradaban manusia mulai dari penggunaan batu alam sebagai alat pemukul. Lama-kelamaan batu, serta bahan-bahan alamiah lain seperti tulang, kayu, dan lain-lain, sebelum dipakai dapat dibentuknya lebih dahulu untuk memperoleh daya guna yang lebih besar.

Kamera pun adalah suatu alat dari manusia. Dan ini yang dipakai oleh Ali Said. Untuk apa? Kamera, suatu instrumen yang merupakan akumulasi dari temuan-temuan ilmiah, diciptakan dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi berbagai harapan. Kapasitas dasarnya adalah untuk merekam secara visual apa yang tampak di alam yang hidup. Hasilnya adalah sebuah tampakan visual yang diam. Namun di tangan seorang pengguna kamera yang mahir dan berwawasan, hasil jepretan kamera yang diam itu dapat 'hidup', menggerakkan berbagai emosi dan pemikiran.

Harapan pengguna kamera memang bermacam-macam: dari memperoleh rekaman visual, atau 'pengabadian' adegan-adegan dalam peristiwa-peristiwa, baik yang domestik maupun yang bersejarah dan bersifat kenegaraan, serta berbagai variasi di antaranya, hingga menghasilkan suatu ekspresi visual sebagai tanggapan dunia yang sangat pribadi dari seorang seniman foto. Kiranya Ali Said memberikan tanggapan dan tangkapan pribadinya atas kejadian-kejadian yang disaksikannya. Marilah kita bersama-sama menikmati foto-foto karyanya, yang dipandu oleh intuisi jurnalistik dan bakat seninya.

Jakarta, 14 Juni 1996

**Sambutan Pembukaan  
Pameran Bersama "LONTAR"  
Museum-museum Negeri Propinsi Timor Timur,  
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali  
di Dili, 19 Juni 1996**

Para hadirin yang saya muliakan,

Adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk berada di sini, di Timor Timur, untuk menyaksikan digelarnya sebuah pameran bersama. Pameran yang merupakan kerjasama empat museum negeri propinsi ini patut kita hargai secara khusus, karena pameran seperti ini hanya akan dapat terlaksana jika tingkat koordinasi para penyelenggaranya cukup tinggi. Gagasan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Direktorat Permuseuman sejak lama ini patut mendapat dukungan semua pihak, karena dengan pameran bersama seperti ini lah akan dapat ditingkatkan kesaling-kenalan antar daerah di dalam tanah air kita Indonesia yang tercinta ini. Untuk kesempatan ini, masyarakat di Dili, dan Timor Timur pada umumnya, dapat menyaksikan karya-karya budaya dari saudara-saudaranya yang tinggal bertetangga, dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Setelah semakin kenal, diharapkan kita, antar suku bangsa di dalam kesatuan bangsa Indonesia ini dapat lebih-lebih lagi semakin saling mencintai.

Pameran bersama yang bertema "lontar" ini tentunya akan sangat menarik, karena kebanyakan kita tahu bahwa daun lontar yang dikeringkan itu memiliki kemungkinan untuk dijadikan aneka macam benda. Daun lontar dapat dipakai untuk membuat berbagai jenis wadah : lontar dapat pula digunakan sebagai bahan pakaian dan hiasan kepala, lontar dapat pula dijadikan instrumen musik, dan lontar dapat pula digores dan ditulisi untuk mengabadikan karya-karya cipta manusia. Pemikiran manusia diwujudkan ke dalam dan melalui bahasa, sedangkan bahasa direkam ke dalam tulisan. Kemudian, dalam sejarah penggunaannya, ternyata tulisan mampu mendekatkan jarak antara manusia. Orang yang berjauhan tempat dapat berhubungan melalui surat. Tulisan pun mampu mendekatkan manusia dari berbagai zaman. Kita di zaman sekarang ini masih dapat membaca tulisan hasil karya pujangga-pujangga yang berabad-abad yang lalu menggoreskan karya sastranya di atas helai-helai lontar.

Di zaman sekarang ini, di mana komunikasi didominasi oleh penggunaan berbagai media elektronik, kita mungkin bertanya-tanya: adakah masih akan ada gunanya kita memelihara kemahiran menulis di atas daun lontar? Begitu juga, di zaman yang didominasi oleh bahan-bahan sintetis ini, masihkah ada gunanya kita mempertahankan pembuatan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti lontar ini? Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab ya maupun tidak. Yang menjawab tidak adalah mereka yang melihat peri kehidupan budaya manusia sebagai penjabaran dari kebutuhan-kebutuhan ekonomik belaka. Dan zaman kita memang sebuah zaman yang sangat "sadar ekonomi". Di satu sisi hal ini mengandung alasan yang dapat dibenarkan, yaitu karena kesejahteraan suatu bangsa serta kewibawaan sebuah negara memang antara lain sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam kehidupan ekonomiknya. Namun, di sisi lain, dapat pula dikemukakan bahwa kemajuan dalam kehidupan ekonomik tidaklah harus berarti khasanah-khasanah yang unik dalam suatu kebudayaan menjadi sesuatu yang terlempar ke pinggir. Kemahiran-kemahiran yang unik untuk membuat benda-benda dari bahan-bahan yang khas dapat pula dikembangkan menjadi kemahiran-kemahiran yang bernilai ekonomik. Untuk ini masyarakat harus lebih dahulu diajari untuk menghargai, dipersiapkan untuk mengapresiasi.

Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita nikmati sajian pameran ini, yang menampilkan berbagai benda terbuat dari lontar. Marilah kita simak fungsi-fungsinya yang lama dalam tradisi masing-masing masyarakatnya, dan marilah pula kita mencoba berimajinasi ke masa depan : apa kiranya yang dapat diperkembangkan dari bahan, teknik, maupun fungsi lama dari benda-benda budaya yang terbuat dari lontar ini.

Dili, 19 Juni 1996

**Sambutan Untuk  
Pameran ASIAN MODERNISM  
Penyelenggara: Asia Center, Japan Foundation  
bekerja sama dengan Ditjen Kebudayaan  
Jakarta, 21 Juni -- 7 Juli 1996**

Kata pertama yang perlu saya sampaikan adalah "Terima Kasih", baik kepada Asia Center yang memprakarsai dan menyelenggarakan pameran ini, maupun para seniman dan pemilik koleksi yang telah mengizinkan peminjaman karya-karya seni untuk ditampilkan dalam pameran "Asian Modernism" ini.

Dipamerkannya karya-karya ini untuk khalayak di Indonesia, khususnya Jakarta, merupakan peluang bagi lebih banyak orang untuk menikmati dan mendalami pesan-pesan yang dilontarkan oleh sejumlah seniman dari tiga negara ASEAN sekaligus, dalam hal ini Philippina, Thailand, dan Indonesia sendiri. Dari Philippina ditampilkan 35 karya dari 18 orang senirupawan, dari Thailand 45 karya dari 17 seniman, dan dari Indonesia 59 karya dari 15 seniman. Dari ketiga negeri itu ditampilkan karya-karya yang meliputi rentang waktu yang panjang, dari awal munculnya apa yang dinamakan seni rupa 'modern' yang pada dasarnya merupakan perpanjangan garis tradisi seni rupa 'barat' (Eropa), sampai kepada karya-karya mutakhir dari tahun 1995. Seperti diketahui pameran ini telah dikelilingkan, mulai dari Tokyo (pembukaan 28 Oktober 1995), Manila, Bangkok, dan kini terakhir di Jakarta. Karya tertua dari Thailand dan Indonesia berasal dari tahun 1851, sedangkan dari Philippina hampir seabad sebelum itu.

Selama masa perkembangan yang panjang itu, melintasi berbagai perubahan sosial, besar dan kecil, di masing-masing negeri itu terlihat pula keanekaragaman pendorong yang menggerakkan para seniman untuk mewujudkan karyanya. Saya ucapkan selamat kepada para kurator dan ko-kurator yang dengan cermat dan penuh pertimbangan telah memilih karya-karya untuk mewakili keseluruhan bentangan aspirasi yang pernah berkembang dalam dunia seni rupa di masing-masing negara. Dijajarkannya karya-karya dari rentang waktu yang kurang lebih sama ini memungkinkan pula pemirsa untuk memperoleh perbandingan-perbandingan. Saya

sampaikan pula penghargaan yang tinggi atas tulisan-tulisan pengantar dalam katalog pameran ini yang walaupun singkat telah memberikan landasan pengetahuan yang mendalam kepada pemirsa mengenai perkembangan seni rupa 'modern' di ketiga negara ini.

Jakarta, 21 Juni 1996

**Opening Speech**  
**Conference on Precious Metals in Southeast Asia**  
**National Museum, Jakarta, 1-3 July 1996**

Honourable guests, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is my pleasant duty to be here to present an opening speech among this distinguished gathering. I wish I could be here all the way through the whole conference, to partake in the enjoyment of listening to your deliberations that are going to happen here.

I hope this small conference will be able to yield a big harvest of new findings to be shared, and new problems to be formulated. The present focus of discussion, precious metals, is itself a class of material which may have a rich variety both in terms of colour and in terms of component elements. Beyond the mere material, which imply metallurgical questions to deal with it, there is again a multitude of related aspects, be it technological, social, as well as ideological. Almost each of those aspects mentioned needs a specialist. And it is a blessing in itself that today many of the needed specialists are present in this conference.

It is a universally recognized fact that precious metals as a class is the object of human desire. Its glitter and its strength are the attractive qualities that push people to rush for it. Moreover, because it is rare, it is then highly priced, and as a consequence, it is only the privileged within a society that is given the possibility to own it.

In many societies precious metal has become a symbol of prestige. In some instances it is even exclusively allocated to certain high ranking persons, or a class of privileged persons. Even within a society with a more 'democratic' condition to own precious metal, as is found among the many ethnic groups in Indonesia, wearing golden ornaments (and not "false" ones) for an official gathering or ceremony is always considered as the proper conduct. Gold is special, and gold is honour.

In ancient Indonesia gold and silver, obviously recognized as precious metals, was used to measure standard nominal values within an exchange system. In Old Javanese, the units, presumably referring to weight, for gold were

called suvarna and mâsa, while the unit for silver was called dharana. It is, however, remarkable that the goldsmith is less mentioned in inscriptions than his colleagues, the blacksmith and the coppersmith. Their mention in inscriptions is always related to the restriction of the number of producing smithies within one village which are free from taxation. From this fact it can be inferred that blacksmiths and coppersmiths, the makers of daily used utensils for the people were numerous found in the villages, while goldsmiths were rare, and possibly only found in larger towns, or even only within the palace precincts.

The variety of the use of precious metals had made it necessary to process the raw material into one or another form of prepared material. The Old Javanese, especially for gold, has a special terminology to denote prepared gold in different forms, namely that of solid material (called jatirûpa), of liquid (called kanakadrawa), of powder (called atal êpit), and in the form of sheets (called parada). The technology to obtain gold as raw material, to process it into prepared material, and turner on to produce components and then to make the finished products ready to be used, all of them demand the scrutiny of the scholar. It has its development along the time line, and it also has its variety among the many cultures and sub-cultures.

On the other hand, within the context of today's demands, the technology behind the many specific styles of golden artifacts from different regions in Southeast Asia is always waiting to be transferred from a traditional setting into a more industrial one. At this point I would like to identify the existence of a problem of degeneration. Because the traditional goldsmiths do not cater anymore to the exquisite demands of their elite, tasteful patrons, but now confronted to the demands of the common market, they hardly can retain their motivation to excel. To do a masterly work the goldsmith will need twice or more of the time to do a work of a common, mediocre quality. The last mentioned is, ironically, more readily welcomed in the common market. What makes the situation worse is that the capability to discriminate quality among the majority of people tends also to degenerate. To conserve the masterly skills, to my mind, some special formal certification should be ventured.

A last point concerns the function of things made of precious metals. They are often commissioned to meet the sheer need to delight in beauty, especially

among the rich people. They are at the same time also meant to enhance one's prestige. Traditionally, a thing made of precious metal is presented as a gift that is considered serious. It is also often meant to be a symbol of everlasting bond, be it friendship, patron-client relationship, and others. Among many, golden things owned are regarded as capital, or security back-up for the home finance. Changes of functions, changes of custom and tradition, even changes of taste, are undergoing these days in many places. To study them is another challenge for researchers.

Distinguished participants, ladies and gentlemen, may I wish you a success with your undertakings, and may your discussions be fruitful.

Jakarta, 1 Juli 1996



**Sambutan untuk  
Pembukaan Seminar Prasejarah Indonesia  
Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API)  
Yogyakarta, 1 Agustus 1996**

**Sambutan Pembukaan**

Bapak Prof. Dr. R.P. Soejono, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Ahli Prasejarah, serta Para Undangan sekalian yang saya hormati,

Dalam periode sejarah Indonesia yang ditandai oleh pembangunan ini, mungkin orang akan bertanya mengenai seminar ini, apakah gerangan hubungan antara Prehistori dan Pembangunan? Maka orang harus menjawab dahulu, apakah "pembangunan" itu. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini adalah pembangunan yang menyeluruh, dan karena itu mempunyai berbagai aspek. Tujuan umum dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan hidup, lahir dan batin, bagi seluruh bangsa, serta kewibawaan dan kedaulatan di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Aspek yang menonjol dewasa ini adalah aspek pembangunan ekonomi dan aspek ketahanan nasional. Di atas landasan kedua aspek ini didirikan usaha pembangunan bangsa, yang mempunyai berbagai seginya pula. Membangun bangsa berarti membangun manusia Indonesia. Segi-seginya adalah: kesejahteraan hidup lahiriahnya, ketenteraman kehidupan keagamaannya, terpenuhinya kebutuhan batinnya yang lain, baik dalam hal keamanan sosial maupun nilai-nilai estetis, keberdayaannya di dalam dunia kerja, serta dimilikinya kesadaran budaya dan kesadaran sejarah. Dengan dua hal yang disebut terakhir ini lah warga suatu bangsa dapat dikatakan memiliki jati diri. Maka ketemulah sekarang hubungan antara pembangunan dan prehistori dan prehistorisi. Khususnya pembangunan bangsa, dan lebih khusus lagi segi pembangunan kesadaran budaya dan kesadaran sejarah, sangat memerlukan jasa para prehistorisi. Para ahli ini lah yang dapat membuahkan 'cerita' mengenai prasejarah Indonesia. Pengetahuan mengenai budaya dan perkembangan budaya dari masa prasejarah itu merupakan bahan pokok untuk menanamkan kesadaran budaya dan kesadaran sejarah bangsa. Masa prasejarah dapat dilihat sebagai titik awal dari perkembangan kebudayaan bangsa. Kebudayaan prasejarah dapat dilihat sebagai fondasi bagi perkembangan selanjutnya ketika berbagai suku bangsa dengan takaran yang berbeda-beda menyerap berbagai pengaruh budaya luar, sebagian daripadanya adalah yang telah membawa mereka ke masa sejarah.

Masa sejarah tersebut di beberapa tempat telah membawa pula bangsa-bangsa yang terkait ke dalam suatu babakan di mana manusia mulai mengorganisasikan diri ke dalam satuan-satuan politis dalam wilayah-wilayah yang diperbatasi dengan definisi yang jelas (meskipun de facto dan secara empiris belum tentu selalu jelas). Sebagai bagian dari sejarah, yang didukung oleh bukti-bukti pertulisan yang senantiasa dapat disimak kembali, kesatuan-kesatuan politis itu, yang umumnya disebut "kerajaan", meninggalkan bekas yang lebih terang dan mendalam dalam berbagai legenda maupun babad, tambo dan sebangsanya. Kejelasan identitas kerajaan-kerajaan lama itu seolah-olah mengaburkan eksistensi satuan-satuan masyarakat yang ada sebelumnya, yaitu satuan-satuan masyarakat prasejarah.

Kajian prasejarah, oleh karena itu, amat diperlukan untuk memberikan imbalan dalam pengetahuan kita mengenai masa lalu bangsa secara keseluruhan. Berbagai kajian prasejarah telah membuktikan adanya jaringan-jaringan hubungan yang meliputi kawasan-kawasan yang lebih luas daripada batas-batas negara-negara kontemporer dewasa ini. Tanpa adanya data pendamping tertulis dapatlah difahami bahwa sangatlah pelik upaya untuk menafsirkan, apakah persamaan-persamaan temuan di berbagai daerah itu menyiratkan suatu hubungan perdagangan, ataukah hubungan keagamaan, ataukah politik, ataukah gabungan-gabungan daripadanya. Apapun interpretasinya, gejala mengenai adanya hubungan itu sendiri dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk pembinaan hubungan-hubungan regional di masa kini. Jaringan-jaringan hubungan di masa lalu itu dapat digunakan sebagai landasan historis untuk ikatan-ikatan di masa kini, apakah itu ASEAN ataupun Asia-Pasifik, atau juga "kesatuan Laut Arafuru" yang sekarang ini sedang digunakan untuk mempersatukan para pemuda dalam arena olah raga.

Sudah tentu, sumbangan untuk kepentingan masa kini itu adalah sasaran sekunder bagi ilmu prasejarah sendiri. Dari segi ilmiah, yang kiranya masih diharapkan dari para ahli prehistori adalah kajian lintas daerah mengenai berbagai jenis tinggalan budaya masa lalu secara terintegrasi.

Yogyakarta, 1 Agustus 1996

**Laporan Ketua Penyelenggara  
Kongres Nasional Sejarah dan Kongres M.S.I. \*)  
(Masyarakat Sejarawan Indonesia)  
Jakarta, 12-15 November 1996**

Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden R.I. (dan Ibu Try Sutrisno),  
Yang Terhormat Para Menteri Kabinet Pembangunan VI,  
Hadirin yang saya muliakan,

as-salamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

Izinkan saya menyampaikan laporan mengenai Kongres Nasional Sejarah yang pada waktunya nanti kami akan mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk membukanya. Kongres yang akan segera dimulai ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dahulu kami sebut Seminar Sejarah Nasional, yang sudah lima kali diselenggarakan. Seminar Sejarah Nasional yang pertama diadakan pada tahun 1957 di Yogyakarta, dihadiri oleh pembicara dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, termasuk dari luar bidang ilmu sejarah. Seminar pertama tersebut merupakan kegiatan formal yang awal dari suatu pencarian landasan filosofis dan metodologis dari apa yang ingin kita sebut sebagai "sejarah nasional Indonesia". Permasalahan sudut pandang dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan menjadi masalah mendesak, yang pada waktu itu masih dihadapkan pada kenyataan dominannya peredaran tulisan-tulisan mengenai sejarah berbagai kerajaan di Indonesia oleh para sejarawan Belanda, yang secara sengaja atau pun tidak seringkali menampilkan visi kolonial dalam melihat sejarah kita.

Seminar Sejarah Nasional II diselenggarakan di Yogyakarta pula, 13 tahun kemudian, pada tahun 1970. Kedua seminar yang paling awal itu diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan diselenggarakan di kampus universitas negeri yang pertama di Republik Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Baik rektor UGM pada waktu itu, maupun Sri Sultan Hamengku Buwana IX sangat besar dukungannya dalam penyelenggaraan kedua seminar nasional tersebut. Pada kesempatan

---

\*) Diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional,  
Direktorat Jenderal Kebudayaan, bersama M.S.I., Jakarta, 12-15 November 1996

Seminar Sejarah Nasional II itu lah pula, melalui kepemimpinan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, didirikan organisasi profesi sejarawan, yang tetap berdiri hingga sekarang, bernama Masyarakat Sejarawan Indonesia. Pada seminar itu pula permasalahan periodisasi sejarah Indonesia mendapat perhatian khusus, dan di samping itu dilontarkan pula gagasan agar para sejarawan, dari ahli prasejarah hingga ke ahli sejarah kontemporer, bergabung dalam suatu usaha bersama untuk menuliskan apa yang dapat disebut sebagai buku babon Sejarah Nasional Indonesia. Usaha ini memang berhasil membuahkan beberapa buku.

Seminar-seminar nasional berikutnya adalah: yang ketiga diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1981 (artinya 11 tahun sesudah seminar kedua), Seminar Sejarah Nasional keempat diselenggarakan di Yogyakarta lagi pada tahun 1985, sedangkan yang kelima, yaitu yang terakhir sebelum ini, diselenggarakan di Semarang pada tahun 1990. Sebenarnya kami memang berkeinginan untuk menyelenggarakan seminar keenam, yang sekarang kami sebut "kongres" ini, pada tahun 1995, dengan mengacu pada periode penyelenggaraan lima tahunan, namun apa daya, tahun 1995 yang lalu bagi kami telah merupakan tahun yang cukup berat dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan lain yang kami abdikan pula bagi peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Setiap seminar nasional, maupun kongres sejarah yang kami selenggarakan ini selalu mencoba untuk menampilkan suatu pokok permasalahan yang ditonjolkan, di samping sudah tentu sejumlah daerah minat yang diharapkan dapat mawadahi hasil-hasil kajian mutakhir dari para sejarawan kita, yang semakin hari semakin beragam pengkhususan penelitiannya. Pokok-pokok yang pernah ditonjolkan pada waktu-waktu yang lalu, di samping visi nasional dalam penulisan sejarah dan periodisasi sejarah nasional yang telah disebutkan di muka, juga termasuk masalah-masalah lain seperti metodologi dan teori sejarah, serta masalah pengajaran sejarah di sekolah umum. Di sela-sela seminar-seminar nasional sejarah yang telah dilaksanakan itu diselenggarakan pula beberapa kali seminar sejarah lokal, yaitu pada tahun 1984 di Medan, pada tahun 1986 di Bali, dan pada tahun 1994 di Semarang. Dimensi lokal, dimensi nasional, maupun dimensi regional dan internasional dari sejarah bangsa mempunyai maknanya tersendiri untuk memperdalam pemahaman dan kesadaran sejarah, dan dengan kesadaran akan hal itu para sejarawan Indonesia pun telah menganekaragamkan perhatian dan pendekatannya dalam meneliti sejarah.

Untuk Kongres Nasional Sejarah 1996 ini tema yang kami kemukakan adalah: "Dialog Kelampauan Menguak Kekinian untuk Merancang Masa Depan". Makalah-makalah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu sejumlah 8 makalah utama yang dibahas dalam sidang pleno, sejumlah 45 makalah "undangan" yang diminta untuk mengisi sidang-sidang kelompok, dan terakhir sejumlah 56 makalah hasil seleksi yang mendaftar untuk sejumlah sidang kelompok yang sama. Kedelapan pokok yang dibicarakan dalam sidang pleno adalah:

1. Sejarah dan Historiografi;
2. Sejarah dan Pemikiran Ekonomi;
3. Sejarah dan Perkembangan Iptek;
4. Sejarah dan Prospek Masa Depan;
5. Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah;
6. Kurikulum dan Buku Teks Sejarah;
7. Masyarakat dan Kesadaran Sejarah; dan
8. Metodologi Pengajaran Sejarah.

Adapun sidang-sidang kelompok yang berjumlah 12 bertemakan:

1. Perempuan dalam Sastra dan Sejarah;
2. Nasionalisme dan Demokrasi;
3. Kekuasaan dan Masyarakat dalam Pemikiran Politik;
4. Ekspresi Seni dan Sastra dalam Perubahan Sosial-Politik;
5. Migrasi, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
6. Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya;
7. Pendidikan, Diferensiasi Kerja dan Pluralisme Sosial;
8. Alih Ilmu dan Teknologi;
9. Indonesia dalam Dinamika Regional;
10. Politik dan Pemerintahan;
11. Diplomasi dan Hubungan Ekonomi Internasional; dan
12. Suara dari "Mereka Yang Diam"

Bapak Wakil Presiden dan Hadirin yang kami muliakan,

Para pemakalah dan peserta yang sampai hari ini telah terdaftar untuk mengikuti kongres ini berjumlah isi orang, yang berasal dari seluruh Indonesia, dan termasuk pula beberapa sejarawan mancanegara. Di antara para pemakalah terdapat pula para ahli dari disiplin asal non-sejarah, namun

telah terjun ke dalam kajian interdisiplin yang melibatkan ilmu sejarah. Seperti telah kami laporkan, kegiatan penyajian dan pembahasan ilmiah atas makalah-makalah ini didampingi pula oleh rapat umum anggota dari perhimpunan profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia. Ada 16 cabang MSI yang diwakili dalam kongres ini, yaitu cabang-cabang: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kongres ini insya' Allah akan diresmikan pula dua cabang baru, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati,

Kiranya perlu pula kami laporkan bahwa kesempatan penyelenggaraan Kongres Nasional Sejarah ini akan kami gunakan pula sebagai semacam latihan untuk pada tahun 1998 kelak menjadi tuan rumah bagi suatu konperensi internasional sejarah, yaitu konperensi ke-15 dari International Association of Historians of Asia (IAHA). Pada periode ini, 1996-1998, Prof. Dr. Taufik Abdullah dari Indonesia menjadi president dari asosiasi tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1974 Indonesia pernah pula menjadi tuan rumah Konperensi IAHA, ketika president-nya adalah Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Demikianlah penyampaian laporan kami mengenai kongres dan hal-hal yang terkait dengannya. Meski sekecil apapun sumbangan kami dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami didorong oleh kemauan bertarung dalam karya ilmiah, dan oleh harapan akan dapat menyumbangkan sesuatu bagi kesadaran sejarah seluruh bangsa Indonesia.

Bapak Wakil Presiden yang kami cintai,

kami kini memohon petunjuk dan dorongan Bapak.

Wasalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 12 Nopember 1996

**EDI SEDYAWATI**

**Sambutan untuk  
Pameran Staf Pengajar Fakultas Seni Rupa  
Institut Kesenian Jakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat atas terselenggaranya pameran bersama dari staf pengajar Fakultas Seni Rupa IKJ.

Pameran semacam ini sangat penting artinya bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa senirupa IKJ sendiri, karena hal seperti ini dapat memberikan semangat dan dorongan untuk meningkatkan kreatifitas mereka.

Sedangkan bagi para pengajar sendiri kegiatan semacam ini tentunya diperlukan untuk mengasah kemampuan dan kreatifitas yang harus terus-menerus disalurkan.

Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala agar para pengajar senirupa di IKJ mempunyai wadah tetap untuk berkreasi, sedangkan bagi mahasiswanya dapat merupakan suatu sumber semangat dan ajang belajar yang nyata.

Selain itu juga yang terpenting pameran ini diharapkan dapat merupakan pertanggung jawaban IKJ kepada masyarakat, mengenai mutu seni rupa yang menjadi subyek asuhannya.

Pengantar untuk terbitan CD Musik Nusantara

**Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan  
Sebagai Pemrakarsa**

Terbitan CD Musik Nusantara ini merupakan persembahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1988-1997. Dasawarsa ini di Indonesia dicanangkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1989, yang bertolak dari Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 41/187 pada tanggal 8 Desember 1986 tentang penetapan dasawarsa 1988-1997 sebagai The World Decade for Cultural Development.

Salah satu aspek pembangunan Indonesia adalah pembinaan kebudayaan. Di antara sekian banyak permasalahan budaya terdapat masalah kesadaran akan jatidiri bangsa. Salah satu ciri budaya Indonesia adalah keanekaragamannya. Aneka budaya suku bangsa telah mempunyai sejarahnya yang panjang, dan kini menjadi khasanah bersama milik bangsa Indonesia seluruhnya. Contoh-contoh musik dari beberapa sukubangsa yang terhimpun dalam CD ini merupakan sekedar pengenalan, yang mudah-mudahan menjadi jembatan untuk apresiasi yang lebih mendalam dalam kesempatan lain.



## Pengantar untuk terbitan CD Musik Nusantara

### Remarks By The Director General Of Culture As Initiator

This CD issue of a collection of examples of Indonesian traditional music is dedicated by the Directorate General of Culture to the "Decade for Cultural Development 1988-1997". In Indonesia this decade was announced through a Directive of The President of The Republic of Indonesia No. 4 in 1989, based on Resolution No. 41/187 of The United Nations adopted by the General Assembly on December 8th, 1986, to declare the years 1988-1997 as the World Decade for Cultural Development.

Among the many aspects of Indonesia's development is that concerning culture. One most important problem of cultural development is that of the cultural identity of a nation. A prominent feature of Indonesian culture is its multitude and variedness. The many different cultures of the sub-nations of Indonesia have their respective long history behind. All of them comprise at present the heritage of the Indonesian nation as a whole.

The examples of musical fragments compiled in this CD are but first step introductions. It is hoped that this introduction will bring about a more profound understanding and appreciation in the next steps.

## **sambutan untuk buku**

### **TATA CARA PERKAWINAN ADAT ISTIADAT MINANGKABAU oleh Nazif Basir dan Elly Kasim**

Buku mengenai tata cara perkawinan menurut adat Minangkabau yang disusun oleh Nazif Basir dan Elly Kasim ini kiranya akan disambut baik oleh khalayak Minang pada khususnya dan oleh bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh mereka yang berasal dari keluarga Minang buku ini dapat dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan untuk menyelenggarakan upacara adat perkawinan, sedangkan oleh mereka yang bukan Minang tetapi terlibat dalam pelaksanaan upacara, baik sebagai "panitia" ataupun tamu, buku ini dapat dipakai untuk memahami apa-apa saja makna dari tindakan-tindakan keupacaraan yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan itu.

Upacara adat adalah ungkapan budaya yang merupakan salah satu penunjuk kekhasan suatu suku bangsa. Kita di Indonesia ini hidup dalam suatu kebersamaan budaya, di mana di satu sisi kita bersama-sama menumbuhkan-kembangkan kebudayaan nasional, dan di sisi lain memupuk perasaan kepemilikan bersama atas segala warisan budaya kita, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bukan kebendaan seperti halnya adat-istiadat ini. Kita, bangsa Indonesia, yang terdiri dari banyak suku bangsa ini, perlu secara bersama senantiasanya meningkatkan usaha untuk saling mengenal secara lebih intensif, melalui berbagai macam ungkapan budaya, seperti kesenian, bahasa, makanan, busana, arsitektur, maupun upacara adat beserta segala makna dan nilai yang terkait dengannya. Saya berharap buku ini dapat menjadi salah satu sarana yang bermanfaat bagi usaha saling kenal tersebut.

**EDI SEDYAWATI**

**SAMBUTAN UNTUK BUKU  
PERBURUAN KE 'PRANA JIWA': PERBURUAN SEORANG IDA  
WAYAN GRANOKA Warsa V / Wedalan X BAJRA SANDHI, Bali**

Penerbitan buku "memori Bajra Sandhi" yang diberi judul "Perburuan ke Prana Jiwa" ini adalah penerbitan yang langka. Pada umumnya orang menerbitkan sesuatu dengan tujuan menjelaskan/menerangkan/mendidik, atau mewujudkan suatu karya seni sastra. Buku "perburuan" ini adalah kedua-duanya, atau bukan kedua-duanya. Buku ini menyajikan sebuah eksplorasi terhadap teks-teks yang bernuansa religius, sekaligus mencoba penggapai interpretasi melalui penghayatan yang mendalam, melalui jalur seni.

Apabila di sana-sini terdapat kemelesetan dalam menerjemahkan ataupun memisah kata-kata Kawi, hal itu hendaknya tidaklah ditanggapi secara ilmiah-obyektif, melainkan hendaknya dapat kita terima sebagai kenyataan dalam proses penafsiran budaya. Proses-proses kecil seperti ini ibarat riak-riak di samudra luas. Ada kalanya tetap berupa riak kecil sampai ke pertemuan dengan pantai, namun ada kalanya pula bergabung dan bergulung menjadi sebuah ombak besar yang mempunyai arti dalam perubahan budaya.

Usaha-usaha Bajra Sandhi kiranya perlu diberi penghargaan tersendiri karena jasanya membudayakan generasi muda melalui seni dan sastra yang serius. Semoga selalu berhasil!

EDI SEDYAWATI

**Unesco International Conference on Culture and Population  
Indonesia, Yogyakarta, April 14-17, 1997**

**Opening Speech  
by  
Director-General for Culture  
Prof. Dr. Edi Sedyawati**

The Representative of the Minister for Population Affairs

The Representative of the UNESCO Office in Indonesia

The Representative of the Governor of the Provincial Government of the  
Special Territory of Yogyakarta

Special Territory of Yogyakarta

The Chairman of the National Committee for World Decade for Cultural  
Development

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

It is a great honour for me to stand here and to later on declare this conference  
officially opened.

As we have listened to Prof Makagiansar's and UNESCO representative's speech on our problems on culture and population, it seems that the problem of culture and population is looked upon as something of an integrated problem. However, we can also see the problem of culture and population as two problems opposing each other. One is the problem of population in which population tends to be seen in terms of individuals as units of observation. The population problem has its demographic aspect; and it also mainly deals with people's welfare in a general sense. On the other hand, talking about culture may mean talking about the bearer of the culture, the society, in which there are shared values within the society. Of course there are the dynamics between culture development and population growth or population development in a general sense, not necessarily the growth of it. It depends on what theory of culture we adhere to. We can see the relationship between culture and population in two ways. The first, if we tend to the more materialistic theories of culture, we may tend to see that it is firstly population dynamics that gears social change, and social change may result in culture change later on, in a slower pace. But if we are adhering to the more ideological

theories of culture we also see population dynamics as something being geared by culture, by certain values. In the Indonesian case, we saw already changes in values for instance in values regarding the ideal size of a family; and also regarding the value of children in the family. If we are going to "oppose" population problems to cultural problems, we may see that population problems are mainly hard problems, involving exact numbers, exact variables put into numbers. Meanwhile, in discussing culture, culture is seen as something needed for the identity of the society, of a nation, or of an ethnic group; culture also can be seen through the way of life of a society; thus, culture may be regarded as soft causes for population problems, for population dynamics. But, there also may be "hard effect" changes that happened in culture because of population dynamics. Of course, there is also a question of whether assumptions taken out from a certain culture on population, for instance, can be automatically applied to another culture as easy as we apply technological know-how. That is, I think, something that will be of interest to be discussed in this conference. Of course, we are now having more the task of problem solving, rather than theorizing on the concept of culture and the concept of the relationship between culture and population.

In this occasion may I also welcome all the participants in this conference with many thanks, with great appreciation. I wish the deliberations in this conference will be fruitful for all of us.

By saying Bismillahirrahmanirrahim, may God always be with us, I declare this conference officially opened.

Yogyakarta, April, 14<sup>th</sup>, 1997

Sambutan pada  
Penutupan Bulan Bahasa dan Sastra 1996  
Jakarta, 4 November 1996

Hadirin yang saya muliakan,

Seperti tentunya Saudara-saudara telah ketahui, bulan Oktober sejak tahun 1980 ditetapkan sebagai **Bulan Bahasa**. Selanjutnya, setelah diselenggarakan juga **Pekan Apresiasi Sastra** pada tahun 1988, yang dikoordinasi secara langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka kegiatan serupa itu mulai tahun 1989 dijadikan sebagai tradisi kegiatan berkala yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober, bersamaan dengan kegiatan **Bulan Bahasa**. Atas dasar itu, pada akhirnya bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Bahasa dan Sastra.

**Bulan Bahasa dan Sastra** diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari di semua lapisan masyarakat pengguna bahasa Indonesia; di samping itu, melalui kegiatan kesastraan, bertujuan menanamkan sikap positif terhadap sastra dan meningkatkan kemampuan apresiasi sastra siswa sekolah lanjutan tingkat atas, sehingga dalam dirinya timbul kepekaan, kecintaan, kebanggaan, dan rasa memiliki sastra Indonesia, serta mampu memanfaatkannya sebagai sarana peningkatan kualitas pribadi.

Berkenaan dengan itu, penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra 1996 mengambil tema "*Melalui penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, kita wujudkan jati diri bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa*".

Kegiatan **Bulan Bahasa dan Sastra 1996** termasuk ke dalam rangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa yang selama ini diupayakan dan dilaksanakan. Di antara berbagai kegiatan itu, yang dampaknya positif dan meluas, adalah **Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar**, yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-87 pada tanggal 20 Mei 1995. Gerakan yang secara khusus bertujuan menertibkan penggunaan kata dan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia perlu secara terus-menerus dilakukan untuk menjaga citra bahasa Indonesia sebagai lambang dan juga

salah satu bagian substansial dari jati diri bangsa. Hal itu merupakan aktualisasi dari ikrar kita bersama seperti yang tertuang di dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang berbunyi "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Kini, memang, 58 tahun setelah ikrar tersebut, dan 51 tahun setelah kita dapat memerdekakan diri sebagai bangsa, dan selanjutnya membina negara dengan dipandu oleh semangat persatuan dan kesatuan, maka bahasa Indonesia itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pemersatu, melainkan sudah menjadi bagian dari jati diri budaya bangsa. Dengan kata lain, bahasa Indonesia telah menjadi salah satu unsur kebudayaan nasional Indonesia, dan unsur yang teramat penting pula karena bahasa tersebut telah berfungsi sebagai sarana konseptualisasi, simbolisasi, dan ekspresi yang mantap.

Dalam kaitan dengan fungsi bahasa dan sastra itu di dalam masyarakat, perlu pula semakin dimantapkan kesadaran kelompok profesi di bidang kebahasaan dan kesastraan. Sehubungan dengan hal itu, kegiatan-kegiatan **Bulan Bahasa dan Sastra** hendaknya dapat dijadikan momentum bukan saja untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan, melainkan juga untuk sekaligus merancang dan mengupayakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra untuk masa-masa yang akan datang.

*Bulan Bahasa dan Sastra*, yang merupakan acara pada tingkat nasional, perlu selanjutnya dipikirkan untuk meningkatkan jumlah dan ragam kegiatannya. Kegiatan tingkat nasional itu harus betul-betul dikelola secara baik, dengan seluas mungkin melibatkan partisipasi berbagai pihak di dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan prestasi yang membanggakan dapat diraih di dalam goresan sejarah peringatan Hari Sumpah Pemuda / Hari Pemuda pada tahun-tahun mendatang.

Kegiatan yang berupa pertemuan para pembina bahasa dengan media massa cetak dan elektronik perlu ditingkatkan, baik dalam jangka waktu pertemuan maupun dalam intensitas diskusi di dalamnya. Dengan itu diharapkan dapat dibuahkan butir-butir gagasan dan rencana yang kongkret untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu digalang kerja sama yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang, agar gerak laju usaha pembinaan dan pengembangan bahasa serta upaya pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menjadi lebih mantap.

Kegiatan tingkat nasional yang perlu dipertimbangan dan direncanakan secara lebih baik antara lain ialah apa yang biasa kita sebut *bengkel sastra*. Kiranya kegiatan ini perlu diperluas sehingga mencakup semua aspek kesastraan, serta menjangkau khalayak pada rentang kelompok umur yang lebih lebar pula. Kegiatan lain yang perlu ditingkatkan jangkauannya adalah musikalisasi puisi. Dalam hubungan ini perlu saya pesankan secara khusus agar diadakan pengaitan dan pepaduan antara musikalisasi puisi dalam rangka **Bulan Bahasa dan Sastra** ini dengan **Lomba Musikalisasi Puisi** yang diselenggarakan oleh Proyek Anak dan Remaja Ditjen Kebudayaan. Jenis kegiatan ini sendiri memerlukan pembahasan, evaluasi, serta penelitian secara lebih luas, untuk mengetahui tingkat kemanfaatan dan efektifitasnya sebagai upaya mengasah kepekaan akan nilai-nilai susastra dan sekaligus nilai-nilai musikal.

Kegiatan lomba cerdas cermat, sayembara penulisan naskah pidato, serta sayembara mengarang esai sastra tingkat nasional perlu dipertahankan dan ditingkatkan profesionalitas pengelolaannya. Kegiatan itu sangat menunjang tercapainya keberhasilan proses belajar-mengajar di sekolah bagi para peserta yang mengikutinya. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kemampuan siswa, serta membentuk kepribadiannya melalui proses peningkatan belajar dan pelatihan keterampilan menulis dan membaca, serta di dasar itu semua, ketrampilan merumuskan pikiran.

Kegiatan penilaian penggunaan bahasa Indonesia dalam sulih suara pada film atau sinetron yang ditayangkan di televisi diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi peningkatan mutu dan kemampuan para anggota kerabat kerja penyulih suara. Penerjemah dan aktor pembaca, masing-masing harus menguasai bidangnya. Penerjemah harus betul-betul mempunyai kualifikasi penerjemah, artinya ia menguasai dengan baik bahasa sumber atau bahasa asal yang disulih suara, sehingga ia dapat menangkap makna yang tepat dalam kehalusan nuansa-nuansanya, dan ia pun harus menguasai bahasa Indonesia yang baik, benar dan tepat untuk situasi-situasi yang digambarkan dalam masing-masing adegan. Adapun pembaca dialog diharuskan pula menguasai seni akting untuk dapat mengucapkan dialognya dengan nada, tekanan, dan ritme yang tepat, sesuai dengan adegannya, dan tentu juga sesuai dengan kaidah pengucapan bahasa Indonesia.



Kegiatan lain dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra ini adalah penilaian penggunaan bahasa Indonesia di surat kabar tingkat nasional. Diharapkan, hasilnya dapat menjadi cambuk bagi para penulis dan wartawan dalam meningkatkan mutu pengetahuan serta kemampuannya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, peran media massa cetak sangat menentukan keberhasilan upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena menurut anggapan kebanyakan orang, bahasa yang digunakan pada media massa cetak selalu dijadikan contoh 'yang benar' dalam penggunaan bahasa.

Adapun kegiatan lomba deklamasi untuk siswa merupakan sarana yang andal untuk tujuan (1) menumbuhkan wawasan siswa terhadap kedudukan dan fungsi sastra sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya; (2) membina bakat dan apresiasi siswa terhadap sastra; (3) meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami karya sastra; dan (4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan diri dalam memahami sebuah karya sastra. Selain itu, kegiatan pertemuan tatap muka antara sastrawan dan siswa yang didampingi kepala sekolah dan guru-gurunya menjadi wadah dan sarana peningkatan wawasan dan pengalaman tentang proses kreatif dalam penciptaan karya sastra. Melalui kegiatan itu, rasa "*gandrung*" kepada karya cipta sastra diharapkan akan dapat meningkat.

Akhirnya, saya ingin menutup sambutan ini dengan saran untuk pengembangan pembinaan kebahasaan dalam program-program selanjutnya. Saran pertama berkenaan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informatika, dan saran kedua berkenaan dengan pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kiranya para ahli kebahasaan di Indonesia sudah waktunya untuk lebih proaktif menyusun kemasan-kemasan informasi kebahasaan dan kesastraan, untuk melayani berbagai kebutuhan, yang dapat dibedakan atas berbagai modus, seperti: untuk menyampaikan pengetahuan, untuk melatih ketrampilan, ataupun untuk menikmati. Terkait dengan itu adalah saran kedua, yaitu untuk menggalakkan produksi bahan-bahan ajar dalam aneka ragam kemasannya mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, maupun juga Bahasa Daerah sebagai bahasa kedua.

Dengan ucapan selamat atas telah terselenggaranya *Bulan Bahasa dan Sastra 1996*, serta pula dengan sejumlah harapan yang telah saya utarakan itu, dengan ini saya nyatakan kegiatan *Bulan Bahasa dan Sastra 1996* ini ditutup!

Jakarta, 4 November 1996

**CLOSING ADDRESS**  
**by**  
**the Director General for Culture**  
**International Conference on Culture and Population**  
**Yogyakarta, April 17th, 1997**

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Our conference is now approaching its end. Soon we have to say goodbye to each other. I do hope that all the issues having put on the table on population related to culture will not be only words written on paper, but may we all have the chance to work it out in whatever mode suitable to our respective daily duties.

While the basic problems of population are population density, population imbalance, and the problem of people's quality of life, we have identified and discussed more technical problems related to those, namely the family structure, fertility, mortality, migration, and human quality. These specific problems are somehow closely linked with certain cultural predispositions, as well as postdispositions. Specific values found in the many cultures in this world can be classified into those considered positive and those considered negative in terms of their relation to population problems.

Much inquiry work have still to be done in finding out, analysing, and testing of those cultural specificities. Social change, and the often resulting cultural change, may happen "naturally", meaning it happen without deliberate intentional schemes. However, we may also come across planned interventions, especially in our present pressing situations regarding population problems. In our research for the future as well as in using its results for programmatic actions, dealing with the problem of "population and culture", we have to make a clear distinction between values and techniques whenever we inquire on cultures.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

may I say a few words to the respective parties that have made this conference. First of all, may I thank our dearest friends from Bangladesh, Brazil, China, Egypt, India, Mexico, Nigeria, Pakistan, and Thailand, as well as from the

headquarters of UNESCO in Paris, and also from the Jakarta Office of UNESCO, from England, for all their efforts to come over to Yogyakarta, and share their thoughts in our conference. We understand how hard the travel itself can be, as has been experienced by the Nigerian delegate. May I, for myself and also representing all my Indonesian friends in the steering as well as organizing committees, ask for your pardon for all the inconveniences you may have had during the conference and its preliminaries.

We also should thank the UNESCO Commission for the World Decade for Cultural Development for granting us a substantial financial aid as a "Participation Program" aid to facilitate this conference.

I would also like to thank all the paper writers and presenters, as well as the chairmen and rapporteurs of the conference, for their efforts to formulate problems, concept and data into solid words, so that they can be used as reference for future endeavours. May I direct my feelings of appreciation to all the participants for their enthusiasm in the deliberations in this conference.

I wish you all, Ladies and Gentlemen, a safe journey home. May God be always with you. For those who are Moslems may I wish you spiritual fulfilment with the Id'al Adha tomorrow.

**Yogyakarta, April, 17<sup>th</sup>, 1997**

Speech on occasion of the presentation of the award as  
"Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres"  
by The Ambassador of France in Indonesia;  
Jakarta, May 14<sup>th</sup>, 1997

Your Excellency the Ambassador of the Republic of France to  
The Republic of Indonesia, and Mme. Thierry de Beauce,  
Excellencies, Distinguished Ladies and Gentlemen,

it is indeed a great honour for me to receive today the presentation of an award as a "chevalier dans l'ordre des arts et des lettres" from the Government of The Republic of France. May I express my deeply felt happiness and gratitude for this token of appreciation for what I have done in the field of art and letters. As a matter of fact, however, I do feel that whatever I have ever did in the field of art and letters are still too little to be balanced with the predicate "chevalier". This makes me shy, but happy at the same time.

Excellencies, Ladies and Gentlemen

This presentation of award from the Government of The Republic of France reminds me of the special quality of the cultural relation between our two countries. There have been so many activities in art and the humanities that have closely and intensively tied persons, both scientists and artists, from both our countries. What has been very much appreciated here in Indonesia is the fact that French scholars and artists are ready to act as equal partners for their Indonesian counterparts in their specific projects. For us Indonesians, equality does not mean only for the sake of status, but more importantly, for the sake of responsibility. May I on this occasion express my deep appreciation for the remarkedly un-patronising attitude of our French colleagues, both artists and scientists in the humanities, that have worked with us. By way of example, we may recall all the important research projects in archaeology, as well as all the excellent musical and theatrical works done jointly. Let us work further for the maintenance, and even intensification, of this good record of cultural cooperation.

Your Excellency The Ambassador of France,  
Excellencies, Ladies and Gentlemen,

to close this speech, may I resume to express my feelings: I feel very, very honoured in receiving this "chevalier" award. I thank the Government of The Republic of France.

**Jakarta, May, 14<sup>th</sup>, 1997**

## **Sambutan untuk Katalog Pendirian Galeri Padi**

Setelah melalui curahan pikiran dan kerja keras, akhirnya prakarsa mendirikan Galeripadi dapat terlaksana di kota Bandung dengan pameran perdana menggelar karya perupa muda potensial yang berkualitas.

Saya menyambut dan menghargai prakarsa maupun upaya mendirikan galeri seni rupa ini. Langkah ini adalah selaras dengan sifat pembangunan kita yang tidak hanya mencakup aspek lahiriah tetapi juga menyangkut aspek batiniah secara serasi. Karya seni merupakan salah satu kebutuhan batiniah kita yang perlu terus kita pelihara dan kita kembangkan sebagai pemacu kreativitas dan memotivasi diri dalam mengisi kehidupan kita.

Kehadiran Galeripadi ke tengah-tengah masyarakat akan menambah semaraknya perkembangan kesenirupaan, antara lain akan bertambah sarana untuk menggelar karya cipta seni khususnya bagi perupa muda potensial yang kadang kala kurang beroleh kesempatan untuk tampil.

Dari segi fungsi inilah Galeripadi diharapkan bukan hanya sebagai sarana menggelar karya akan tetapi lebih dalam lagi sebagai sarana dialog antara pencinta seni, pengamat dan peminat seni dengan perupa lewat karya cipta seninya, bahkan sekaligus menghayati nilai-nilai di balik karyanya. Apapun bentuk dan wujud dialog yang akan terjadi tentu akan menambah pengalaman yang bermanfaat.

Salah satu visi Galeripadi, yaitu memusatkan perhatian pada para perupa muda, adalah upaya yang membesarkan hati. Sikap ini adalah salah satu perwujudan dalam ikut serta meningkatkan kedudukan karya perupa Indonesia agar lebih mantap dalam percaturan kesenirupaan dalam lingkup nasional maupun antarbangsa.

Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada pemarkarsa serta pengelola Galeripadi, dengan harapan akan terus berupaya mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat. Ini bukanlah pekerjaan yang ringan namun dengan kerja keras, kerja sama yang harmonis serta pengabdian yang tulus apapun yang kita inginkan insya Allah akan terwujud.

Edi Sedyawati

**Opening Speech**  
**LINDA MARIE TABIOS painting exhibition**  
**Grand Hyatt Hotel, Jakarta, June 23th, 1997**

Your Excellency The Ambassador of the Philippines and  
Mme. Eusebio A. Abaquin,  
Excellencies, Ladies and Gentlemen,

it is a great pleasure for me to be present at this distinguished gathering of art lovers. It is with great pleasure too that I accept the request to officially open this painting exhibition of Mrs. Linda Marie Tabios, a rare personality who can combine very well her two seemingly opposing worlds, namely that of efficient business and that of imaginative artistic creation. This phenomena of Mrs. Linda Marie Tabios reminds us of the basic fact of our lives: the dual aspect of our very life that indeed has its material and spiritual sides, that both need feeding.

It is mentioned in the introduction to this exhibition that the painter is referred to as an embodiment of the ideal cultivated scholar according to the 18th century tradition of the Eastern literati developed in Japan and China. It is, indeed, worth asking to ourselves whether now, on the eve of the 21st century, we still have to learn something from the 18th century's idea of literati. Are we going to proceed with the trend to judge achievement success on the basis of social status and material well-being only, or are we going to give an even greater significance to spiritual and aesthetic qualities in our lives as well. I would like to suggest, that we follow Mrs. Tabios' example to make a good balance between materiality and spirituality.

May I now, with your permission, Ladies and Gentlemen, declare this exhibition of Mrs. Linda Marie Tabios' paintings officially opened.

Jakarta, June, 23 th, 1997

## **Sambutan untuk Penerbitan Buku Nuansa Minangkabau**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyambut gembira prakarsa IAKTRI Sumatera Barat untuk menerbitkan buku yang bertemakan adat dan budaya Minangkabau. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk menggali dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa.

Dalam rangka menghadapi dunia yang dalam segi-segi tertentu semakin menyeragam ini kita justru perlu melestarikan keanekaragaman budaya, sebagai sumber kekayaan bangsa. Kebudayaan daerah turut memberikan darah pada tubuh kebudayaan nasional. Dengan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional dan daerah ini pada hakekatnya kita berusaha agar generasi yang akan datang tidak akan kehilangan kekayaan budaya bangsanya.

Dengan adanya buku ini diharapkan masyarakat luas akan lebih memahami dengan baik adat istiadat dan tradisi suku bangsa di Indonesia yang tentu akan menambah wawasan kita tentang kebudayaan suku bangsa dalam rangka ber-Bhinneka Tunggal Ika dan akan berdampak memperkuat rasa persatuan bangsa.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih serta selamat kepada IAKTRI Sumatera Barat atas terbitnya buku "Nuansa Mingkabau" ini.

Jakarta, 2 Juli 1997



## **Preface for Exhibitions on Indonesian – Japan Friendship Festival**

The climate of change in the world today has resulted in the shift in the relationship among cultures around the world. What is needed for understanding of this global change are mutual efforts to communicate changes that occur within each culture. The Indonesia - Japan Friendship Festival is meant to develop such cultural dialogues. This is a dialogue where inter-cultural understanding includes that on the process of change.

The atmosphere of change in the world has led those of us in the Festival's organizing committee to present this exhibition titled "*The Mutation: Painsstaking Realism in Indonesian Contemporary Painting.*" The exhibition will give an idea of a fragment of development in Indonesian contemporary art which is directly linked with socio-cultural change. Furthermore, this exhibition is connected also with the dialogue concerning changes in the world's art, as it includes the argumentation which can be elevated as some of the issues within the overall Indonesia-Japan dialogue.

As the Director General for Culture, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, I have perceived that the Indonesia - Japan dialogue in Asian and Southeast Asian arts forums has reached an advanced stage. As examples, the following exhibitions can be mentioned: *The Asian Art Show* in Fukuoka, *The New Art from Southeast Asia* in Tokyo, *The Asian Modernism* (a traveling exhibition with stopovers in Tokyo, Bangkok, Manila, and Jakarta), *Asian Art Now* in Hiroshima, *Vision and Hobbies* in Tokyo, *the Birth of Modern Art in Southeast Asia* in Fukuoka, *Art in Southeast Asia: Glimpses into the Future* in Tokyo and Hiroshima, all of which were organized by Japanese art institutions and involving Indonesia.

Still with the context of Indonesia - Japan dialogue, it is quite impossible to enumerate the Japanese exhibitions which have been organized by Japanese curators held in Indonesia. As one of our efforts to develop this ongoing dialogue, the time has now come for Indonesia to present an exhibition in Japan, conducted by Indonesian curators. This exhibition, *The Mutation*, arranged by an independent curator, Mr. Jim Supangkat, is the first exhibition of this kind. I am truly confident that this is a sign of improved mutual understanding between Indonesia and Japan, both at the institutional level

as well as at a societal level. Within the framework of cooperation in setting up this exhibition, the existing mutual understanding can be clearly observed. This exhibition could not have been organized successfully without the assistance of Mr. Fumio Nanjo, who himself is also an independent curator.

Jakarta, July 1997

**Sambutan Untuk  
Peresmian GALERIPADI  
Bandung, 1 Agustus 1997**

Saudara Penyantun dan Pengurus Galeripadi,  
Para Seniman yang berpameran,  
Para Tamu Undangan, Hadirin sekalian yang saya hormati,

as-salamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

Adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk hari ini menyaksikan suatu kelahiran sebuah sarana kebudayaan baru, suatu sarana yang menjanjikan perluasan peluang berkarya bagi para seniman seni rupa. Saya menangkap pokok-pokok pikiran yang cukup jelas, dan semangat yang menggelora dari para penyelenggara Galeripadi ini untuk membentuk suatu arena kehidupan seni di mana penjelajahan merupakan nada dasarnya. Dalam arena tersebut pencarian dapat dilakukan pada berbagai ranah: pertama, dapat disebutkan ranah tematik; kedua, ranah teknik, yang mencakup baik persoalan bahan maupun proses pengerjaan; dan ketiga, ranah fungsi, yang dapat meliputi penggunaan maupun pemakaian dari suatu karya tertentu.

Suatu hal lain yang membahagiakan pula adalah kenyataan bahwa pameran perdana yang ditampilkan hari ini menunjukkan suatu wawasan luas yang, disadari atau tidak, dijiwai oleh suatu semangat kebangsaan, bebas dari kepicikan kekelompokan ataupun kedaerahan. Profesionalitas adalah taruhan dan harapan yang dapat kita tumpukan pada Galeripadi yang baru lahir ini.

Saya menduga bahwa arah yang akan ditempuh oleh Galeripadi ini adalah untuk mengembangkan pendekatan seni kontemporer. Artinya, para seniman yang diundang berpameran maupun topik-topik yang dipilih untuk lokakarya atau diskusi, akan dipandu oleh aktualitas permasalahan "hari ini". Forum di Galeripadi ini kita semua harapkan akan dapat berfungsi optimal, berkegiatan yang bersinambungan, untuk menambah kesemarak kehidupan seni rupa Indonesia, yang dewasa ini berkembang di berbagai pusat perkembangan di negeri kita tercinta ini.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas berdirinya Galeripadi ini. Atas nama Pemerintah R.I. pun saya menyatakan terima kasih kepada Penyantun dan

Pengurus galeri ini atas prakarsa serta tindakannya yang nyata untuk menggairahkan kehidupan berkesenian di Indonesia, dan semoga juga dapat membina hubungan-hubungan dengan dunia seni dalam forum internasional, sehingga dengan demikian dapat turut meningkatkan martabat bangsa melalui kesenian.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

**Bandung, 1 Agustus 1997**

**Opening Speech**  
**Inauguration of the Thai Room at the State Museum of the**  
**Province of North Sumatra in Medan, July 19th, 1997**

Your Excellency the Ambassador of Thailand, Mr. Somphand Kokilanon,  
Your Excellency The Minister of Education and Culture, Prof. DR. Ing. Wardiman  
Djojonegoro

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

This inauguration of the Thai Room within the State Museum of the province of the North Sumatra in Medan, is a much awaited for result of a more or less two years process of preparation. Inspired by the animated interest of H.E The Ambassador of Thailand to Indonesia in 1995 to intensify cultural relations between Indonesia and Thailand, implemented among others by the donation of several cultural items that we are now displaying in this Thai Room, we launched a program for state museums to develop a specific affiliation with a certain country.

We do hope that the existence of this Thai Room will inspire scholars, at least the curators of this Medan state museum, to develop experties in Thai Studies. There are still much to be done between Thailand and Indonesia, and among ASEAN countries in general, to promote interest in scientific and cultural cooperation. It is among others felt that we should intensify the promotion of historical awareness among our peoples. Trade, political, and cultural relations of the past are worth to be understood more deeply, since that understanding would constitute a strong cement for the present-day ASEAN association.

The Thai government has offered, alongside this Thai collection, several other grants for conservation and restoration of some archaeological and historical remains. We would like to, again, express our gratitude and deep appreciation. In reciprocity, Indonesia has sent several cultural missions to Thailand, among others for the commemoration of the 50th anniversary of the ascension to the throne of His Royal Highness King Bhumipol Adulyadets. As for the donated Thai collection in this museum, a special room and display facilities was prepared, after the initial guidance of the former Director for Museum Affairs, Mrs Soejatmi Satari, who is herself a scholar specialising in Southeast Asian Archaeology.

Coinciding with this inauguration of the Thai Room, today we will also witness the opening of an exhibition on ornaments worn by brides and bridegrooms in Sumatra. This exhibition is organised jointly between all state museums in Sumatra, namely that of Aceh, North Sumatra, Riau, Jambi, West Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, and Lampung. I am sure that within this subject too, we might see several similarities with other cultures in Southeast Asia.

To conclude, may I thank the minister of Education and Culture for sharing his dear time with us, to officially open both the Thai Room and the special exhibition of ornaments. May I also thank the Governor of North Sumatra for his continued support, moral and material, for the development of this museum as well as other cultural endeavours in North Sumatra.

Thank You.

Medan, July, 19<sup>th</sup>, 1997

**Sambutan untuk  
Pembukaan Widyakarya "Antropologi dan Pembangunan"  
dan Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia  
Jakarta, 26 Agustus 1997**

Adalah sesuatu yang patut disyukuri apabila di tengah-tengah tantangan dan kesulitan kita masih diperkenankan untuk memiliki kemauan keras untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Perkenankan saya menyampaikan pujian tersendiri kepada kedua tim pelaksana, baik widyakarya maupun kongres, yang dengan penuh ketulusan dan kerja keras telah mengatasi berbagai kendala untuk sampai pada saat yang berbahagia ini, yaitu pembukaan Widyakarya "Antropologi dan Pembangunan" serta Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia.

Pemilihan tema "Antropologi dan Pembangunan" dimaksudkan untuk memunculkan dan menghimpun analisis atas berbagai kenyataan yang memang terdapat di dalam masyarakat, di mana persoalan-persoalan pembangunan dalam berbagai aspeknya memerlukan penyorotan dari arahnya disiplin antropologi. Pengertian pembangunan dalam hal ini diberikan dalam arti luas, juga seluas cakupan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, meliputi pengembangan fisik-material, maupun teknologi, sistem, serta nilai-nilai budaya dan sikap hidup.

Di samping alasan pragmatis tersebut, widyakarya ini juga diharapkan untuk menjadi forum ilmiah untuk menunjang usaha pengembangan ilmu. Berbagai pemikiran di sekitar konsep dan teori, berbagai penjelajahan di bidang metodologi, diharapkan dapat diperdebatkan di dalam forum ini. Forum tatapmuka ini diharapkan dapat menggambarkan secara ringkas akumulasi pencapaian-pencapaian ilmiah dari para ahli antropologi Indonesia. Di samping itu, diharapkan bahwa pertemuan ilmiah antropologi dalam format ini untuk selanjutnya dapat diselenggarakan secara berkala, sesuai dengan jangka waktu dari kongres Asosiasi Antropologi Indonesia.

Kepada seluruh ahli antropologi beserta para ahli bidang lain yang berinterdisiplin dengan antropologi, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya pertemuan besar ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat menjadi pendorong untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, yang di satu sisi

meningkatkan intensitas komunikasi antara para ahli antropologi sendiri, dan di sisi lain dapat membuat warga masyarakat luas lebih memahami apa yang dapat disumbangkan oleh disiplin antropologi bagi pembangunan.

Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada berbagai pihak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Koentjaraningrat atas kesediaanya duduk sebagai Ketua Panitia Pengarah. Beliau dengan sabar, dan kadang-kadang juga dengan keras, mau mendengar dan berdebat dengan kami semua dari tim pengarah. Kehadiran beliau di antara kita terasa sebagai suatu pengayoman. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Letjen TNI Drs. A.A. Hendropriyono, SE, SH, MBA, yang berkenan untuk nanti membuka widyakarya dan kongres ini, meskipun diminta untuk itu dalam waktu yang terlalu singkat sehingga terasa kurang sopan. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf. Terima kasih kami yang khusus pula, kami sampaikan kepada Saudara kami, Dr. Syahrir yang dengan ketulusan memberikan dukungan dan bantuan kepada panitia pada saat-saat sangat dibutuhkan. Terakhir, tidak kurang pula rasa terima kasih saya kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, kepada ketua dan seluruh anggota panitia pelaksana Widyakarya Nasional, serta kepada ketua dan seluruh anggota panitia kongres AAI, yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini.

Kepada seluruh peserta saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, yang memberi isi kegiatan ini.

**Jakarta, 26 Agustus 1997**



**Sambutan untuk  
Pembukaan Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa  
dari Pergerakan Nasional sampai Era Orde Baru  
Maluku, 23 September 1997**

Pameran ini diselenggarakan bersama oleh empat Museum Khusus yang dikelola oleh Direktorat Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan. Keempat museum itu mempunyai persamaan bahwa kesemuanya terkait erat dengan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Selain itu, gedung-gedung keempat museum itu juga merupakan "Benda Cagar Budaya" yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu maka perawatan dan pembinaannya pun harus mengikuti kaidah-kaidah konservasi benda cagar budaya. Tiga di antara keempat museum itu, yang kebetulan semuanya ada di Jakarta, pada dasarnya merupakan situs-situs tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa bersejarah yang maha penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia membentuk diri dan menyatakan kemerdekaannya. Museum-museum Khusus itu adalah Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum yang disebut pertama, yang juga dikenal sebagai Gedung STOVIA ( School Tot Opleiding Van Islandsche Artsen = Sekolah untuk Pelatihan Dokter Pribumi ), adalah tempat berhimpunnya para pemuda terpelajar Indonesia dari berbagai organisasi untuk menyatukan sudut pandang dan cita-cita, menuju kepada kesatuan bangsa dan bersama-sama berusaha membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan oleh bangsa asing. Museum yang disebut kedua adalah tempat diikrarkannya tekad dan kaidah pemersatu bangsa, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini pada dasarnya memberikan landasan instrumental untuk pengembangan sebuah kebudayaan baru, Kebudayaan Nasional Indonesia. Khususnya satu bahasa, Bahasa Indonesia, adalah satu alat konseptualisasi yang harus dipahami dan digunakan secara bersama oleh seluruh bangsa. Adapun Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah tempat dirumuskannya Naskah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia dari jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Soekarno - Hatta.

Museum yang keempat adalah Museum Benteng Yogyakarta yang dahulu dibuat oleh kolonialis Belanda dan dinamakan Benteng "Vrendenburg"

(benteng perdamaian), namun di sini terdapat ironi, karena pada hakekatnya pembuatan benteng kolonial di hadapan istana Jawa itu adalah lambang rongrongan terhadap kedaulatan pemerintahan pribumi. Demikian pun di berbagai tempat lain yang tersebar di banyak tempat di Indonesia ini terdapat benteng-benteng yang dibuat oleh orang-orang kolonialis dari Eropa, baik itu Portugis, Belanda maupun Inggris. Tujuan pembuatan benteng-benteng tersebut adalah untuk menandingi sistem pertahanan dari kerajaan-kerajaan pribumi yang sah, sedangkan sasaran akhirnya adalah untuk mendapatkan dan mengamankan monopoli perdagangan oleh orang-orang asing tersebut. Oleh tindakan-tindakan kolonialis itu, yang berdagang sambil membawa senjata, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini menderita kerugian dalam hal materi maupun martabat. Situasi yang tidak menguntungkan ini seringkali disadari oleh para pemimpin berbagai kerajaan itu, sehingga dari waktu ke waktu terjadi perlawanan-perlawanan terhadap orang asing itu. Perlawanan semesta oleh Pangeran Diponegoro di Jawa telah mengkalangkabutkan kolonialisme Belanda sehingga sesudah itu mereka lalu justru memperkuat usaha-usaha penjajahannya. Bentuk serikat perusahaan dagang (yang dari awal memang sudah "main penguasa" dan mempersenjatai diri itu), sudah tentu dengan berbagai sarana penegakan kedaulatan yang semakin kuat dan terstruktur. Peninggalan masa kolonial adalah memang sudah menjadi bagian dari bukti sejarah bangsa, namun fungsinya bagi kita sekarang, sebuah bangsa yang mampu memerdekakan diri dari penjajahan ini, adalah untuk menjadi pengingat agar kita bangsa Indonesia tidak akan lagi terjerumus ke dalam keadaan terjajah, dalam segala bidang. Demikianlah jika ketiga Museum Khusus di Jakarta menyajikan bahan-bahan pameran yang merupakan data yang terkait dengan peristiwa di gedung itu masing-masing, tidak demikian halnya dengan Museum Benteng Yogyakarta. Museum di Yogyakarta ini tidak mengutamakan penyajian data mengenai kejayaan kolonialis Belanda, melainkan mengenai perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap mereka.

Mudah-mudahan pameran bersama museum-museum khusus yang digelar di Museum Negeri Propinsi Maluku di Ambon ini mampu menggerakkan rasa kebangsaan dari para pemirsanya.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

## **Sambutan**

### **Pembukaan Pameran Foto Heinz-Gunter Praeger Gedung Wisma Seni Depdikbud, Jakarta 16 Oktober 1997**

Foto-foto yang mengambil candi Borobudur sebagai objek ini pada dasarnya adalah suatu ungkapan kesan, suatu interpretasi individual oleh seniman fotografi yang membidiknya. Dalam hal pemotretan oleh tuan Heinz-Gunter Praeger ini, bukanlah ajaran keagamaannya benar yang menjadi arahan utama interpretasinya, melainkan pola-pola tata ruangnya lah yang menjadi pokok perhatiannya, menjadi perangsang untuk mengamatinya dari berbagai sudut pandang.

Melalui kameranya sang fotografer melihat dari berbagai arah yang tak terduga. Interpretasi tata ruang candi Borobudur ini bahkan dituangkan ke dalam sejumlah hitungan berpola, baik mengenai ukuran maupun jumlah. Hal ini pun dilakukannya secara empiris, tanpa panduan kitab-kitab petunjuk arsitektur kuna yang kira-kira sezaman dengan Borobudur. Pola-pola hitungan yang ditemukannya, dengan demikian, benar-benar merupakan suatu "penemuan" yang di sisi lain juga menunjukkan adanya kandungan mutu yang universal, yang terdapat di dalam candi yang kita banggakan ini.

Seniman foto Praeger melalui foto-fotonya, pelukis Oesman Effendi almarhum melalui sketsa-sketsanya, pelukis Srihadi melalui lukisan-lukisan cat minyaknya, semuanya pernah terpikat oleh candi Borobudur. Ini semua menunjukan bahwa candi tersebut memang suatu karya agung, dilihat dari sudut agama maupun seni, yang mampu menggerakkan seniman-seniman lain, bahkan dari jarak waktu dan kebangsaan yang jauh, untuk memberinya tanggapan seni dalam bentuk lain.

Kepada Tuan Praeger saya ucapkan selamat berpameran. Pameran ini pada dasarnya adalah ajakan untuk suatu dialog budaya. Kepada Yang Mulia Duta Besar Republik Federasi Jerman untuk Indonesia, Dr. Heinrich Seemann, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya yang penuh untuk pameran ini, maupun untuk perhatiannya yang amat luas untuk kebudayaan Indonesia.

**Jakarta, 16 Oktober 1997**

**Sambutan**  
**Peluncuran Buku Dr. A.A.M. Djelantik:**  
**THE BIRTHMARK: MEMOIRS OF A BALINESE PRINCE**

Bagi saya Bapak Dr. A.A.M. Djelantik adalah salah seorang tokoh teladan: seorang yang senantiasa membawa kerendahan hatinya melewati berbagai prestasi kerja yang berhasil diwujudkannya.

Di bidang kesehatan, bidang pokok yang dilandasi oleh studi formalnya, beliau telah mengabdikan diri secara amat berarti, terutama dalam usaha pemberantasan penyakit malaria. Di samping itu, dilandasi oleh kecintaannya serta pemahamannya yang mendalam akan dunia seni, beliau pun telah menghasilkan berbagai karya, khususnya tulisan-tulisan yang dikenal luas mengenai seni lukis Bali. Secara pribadi saya pernah berkesempatan merasakan sentuhan wibawa beliau ketika memenuhi permohonan kami untuk menjadi kurator pameran "Contemporary Balinese Art" di Jakarta tahun 1995 dalam rangka menunjang pameran "Contemporary Art of The Non-Aligned Countries".

Biografi-diri yang beliau tuangkan ke dalam buku yang diluncurkan hari ini sangat enak dibaca, berkat alur narasi yang lancar, struktur topik yang kuat, serta dari bagian ke bagian sebenarnya menyajikan dan mengungkap aneka ragam masalah kehidupan yang dapat mempunyai makna bagi siapapun. Penceritaan mengenai kejadian-kejadian sekaligus memaparkan posisi penulis serta sikapnya mengenai posisi tersebut, serta juga makna kehidupan apa yang sebenarnya sedang dimunculkan. Dibingkai oleh penafsiran dan perenungan mengenai "birthmark" pada tubuhnya yang konon meramalkan tantangan-tantangan besar, bahkan bahaya-bahaya dalam kehidupannya, biografi ini dengan gaya novel yang memikat membawa pembacanya mengikuti situasi-situasi kritis dalam kehidupannya. Permasalahan pewarisan adat-istiadat Bali yang luhur, kekeluargaan, permasalahan etika pelayanan kesehatan, permasalahan persahabatan, dunia kemahasiswaan, pengembangan sikap rasional dalam situasi-situasi yang irrasional, permasalahan kepentingan-kepentingan politik dalam bingkai situasi-situasi Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, semua ini dijalin dalam cerita yang lancar. Saya berfikir, bahwa buku semacam ini justru dapat

menyuburkan kesadaran sejarah, kesadaran sosial-budaya, serta kesadaran kemanusiaan pada pembacanya. -

Saya merasa betul-betul mendapat kehormatan bahwa dipilih oleh bapak saya, Dr. A.A.M. Djelantik, dan saudara saya, Prof.Dr. I Made Bandem, untuk menyampaikan sambutan dalam peluncuran buku ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sungguh berharap agar buku ini dapat dibaca secara luas, khususnya oleh remaja dan pemuda Indonesia sendiri, agar mereka mendapat semangat baru untuk bersikap, bekerja dan berkarya seperti yang diteladankan oleh Dr. A.A.M. Djelantik.

EDI SEDYAWATI

## **Sambutan**

### **Pelaksanaan Produksi Pementasan Tari "Kunti Pinilih dan Gandrung Blambangan" Karya Deddy Luthan**

Produksi pementasan tari sebagai salah satu media lengkap yang dituangkan melalui bentuk perpaduan garis-garis ekspresi, lewat sentuhan-sentuhan gerak yang artistik dan estetik. Karya seni tari yang bermuatan nilai-nilai spiritual, merupakan sarana yang ampuh dalam upaya menuangkan gagasan dan pengalaman diri seniman lewat daya imajinasi serta gejolak jiwa yang tersembunyi dalam sanubari.

Sebagai wujud kreatifitas para seniman tari di antaranya telah banyak berkembang dan mampu mengangkat dan mengharumkan nama bangsa. Oleh karenanya, melalui pelaksanaan produksi pementasan karya tari ini mengambil konsep dari Wiracarita Mahabrata lakon Kunti Pinilih yang mengandung makna simbolis terutama bagi kaum wanita, atas nilai-nilai etis, kesetian, cinta kasih dsb. Di sini seniman dituntut mampu menjabarkan nilai-nilai filosofis lewat gerak-gerak tarinya. Intensitas seniman dalam menuangkan gagasannya lewat karya yang disentuh oleh kemasan materi sajian adalah upaya untuk mengikat penonton, dan juga seniman harus mampu menyampaikan tema dan pesan karyanya.

Semoga kegiatan ini dapat memacu semangat dan kreatifitas seniman dan seniwati tari Indonesia, untuk lebih meningkatkan kualitas seni tarinya.

Selanjutnya melalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Deddy Dance Company atas karyanya. Semoga niat baik kita senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 17 Oktober 1997

**Sambutan Pembukaan PEKAN TEMU BUDAYA  
dalam rangka Penutupan Dasawarsa Pengembangan  
Kebudayaan di Yogyakarta, 3 Nopember 1997**

Yth. Gubernur KDh Tk.I DIY,  
Hadirin yang saya muliakan,

Pada saat ini kita akan menandai diawalinya Pekan Temu Budaya yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY. Instansi-instansi bidang kebudayaan di dalam Kanwil ini, baik itu Bidang maupun UPT, merupakan penggerak dan pelaksana dari rangkaian kegiatan ini, dengan kerjasama yang sangat erat pula dengan Dinas P dan K DIY, Pemda Tk.II seluruh DIY, PWI Cabang Yogyakarta, Dewan Kesenian DIY, serta BP7 Propinsi DIY. Atas segala usaha tersebut, mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pekan Temu Budaya ini diselenggarakan dalam rangka pengakhiran Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan di tahun 1997 ini. Dasawarsa itu sendiri sebagai suatu program antarabangsa diawali pada tahun 1988. Sebelumnya, gagasan dasawarsa tersebut muncul sebagai salah satu rekomendasi dari World Conference on Cultural Policies di Mexico City pada tahun 1982. Dalam rekomendasi itu dinyatakan bahwa:

- (1) kebudayaan merupakan bagian yang fundamental dari kehidupan setiap orang serta setiap masyarakat dan karena itu pembangunan yang tujuan akhirnya diarahkan bagi kepentingan manusia, harus memiliki dimensi kebudayaan;
- (2) upaya meningkatkan pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari aspirasi rakyat untuk memperoleh kebebasan politik dan pembangunan sosial-ekonomi;
- (3) usaha memajukan kebudayaan hendaknya dilihat dalam perspektif internasional, yaitu sebagai suatu syarat bagi pembangunan di seluruh dunia yang kondusif bagi perdamaian dunia.

Selanjutnya Rekomendasi tersebut menyarankan agar UNESCO mengusulkan kepada Sidang Umum PBB untuk mencanangkan Dasawarsa

Pengembangan Kebudayaan bagi seluruh dunia, dan memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal UNESCO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelenggaraan dasawarsa tersebut.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya tanggal 8 Desember 1986 telah memutuskan bahwa tahun 1988 hingga 1997 dijadikan Decade for Cultural Development. Keputusan itu dituangkan dalam Resolusi Nomor 41/187, yang mengamarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mencanangkan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Dunia (World Decade for Cultural Development) mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 1997.
- (2) Menyetujui empat tujuan utama Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Dunia, yaitu:
  - (a) pengakuan adanya matra kebudayaan dalam pembangunan;
  - (b) pengakuan akan identitas kebudayaan dan pengembangan kebudayaan;
  - (c) perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan;
  - (d) peningkatan kerjasama internasional dalam bidang kebudayaan.

Oleh karena resolusi PBB tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 (yang pada Pasal 32 mengamanatkan bahwa "**Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia**") serta sejalan pula dengan GBHN 1988 (yang menyatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan yang berbudaya), maka Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik hal itu, dan menyatakannya dengan pencanangan berlakunya Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1988, dan ini kemudian dikukuhkan dengan Instruksi Presiden R.I. No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan.

Melalui Instruksi Presiden tersebut dibentuk:

- (a) "Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan" yang terdiri dari:
  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;



4. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
  5. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  6. Menteri dan pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Menko Kesra, sebagai Anggota;
- (b) Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan;
- (c) Sekretariat Panitia Nasional yang secara fungsional dipimpin oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud.

Kemudian daripada itu, Menko Kesra dengan Keputusan No.06/Kep/Menko/Kesra/III/1990 tanggal 6 Maret 1990 melengkapi susunan Panitia Nasional tersebut dengan tambahan Anggota:

Menteri Sosial;  
 Menteri Penerangan;  
 Menteri Pariwisata;  
 Menteri Agama; dan  
 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun Pokja Dasabud dibentuk melalui Keputusan Menko Kesra No. 24/ Kep/Menko/Kesra/XII/1992 tanggal 30 Desember 1992, dengan Prof. Dr. M. Makagiansar (Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) sebagai Ketua merangkap Anggota; Drs. GBPH Poeger (Direktur Jenderal Kebudayaan) sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota; Prof. Drs. Soedomo, MA (Asisten I Menko Kesra) sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota; Drs. Bastomi Eryan (Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan) sebagai Sekretaris merangkap Anggota; serta sejumlah 10 orang lagi (pejabat dan tokoh budaya) sebagai Anggota.

Dalam naskah Kebijakan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1988-1997 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra pada 8 Oktober 1991 disebutkan pula bahwa :

- (1) Panitia Daerah Dasabud dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No.4 tahun 1989 dan pengarahannya Menko Kesra selaku Ketua Pannas Dasabud, dan terdiri atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua Panitia Daerah Dasawarsa Kebudayaan, dan pejabat-pejabat lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Dasabud, sebagai Anggota;

- (2) Panitia Daerah Dasabud bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas Dasawarsa Kebudayaan kepada Menko Kesra selaku Ketua Pannas Dasabud.

Demikianlah latar belakang dari Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan yang pada akhir tahun ini akan berakhir. Sudah saatnya kita semua yang terlibat bersiap untuk menyusun laporan mengenai pelaksanaan dasawarsa tersebut. Namun, meskipun sebentar lagi dasawarsa ini akan berakhir, tidaklah berarti bahwa penyadaran akan makna budaya dari segala usaha pembangunan boleh kita tinggalkan. Bahkan sebaliknya, semakin laju kita memasuki arena pasar bebas, semakin kuat pula hendaknya kesadaran budaya kita, di mana terkandung di dalamnya pengertian bahwa peningkatan kualitas hidup manusia, *lahir dan batin*, adalah sasaran pokok dari segala upaya pembangunan kita.

Yogyakarta, 3 November 1997

**Sambutan Pembukaan  
PAMERAN WAYANG RUMPUT  
diselenggarakan oleh Bentara Budaya Jakarta Jakarta,  
8 Nopember 1997**

Perlu saya awali sambutan ini dengan suatu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pengamat dan pengasuh budaya dari Bentara Budaya dan Karta Pustaka yang telah menemukan dan memperkenalkan secara luas secercah cahaya budaya yang ada dalam diri Kasanwikrama Tunut alias Pak Gepuk dari desa Bantar, Kabupaten Purbalingga ini. Sebagai seorang petani dengan jiwa besarnya yang dilandasi kejujuran dalam menjalani panggilan hidup, Pak Gepuk juga mengembangkan 'karir' sampingannya sebagai seniman alami. Seperti kata pepatah Minang, baginya "alam takambang manjadi guru". Pengertian "alam" yang menjadi lingkungannya tempat berguru itu adalah, baik sekalian tradisi dan warisan budaya yang telah tumbuh di dalam masyarakatnya (dari sana ia mengenal dunia wayang), maupun lingkungan alami tempatnya hidup sehari-hari (dari sana ia menemukan potensi gagang rumput kasuran). Dalam prosesnya berguru langsung kepada "alam" itu, secara naluriah ia pun mewarisi konsep-konsep komunikasi kebatinan yang telah diolah dalam kebudayaan Jawa selama kurang lebih duabelas abad. Prinsip *dhyana* yang dahulu pernah diterapkan oleh seniman-seniman masa lalu dalam mewujudkan arca-arca dewa, kini dipraktekkan pula oleh Pak Gepuk dalam melahirkan tokoh-tokoh wayang rumputnya yang demikian kuat menampilkan karakter masing-masing.

Kita semua patut berterima kasih kepada Pak Gepuk atas sumbangannya kepada khasanah seni bangsa kita. Ia telah menemukan teknik yang cukup rumit dalam menganyam rumput dalam paduan berbagai cara untuk mewujudkan hasil akhir yang berbeda dengan wayang-wayang rumput lain. Ia adalah sebuah bukti mengenai adanya "kreativitas di dalam tradisi". Sesungguhnya, di dalam tradisi seni suku-suku bangsa kita terdapat kreativitas yang dari waktu ke waktu mampu memunculkan hal-hal baru, meski dalam frekuensi yang berbeda-beda. Kesan kemandegan dalam tradisi hanya terlihat apabila bentuk-bentuk karya seni tertentu dialokasikan secara khusus bagi status-status sosial ataupun fungsi-fungsi ritual tertentu.

Di dalam seni pewayangan pun, baik pada aspek seni rupa maupun pada aspek seni teaternya, lahirnya variasi-variasi baru, bahkan bentuk-bentuk baru yang 'menyimpang' dari apa yang 'sudah biasa', adalah kelahiran yang senantiasa harus disyukuri. Wayang Kasman, wayang "sandosa", wayang layar ganda, adalah contoh-contoh percobaan pembaruan yang masih harus diteruskan, sambil dari waktu ke waktu diberi tinjauan kritis oleh para pakar dan seniman di bidangnya. Marilah kita sambut pengungkapan-pengungkapan baru itu dengan tanggapan aktif, kritis dan rasa syukur, namun tidak dengan skeptik.

**Jakarta, 8 November 1997**

**Sambutan untuk  
Pembukaan Pameran Keramik Hildawati Cs.  
Wisma Seni Nasional, 12 – 30 Desember 1997**

Pameran ini hendaklah dilihat sebagai suatu persiapan untuk suatu pameran keramik kontemporer Indonesia yang lebih besar di waktu yang akan datang. Beberapa seniman keramik yang tergabung dalam pameran kali ini adalah masing-masing seorang pribadi mandiri, yang dalam dunia seni keramik telah mengembangkan ciri-ciri khususnya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, dengan peranannya masing-masing, dalam perkembangan seni keramik kontemporer Indonesia. Pencarian-pencarian mereka meliputi berbagai tahap proses penggarapan seni keramik, dari penyediaan bahan dengan segala eksperimentasinya, sampai ke teknik-teknik pembentukan dan prosedur pembakaran dengan segala intervensinya. Semoga banyak pemirsa tergugah semangat hidupnya oleh daya cipta yang terkandung di dalam karya-karya yang disertakan pada pameran ini.

Kepada para seniman yang berpameran saya ucapkan selamat, semoga selalu jaya dalam berkarya.

**Jakarta, 12 Desember 1997**

**Sambutan untuk Upacara Pembukaan  
Festival Musik Tradisi Indonesia Tahun 1997  
Surabaya, 13 Desember 1997**

*Bapak Gubernur, yang dalam hal ini diwakili Kakanwil Depdikbud;  
Para pejabat Pemda Tk. I Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili;  
Para Bupati atau yang mewakili;  
Walikotamadya Surabaya atau yang mewakili;  
Para pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormat.*

*Assalamu'alaikum Wt. Wb.;  
Salam Sejahtera;  
Om Swastiastu.*

Saudara-saudara, parade tadi dan juga sederetan wakil-wakil kontingen yang ada di pentas ini sebenarnya melambangkan kekayaan khasanah budaya kita. Kita biasa menyanyikan lagu-lagu pujaan Indonesia yang kaya-raya, dan ternyata yang kaya-raya bukan dalam hal kekayaan alamiah saja, tetapi juga kekayaan budayanya. Bangsa yang kreatif sepanjang masa, yang telah menumbuhkan kebudayaan yang aneka warna di dalam lingkungannya masing-masing, marilah kita syukuri. Demonstrasi kekayaan ini memperlihatkan betapa kita mempunyai keanekaragaman.

Di dalam kita berbangsa, bangsa Indonesia yang baru, yang terhimpun atas suku-suku yang banyak yang masing-masing mempunyai kebudayaan, maka dalam konteks inilah kita perlu senantiasa tidak menghentikan upaya kita untuk saling kenal secara budaya. Ini sering kali tidak disadari, karena dalam sektor-sektor kegiatan yang lain, dalam sektor-sektor yang ditunjang keilmuan, seperti sektor lingkungan, sektor kesehatan, dan sektor ekonomi, kita selalu berbicara atas dasar parameter yang sama --- atas dasar kaidah-kaidah umum yang universal. Tetapi tidak mungkin hal yang sama diterapkan untuk kebudayaan. Kebudayaan selalu mempunyai kekhususan-kekhususan dalam nilai-nilai. Dalam kesempatan ini kita menampilkan kesenian, dan kita tahu

bahwa fungsi agama dan kesenian itu memang khas dalam kehidupan manusia yang tidak dapat disejajarkan begitu saja dengan fungsi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material.

Dengan kekayaan budaya yang aneka ragam ini, maka untuk membina integrasi nasional Indonesia yang baru, kita harus tetap mengusahakan upaya untuk saling kenal. Dan peristiwa ini, Festival Musik Tradisi Indonesia, adalah salah satu upaya untuk itu. Jadi saya mohon, khususnya kepada Saudara-saudara pemirsa maupun kepada kontingen, agar memanfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul saling memperhatikan, memahami, dan mengapresiasi. Itulah fungsi integrasi nasional dari keanekaragaman budaya kita.

Di dalam mengembangkan dan mengurus kebudayaan, khususnya kesenian kita, ada dua aspek yang harus kita perhatikan sekaligus dengan derajat kepedulian yang sama, yaitu : pewarisan dari segala warisan budaya, baik berupa teknik-teknik kesenian tertentu atau berupa nilai estetika tertentu yang telah dihimpun oleh pengalaman berpuluh, bahkan beratus tahun, oleh bangsa kita. Ini perlu kita lestarikan, kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Jadi di sinilah fungsi dari konservasi kita. Tetapi di sisi lain kita perlu mengembangkan kreativitas dalam bidang kesenian ini. Kita telah melihat kenyataan, bahwa tradisi dari seni kita pada umumnya memperlihatkan bahwa sepanjang zaman terdapat kreasi-kreasi baru meskipun tetap bertujuan untuk memperkaya tradisi yang bersangkutan. Oleh karena itu kita melihat ada kreativitas dalam tradisi; dan bahkan kreativitas dalam tradisi ini yang sesungguhnya menghidupkan tradisi tersebut.

Mungkin di lingkungan-lingkungan tertentu masih terdapat sikap yang kita sebut "*tradisionalisme*", yaitu mempertahankan tradisi dengan cara kaku, dengan cara ketat; artinya tidak mau bergeming dari apa yang sudah ada. Sikap itu perlu kita pertanyakan kembali. Dapatkah kita terus-menerus demikian '?

Kita telah melihat dalam perkembangan sejarah kita terdapat perubahan-perubahan. Perubahan sejarah dari bangsa yang terpecah-pecah menjadi satu bangsa baru yang diikuti dengan perubahan sosial di mana dahulu raja yang menentukan segala-galanya, sekarang bukan zamannya lagi. Zaman demokrasi, di mana ada jenjang-jenjang kepemimpinan yang harus kita bangun. Melalui struktur itulah kita harus menata kembali, atau harus berjalan untuk membina dan mengembangkan budaya kita.

Dalam proses perubahan sejarah dan proses perubahan sosial itu, disadari atau tidak, seringkali juga terdapat perubahan-perubahan budaya. Seperti perkembangan ekonomi kita dewasa ini membuat terbuka peluang bagi kita untuk "*memiliki*" aspek-aspek material maupun nilai-nilai dari bangsa luar, khususnya dari bangsa-bangsa maju, bangsa Barat. Dalam hal-hal tertentu juga kita melihat perwujudannya dalam ekspresi budaya kita. Dalam sinetron misalnya, juga dalam lagu-lagu populer. Hal ini memerlukan penyikapan yang tepat dari kita semua yang mencintai kesenian Indonesia. Salah satu aspek dari tantangan yang kita hadapi adalah, berhubungan dengan perubahan sejarah dan sosial itu terdapat juga perubahan dalam orientasi nilai. Sekarang kita di Indonesia telah mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi falsafah negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama misalnya, adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya, dalam bentuk-bentuk kesenian kita di daerah-daerah tertentu terdapat bentuk-bentuk kesenian yang sangat terkait erat dengan ritus-ritus kepercayaan --yang di sana-sini --- menunjukkan kesenjangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang saya kira memerlukan pemikiran kita, bagaimana sikap kita, khususnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembina yang ada di sini. Bagaimana kiranya kita menyelamatkan warisan budaya berupa teknik dan nilai-nilai seni dari khasanah budaya-budaya bangsa kita tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologis kita yang baru --- misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Ini berarti bahwa bentuk-bentuk seni tertentu perlu dipikirkan bagaimana mengalihfungsikannya.

Kekayaan khasanah budaya kita ini juga memerlukan tidak hanya pemanfaatan, tetapi juga lebih dahulu diperlukan studi. Seperti dalam seni musik ini, diperlukan studi profesional yang mendalam dari para ahlinya; ahli-ahli etnomusikologi. Di tengah-tengah kita ini ada ahli-ahli etnomusikologi Indonesia. Di tangan merekalah sebetulnya terletak masa depan pemahaman musik kita. Seberapa jauh kita dapat disadarkan akan kekayaan khasanah musik kita ini. Pernah ada para etnomusikolog di negeri maju (Barat) yang mengungkapkan bahwa betapa kehidupan musik kita sekarang ini didominasi oleh sistem nada diatonik. Padahal kita punya kekayaan berbagai macam sistem nada dalam khasanah musik kita. Sudah tahukah kita apa kekhasan sistem nada kita? Sudah tahukah kita akan kekayaan ini? Saya kira belum. Kalau harus menjelaskan ada berapa sistem nada yang kita kenal di Indonesia, barangkali paling yang bisa kita sebut



adalah *slendro* dan *pelog*. Padahal ada daerah-daerah lain yang punya sistem nada yang agak berbeda.

Inilah pesan saya, khususnya kepada para pembina musik atau kesenian di daerah, agar lebih cermat mengenali adanya kekayaan-kekayaan dalam sistem nada ini. Di antara para ahli etnomusikologi kita juga ada seorang yang sedang melakukan studi mengenai *Sonic Orders* ini dalam lingkup studi ASEAN. Marilah kita tunggu hasilnya, tetapi sambil kita sendiri sebagai penikmat mencoba mencamkan, mendengarkan --- bagaimana rasanya lagu-lagu atau rangkaian nada-nada dari daerah-daerah tertentu nanti, yang akan disajikan dalam festival ini.

Dalam rangka usaha memperkenalkan berbagai macam seni musik dari berbagai daerah ini, dalam rangka Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Dunia ini, Indonesia juga akan mempersembahkan suatu hasil rangkuman pengumpulan musik nusantara. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita dapat melihat peluncuran dari compact disc yang berisi contoh-contoh musik khas dari 27 provinsi di Indonesia.

Jadi, studi-studi dipersilakan kepada siapa saja yang berminat, di samping terhadap masalah sistem nada tadi, juga masalah organologi (mempelajari struktur dari instrumen-instrumen musik). Dan satu hal lagi yang bisa menjadi pengamatan kita adalah masalah *kekerabatan musik*. Kita sudah kenal studi kekerabatan bahasa, di mana kita melihat bahasa yang satu dengan yang lain itu serumpun atau tidak, jauh atau dekat hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Demikian juga dalam seni musik pun, kita bisa meneliti ini.

Sebagai kata-kata untuk mengakhiri sambutan ini, saya mohon atau tepatnya ada permintaan khususnya kepada Bapak Walikota Surabaya atau yang mewakili, para Bupati atau yang mewakili, untuk mengizinkan kami memasang spanduk-spanduk di berbagai pojok kota agar lebih banyak peminat untuk hadir dan menyaksikan pertunjukan yang langka ini. Dan khusus kepada Bapak Kakanwil Depdikbud, saya juga ada permohonan kiranya dapat mengarahkan atau mengajak murid sekolah untuk menonton -- didampingi guru-guru -- menikmati dan mempersoalkan, ikut mendiskusikan tentang musik-musik yang dipergelarkan dalam festival ini.

Demikian, akhirnya dengan seizin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian saya menyatakan "Festival Musik Tradisi Indonesia Tahun 1997" ini dimulai.

Terima kasih.

*Wassalamutalaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 13 Desember 1997

**Opening speech**  
**"Birth of Modern Art in Southeast Asia"**  
**Exhibition at Fukuoka Art Museum, May 9th, 1998**

The Director of the Fukuoka Art Museum,  
Distinguished Guests,  
Ladies and Gentlemen,

It is indeed an honour for me to stand here representing all the overseas participants in this exhibition. In this occasion, may I express our deep appreciation for the invitation extended to us by the Fukuoka Art Museum. We sincerely wish that this exhibition may function to the full as a means of generating a really deep understanding among all of us, be it at an individual level as well as at a national level.

On this happy occasion, may I draw the audience's attention to an issue to be reflected upon, namely the imagined global culture believed by some to be an overall reality in the near future. I shall question that prediction. Communication systems as well as economic systems have indeed become more and more solidly globalized, supported by scientific findings which in itself is based on universal scientific principles. However, matters related to values and feelings, related to history and culture, should be guarded against "standardisation" or "unification", because it is just the variedness that makes human life rich. It is the very dynamics between, on the one hand, excellence and uniqueness, and on the other, acceptance and appreciation, that makes human life culturally humane. Challenges might be similar, but every nation, every artist, is likely to respond in a relatively unique manner. The media used can be the same, but the ways of using it, as well as the messages conveyed, should be spared from uniformity.

Closing this short speech, may I, once more on behalf of all the participants, congratulate the Fukuoka Art Museum for this successful undertaking.

Thank you

**B**

**KUMPULAN MAKALAH**

## TANTANGAN UNTUK SEPULUH TAHUN LAGI \*)

Sepuluh tahun ke depan adalah jarak yang cukup pendek apabila kita bandingkan dengan usia Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) yang tahun ini tepat duapuluh tahun. Lebih pendek lagi, tentunya, jika dibandingkan dengan usia penelitian arkeologi di Indonesia yang telah lebih dari delapanpuluh tahun. Sebuah pertanyaan yang terandai di dalam pikiran saya adalah, apakah kita akan mengerjakan arkeologi sama seperti sekarang ini seandainya bangsa kita masih hidup dalam alam penjajahan?

Bagi orang yang yakin bahwa ilmu itu, termasuk arkeologi, adalah obyektif dan netral, maka jawaban yang akan diberikannya atas pertanyaan tersebut di atas adalah bahwa: dijajah atau merdeka sama saja, karena datanya toh itu-itu juga dan permasalahannya adalah permasalahan masa lalu yang tidak terkait dengan keberadaan si peneliti di masa kini. Sebaliknya, bagi orang yang melihat kemungkinan pengaruh visi maupun sarana terhadap arah pengembangan ilmu akan menjawab lain. Perbedaan sarana, termasuk sarana kemerdekaan bangsa, dan terkait dengannya persamaan hak menuntut ilmu bagi semua penduduk di negara ini, akan membawa kepada perbedaan peluang kepada kita sebagai anak negeri untuk sampai pada tingkat-tingkat pencapaian yang sama dengan para penjajah. Di samping itu, visi yang didorongkan oleh pemerintahan kolonial tentunya akan berbeda dengan visi yang didorongkan oleh pemerintahan bangsa sendiri yang berdaulat. Subyektivitas dalam kaitannya dengan pengaruh visi ini adalah seperti subyektivitas dalam penulisan sejarah. Itu bukanlah suatu subyektivitas individual, melainkan suatu subyektivitas kategori orang, yang diarahkan oleh perbedaan wawasan kebangsaan, ataupun oleh perbedaan landasan teori. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa subyektivitas yang dimaksudkan adalah hanya dalam menentukan arah penelitian dan memandu penafsiran, sehingga dengan demikian tidaklah berarti bahwa data dan pengolahannya tidak terkontrol melalui metode yang obyektif.

Soal-soal interpretasi yang dapat dipengaruhi oleh visi adalah misalnya mengenai hubungan antar budaya. Dalam wacana arkeologi kita telah terjadi misalnya dialog antara wawasan "greater India" dan wawasan "local genius".

---

\*) Makalah Kunci Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, Cipanas 11-16 Maret 1996

Sebenarnya, kedua pihak dalam dialog itu seringkali menggunakan data yang sama, tetapi melihatnya dan menafsirkannya secara berbeda. Namun, telah kita lihat pula, bahwa begitu wawasan itu dilontarkan, maka para pesertanya pun kemudian dalam memilih pokok penelitian dan datanya menyesuaikan dengan pengarahannya yang dianutnya. Wawasan "greater India" memusatkan kajiannya pada persoalan persebaran budaya, dengan penafsiran yang terfokus pada identifikasi atas sifat dan pelaku dominasi dalam pertemuan antar masyarakat dan antar budaya. Berbeda dengan itu, wawasan "local genius" memusatkan perhatian kepada perkembangan budaya, dengan penafsiran yang terfokus pada identifikasi atas kreativitas atau daya tanggap yang terdapat pada suatu bangsa untuk menyerap dan mengolah pengaruh apapun yang sampai padanya.

Dalam penulisan sejarah pengaruh visi itu pada umumnya lebih kentara daripada dalam penelitian arkeologi. Hal ini terutama disebabkan karena data sejarah telah sarat dengan pengertian-pengertian yang langsung tersampaikan dari masa lalu melalui kata-kata sebagai lambangnya. Makna kontekstual dari pengertian-pengertian tersebut dapat langsung ditafsirkan dari sana. Berbeda dengan itu, data arkeologi dalam arti sempit adalah benda-benda, yang tidak selalu gamblang menyiratkan pengertian-pengertian yang ada di belakangnya. Dengan demikian langkah ke arah penafsiran yang terkait dengan visi lebih bertingkat-tingkat. Meskipun demikian ahli-ahli arkeologi tertentu senantiasa mencoba untuk memberi tafsiran-tafsiran berdasarkan visi, bahkan dengan menginterpolasikan permasalahan masa kini, seperti misalnya permasalahan emansipasi wanita.

Banyak orang bertanya, apa gerangan perlunya mempelajari arkeologi. Bukankah itu semua berkenaan dengan masa lalu yang tak ada lagi kaitannya dengan kehidupan kita sekarang! Bagi yang terlanjur menyenangnya, apakah itu bukan semata-mata suatu kemewahan untuk menikmati, baik misteri, maupun teori dan metodologinya, tetapi sebenarnya tak ada sumbangannya bagi pembangunan bangsa dan negara? Bagi seorang ahli arkeologi pertanyaan seperti itu tentu menyakitkan. Tetapi, bukankah sebaiknya dijawab juga? Jawaban yang pertama adalah bahwa arkeologi itu sebuah ilmu yang mantap di dunia ilmu pengetahuan dewasa ini, sehingga kemahiran dan keunggulan kita dalam menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang ilmu ini dapat merupakan sumbangan, betapa kecilnya pun, untuk menaikkan martabat bangsa dalam pergaulan internasional. Jawaban yang kedua adalah

bahwa jika kita mempelajari Arkeologi Indonesia, maka yang kita pelajari itu adalah sejarah budaya kita, warisan budaya kita. Fakta-fakta masa lalu yang menunjukkan keunggulan bangsa dapat diurai secara khusus untuk menampilkan kemampuan bangsa kita yang dapat dibanggakan. Ini bukan untuk kagum buta, melainkan untuk mengetahui secara mendalam, menghargai, membanggakan secara wajar, dan meneladani hakikat pencapaiannya di mana perlu.

Dengan demikian maka ilmu kepurbakalaan atau arkeologi ini jelas dapat memberikan sumbangannya dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sejarah dari bangsa kita. Khususnya hal ini berkenaan dengan kesadaran akan sejarah kebudayaan bangsa. Dengan mantapnya kesadaran sejarah budaya ini maka diharapkan akan menjadi mantap pula wawasan budaya yang hidup di masa kini. Argumen ini memang melibatkan suatu ekstrapolasi, di mana pengertian bangsa atau nasyon yang kita gunakan sekarang ini dilihat sebagai ada juga di masa-masa yang lalu. Ekstrapolasi ini dapat dipertanggungjawabkan karena sesungguhnya, dan ini dapat dibuktikan untuk periode-periode tertentu dan wilayah-wilayah tertentu, pemahaman akan pengertian itu telah ada di masa-masa lalu tersebut, meskipun batas-batasnya serta peristilahan yang digunakan berbeda-beda.

Apapun permasalahan yang digarap dan visi yang digunakan dalam penelitian, profesionalitas dalam kerja pengkajian arkeologi itu senantiasa harus dijaga dan bahkan ditingkatkan di mana perlu. Profesionalitas ilmiah ditandai oleh kejujuran, pertanggungjawaban, serta ketuntasan, baik dalam penalaran, maupun dalam pengumpulan dan penggarapan data. Salah satu dari wujud kejujuran itu adalah pengakuan terhadap pencapaian ilmuwan terdahulu, dan pemberian kredit yang jelas kepada ilmuwan yang bersangkutan. Kritik dan ulasan adalah salah satu sarana untuk pengembangan interaksi antar ilmuwan. Bahkan polemik yang sehat dan benar-benar ilmiah dapat tumbuh dari sana.

Perluasan wawasan dan pendalaman kajian adalah dua tuntutan sekaligus yang dari hari ke hari dihadapi oleh ilmuwan. Dalam rangka itu dapat senantiasa ditemukan bidang-bidang garapan ataupun permasalahan baru. Memang ilmu dapat dan harus berkembang terus. Dalam hal ini lah kreativitas seorang ilmuwan dapat menentukan perkembangan ilmu. Sudah tentu kreativitas yang diperlukan di sini bukanlah suatu kreativitas yang

idiosinkretik (seperti yang bisa ada pada bidang kesenian), melainkan suatu kreativitas yang dilandasi oleh kesepakatan-kesepakatan dan pencapaian-pencapaian ilmiah yang telah ada lebih dahulu.

Perkembangan ilmu juga dapat menyangkut pembedaan. Dalam arkeologi Indonesia kita telah lama mengenal pembedaan berdasarkan zaman, di mana batas-batas antara zaman tersebut ditentukan oleh mayoritas jenis temuan yang didapatkan dari zaman bersangkutan. Pembagian atas tahap Prasejarah, yang terdiri dari zaman batu dan zaman logam, disusul oleh tahap Sejarah yang terdiri dari zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan zaman Kolonial, pada dasarnya dilandasi oleh perbedaan jenis-jenis temuan utama beserta temuan-temuan pendukungnya yang berupa teks untuk zaman-zaman sejarah. Kalau kita masih berpegang kepada kriteria usia 50 tahun untuk menentukan suatu benda itu bersifat purbakala atau tidak, maka mulai tahun ini tentunya kita dapat membuka lembaran "arkeologi masa kemerdekaan"! Kesimpulan-kesimpulan dari pengkajian atas peninggalan-peninggalan dari zaman-zaman tersebut di atas telah pula membawa kita kepada penglihatan bahwa seiring dengan perubahan jenis temuan-temuan itu terjadi pula perubahan struktur sosial yang melatarinya. Maka kita lihat perkembangan dari kelompok-kelompok berburu-meramu yang senantiasa berpindah-pindah, ke kelompok-kelompok berladang yang semi sedenter, kemudian kita ketahui adanya masyarakat petani yang tinggal menetap, lalu di atas struktur ini kemudian terbentuk satuan-satuan kerajaan, kemudian lagi imperium, lalu kemudian pula, di atas atau di samping kerajaan atau imperium itu terdapat pemerintahan kolonial yang mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan pribumi, dan kemudian, di masa terakhir sampai sekarang ini, terdapat bangsa baru yang telah bebas dari kolonialisasi dan yang telah membangun negara dengan bentuk republik. Perbedaan-perbedaan tata kemasyarakatan itu ternyata meninggalkan 'relik-relik' yang khas.

Pembedaan arkeologi, di samping didasarkan pada perbedaan zaman itu, dapat pula dilakukan berdasarkan hal-hal lain. Salah satu daripadanya adalah pembedaan berdasarkan segi kehidupan yang masing-masing menuntut pemahaman akan kaidah-kaidahnya yang khas. Sebagai contoh dapat disebutkan pengkhususan-pengkhususan kajian seperti: perkotaan, perkapalan, perdagangan, kesenian, keagamaan, teknologi logam, dan lain-lain. Kelompok ahli arkeologi Indonesia masih perlu lebih 'membelah diri' dan memantapkan diri ke dalam pengkhususan-pengkhususan, di samping



keahlian awalnya yang didasarkan atas penggolongan zaman. Pembidangan juga dapat didasarkan pada jenis pekerjaan yang dihadapi. Ini memang pembidangan yang tidak berkenaan dengan substansi kajian arkeologinya melainkan lebih berkenaan dengan tujuan khusus dari pekerjaan yang dihadapi tersebut. Setelah landasan pengetahuan mengenai substansi arkeologi tertentu dikuasai, maka seorang pengajar misalnya, memerlukan pengembangan ilmu khusus untuk membuatnya mampu mengalihkan ilmu pengetahuan arkeologi yang dikuasainya itu kepada mahasiswa peserta didiknya. Penerapan metode dan strategi belajar-mengajar, serta pengemasan informasi ilmiah harus senantiasa dikembangkan dan diuji untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Di samping itu, sebagai contoh dan perangsang bagi peserta didiknya, seorang pengajar pun tak boleh sepi dari kegiatan berkarya ilmiah.

Suatu bidang lain yang didasarkan atas tuntutan pekerjaan adalah yang berkenaan dengan pengamanan dan konservasi dalam arti luas, di mana termasuk ke dalamnya pengawetan dan pemugaran. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut diperlukan sejumlah pengetahuan khusus, yang kesemuanya itu pun membutuhkan ilmu dan penelitian. Berbagai teknik analisis bahan serta pengawetannya membutuhkan penguasaan atas disiplin-disiplin penunjang tertentu, yang beraneka ragam sejalan dengan keanekaragaman bahannya. Berbagai eksperimen dalam bidang ini memberikan peluang untuk sampai pada penemuan-penemuan baru. Demikian pula pemugaran mempunyai sejumlah permasalahannya tersendiri, yang dari waktu ke waktu senantiasa memerlukan pengujian. Lain pula permasalahan pengamanan yang menyangkut kesadaran dan partisipasi masyarakat luas. Ilmu Komunikasi sudah merupakan suatu keharusan untuk dikuasai juga oleh para ahli arkeologi yang mempunyai tugas penyuluhan, yang pada ujungnya menuju kepada peningkatan wawasan budaya bangsa.

Sebagai simpulan dari semua yang telah saya kemukakan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa tantangan para ahli arkeologi Indonesia untuk sepuluh tahun lagi adalah untuk meningkatkan mutu karya, mengembangkan kreativitas ilmiah, serta menajamkan kepekaan untuk saling menanggapi. Dalam hubungan ini, tak dapat dielakkan fakta bahwa saya pun adalah bagian

dari kelompok saudara-saudara sekalian. Karena itu saya ikut dalam barisan saudara-saudara, untuk bersama-sama berusaha berpacu dalam karya, di forum-forum nasional maupun internasional. Semoga Tuhan mengabulkan harapan-harapan kita.

Cipanas, 11 Maret 1996

## DISERTASI SOEKMONO : CANDI, FUNGSI DAN PENGERTIANNYA \*)

Soekmono, yang lahir di Ketanggungan, Brebes, pada tahun 1922, telah mempertahankan disertasinya di Universitas Indonesia, di hadapan penguji dan umum pada tanggal 27 April 1974. Promotor beliau adalah Prof.Dr. P.J.Zoetmulder. Pada tanggal itu beliau dinyatakan lulus ujian doktornya dengan yudisium *cum laude*.

Duapuluh satu tahun kemudian terbitlah terjemahan bahasa Inggris dari disertasi tersebut, yaitu:

R. Soekmono,  
The Javanese Candi: Function and Meaning,  
Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1995  
(162 hlm., i--xii, 8 hlm foto)

### **Postscriptum**

Terbitan 1995 tersebut memuat suatu "Postscriptum" (ditulis April 1994) yang menyajikan pemutakhiran data mengenai temuan-temuan pripih, yaitu "semua benda yang disimpan dalam suatu 'peti abu jenazah' (kepingan-kepingan logam, batu-batu permata, dan benda-benda lainnya); pun benda-benda serupa, tetapi terdapatkan lepas, akan kita sebut pripih pula (definisi dalam disertasi 1974, halaman 41). Pripih-pripih yang dibicarakan dalam pemutakhiran itu berasal dari berbagai candi yang ditemukan sesudah penulisan disertasi tersebut (dan secara umum terjemahan ini mencakup juga beberapa bacaan terkait yang diterbitkan sesudah tahun 1973). "Postscriptum" itu tidak hanya membahas pripih yang ditemukan di candi-candi Jawa, tetapi juga temuan-temuan sejenis di Bali dan Sumatera. Temuan-temuan pripih itu tidak hanya ditemukan di dalam bangunan candi melainkan juga di bawah tanah percandian.

Dalam disertasi yang diumumkan tahun 1974 Soekmono telah mempertanyakan mengenai apakah pripih hanya ditemukan di candi-candi

---

\*) Ulasan Disertasi, disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII di Cipanas, 12-15 Maret 1996

Hindu dan tidak di candi-candi Buddha seperti yang diisyaratkan oleh data pada waktu itu. Pemutakhiran data pada tahun 1994 itu memang menunjukkan bahwa dua candi Buddha terbesar di Jawa Tengah, yaitu Barabudur dan Sewu yang keduanya kemudian telah mengalami pembongkaran tuntas, sama sekali tidak menunjukkan adanya pripih di dalam bangunan candi. Namun ternyata bahwa penelitian kemudian di candi-candi lain (candi Gumpung, Sumatera, 1984; pura Pegulingan, Bali, 1985; candi Plaosan, Jawa Tengah, 1993) menunjukkan bahwa pripih ditemukan juga di candi-candi Buddha.

Postscriptum ini diakhiri dengan penegasan, berdasarkan argumen yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa pandangan yang menyesatkan, yaitu bahwa wadah-wadah relik yang terdapat di dalam candi itu dimaksudkan untuk menyimpan abu jenazah, harus sama sekali ditinggalkan. Pernyataan dalam Bab VII yang lama (1974) yang tidak lagi dimuat dalam edisi 1995 itu adalah mengenai adanya kelanjutan antara fungsi menhir dari masa Prasejarah hingga ke arca atau lingga pada candi, yaitu sebagai penghargaan kepada sang pemimpin masyarakat.

### **Melawan Pendapat Yang Telah Menjadi Kepercayaan**

Keenam bab yang mendahului bab Penutup (1974) maupun Postscriptum (1995), adalah sebuah argumen panjang yang amat cermat dan tuntas untuk melawan pendapat lama yang didukung oleh sejumlah sarjana Belanda, yaitu pendapat bahwa candi (khususnya yang di Jawa) merupakan suatu tempat menyimpan abu jenazah raja-raja masa Hindu-Buddha. Para sarjana yang terutama disanggahnya itu adalah J.W. Ijzerman, J.L.A. Brandes, W.P. Groeneveldt, D. Leemans, P.J. Veth, W.R. van Hoeverell, J. Groneman, N.J. Krom, J.C. van Eerde, dan W.F. Stutterheim, yang melalui berbagai karangannya saling mengacu sehingga mempunyai efek saling mendukung. Bahkan Van Eerde, yang semula melalui kajiannya sendiri atas praktek upacara bagi si mati di Bali telah menyimpulkan bahwa abu jenazah, sesuai dengan ketentuan dan tradisi yang berlaku, tak mungkin disimpan di pura, kemudian setelah mengacu kepada tulisan sarjana lain menjadi berbalik mengambil pendapat bahwa candi (ekivalen pura) adalah tempat pemakaman abu jenazah.

Soekmono menganalisa bahwa ada tiga unsur yang terkait dengan pendugaan bahwa candi mempunyai fungsi pemakaman, yaitu: adanya relik di dalam

kaki candi, adanya 'portrait image' atau lingga di dalam cella, serta adanya tempat di dalam atap candi sebagai tempat sementara bagi dewa. Selanjutnya ditunjukkannya melalui berbagai data bahwa ketiga unsur tersebut memang seringkali ada pada candi-candi Jawa, tetapi yang menentukan apakah candi itu berfungsi pemakaman atau tidak adalah data mengenai apa yang terdapat di dalam tempat relik di dalam kaki candi tersebut. Bukti yang ada menunjukkan bahwa relik atau pripih itu mengacu kepada kedewataan dan bukan sisa-sisa pembakaran jenazah. Jadi, candi bukanlah cungkup (bangunan yang menaungi makam), melainkan kuil (bangunan untuk pemujaan dewa). Sebagai perbandingan diberikan juga data dari candi-candi di Kamboja, yang di dalamnya ditemukan sarkofag. Oleh Soekmono dibuktikan bahwa sarkofag-sarkofag tersebut berfungsi sebagai penampung cairan dari upacara penyiraman lingga atau arca, dan bukan untuk menyimpan jenazah atau hasil proses apapun terhadapnya. Dengan demikian maka diperlihatkan bahwa fungsi candi di Kamboja pun adalah sebagai sarana pemujaan dewa, dan tidak sekaligus merangkap sebagai mausoleum raja seperti yang diduga oleh G. Coedes.

Kembali kepada masalah candi di Jawa, Soekmono menggugat bahwa dugaan mengenai fungsi pemakaman pada candi itu didasarkan kepada data yang labil, yaitu mengenai ditemukannya sisa pembakaran "dierlijk stof" (bahan dari makhluk hidup) di pripih dalam perigi candi Lara Jonggrang dan dalam dasar kolam candi Jalatunda. Abu sisa pembakaran tersebut, yang sebenarnya dapat juga berasal dari binatang, telah sertamerta ditafsirkan sebagai sisa pembakaran jenazah manusia, dan lebih jauh lagi seperti dipastikan bahwa semua peti batu tempat pripih itu seharusnya mengandung abu jenazah. Maka selanjutnya semua peti batu yang ditemukan atau didaftar di museum diberi nama "peti abu jenazah". Padahal, temuan abu itu, hanya ditemukan di 2 di antara 85 temuan pripih yang didaftar oleh Soekmono. Kenyataan lain yang ditemukan Soekmono adalah bahwa pripih tidak hanya ditemukan di dalam perigi candi melainkan juga di berbagai bagian dari bangunan ataupun pelataran candi. Selain itu juga diketahui bahwa tidak semua candi mempunyai peripih. Adanya penggalian liar oleh para pemburu harta karun pun memberikan andil untuk terjadinya salah tafsir. Seringkali lubang yang ditinggalkan oleh para penjarah itu diperkirakan sebagai lubang perigi.

## Beberapa Catatan

Tesis Soekmono bahwa candi adalah sepenuhnya suatu kuil tempat pemujaan dewa dan bukan suatu cungkup, dengan demikian telah menepis kesalah-kaprahan pendapat lama yang mengatakan bahwa candi adalah tempat menanam abu jenazah. Yang perlu menjadi catatan kita bersama adalah bahwa sampai bertahun-tahun setelah disertasi itu ditulis (dan meskipun belum pernah resmi terbit dalam versi bahasa Indonesianya telah pernah diputar ulang stensilannya dan kemudian juga difotokopi dan dicetak bajak untuk dijadikan isi perpustakaan banyak sarjana dan mahasiswa arkeologi serta para peminat pada umumnya) masih seringkali pendapat-pendapat lama yang salah kaprah itu diacu-acu tanpa kritik dalam tulisan-tulisan kita, seolah-olah kita belum pernah membaca disertasi tersebut. Salah satu sumber pengecekan kepada pendapat yang *outdated* itu mungkin adalah catatan-catatan pada katalog-katalog museum yang ditulis para ilmuwan seperti Brandes dan Groeneveldt. Catatan katalog itu barangkali terlalu dianggap sebagai "data base" yang tak dapat diganggu-gugat. Mudah-mudahan "pelajaran" dari kasus tesis Soekmono ini menyadarkan kita bahwa semua catatan, termasuk katalog museum, harus digunakan secara kritis. Pertama harus dipisahkan antara deskripsi dan opini, dan selanjutnya opini harus senantiasa dipertanyakan, sedangkan deskripsi pun tak ada salahnya selalu diperiksa ulang.

Penerbitan edisi 1995 dari disertasi ini mengandung beberapa penyempurnaan, misalnya dibubuhkannya daftar isi, pengalihan tabel-tabel data dari bab ke lampiran, pemuatan sejumlah foto temuan pripih, semuanya sangat mengenakan pembacaan. Sayang ada juga yang luput dari pemutakhiran, yaitu pada penyebutan nama museum di Jakarta, yang pada waktu disertasi ditulis memang masih bernama "Museum Pusat"; sekarang telah menjadi bernama "Museum Nasional" tetapi dalam terjemahan 1995 ini masih disebut "Central Museum".

Cipanas, 12 Maret 1996

persoalan bangunan fisiknya itu sendiri, beserta hal-hal yang terkait erat dengan itu, yaitu teknik dan kecakapan pengerjaan yang dituntut untuk itu. Gugusan permasalahan yang kedua adalah yang menyangkut konsep-konsep pengarah yang dianut dalam kebudayaan yang bersangkutan. Konsep-konsep itu dapat menyangkut pandangan-pandangan tentang keindahan, atau estetika, dapat pula menyangkut pandangan-pandangan mengenai kosmos. Pandangan tentang kosmos itu dapat dipilah pula antara yang berkenaan dengan kosmos besar dan yang berkenaan dengan kosmos kecil. Kosmos kecil lebih jauh dapat dijenjangkan antara yang paling kecil, yaitu diri manusia secara individual, dan yang lebih besar daripada itu, yaitu masyarakat. Dalam banyak kebudayaan terdapat pandangan bahwa masyarakat adalah gambaran yang lebih kecil dari kosmos raya. Dalam kaitan dengan masyarakat dan manusia ini terdapatlah gugus permasalahan yang ketiga, yaitu yang menyangkut fungsi sosial dari lingkungan binaan secara keseluruhan maupun dari satu per satu jenisnya. Dalam penggunaan jenis-jenis benda arsitektural itu seringkali terkait sejumlah norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan melihat keanekaan aspek arsitektur tersebut, dapatlah difahami bahwa penulisan sejarah arsitektur bangsa perlu menambahkan wawasan sosial-budaya di samping wawasan teknik yang sudah lazim digunakan. Dengan demikian maka disiplin penunjang yang diperlukan bukan hanya Sejarah Kesenian, melainkan juga Sejarah dalam arti luas, Arkeologi, Antropologi, Sosiologi, dan bahkan Filologi. Pengkhususan Sejarah Arsitektur kiranya perlu dikembangkan pada jenjang studi Strata II (S-2), dengan memasukkan dasar-dasar disiplin penunjang ke dalam kurikulumnya.

Lepas dari permasalahan kurikuler tersebut, secara umum dapat diutarakan di sini bahwa pemahaman budaya amat diperlukan bagi penulisan sejarah arsitektur bangsa. Apabila di sini disebut "sejarah arsitektur bangsa", maka dalam hal ini dapat diacu berbagai dimensi dari pengertian "bangsa" itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Indonesia saja, bangsa ini dapat berarti bangsa Indonesia yang ada sekarang ini, yaitu yang merupakan persatuan dari segenap suku-suku bangsa di tanah air Indonesia, yang pada gilirannya telah membentuk kebudayaannya yang baru, tetapi dapat pula berarti bangsa-bangsa pra-Indonesia yang sekarang kita sebut suku bangsa itu. Maka, di samping dapat disusun suatu sejarah arsitektur Indonesia, dapat pula secara lebih khusus, apabila datanya cukup, disusun sejarah arsitektur Jawa, sejarah

arsitektur Bali, sejarah arsitektur Minang, Batak, Aceh, Sumba, Toraja, dan lain-lain.

Dalam penulisan sejarah arsitektur bangsa tersebut selalu perlu pula dicermati unsur-unsur luar yang mempengaruhi perkembangannya. Hasil kajian mengenai proses penyerapan unsur luar ini bahkan seringkali dapat memperlihatkan daya cipta yang sebenarnya ada pada bangsa yang bersangkutan. Suatu 'kendala' untuk melihat proses perubahan itu adalah pandangan internal yang seringkali ada di dalam masyarakat tradisional, yaitu bahwa kaidah-kaidah yang ada dalam tradisi tersebut adalah "warisan nenek moyang yang telah diteruskan secara turun-temurun". Ungkapan itu diartikan sebagai "tidak adanya perubahan dalam tradisi sejak awal adanya bangsa yang memilikinya". Pandangan seperti itu, yang sebenarnya menyesatkan, seringkali mempengaruhi peneliti, khususnya peneliti yang tidak terlatih dalam bidang kajian Sejarah Kebudayaan. Ia menjadi tidak peka terhadap petunjuk-petunjuk adanya perubahan, karena ia tidak mengharapkannya. Kenyataannya, dalam berbagai kajian mendalam atas pokok-pokok bahasan yang khusus dan terbatas dapat dibuktikan adanya berbagai perubahan sepanjang zaman. Kajian seperti itu harus didukung oleh data primer yang diambil dan diolah sesuai dengan permasalahan akademis yang diajukan. Data itu dapat berupa data artefaktual semata, tekstual semata, atau perpaduan dari keduanya. Demikian pula lah yang diperlukan apabila kita hendak mengkaji aspek-aspek khusus dalam sejarah arsitektur bangsa.

Apa yang baru saja diutarakan adalah berkenaan dengan pemahaman akan proses, yang khususnya menyangkut jalannya perubahan demi perubahan. Pemahaman demikian itu perlu pula diimbangi dengan pemahaman akan struktur dan sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada umumnya ada ketentuan-ketentuan dalam suatu masyarakat yang mengalokasikan fungsi-fungsi tertentu bagi masing-masing jenis lingkungan binaan. Fungsi-fungsi itu senantiasa dapat dikaji keterkaitannya dengan struktur sosial yang bersangkutan, dan juga dengan sistem kepranataan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Kemungkinan terbesar untuk dapat mengungkap keutuhan struktural dan sistemik itu adalah pada kajian atas masyarakat yang ada di masa kini, yang masih dapat diamati dalam keadaan 'hidup' oleh si peneliti. Pada gilirannya, hasil-hasil kajian struktural dan sistemik ini dapat digunakan sebagai sarana penduga untuk menafsirkan tanda-tanda yang berasal dari masa lalu.



Suatu kewaspadaan pula yang perlu diancangkan dalam kajian sejarah arsitektur, dan sebenarnya juga dalam kajian sejarah kebudayaan pada umumnya, adalah adanya kenyataan-kenyataan sejarah yang berupa bertemunya dua sistem atau lebih dalam suatu kancah kehidupan nyata. Dalam sejarah Jawa misalnya, pernah kita kenal adanya sistem kenegaraan tradisional Jawa, sistem pemerintahan kolonial, sistem perdagangan lintas samudera, sistem bandar yang mendudukkan kota-kota pesisir pada kedudukan sentral dalam jaringan perdagangan, sistem pondok pesantren, dan lain-lain. Sistem-sistem itu, dengan dimensi yang berbeda-beda, pernah ada dan berfungsi pada waktu yang sama, dalam teritori yang saling melingkup. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa sistem-sistem tersebut saling memasuki dan saling mempengaruhi. Selanjutnya dapat dipertanyakan, bagaimana masing-masing pelaku utama dalam sistem-sistem tersebut menghajatkan karya-karya arsitektural untuk menopang eksistensinya.

Demikianlah, sejarah arsitektur dapat menjadi cukup rumit apabila semua seginya yang mungkin untuk diketahui harus dimasukkan ke dalam bahasan. Sudah tentu kita harus bekerja langkah demi langkah. Dinamika perkembangan pengetahuan kita mengenai sejarah arsitektur bangsa adalah antara kajian-kajian sapuan besar dengan kajian-kajian terbatas yang amat cermat dan tuntas; juga, antara tinjauan prosesual dan tinjauan struktural. Untuk dapat mengamati dinamika tersebut dengan tepat kiranya yang mendesak diperlukan pada waktu ini adalah penyusunan suatu Bibliografi Sejarah Arsitektur Indonesia, di mana ke dalam pengertian "Indonesia" itu termasuk juga suku-suku bangsa di dalamnya.

Bandung, 22 Maret 1996

## **DANCE CREATIVITY IN INDONESIA \*)**

### **Contemporary Dance**

The term contemporary dance has been used to signify the generation of dance newer than modern dance, as it is called in the West. Modern Dance came about as a reaction against the established classical ballet. The exponents of modern dance regard classical ballet as having reached a stagnant stage of technical development, aside from its theme that always seem to involve beautiful tales and do not allow a free interpretation of real-life problems. The technical rules are so rigid that they leave no room for the dancer to present his own approach.

Thus, there emerged a first generation of modern dance preoccupied with trying to find a personal identity in its choice of the dance theme as well as choosing a characteristic way of expression of private emotions was not enough for them. The one thing they believed in, which they inherited from the first generation, was not to be shackled by fixed rules of the old dance style. Subsequently, they were trying to settle on new fundamentals.

Significant figures from the second generation have asserted the existence of modern dance as an art field with a capital "A" that places the creativity of the dance artist at its center. Through this creativity, the dancer could realize his response to life and the world. The dance is, therefore, no longer just a mere entertainment, but an interpretation or attitude. However, because the techniques created by those pioneers later tended to freeze, the subsequent generation tried to liberate themselves from them. At that stage, the term "contemporary dance" arose. It came to mean "latest dance". People then tried to find other novelties.

Many prominent choreographers emerged during this stage of development, which has lasted virtually up to the present. Their search was no longer limited to movement but has expanded to include various other aspects related to visual composition and time systems. This generation has been called the third generation in the development of dance.

The ever-spreading impact of modern dance in turn influenced the ballet style itself and "modern ballet" developed. Unlike modern dance, which rejected any ties with the ballet technique, modern ballet is still based on the

---

\*) Prepared for Yayasan Nusantara Jaya, 1991

technique of classical ballet. It differs from classical ballet in that modern ballet is still developing its treasury of movement from classical ballet, but at the same time often even adding movement that in classical ballet are considered taboo, such as twisting the torso. What has been known as "Jazz Ballet" concentrates on exploring the twisting and shuddering of various parts of the body.

### **Evolution in Indonesia**

Let us now look at what has happened in Indonesia in the creation of new dances. Undeniably, what happened in the West also influenced the dance scene. Those influenced most by the innovations of dance elsewhere in the world were Indonesian choreographers possessing a curiosity about the rest of the world, though most of them started out working in a certain traditional dance style.

One of these pioneers was a choreographer named Jodjana. Originally from Yogyakarta, he later became a resident of the Netherlands. Together with other modern dance choreographers of the same generation, Jodjana created dances that were entirely choreographed (although many ideas from the classical dances of India were adopted) to realise his personal impression of certain themes. One of his dances recorded on film depicted the god Siva as the Creator.

The echo of the second generation of modern dance, in particular, as represented by the Martha Graham studio, was captured by such Indonesian choreographers as Wisnoe Wardhana, Bagong Kussudiardjo and Seti-Arti Kailola. The first two of these choreographers brought with them a strong tradition of Yogyakarta dance, while Seti-Arti Kailola from the outset started with the techniques of Martha Graham.

Their creation differed from one another. Seti-Arti presented the concentrated style of Martha Graham while Bagong and Wisnoe employed some elements of Graham but further developed their own ways in rehearsing and composing their dances. Bagong and Wisnoe, apart from placing themselves on the modern side of the dance world, are distinguished by their effort to remain Indonesian. They studied other styles of Indonesian dances besides the Javanese style they had already mastered, and here and there, inserted this collection of techniques into their own choreography.

Bagong eventually succeeded in developing a uniquely personal style. Both the dances and the music of Bagong's creations are based on free compositions originating from certain elements in traditional dances. In his music, colorful elements create a distinctive sound. He employs instruments, such as the *rebab*, a two-stringed lute, the *kendang* a sort of bongo drum, etc. in a unique composition. In the dance themselves, the movement of the toes, the torso and the arms reflect certain Indonesian traditions, whether from Java, Sunda, Bali or other regions. This synthesis of music and movement creates real excitement : rhythms that sound like a barely restrained storm, subtle movement of toes so swift as to move the body weight, movement of the torso and head in the opposite direction from that of the feet, and so on.

Sardono W. Kusumo is a choreographer belonging to the third generation. He has never looked for a special expressive style or dance technique; but in each of his work, he has tried to explore new possibilities. With "Samgita", he asked his group to experiment with a kinetic exploration based on the visual stimulation provided by the reliefs of the classical Prambanan temple. He also asked them to express their kinetic response to nature's stimulation. Sensitivity to nature is basic to the creation of his dance. In "The Widow from Dirah," the dance when performed in France was given the title "La Sorciere de Dirah," he tried something different again by integrating influences from various theatrical traditions, those of Java and Bali in particular.

There was another unprecedented step taken by Sardono in "Meta Ekologi" While he had previously let his dancers move in the freedom of the air, in this work he made the dancers wallow in mud. The dancers became sculpture-like figures moving slowly in a medium which inhibits and restricts them. The effect produced was a memorable one, and the performance was more of a happening than a dance concert.

Another method employed by Sardono is known as multimedia, which involves not just the medium of dance but also other media, such as slides and film. The first time he experimented with this format was at the Jakarta Arts Institute with "The Yellow Submarine." Subsequent works of this kind were "Hutan Plastik" (The Plastik Forest) and "Elisa di Bali" (Elisa in Bali). In the latter, he worked together with Elisa Monte, a choreographer from the

USA In this work, dance slides and film were projected behind the screen, alternately and sometimes overlapping. The projections on the screen depicted figures or scenes of activities from dance rehearsals held in Bali. The dance in the foreground and the rehearsal scenes filled the entire screen, creating an amazing impression of depth.

In the development of new works of dance in Indonesia already mentioned, we ought to take into account types of dance works that utilize the treasury of tradition as starting point and source. Among the names that should be mentioned are such choreographers as Retno Maruti, who uses the vocabulary of Javanese dance as her foundation; Tom Ibnur, who uses the Minang dance as a starting point; Wiwiek Sipala, who assimilates from South Sulawesi dances; and Yulianti Parani, who uses Betawi dances for a source from which to take certain characteristics that she develops further. This sort of innovation complements the panorama of dance creativity in Indonesia.

This panorama is still to be completed by new dance works in which compositions are based on ballet techniques (classical, modern, or jazz). The works use ballet (as with choreographers like Farida Feisol, Yulianti Parani, Maya Tamara and others) to start from, and will often bring out the Indonesian image through the use of certain movements which borrow techniques and inspiration from the treasury of dance created by the ethnic groups in Indonesia, or through their costumes and music.

Edi Sedyawati

## **PRESENT SITUATION AND ISSUES CONCERNING POLICY FOR THE PROMOTION OF CULTURE (INCLUDING THE ARTS) IN INDONESIA \*)**

### **Present Situation and Current Issues In Short**

In this initial paragraphs will be described in short the present cultural issues and situation in Indonesia. There are two main issues related to the socio-cultural situation of presentday Indonesia. The situation itself is related to socio-political changes both in the past and at present. Those of the past are first, changes related to colonialism, and second, changes related to the Indonesian nation formation. The first one has still some reverberations in the present, however vague, while the second one is actually still continuing. The most actual situation of today is that related to the powerful flow of socio-economic changes.

However, due to the ample experience of the Indonesian people to exercise in these problems, some principles to solve them are taken, which are: to decide in broad lines the acceptable values in a national scope, to engender the atmosphere of tolerance, and to find compromises wherever possible.

### **Socio-Cultural Background**

The Indonesian nation was formed by generating a national awareness among the people through a political national movement, animated by young Indonesian intellectuals during the Dutch colonial period. The main aim of the movement had been the formation of a nation, the Indonesian nation, and to obtain freedom for this nation, a freedom from any colonial and imperialistic power.

Since the beginning, the new "nation in formation" has always been aware that within the Indonesian nation there is a multifariousness in terms of ethnicity and religious adherence. Therefore, the motto "Unity in Diversity" (in the original classical literary language of Old Javanese, where the phrase was coined, it is spelled "bhinneka tunggal ika") was launched officially in

---

\*) The Japan Foundation Asia Center Advisory Panel, Tokyo, March, 25th-26th. 1996

1951. This string of words, in its original phrase, was put on the Indonesian national coat of arms, which has the form of Garuda, a mythical bird that symbolises power, perseverance and justness.

Right after the proclamation of independence of the Indonesian nation on the 17th of August 1945, the next day, the Indonesian constitution was drafted, to be officially issued later on the 15th of February 1946. This constitution contain a paragraph that lay the foundation for a further development of the Indonesian national culture. It mentions that the government of the Republic of Indonesia should develop an Indonesian national culture. In the appended explanation of the constitution, it is expounded that the national culture is the product of the minds of the Indonesian people as a whole. Ancient and indigenous cultures that appear as peaks of culture in different regions are considered as the culture of the nation. Further on the explanation asserts that cultural development should be directed towards progress of culture and civilization; and towards unity of the nation, while not rejecting new elements from foreign cultures as far as they are enriching the national culture, and enhanching the high degree of humanity of the Indonesian nation.

Upon that mandate of the constitution the government of the Republic of Indonesia launches programs that are directed towards the stimulation of creativity, as well as the appreciation for the nation's cultural heritage. The preservation and maintenance of traditional ethnic cultures is perceived as a means to bring about a feeling of rootedness in one's own culture. The awareness, appreciation, as well as comprehension of the cultural heritage from ancient times, irrespective of territorial boundaries between different kingdoms of the past, moreover, could give the new Indonesian nation a feeling of having a common heritage from the past, since the demarcations of ancient kingdoms do not automatically tally with the presentday ethnic boundaries.

The new Indonesian nation, within the present independent state of the Republic of Indonesia, has been and is still forming itself by creating new forms of cultural products, maintaining and enhanching agreed upon cultural values, while at the same time making its cultural and historical heritage function as the provider of its identity. Politically, the basic principles that also count as basic source for cultural values, are formulated in what is called

the Pancasila (five principles), specified as: (1) Belief in One God; (2) A just and civilized humanity; (3) Indonesian unity; (4) Populism guided by wisdom in consultation and representation; (5) Social justice for the whole Indonesian people.

Aside from the present socio-political background mentioned before, the cultural and historical background should also be kept in mind. In the past, there were kingdoms and even empires within the boundaries of presentday Indonesian territory, some of which had arose to a considerable height of cultural and political achievements. Some of them had more than one ethnic group among their people. Interaction and sharing between different ethnic groups within one state has thus been a familiar experience in Indonesia since ancient times. Furthermore, people in Indonesia had had relationships with people from outside the country, either for the sake of trade or for the sake of religion. Those relationships had brought about acculturation processes, especially those happening in the centers of the many states, at different ages, in varied paces. It has been along those lines that culture developed in Indonesia. Two religion-based cultural currents have been influential in forming Indonesia's culture: the first one being the Hindu-Buddhist originating in India, and the second one being the Islamic which came to Indonesia carrying along some Persian elements. Another current, coming later on along with the European colonialists, was the western culture. One part of this latest cultural influence is somehow closely linked with Christianity. It is interesting to note that in Indonesian cultural history there is a kind of anomaly, or reversal in chronology, in which Islam, which came into existence after Christianity, came to Indonesia earlier, and thus giving the impression, especially to laymen, as being older. The other way around, Christianity is illusively taken as being younger and hence more 'modern'.

Before the encounter with Buddhism-Hinduism, Islam, and the western culture, the many ethnic or tribal groups in Indonesia had developed their own cultures in the prehistoric phase of development. Some ethnic groups had the chance to have encounters in successive periods with all three foreign influences, others had two or even only one. Java is an island in Indonesia wich has ample evidences of the four phases in its cultural history, namely the prehistoric and the three historic periods, that is, the Hindu-Buddhist,



the Islamic, and the colonial periods. It is also the most densely populated island, with a more or less two million years history of human occupancy.

Prehistoric social organizations comprise the hunter-gatherer, the swidden cultivators, and the sedentary peasants. Some communities with these types of social organizations persists into the historic periods of Indonesia taken as a whole. A few even survive up till now, forming small-scale societies. The government of The Republic of Indonesia has special programs to empower them with a larger range of knowledge and technical knowhows, so that they can survive in the larger, multicultural society of Indonesia.

The Indonesian nation comprises a multitude of ethnic groups, small and large. Counting by the number of their respective languages, we may find more than 300 groups. The Indonesian nation is thus a unified, multi-ethnic nation, all of them are indigenous. A small part of the population, though, originated from outside Indonesia, such as the Chinese, the Arabs, the Indians, etc., and become Indonesian citizens. They are then absorbed into the ethnic group in which they mingle. As a matter of fact, they speak the local language of the receiving ethnic group.

The indigenous ethnic cultures, as well as the new forms created within the Indonesian society are taken care of by the government. There are systematic endeavours for both conservation and the enhancement of creativity.

### **Organizations: Government and Private**

Both Government-based and private-based organizations are important agents for cultural development in Indonesia. They function, however, in a slightly different way for some aspects of cultural development. Basically, the Government of The Republic of Indonesia has the task of developing culture with a clearly defined set of norms and objectives. These set of norms and objectives aims at generating whatever actions and products that strengthen the national culture, while at the same time warding off any element of activity and production that is considered detrimental to the building up of a well-founded national culture. The private organizations, on the other hand, have a freer rein for their activities. Some types of private organization do have the awareness and intent to develop culture in a positive

and constructive way relevant to the building up of a national culture. Other types of private organizations, to the contrary, are active in some fields of culture but using mainly a commercial rather than a cultural yardstick.

There are three main types of cultural organization in Indonesia, namely:

- (a) purely governmental;
- (b) by status private, but strongly supported by the government;
- (c) purely private.

Among the purely governmental organizations can be mentioned the different departments (equivalent to "ministries" in other countries) that are somehow relevant to the task of cultural development. The first to be mentioned is the Department of Education and Culture, within which there is the Directorate General for Culture, the other three directorate generals being those concerning education. Other departments that can be mentioned in connection with cultural development are the Department of Information and the Department of Post, Telecommunication and Tourism.

It is the Directorate General for Culture that has the explicit task concerning cultural development. However, it doesn't visualize itself as being the sole player of the role. The main fields of activity of the Directorate General for Culture are:

- (a) the management (a.o. the making of inventories), preservation, conservation, and restoration of monuments and other tangible cultural heritage;
- (b) the management of all museums owned by the state, and professional consultations to private museums;
- (c) research in Indonesian languages, literature, ethnic cultures, archaeology and the arts;
- (d) the giving of directives towards the use of correct Indonesian (language), and the construction of norms related to it;
- (e) the study and dissemination of Indonesian cultural values, studied either from the old traditions (literate and non-literate) or from contemporary developments;
- (f) the promotion of high quality works of art;

- (g) the study of local belief systems and its methods of attaining spiritual merits;
- (h) the study and writing of Indonesian history;
- (i) the promotion of inter-regional cultural understanding;
- (j) the management of cultural information;
- (k) the production and the promotion of production of exemplary packages of cultural information.

In principle, this directorate general has several roles to play in cultural development: not always as the executor of cultural activities, but often also as coordinator, or just motivator of such activities.

Other directorate generals in the Department of Education and Culture takes care of school, and out-of-school education, from kindergarten up to university level, which is in a way dealing with enculturation processes. National awareness, historical awareness, as well as awareness of the need for cultural identity, of ethical and religious truths, are among the substances learned through different subjects of teaching.

The Department of Information is responsible in forming guiding principles for media management. The media is, either printed, auditive, or audio-visual, also the media for cultural transfer. It is always important to keep track of the flow of informations that has a cultural impact. The flow of foreign media products needs to be balanced by self-made Indonesian products which are not only commercial but culturally constructive. Film and video making and distribution is supervised by this department.

The Department of Post, Telecommunication and Tourism, especially the Directorate General for Tourism in it, has a direct relevance to cultural development, since it promotes the 'selling' of culture to tourists. The most important thing in the bussiness of selling is the endeavour to make the best quality of each class of things sold, and at the same time reaching for the best financial income for the makers of all those cultural products. Archaeological parks, art festivals, ritualistic-ceremonial events, and musea are among the cultural tourists objects.

The province and district level governments may also have some cultural organizations under their auspices. It ranges from the artistic group led by

the wife of the governor, to the council of art elected among the prominent artists in the region. These Art Councils, that can be found in many provinces, are the examples of an organization that has a private status but heavily supported by the local government. Another example is the Archaeological Park, which is managed as a private company, but at the same is responsible to the government because this park is using Government's asset. Still another example is the National Crafts Council: it is a semi-governmental organization, with a more or less private status, but all the members and staff come from Government's offices, *ex officio*. This council has branches in all the provinces, chaired by the wife of the governor. Provincial as well as municipal and district level governments may also support, or even own, specific museums.

The purely private organizations are manifold. They range from music-cassette producers to the organization of patrons of the classical leather puppet performances. There are also private museums and art-galleries in many of the big cities. The cultural subject matter dealt with ranges from the most trivial to the most serious, from the most popular to the most classical. Aside from those already mentioned, some traditional theatre forms which have permanent admirers managed to organize performing groups that play regularly. By way of example can be mentioned traditional performing groups of *wayang wong* and *ketoprak* in Java, the *arja*, *gambuh*, *drama gong* and *wayang wong* in Bali, the *komedi bangsawan* and *makyong* in Sumatran Malay areas, the *wayang gong* in South Kalimantan, etc. Most of them, however, are in an endangered status, both in terms of the secure development of appreciation among the younger public, and in terms financial gains. What is hoped to help the situation is the fact that private sponsorship for serious art is now in the beginnings of their emergence in Indonesia. Encouragement is being given from time to time by the government to the private sector to take a greater role in supporting serious art.

The government has the authority to direct all those aspects of cultural development, while the private sector has a full chance to be the actor. Deeper understanding on cultural subjects is still to be promoted and the appreciation for good cultural products to be widened to all the different groups in a society, and especially to those of the economically successful, the well-to-do people in the society. These elegantly exposed people are usually considered as models in a society. It is desirable therefore, that they are identified

with good taste for art, and for all other cultural expressions. Through them, the majority of people within a society will also become people of high taste, culturally.

### **Culture and Cultural Development**

Since development in a general sense should always cater to the overall wellbeing of human beings, it should, then, have a cultural dimension. It is through the culture of his society that a human being is brought to his dignity, after his basic physical needs have been fulfilled. Culture may also be developed in its own right. In that case, it is visualized that cultural values as well as conceptual frameworks and ideologies together comprise the focal point in a cultural system, of which cultural expressions and works of art are the most observable indicators.

The term culture should also be defined in its broader as well as its narrower sense. In its broader sense culture is the totality of human ability to deal with his life, to survive physically, emotionally, and mentally. In a more strict sense, culture should mean the human faculty, within a society, to construct a system of symbols, either for communicational ends or for interpreting the world, the cosmos, and human life. In any sense, however, culture is a total configuration of those faculties that characterize a society, or a nation.

Language, philosophy and ethics, science, and the arts are fields of human creation using symbolic faculties. Those are the pure cultural products in a strict sense. Applied science, however, is part of culture in a broader sense, since it has pragmatic and practical ends. On the other end, religion has a specific place in human life. Religion is a cultural faculty although the basic teachings of which is God-sent, revealed to God-chosen human beings. Those basic teachings are to be understood universally, although the material renderings could be culturally adapted within each society.

Cultural expressions and the arts have symbols and concepts as their ingredients, while the contents are the different kinds of messages. They have the forms of, either works of art, or any kinds of discourse. All the symbols, concepts, and messages, within a well-integrated culture normally conform to the set of cultural values relevant to the respective society. However, it might also happen that within a multi-cultural society with less

integrative forces in it, cultural values may vary from one to another faction within that society, even to the extent that values generated from a newly acquired economic growth may become so divergent from the ethical values known from the past, that have functioned as a stronghold of a nation.

The last mentioned situation may happen if the society concerned lacks the awareness of the existence of those disintegrating factors. If a nation is determined to avoid disintegration, then cultural discourse should always be conducted from time to time, along with the economical and technological developments that tend to ever speed-up. The position of culture in a strict sense, in a society, should be that of a guardian of morality, a reflection on the meaning of human life, and a source of energy to raise an ever better condition of life. To be able to function in that way, culture should deliberately be given a position of a guiding strength within a society. Put in other words, life should not be taken as having practical ends alone.

Human dignity and (national) cultural identity should be the goals of a cultural development in its own right. Ideally cultural development is treated as part and parcel of development in a broad sense. Cultural development should then have two directions that are of equal importance and should be mutually supportive. The first direction is towards the strengthening of:

- (a) cultural identity, through a sense of having specific cultural roots, and through an awareness of having creative faculties;
- (b) ethical and moral values; and
- (c) historical awareness.

On the other hand, the second direction is catered to cope with the speed of technological and economic development. This direction of cultural development comprises the promotion and enhancement of values that put ingenuity, objectivity, and systems awareness at an elevated place.

The creative faculties mentioned in relation to the first direction of cultural development are not to be understood as comprising only creativity in the artistic field. Artistic creativity is indeed the most exposed, immediately recognizable form of creativity. In a way, it deserves the laudation as the representative of the concept of creativity itself, since it is in the arts that creativity can deal with sheer form, sheer imagination, with no other objectives besides the work of art itself. Nevertheless, it is also an established fact

that creativity is also a faculty that through new concepts, new theories, new methodologies, promotes science and entrepreneurship into a dynamic life.

A continuous dialogue between cultural development and economic-technological development is badly needed if development in a broader sense is deemed to succeed. Spiritual and mental-emotional needs of the whole society is expected to be facilitated and enhanced by its physical-material wellbeing, rather than eclipsed or pestered by it.

Several subjects that can be seen as aspects of cultural development are among others:

- (a) the promotion of a national culture;
- (b) the development of local-ethnic cultures as a source for giving a sense of having cultural roots, as well as a source of inspiration for newer creations;
- (c) the promotion and enhancement of quality in cultural works;
- (d) the promotion and control of cultural industry.

### **Human Resource Development for Culture**

The preparation as well as the upgrading of human resources for cultural development are done in schools, academies, universities, as well as in inhouse trainings while they are already accepted as employees. The disciplines grouped as "cultural" or "humanities" are philosophy, linguistics, literature, history, archaeology, anthropology, museology, the arts, law, and some interdisciplinary fields of study. Nevertheless, in working on cultural development many other kinds of experties are needed, such as experties in communications, in chemistry, in physics, in international relations, in education, in sociology, etc.

Communications, especially mass communications is of much help in endeavours towards the increase of cultural as well as historical awareness amongst people in society. That awareness needs to be developed with the right, most effective strategy, which must be outlined professionally. Likewise, the awareness about, as well as respect and appreciation for the national heritage, has to be developed through a well designed communication plan.

Another example for a non-cultural discipline is that in which chemistry is involved. Many kinds of conservational work basically need expertise in chemistry. There are even specializations in wood, paper, textile, stone, and metals. The offer of specialized courses, however, are still lacking or at least inadequate in Indonesia today. Therefore, to meet the existing needs, there are from time to time ad-hoc inhouse trainings or the sending of employees abroad to follow specialized courses.

### **Long-term, Mid-term, and Short-term Plans**

As guidelines for development on a national level, the Republic of Indonesia has a long-term plan for 25 years, divided into five mid-term plans of 5 years, and this again is divided into the yearly plans that can be called the short-term plans. What will be given below are quotations from the official texts delineating the term plans relevant for culture. The first long-term development plan has just been passed (1969--1994); thus in the year 1994 Indonesia embarked on the second long-term plan, and at the same time entering the 6th five-year development plan.

### **Long-term Plan II (1994--2019)**

The basic outlook for the Indonesian national development is called "Wawasan Nusantara" which is paraphrased as "the national outlook originating from the Pancasila (The Five Pillars/Principles), and based on the 1945 Constitution, which is the outlook and attitude of the Indonesian nation about itself and its surroundings, while giving priority for the unity and integration of the whole nation, as well as for the territorial unity, in living within the society, the nation, and the state".

Considered as of utter importance is the many aspects of "National Resilience". Among the aspects there is the "socio-cultural resilience", which is described as "the nation's socio-cultural condition of life spiritually endowed with national identity based on Pancasila, enabling (the nation) to form and develop the socio-cultural life of the Indonesian man as well as society, which is: having faith and devotion to God Almighty (literally, The Only One God), harmoniously living together, unified, loving the country,



qualified, progressive, and welfaring in a harmonious, matching, and balanced life, while being able to ward off any foreign cultural penetration which is not in conformity to the national culture".

The long-term target in the sector of "People's Welfare, Education, and Culture" is: "the coming into being of a life for the whole society that is more and more welfaring, physically as well as spiritually, in a sphere of justice and equality; the implementation of national educational plans and the provision of health services, both to be more spread out for the whole population; all of those to enable people to become a person that is devoted to God Almighty, has good and noble conduct, persevering, healthy, intelligent, patriotic, disciplined, creative, productive and professional; the strengthening of the Indonesian national culture, which is to be observable in the rise of the quality of civilization and human dignity; and the strengthening of Indonesia's national identity.

#### **Mid-term Plan (1994--1999)**

As a general condition identified for this period is among others the existence of threats. Potential political and national defence threats include the possibility of moves against the Pancasila as a national ideology, against the "Wawasan Nusantara", and against the need for national defence itself. Those threats may endanger the nation's unity and integration, and thus hampering the progress in national development. Identified as a socio-cultural threat is the intrusion of foreign values that contradict the existing noble values of the nation.

Specifically for the sector of Social Welfare, Education, and Culture the goals of the present five-year plan is put as: more spread out services for all layers of the society in terms of the provision of good clothing, food, and dwelling places; the organization of national education to generate people that is faithful and devoted to God Almighty, having noble conduct, having (the necessary) knowledge and knowhow, physically and mentally healthy, having stable personality and capacity to be independent, having responsibility towards his society and nation; the enhancement of the noble values of the nation, and the enactment of it.

As guidelines for the national development relevant to culture, this mid-term plan puts: "*The national culture*" is directed towards giving a

cultural dimension to the national development in all its sphere: the society, the nation, the state. The national culture is fostered towards the enhancement of human dignity, self esteem, national integrity and identity, towards the strengthening of the spirit of national unity. Capacities to develop sub-national, ethnic cultures which are noble, and to take selectively the positive foreign cultural values, both to enrich the national culture, are to be enhanced.

### **Short-term Plan (1996--1997)**

As it has been developed for the last two years (1994--1995; 1995--1996), there are 5 programs that are exclusively administered within the Directorate General for Culture, and 4 other programs shared by different offices, even in different sectors. Those programs are namely:

- (1) development and enhancement of cultural values;
- (2) development of language, literature and libraries;
- (3) development of the arts;
- (4) development in traditions and history, of national heritage and museums;
- (5) development of local adherers in the belief in the one and only God;
- (6) personnel development;
- (7) maintenance of facilities;
- (8) child and youth (programs in culture);
- (9) integrated information system on culture.

Under these programs there are projects and sub-projects, which are more easily changed from year to year. As an example, last year, 1995, thus within the fiscal year 1995-1996, connected with the celebrations of Indonesia's 50th anniversary of the proclamation of independence, there were three big events in the arts, namely: (1) the Exhibition of Contemporary Art of the Non-Aligned Countries; (2) Art Summit : Music and Dance, Indonesia 1995; (3) Art Congress, which is a national forum for the first time organized in Indonesia.

Beginning in 1994 there was also the first step in international participation in an archaeological restoration work abroad, namely in

Cambodia. In this year, 1996, there are two national conferences, one in archaeology and the other in history. New projects are among others: the making of a directory of Indonesian artists, English translations of selected results of research projects on culture, etc.

### **The Goals of Culture & Art Promotion**

The Government of The Republic of Indonesia has the task of developing culture with a clearly defined set of norms and objectives. These set of norms and objectives aims at generating whatever actions and products that strengthen the national culture, while at the same time warding off any element of activity and production that is considered detrimental to the building up of a well-founded national culture.

Tokyo, March 25th, 1996

## **KARYA CITRA BERGERAK SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN PERSEPSI \*)**

Dalam makalah ini apabila disebut istilah "film", maka yang dimaksud adalah keseluruhan kemasan citra bergerak, dengan teknik dan bahan apapun itu dibuat. Dengan demikian termasuk ke dalamnya baik film dalam arti pokoknya, yaitu yang menggunakan medium seluloid, maupun sinema elektronik (sinetron) yang menggunakan pita magnetik. Adapun masalah yang akan disentuh hanyalah pertama, yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu salah satu unsur yang ada di garis belakang dunia perfilman, dan kedua, yang berkenaan dengan penanggapan dan penggunaan film oleh khalayak pemirsanya.

### **Pendidikan**

Para pembicara lain tentunya sudah menunjukkan betapa tidak seimbangny kondisi perfilman Indonesia dewasa ini dilihat dari sudut bandingan antara tersedianya tenaga profesional perfilman dengan tuntutan akan kuantitas maupun kualitas karya-karya citra bergerak yang harus mengisi gedung-gedung bioskop maupun siaran-siaran televisi. Perguruan formal untuk belajar tentang perfilman boleh dikatakan hanya satu yang dewasa ini dapat dihitung karena telah menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional, yaitu Fakultas Film dan Televisi dari Institut Kesenian Jakarta. Di samping itu dapat pula disebutkan sejumlah pelatihan mengenai berbagai aspek perfilman yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah (misalnya Departemen Penerangan dengan Multi Media Center-nya), maupun swasta (misalnya Yayasan Citra dengan kursus-kursusnya). Itu semua ternyata tidak cukup, atau istilahnya "tidak mengejar", jika kita harus dihadapkan pada persaingan global yang sudah kita lihat kancahnya melalui siaran-siaran televisi kita di Indonesia.

Untuk dapat mengimbangi dan menyaingi arus produk budaya massa dari negara-negara industrial maju itu, Indonesia kiranya harus lebih tegas

---

\*) Makalah untuk Dialog Perfilman Nasional dalam rangka Hari Film Nasional diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Film Nasional, Departemen Penerangan R.I. di Hotel Horizon, Jakarta, 28-30 Maret 1996

dan berani dalam menanamkan modal untuk pengembangan sumber daya manusia perfilman yang handal. Semua pihak perlu mengambil bagian dalam upaya ini: pemerintah, pengusaha perfilman, maupun yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Kemampuan-kemampuan yang dikembangkan dalam dunia perfilman ini dapat diklasifikasikan ke dalam: kemampuan teknis, kemampuan teknis-estetis, serta kemampuan untuk merumuskan pesan. Dalam pendidikan formal, ketiga komponen kompetensi itu dikemas ke dalam kurikulum, yang merupakan kesatuan sejumlah mata kuliah, di mana di dalamnya terdapat bagian yang "wajib" untuk tiap program studi (sekitar 60%-70%) dan bagian yang "pilihan", yaitu yang bebas pengisiannya, sesuai dengan tuntutan-tuntutan khusus maupun peluang-peluang yang memungkinkan. Di bagian pilihan ini lah masing-masing penyelenggara pendidikan dapat menanggapi gerak yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada dalam kehidupan perfilman itu sendiri, baik yang disebabkan oleh inovasi-inovasi teknik, maupun mencuatnya arah-arrah pemikiran tertentu.

Dalam kaitan dengan hal yang terakhir ini, yang akan mempengaruhi aspek pesan dalam film, dapat 'bermain' berbagai kepentingan. Film dapat menyampaikan kaidah-kaidah seni, baik yang merangsang kepekaan seni maupun yang justru menumpulkan; di samping itu film juga dapat menyampaikan berbagai pesan, baik yang berguna untuk proses pembudayaan, maupun yang mempunyai potensi merusak integrasi budaya suatu bangsa.

### **Sarana Pembentukan Persepsi**

Mungkin tanpa disadari oleh para pemirsa film, dan lebih-lebih barangkali televisi, mereka telah dirasuki oleh nilai-nilai yang dibawakan oleh tayangan-tayangan tersebut. Nilai-nilai itu adalah tidak hanya yang berkenaan dengan pertama, tata pergaulan antar manusia dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang disoroti dewasa ini, melainkan juga, kedua, yang berkenaan orientasi artistik-estetik, dan ketiga yang berkenaan dengan pembentukan pandangan-pandangan stereotip terhadap suatu bangsa beserta seluruh orientasi budayanya.

Tentang nilai-nilai pergaulan kiranya tidak perlu diragukan lagi, bahwa film-film tertentu 'mengajarkan' kepada khalayaknya sikap permisif, artinya

apa saja boleh dilakukan, tanpa ancaman penegakan norma mengenai yang dapat dianggap pantas dan yang tidak pantas. Sikap berfilm demikian bahkan sudah diambil oper pula oleh sejumlah kecil pembuat film Indonesia, untuk 'meracuni' khalayaknya sendiri. Maka perlu kita mempertanyakan, apakah kita tidak harus mempersyaratkan integritas, atau watak yang bertanggung jawab, bagi para insan perfilman yang berperan dalam merumuskan pesan.

Orientasi artistik-estetik adalah suatu aspek perfilman yang permasalahannya belum cukup dimasyarakatkan. Dengan kata lain, upaya peningkatan apresiasi film bagi khalayak luas masih jauh dari memadai. Kebanyakan orang awam jika bicara tentang film hanya bicara tentang ceritanya. Persoalan gaya penyajian visual, persoalan tata suara, persoalan penulisan skenario, persoalan penyuntingan, dan lain-lain, belum cukup difahami orang banyak. Film yang merupakan produk industri kultural, yang ditujukan selalu untuk khalayak pemirsa yang amat luas, seharusnya melihat keseluruhan khalayak pemirsa itu sebagai sasaran. Termasuk ke dalamnya adalah sasaran untuk ditingkatkan apresiasinya. Dengan kata lain, tidak hanya kalangan elit yang diharapkan dapat mencerna permasalahan artistik-estetiknya. Kalau wayang kulit saja, yang penyajiannya dahulu terbatas pada kesempatan-kesempatan bersemuka, dalam masyarakat Jawa pada waktu yang lalu telah dapat memenangkan perhatian serius dari seluruh masyarakat tersebut, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi film, yang lebih luas daya jangkauannya, untuk tidak dapat mengambil peranan dan fungsi yang demikian dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

Permasalahan ketiga dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai itu adalah yang berkenaan dengan pesan-pesan, yang langsung ataupun terselubung, yang membentuk pandangan-pandangan stereotip tentang suatu bangsa. Sebagai contoh dapat disebutkan betapa film-film buatan negara-negara maju dari barat menyisipkan pandangan yang merendahkan terhadap bangsa-bangsa kulit berwarna. Orang Afrika atau asal Afrika, orang Indian, orang 'Timur Tengah', orang Cina, dll. seringkali ditampilkan dalam format "terbelakang" atau "jahat", "tak dapat dipercaya", dan sebangsanya. Seringkali pula bias politik di dalam film-film tertentu sangat jelas. Dahulu, pada masa perang dingin antara Amerika dan Rusia, film-film action Amerika seringkali menampilkan orang Rusia sebagai semacam "antagonis alamiah". Kini, yang menjadi sasaran pencapan sebagai antagonis alamiah itu adalah orang-orang Timur Tengah, bahkan dalam film-film tertentu jelas-jelas disebut Libya

misalnya. Kalau kita melihat film-film tersebut sebagai "film perjuangan Amerika Serikat", mungkin untuk tema-tema tertentu masih dapat diterima, seperti halnya kita menampilkan perlawanan terhadap Belanda sebagai penjajah. Namun apabila film yang punya sifat nasionalis itu ditambah dengan pelecehan terhadap bangsa lain, dan ini diedarkan untuk konsumsi seluruh dunia, maka rasanya situasi ini menjadi tidak adil.

Dalam kaitan itu semua kita perlu merenungkan kembali fungsi dasar dari kehidupan perfilman Indonesia : apakah ia pada pertamanya berfungsi sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi dengan memproduksi sebanyak-banyaknya film laris, atautkah hal itu seharusnya bersifat sekunder, sedangkan yang primer adalah fungsinya sebagai sarana pendidikan dan pembudayaan. Fungsi penerangan sebenarnya lebih terkait dengan aspek pendidikan dan pembudayaan itu daripada dengan aspek perdagangan. Khususnya Departemen Penerangan, tentunya tugasnya lebih terarah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kekuatan watak bangsa, daripada untuk semata-mata membuat film Indonesia laris.

Jakarta, 28 Maret 1996

## **KEBIJAKAN PERBUKUAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DEPDIKBUD \***

Dalam kesempatan Bulan Buku Nasional dan Bulan Gemar Membaca 1996 ini saya diharapkan berbicara tentang kebijakan perbukuan Direktorat Jenderal Kebudayaan. 'Kebijakan' itu sudah tentu tidak jauh sarannya dari program-program kebudayaan yang dilontarkan dari Repelita ke Repelita. Tujuan pokok dari program-program kebudayaan itu adalah penguatan jatidiri bangsa, pelestarian warisan budaya bangsa, peningkatan kesadaran sejarah bangsa, dan pengembangan kreativitas dalam bidang ilmu, seni, dan kewirausahaan. Dalam kaitan dengan tujuan-tujuan itu pula lah kita harus meninjau kebijakan perbukuan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kebijakan pertama adalah untuk melakukan upaya-upaya pendorongan ke arah tercapainya keseimbangan antara berbagai jenis bacaan yang tersedia dalam masyarakat. Pada masa sekarang sebenarnya sudah cukup banyak buku terdapat di pasaran, baik yang terbitan swasta maupun pemerintah, dan baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Buku-buku tersebut terdapat dalam klasifikasi jenis yang sangat beragam pula, dari yang bersifat fiksi hingga yang ilmiah, dari yang bersifat hiburan hingga yang sangat serius dan mendalam, dari bacaan anak hingga bacaan orang tua. Selain itu, di pasar terdapat pula buku-buku yang menimbulkan pengaruh buruk dan kualitasnya rendah pula, di samping selebihnya, yang bagus dan bermanfaat. Permasalahannya adalah, bagaimana usaha yang harus dijalankan agar buku-buku yang bermutu jauh lebih banyak daripada yang berkualitas buruk, dan agar buku-buku yang dapat meningkatkan kesadaran sejarah bangsa dan memperkuat jatidiri bangsa dapat mengimbangi buku-buku impor yang bersifat hiburan semata.

Di satu sisi, bangsa Indonesia harus tidak ketinggalan dalam mengikuti, dan bahkan kalau bisa mendahului, perkembangan ilmu pengetahuan modern di dunia ini, namun di sisi lain, bersamaan dengan itu harus pula mengembangkan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri ini diperoleh baik dari kemampuannya di bidang ilmu dan teknologi, maupun dari keyakinannya

---

\*) Makalah untuk Seminar dan Lokakarya Bulan Buku Nasional dan Bulan Gemar Membaca 1996. Jakarta, 6-7 Mei 1996



akan budaya bangsanya sendiri. Budaya bangsa ini mengandung nilai-nilai kekinian maupun nilai-nilai warisan bangsa. Nilai-nilai kekinian yang terpenting adalah yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan nilai-nilai warisan adalah nilai-nilai yang senantiasa harus digali, ditanamkan, dan disosialisasikan antar suku bangsa. Di antara nilai-nilai yang disebut terakhir itu adalah misalnya yang berkenaan dengan adab pergaulan antar manusia, di mana sikap santun dan peduli adalah kata-kata kuncinya. Contoh lain yang dapat disebutkan adalah yang berkenaan dengan nilai-nilai seni. Cobalah kita masing-masing menyimak lingkungan terdekat kita untuk melihat seberapa jauh kita telah terhanyut ke dalam arus kesenian asing dan menjadi terasing dari kesenian bangsa sendiri. Ini adalah contoh kesenjangan yang untuk sebagian dapat dijembatani dengan penyediaan bacaan yang berfungsi sebagai sarana peningkatan apresiasi terhadap seni budaya bangsa sendiri.

Kebijakan kedua adalah untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, walau bagaimana kecilnya pun, untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pembinaan bangsa dengan terbatasnya sediaan bahan bacaan yang dapat menunjangnya. Wujud dari usaha ini, yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan beserta seluruh direktorat dan pusat yang ada di bawah koordinasinya, adalah penerbitan hasil-hasil kajian yang dilakukan dalam rangka tugas pokok dan program-programnya. Penerbitan-penerbitan itu meliputi berbagai bidang kajian, yaitu kebahasaan, arkeologi, sejarah, permuseuman, kesenian, serta antropologi dengan berbagai pokok bahasannya berupa aneka aspek budaya bangsa dan suku bangsa. Dalam hubungan ini dapat disebutkan terbitan-terbitan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Permuseuman, Museum Nasional, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Kesenian dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Pada tingkat pertama, terbitan-terbitan itu barulah merupakan terbitan yang dapat digolongkan "intern", karena sebagai laporan kegiatan harus dinyatakan sebagai "tidak untuk diperjualbelikan". Oleh karena itu, meskipun dicetak dalam jumlah cukup banyak (500 eksemplar ke atas) terbitan-terbitan itu kiranya masih dapat digolongkan sebagai "grey papers" seperti halnya laporan-laporan yang hanya digandakan dengan cara fotokopi.

Usaha penyebar-luasan terbitan-terbitan tersebut dilakukan dengan mengirim kepada pihak-pihak yang kiranya membutuhkan, *apabila cukup tersedia ongkos kirim untuknya*. Kadang-kadang orang-orang yang secara dari mulut ke mulut tahu mengenai adanya terbitan-terbitan intern itu dapat datang ke kantor-kantor yang menerbitkan dan meminta apa yang diperlukannya. Mereka ini pada umumnya adalah para mahasiswa dan peneliti.

Pada tingkat kedua, terbitan-terbitan 'intern' itu dapat ditawarkan untuk 'dilamar' oleh penerbit-penerbit yang berminat untuk menerbitkannya untuk umum. Dalam hal ini terlihat kecenderungan bahwa yang paling banyak diminati penerbit adalah yang kiranya spektrum pembaca potensialnya cukup luas, sedangkan yang kalangan pembacanya terlalu khusus, walau naskahnya dibuat dengan amat baik, cenderung tidak diminati penerbit. Untuk membuat naskah-naskah bagus seperti itu tetap dapat sampai ke kalangan masyarakat luas tanpa kendala 'tidak untuk diperjual-belikan' itu, maka peranan Balai Pustaka sebagai penerbit yang bermisi "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "pendidik rakyat" itu amatlah besar.

Dalam upaya memunculkan naskah-naskah bermutu yang dapat menjembatani kesenjangan antara buku-buku impor dan produk dalam negeri, maka melalui proyek Pembinaan Anak dan Remaja telah diselenggarakan Lomba Pembuatan Komik yang pesertanya adalah umum yang berusia muda. Tujuan lomba, yang telah berlangsung mulai dua tahun terakhir ini, adalah selain untuk secara kongkret mendapatkan naskah-naskah komik yang bercitra Indonesia, juga, secara lebih mendasar lagi, untuk menggugah potensi-potensi komikus Indonesia agar lebih muncul ke permukaan untuk 'menghadapi' serbuan komik terjemahan yang dewasa ini menguasai pasar. Komik-komik pemenang lomba ini, setelah diterbitkan secara intern sebagai "laporan proyek" diharapkan untuk diterbitkan oleh penerbit umum.

Masih berkisar sekitar komik, dapat disebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk melaksanakan Lomba Komik Sejarah yang hasil karya para pemenangnya akan diterbitkan juga. Tema sejarah ini terkait dengan program yang lebih besar, yaitu program peningkatan kesadaran sejarah dalam masyarakat, yang dalam hal komik ini diarahkan khususnya kepada anak dan remaja. Kesadaran sejarah adalah suatu komponen jatidiri bangsa yang seringkali terabaikan, karena dianggap sudah akan ada dengan

sendirinya. Sesungguhnya, kesadaran sejarah itu tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan melalui upaya-upaya intensifikasi yang bersistem. Kesadaran sejarah pada dasarnya berkenaan dengan pengetahuan yang benar, apresiasi akan data yang akurat, serta pengasahan sudut pandang kebangsaan yang tepat.

Kebijakan ketiga adalah peningkatan ketampilan bangsa Indonesia di forum internasional, khususnya dalam bidang kebudayaan. Untuk itu diusahakan menerbitkan buku-buku dalam bahasa Inggris dari hasil-hasil kajian pakar-pakar Indonesia bidang kebudayaan. Pilihan pada bahasa Inggris didasari kenyataan bahwa bahasa itu adalah yang paling luas penggunaannya di antara bahasa-bahasa resmi lain yang digunakan dalam forum antara bangsa. Untuk upaya peningkatan tampilan di forum internasional ini Direktorat Jenderal Kebudayaan baru-baru ini telah membentuk tim redaksi yang terdiri dari pakar-pakar senior untuk memilih karya-karya hasil kajian yang patut diterjemahkan. Tim ini juga selanjutnya menentukan tindakan persiapan editorial apa saja yang harus dilakukan sebelum bukunya diterbitkan. Menurut rencana hasil-hasil kajian yang telah diterjemahkan itu akan diterbitkan oleh Balai Pustaka, berupa seri yang dinamakan *Studies of Indonesian Culture*.

Secara garis besar karya-karya yang akan diterjemahkan itu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pertama, yang berspektrum pembaca luas dan dapat digunakan pula sebagai bacaan yang memperkaya informasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, dan kedua, yang segmen pembacanya adalah khusus dari kalangan akademik. Sudah tentu, masalah yang harus dihadapi dalam rangka penerbitan seri terjemahan ini adalah penyiapan pasarnya. Maksud usaha ini adalah juga untuk merangsang penulis dan ilmuwan Indonesia yang bergerak di bidang kebudayaan untuk berpacu dalam peningkatan mutu karya. Pada tahap awal ini, akan lebih dahulu dipilih karya-karya hasil kajian pada instansi-instansi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namun pada tahap-tahap selanjutnya akan diperhatikan juga karya-karya di bidang kebudayaan yang muncul dalam masyarakat luas.

Demikianlah garis besar kebijakan perbukuan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di samping hal-hal yang diselenggarakan di dalam negeri tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mendorong atau mengelola kerjasama-kerjasama penerbitan dengan pihak negara-negara

lain. Sebagai contoh dapat disebutkan peranan aktif yang diambil dalam rangka program kerja ASEAN-COCI (Committee on Culture and Information). Di antara program kerja badan ini terdapat usaha-usaha penerbitan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota-anggota ASEAN. Khususnya hal ini masuk ke dalam cakupan kerja "working group on Literary and ASEAN Studies". Kelompok kerja ini antara lain telah menghasilkan buku-buku dalam kategori *Anthology of ASEAN Literatures*, *ASEAN Traditional Games and Sports*, *Children's Books and Source Materials on ASEAN Cultures*, dan *Museum Masterpieces*.

Jakarta, 6 Mei 1996

## **NASKAH DAN PENGKAJIANNYA : TIPOLOGI PENGGUNA \*)**

Pengertian dari kata "pengkajian" yang tersebut dalam judul makalah ini mengacu kepada makna yang luas, di mana ke dalamnya termasuk kajian yang bersifat ilmiah maupun yang bertujuan praktis untuk memenuhi berbagai fungsi yang diharapkan ada pada naskah. Tinjauan yang akan dipaparkan di sini adalah mengenai berbagai fungsi naskah yang dikenal dalam masyarakat Indonesia, serta terkait dengannya, berbagai arti naskah bagi individu-individu warga masyarakat Indonesia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, dan dengan demikian dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe pengguna naskah. Tipologi ini dimaksudkan untuk menampilkan kenyataan, bahwa di luar para ahli Filologi, terdapat pula para pengguna naskah yang perlu diamati, dipelajari, ataupun didukung, didorong, dan mungkin juga kalau perlu diintervensi.

Para pengguna naskah itu secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam lima tipe, yang masing-masing mempunyai tujuannya yang khas, dan dengan demikian juga mempunyai cara kerja yang berbeda satu sama lain. Kelima tipe pengguna itu adalah: (1) penyimpan dan penata; (2) peneliti; (3) pembuat; (4) pencari petunjuk; dan (5) perawat pusaka.

### **Penyimpan dan penata**

Pekerjaan menyimpan dan menata yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan secara sistematis, dengan menerapkan sistematika yang dapat bervariasi. Namun, meski caranya bervariasi, tujuan dari mereka yang melakukan pekerjaan ini adalah sama, yaitu untuk membentuk sebuah koleksi naskah. Pendaftaran dan pemberian kode kepada naskah-naskah yang disimpan dalam koleksi tersebut merupakan bagian terpenting dari pekerjaannya, karena dengan itulah kemudian naskah-naskah dapat secara mudah dicari, dikeluarkan, dan dimasukkan kembali.

---

\*) Makalah Kunci Simposium Tradisi Tulis Indonesia. Diselenggarakan oleh Yayasan Lontar, Perpustakaan Nasional R.I., dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 Juni 1996.

Ada kalanya terdapat pemisahan tugas antara penyimpan dan penata, dan dalam hal ini terdapat pula kemungkinan bahwa penata 'disewa' atau 'dikontrak' atau 'dipinjam' dari luar kalangan pemilik koleksi. Para pengguna naskah tipe pertama ini biasanya tidak hanya mengerjakan penyimpanan dan penataan, tetapi juga perawatan. Tujuan dari perawatan itu adalah untuk melestarikan naskah, menjaganya dari kerusakan. Berbagai teknik telah ditemukan, dicoba, dan diterapkan untuk perawatan naskah ini. Dalam hubungan ini, dapat dilihat bahwa salah satu fungsi dari penyalinan naskah adalah menjaga kelestarian tersebut: naskah disalin sebelum rusak atau menjadi tak terbaca karena aus atau karena proses perembesan tinta.

Di Indonesia terdapat banyak koleksi naskah di berbagai daerah. Di samping koleksi-koleksi yang dianggap baku, artinya yang memenuhi syarat-syarat untuk melayani keperluan ilmiah, seperti misalnya koleksi Perpustakaan Nasional, koleksi Fakultas Sastra (Universitas Indonesia dan Universitas Udayana), serta koleksi museum-museum negeri di ibukota propinsi, dan lain-lain, terdapat pula koleksi-koleksi pribadi, yang secara turun-temurun ditata dan dirawat. Kalangan raja-raja masa lalu seringkali memelihara koleksi semacam ini. Di antara koleksi kerajaan dan bangsawan itu terdapat beberapa yang telah disentuh oleh upaya pendaftaran dan perekaman sesuai dengan persyaratan ilmiah, sehingga dapat dicapai oleh para peneliti. Bagi pemilik sendiri, koleksi tersebut adalah sebuah perpustakaan.

### **Peneliti**

Tipe kedua pengguna naskah adalah peneliti, yaitu para ahli Filologi. Ialah yang merupakan tokoh utama, yang menggerakkan kegiatan-kegiatan seperti simposium ini, serta pameran dan penerbitan buku *Illuminations, The Writing Traditions of Indonesia* ini. Para peneliti lah yang mengkaji naskah-naskah dengan metode yang sepenuhnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui kajian-kajian mereka, sejumlah fakta yang tersembunyi di balik naskah-naskah dikemas menjadi informasi yang disusun secara sistematis. Mereka merumuskan dan menangani masalah-masalah berkenaan dengan teknologi pembuatan dan perawatan naskah, bentuk naskah, waktu penulisan naskah, asal-usul naskah, hubungan antar naskah, hubungan antar teks, penyusun teks, sejarah teks, struktur teks, isi teks, fungsi teks dan fungsi naskah, serta juga sejumlah permasalahan kebahasaan dan pertulisan. Hasil-

hasil kajian para ahli Filologi seringkali dapat menjadi sumbangan yang amat berharga bagi pengkajian Sejarah maupun lebih khusus Sejarah Kebudayaan, Sejarah Kesenian, dan Sejarah Sastra.

### **Pembuat**

Tipe ketiga 'pengguna' naskah adalah para pembuatnya. Mereka ini membuat naskah dengan berbagai alasan. Bagi seorang pembuat naskah yang sekaligus adalah pengarang, atau pujangga, maka pekerjaannya menulis naskah adalah suatu pemenuhan kebutuhan batin untuk menyatakan pikiran-pikirannya, untuk mempraktekkan kiat-kiat estetikanya, untuk menyatakan sikap hidup dan tanggapan dunianya. Berbeda halnya adalah para pembuat naskah yang semata-mata melakukan penyalinan, baik atas perintah, keinginan sendiri, maupun atas pesanan. Pada waktu ini, para pembuat naskah yang ada kebanyakan adalah dari golongan penyalin. Para pengarang pada umumnya telah menggunakan media penulisan modern untuk langsung diproduksi secara massa pula. Namun, tidaklah mustahil bahwa dalam komuniti-komuniti tradisional tertentu, seperti misalnya di Bali, masih terdapat pengarang pembuat naskah.

### **Pencari Petunjuk**

Tipe pengguna naskah yang lain adalah yang tidak menghasilkan, melainkan memanfaatkan naskah-naskah. Mereka ini melihat naskah sebagai sumber petunjuk-petunjuk dari nenek moyang. Dari ajaran moral hingga ke petunjuk-petunjuk gaib dicarinya dari naskah-naskah lama. Sebagian dari para pencari petunjuk ini, seperti misalnya para pengguna primbon, tetap merasa dapat terpenuhi kebutuhannya meskipun teks-teks petunjuk itu sudah dicetak dan disebar-luaskan secara umum. Dengan penggunaan media massa cetak ini maka peranan manusia sebagai mediator dan penafsir menjadi berkurang.

### **Perawat Pusaka**

Tipe pengguna naskah yang terakhir adalah mereka yang melihat naskah semata-mata sebagai benda, tetapi sekaligus juga sebagai sebuah benda yang keramat, yang disucikan. Mereka ini merawat naskah sebagai pusaka, baik

sebagai pusaka milik pribadi, keluarga, ataupun kerajaan. Anggapan terhadap naskah sebagai benda keramat itu seringkali tumbuh melalui proses pewarisan, di manapihak yang mewariskan dinilai sebagai mempunyai tuah atau karisma. Penganggapan naskah sebagai benda pusaka yang keramat dapat pula disebabkan oleh isi naskah yang dinilai bersifat suci. Pengkeramatan naskah ini lah yang pada umumnya menjadi hambatan bagi para peneliti untuk mendekatinya, dan demikian pula bagi para petugas pendaftar Benda Cagar Budaya yang mendapat amanat dari Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang BCB.

### **Penutup: Keaneka-ragaman Tradisi**

Demikianlah bentangan khasanah pernaskahan Indonesia sebenarnya melibatkan berbagai pihak dengan kepentingannya masing-masing, satu per satu dengan anggapannya bahwa kepentingannya lah yang paling penting. Kita, yang bersimposium hari ini pun mempunyai kecondongan pandangan yang berpihak, yaitu menganggap kepentingan ilmiah lah yang paling penting dan mendesak. Itu adalah sikap yang memang dituntut oleh profesi ahli Filologi.

Keluasan wawasan dan kedalaman penglihatan, didukung oleh analisis yang tajam dan giringan pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa berkembang dan saling bertautan, merupakan tujuan dari pengkajian ilmiah pernaskahan. Dunia pernaskahan Indonesia dengan keanekaan tradisinya, dengan keberagaman proses-proses budayanya di sepanjang zaman di berbagai wilayah, dengan situasinya di mana tradisi yang mati dan yang hidup terdapat berdampingan, merupakan ranah kajian yang masih semarak dengan tantangan-tantangannya. Buku *Illuminations* telah menggambarkan dengan baik sekali cakupan kajian pernaskahan Indonesia itu.

Sebagai catatan akhir, kiranya perlu pula dikemukakan bahwa dunia pernaskahan juga merupakan hajat dari kalangan yang lebih luas daripada para ilmuwan saja. Dalam kehidupan kebudayaan pada umumnya, fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan aktual dari pembuatan, perawatan, maupun pemanfaatan naskah merupakan sesuatu yang perlu disantuni secara tersendiri, baik demi arah pelestarian maupun perubahan. Berkaitan dengan ini keaneka-ragaman tradisi perlu diterima sebagai kekayaan budaya bangsa secara keseluruhan, dan kesaling-pahaman merupakan sesuatu yang perlu



lebih diupayakan karena hal itu akan merupakan pengkayaan kehidupan pribadi maupun sarana persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan yang harus dihadapi adalah pandangan umum yang menganggap dunia pemaskahan yang non-industrial itu sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, yang tidak relevan lagi dengan kehidupan masa kini. Kiranya perlu lebih dikuatkan pandangan bahwa yang membuat suatu bangsa berjatidiri adalah antara lain karena ia membawa serta akar budayanya dari masa lalu.

Jakarta, 4 Juni 1996

## **SPIRITUALITAS DALAM TINJAUAN SEJARAH KEBUDAYAAN JAWA \***

Spiritualitas adalah salah satu ciri kemanusiaan, yang kiranya membedakan manusia dari makhluk-mahluk lain. Kebutuhan hidup manusia dapat dirinci ke dalam kategori-kategori, dari yang paling fisik (jasmaniah) hingga yang paling spiritual (batiniah). Di antara kebutuhan-kebutuhan batin itu pun dapat dibedakan atas: (a) kebutuhan akan kasih sayang dan ketenterâman hati; (b) kebutuhan akan pemenuhan rasa indah (seni); dan (c) kebutuhan akan sentuhan penghayatan terhadap Yang Adikodrati. Pemenuhan akan kebutuhan yang disebut terakhir ini membutuhkan panduan konseptual dan metodologis, yang perumusannya tak dapat dilepaskan dari perkembangan kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama yang pernah ada di dunia ini, yang melintas melalui berbagai zaman, yang menjelajah di berbagai sudut geografis.

Dalam makalah ini akan dipaparkan garis besar Sejarah Kebudayaan Jawa sepanjang yang relevan dengan permasalahan konsepsi dan metodologi pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Di samping itu, sambil berjalan, akan dibahas pengertian-pengertian dasar yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap sejarah kebudayaan tersebut. Di antara pengertian-pengertian yang akan disinggung adalah mengenai "akulturasi", serta mengenai "kebudayaan dan sub-kultur".

Namun sebelum masuk ke dalam permasalahan Sejarah Kebudayaan Jawa itu sendiri, perlu lebih dahulu ditegaskan bahwa kita harus membedakan dua ranah wacana yang tidak dapat dikacaukan antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah di satu sisi ranah pembahasan ilmiah dan di sisi lain ranah penentuan sikap dan pengarahan pembinaan. Pembahasan ilmiah berlandaskan pada pencarian fakta-fakta ilmiah, dan dari sana dilakukan interpretasi untuk memperoleh kebenaran-kebenaran ilmiah, di mana perlu berdasarkan teori-teori yang setepat-tepatnya. Wacana ilmiah

---

\*) Makalah pembuka Sarasehan Dimensi Budaya Spiritual dalam Masyarakat Jawa diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY, bekerja sama dengan IAIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia.  
Kaliurang, 11-13 Juni 1996

bersifat terbuka, dalam arti semua prosedur kerja dan pembuktiannya harus dapat diikuti oleh semua pihak, dan senantiasa terbuka pula untuk mendapat kritik.

Berbeda dengan itu, ranah wacana "penentuan sikap" menghimpun fakta yang diangkat dari kenyataan-kenyataan empiris, tidak memerlukan metode ilmiah yang ketat, dan interpretasinya diarahkan untuk memperoleh kebenaran yang hendak dipercaya (dan dipegang teguh). Penafsiran dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam rangka ancaman seperti ini seringkali didasarkan pada seperangkat konsep dan strategi yang telah ditentukan lebih dahulu, sesuai dengan tujuan-tujuan yang bersifat politis. Fakta-fakta yang diangkat dari kenyataan empiris itu tak jarang kemudian diakui sebagai kebenaran yang dianggap mutlak setelah melalui berbagai upaya intensifikasi. Pada masa lalu, suatu kebenaran bahkan bukan hanya diangkat dari fakta empiris, melainkan dapat juga dari pemikiran ideal semata, atau juga katakan saja, dari alam gaib yang masuk ke dalam pikiran manusia, sehingga dengan demikian yang terjadi adalah pembentukan mitos.

Sebagai contoh dari sejarah kebudayaan Jawa dapat disebutkan beberapa fakta berupa adanya anggapan yang mantap mengenai beberapa hal, yang secara historis ilmiah amat sulit dibuktikan. Contoh yang pertama adalah mengenai asal-usul raja-raja Mataram besar, yang dikatakan mempunyai jalur *pangiwa* dan *panengen*, yang berpangkal pada dewa-dewa kehinduan di satu sisi dan nabi-nabi ke-Islaman di sisi lain. Contoh lain adalah mengenai pertemuan Senapati, raja Mataram pertama, dengan Ratu Kidul, yang untuk selanjutnya menjadi pasangan gaib dari semua raja Jawa. Kedua contoh ini mempunyai persamaan dalam hal keduanya merupakan salah satu sarana bina negara, khususnya sebagai upaya pembentukan mitos demi tegak dan lestarnya kewibawaan raja.

Suatu contoh lain yang lebih bersangkutan dengan kebijakan kebudayaan pada masa lalu adalah "perekayasa fakta historis" untuk memberikan peranan kepada para wali perintis agama Islam di Jawa sebagai kelompok tokoh pembentuk budaya juga, di samping peranan utamanya sebagai pembaharu keagamaan. Dalam hal ini, contoh yang dimaksud adalah penganggapan yang mantap di kalangan orang Jawa bahwa para wali lah yang menciptakan wayang dan topeng. Dalam pada itu data sastra lama dan kepurbakalaan jelas-jelas menunjukkan bahwa pertunjukan wayang maupun

topeng telah dikenal di Jawa beberapa abad sebelum masa hidup para wali tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pembentukan mitos tentang peranan budaya dari para wali tersebut tentulah diarahkan oleh suatu kebijakan kebudayaan (*cultural policy*) tertentu. Dapat diajukan hipotesis bahwa mitos itu sengaja dibuat karena para pemimpin yang arif pada waktu itu melihat bahwa kesenian wayang dan topeng ketika itu sudah sedemikian menyatu dengan kehidupan dan alam pikiran orang Jawa sehingga tidak mungkin mencabutnya tanpa orang Jawa kehilangan salah satu bagian terpenting dari jati dirinya. Oleh karena itu maka diputuskan bahwa Islam sebagai agama baru harus dapat 'masuk dari dalam', hal mana diwujudkan melalui pengakuan 'post-scriptum' bahwa unsur budaya tercinta itu, wayang dan topeng, adalah berasal dari para wali juga, sehingga adalah sah adanya untuk (tetap) berkembang di alam ke-Islaman di tanah Jawa. Dengan demikian maka wayang dan topeng adalah "legitimate".

Suatu hipotesis lain yang dapat diajukan adalah mengenai perkembangan sastra Jawa sesudah Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pilihan pada bentuk puisi macapat, dengan meninggalkan kakawin yang marak perkembangannya di zaman Hindu-Budha yang mendahuluinya, pun bukanlah suatu perkembangan alamiah belaka, namun juga diarahkan oleh suatu kebijakan kebudayaan. Dapat dikemukakan pandangan hipotetis bahwa puisi macapat/kidung sebenarnya sudah sejak lama sebelum akhir masa Hindu-Budha hidup berdampingan dengan kakawin, tetapi di kalangan 'pinggiran', bukan di pusat-pusat kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh teks Sudamala yang berbentuk macapat dan berasal dari daerah paling timur dari Jawa Timur. Demikian pula kidung-kidung seperti Kidung Ranggalawe dan Kidung Sundayana yang semuanya ditulis dalam macapat dan sekaligus juga mengandung kesalahan-kesalahan informasi historis, menunjukkan bahwa karya-karya tersebut dibuat dan beredar jauh dari pusat informasi dan kekuasaan masa Hindu-Budha. Maka, justru bentuk puisi ini lah, yang semula lebih bercitra kerakyatan, dipilih sebagai wahana sastra Jawa baru yang berorientasi kepada agama Islam. Demikianlah alih bentuk dari karya-karya 'klasik' berbentuk kakawin dalam khasanah kesusastraan Jawa Kuna ke dalam versi baru berbentuk macapat, bukanlah semata-mata karena alasan "renaissance" seperti dikemukakan Th. Pigeaud, ataupun karena berkurangnya pemahaman akan karya-karya Jawa Kuna seperti dikemukakan oleh M.C. Ricklefs, tetapi juga secara

sengaja dialihkan ke dalam bentuk baru, macapat, yang telah dijadikan wahana sastra "zaman Islam", sambil di sana-sini mengubah isinya agar lebih sesuai dengan alam pikiran keagamaan baru yang lebih Islami.

Demikianlah contoh-contoh telah diberikan mengenai interpretasi orang Jawa di zaman yang silam mengenai masa lalunya, yang diarahkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan dilandasi oleh sikap-sikap budaya tertentu pula. Kini tinggalah kita menentukan untuk diri kita sendiri, orang Jawa, apakah kita selalu hanya akan berkonsep dan bertindak secara intuitif, ataukah juga akan memanfaatkan keilmiahannya untuk memandu langkah-langkah dan sikap-sikap kita di masa kini. Apabila kita memberikan kemungkinan pilihan kepada yang disebut terakhir, maka perlulah disimak pengertian-pengertian sekitar akulturasi, kultur dan subkultur.

Segi terpenting dari pengertian "akulturasi" adalah bertemunya dua kebudayaan, di mana salah satu pihak mempunyai kekuatan yang dominan, sehingga unsur-unsur dari kebudayaan yang dominan itu tetap dapat dikenali di dalam kebudayaan penerima pengaruhnya, walau mungkin saja sudah merupakan hasil modifikasi oleh pihak penerima tersebut. Di Jawa khususnya, sepanjang sejarah kebudayaannya, proses akulturasi itu sudah terjadi tiga kali. Akulturasi pertama adalah dengan kebudayaan India yang membawa serta inti budayanya yang berupa agama Hindu dan Budha. Pengaruh yang sebesar-besarnya tampak dalam berbagai segi kehidupan sekaligus: bukan hanya dalam agama, melainkan juga dalam tata masyarakat, bahasa dan tulisan, serta dalam berbagai bidang kesenian, seperti seni bangunan, seni arca, seni sastra, seni tari dan seni drama.

Akulturasi yang kedua adalah dengan agama Islam dengan berbagai implikasi budaya yang dibawanya serta dari tempat-tempat yang dilalui dan bangsa-bangsa yang menyebar-luaskan Islam sampai ke Indonesia, Jawa khususnya. Proses ini pun membawakan perubahan besar, baik dalam hal ajaran-agama itu sendiri, maupun penjabarannya dalam tata kemasyarakatan, seni bangunan dan seni hias. Adapun proses akulturasi ketiga terjadi ketika orang Jawa berhadapan dengan orang Eropa. Proses ini boleh dikatakan masih berlanjut hingga kini. Sebenarnya, masih dapat dipertanyakan apakah akulturasi dengan kebudayaan Eropa itu memang sudah terjadi pada masa kolonial. Pengaruh kebudayaan Eropa pada waktu itu terlalu kecil pada kebudayaan Jawa, dan sifatnya perifer, tidak menyangkut inti pokok

pandangan hidup orang Jawa. Pengaruh akulturasi dengan kebudayaan 'barat' itu baru terasa setelah ada 'seretan' dari perkembangan nasionalitas baru, Indonesia, yang mengambil citra "modern" bagi peri kehidupan masa kininya.

Pada setiap zaman bangsa Jawa membentuk suatu masyarakat yang terintegrasi, dan ditandai oleh suatu kesatuan kebudayaan. Kesatuan kebudayaan ini ditunjukkan oleh ketunggalan dalam sistem tulisan, dan juga sistem bahasa yang dalam perkembangan terakhirnya mempunyai beberapa tingkat tutur; kesatuan kebudayaan Jawa juga ditandai oleh satu sistem sosial, sistem tata cara keupacaraan, sistem kesenian, dan lain-lain, yang semuanya secara konsekuen mengikuti tata masyarakat pada zamannya. Namun juga, di setiap zaman pun, di dalam masyarakat Jawa terdapat penggolongan-penggolongan. Masing-masing golongan itu dapat mempunyai sebuah sub-kultur tersendiri, yang kadang-kadang lebih ditandai oleh kekhasan kebahasaannya, bentuk-bentuk keseniannya, juga versi-versi khusus dalam tata keupacaraannya, dan lain-lain.

Demikianlah, kiranya masalah spiritualitas dalam kehidupan orang Jawa dapat dilihat dalam konteks perkembangan bangsa dan negaranya dari zaman ke zaman, dapat pula dilihat dalam rangka proses-proses akulturasi yang telah dialaminya, serta dapat pula disimak variasi-variasinya dalam kaitan dengan adanya berbagai sub-kultur dalam kebudayaan Jawa. Suku bangsa Jawa, seperti halnya bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa lain, selalu berada dalam proses membentuk diri. Bentuknya hari ini berbeda dengan kemarin dan kemarin dulu, dan mungkin esok akan berbeda pula. Namun karena esok berangkat dari hari ini, dan hari ini berangkat dari kemarin, maka selalu akan ada garis-garis penanda bangsa yang terbawa sepanjang masa. Mungkin kecenderungan untuk senantiasa mencari kepuasan spiritual adalah salah satunya.

Kaliurang, 11 Juni 1996

## **ASPEK PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN \*)**

Tugas pembinaan kebudayaan yang diemban oleh berbagai pihak dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam usaha-usaha yang menurut sifatnya dapat dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu:

- (1) pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran;
- (2) penggalian dan pengkajian
- (3) pengemasan informasi budaya dan penyebar-luasannya;
- (4) perangsangan inovasi dan kreasi;
- (5) perumusan nilai-nilai ideal bangsa dan sosialisasinya.

Usaha-usaha yang lima jenis itu dapat dilakukan dalam kaitannya baik dengan warisan budaya yang kita peroleh melalui proses sejarah, maupun dengan karya-karya aktual yang lebih bersifat menjawab tantangan-tantangan masa kini. Di samping itu, usaha-usaha pembinaan budaya dapat berkenaan dengan karya-karya budaya yang "tangible" (wadag, dapat diraba) maupun yang "intangible" (tak dapat diraba, berupa wujud-wujud yang berlalu dalam waktu, ataupun yang sama sekali bersifat non-material, berupa konsep dan gagasan). Para pengarah dan pengelola pembinaan kebudayaan diharapkan mempunyai ketrampilan pikir yang memadai dalam mengamati dan mengelola dinamika hubungan ulang-alik antara hal-hal yang abstrak dan hal-hal yang konkret. Para pembina budaya pada umumnya bertugas mensosialisasikan nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu, namun dapat merancang seribu satu macam kegiatan yang sebenarnya mengarah kepada satu tujuan besar yang sama.

Tujuan-tujuan besar seperti yang dirumuskan sebagai "memperkokuh jatidiri budaya bangsa", "memperkuat ketahanan budaya bangsa", "melestarikan warisan budaya bangsa", "meningkatkan kesadaran budaya",

---

\*) Pengarahan tentang kebijaksanaan kebudayaan  
Disampaikan dalam Pertemuan Diskusi dan Komunikasi Kepala Museum Negeri dan Museum Khusus se-Indonesia. Diselenggarakan oleh Direktorat Pemuseuman di Palu, Sulawesi Tengah, 18-22 Juli 1996.

"meningkatkan kesadaran sejarah", serta "memperlancar dialog budaya" pada dasarnya adalah tujuan-tujuan payung yang harus dijabarkan ke dalam berbagai program kegiatan. Dalam penerjemahan tujuan-tujuan besar itu lah diperlukan daya cipta pada pihak pengarah dan pengelola pembinaan kebudayaan. Semakin luas dan mendalam pengetahuan kita tentang berbagai permasalahan budaya, diharapkan dapat semakin efektif pula program kegiatan yang kita ajukan. Efektifitas itu diukur dari dangkal atau dalamnya kesan mental-spiritual yang dapat ditumbuhkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan tersebut. Lebih jauh lagi, efektifitas itu dapat dianggap lebih besar lagi apabila pihak-pihak yang mendapatkan kesan mendalam jumlahnya dapat diperbesar pula.

Pembangunan di bidang kebudayaan dapat dikatakan berhasil apabila dapat diperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan mutu dan jumlah, baik pada karya-karya budaya yang tumbuh dalam masyarakat, maupun pada aparat (Pemerintah ataupun swasta) yang mempunyai peranan langsung dalam pembinaan kebudayaan. Demikian pula keberhasilan itu harus terlihat pada semakin meluasnya kesadaran budaya dan kesadaran sejarah dalam masyarakat. Dilihat dari rumusan indikator keberhasilan itu, maka nyata bahwa spektrum permasalahannya amat luas, dan tidak dapat hanya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Suatu wawasan lintas sektoral diperlukan untuk itu, yang pada gilirannya harus diimplementasikan melalui berbagai kerjasama lintas sektoral pula. Kita semua sebagai pekerja di bidang pembinaan dan pembangunan kebudayaan perlu senantiasa menyadari hal itu.

Salah satu segi yang amat penting namun sering dilupakan dalam rangka tugas pembinaan kebudayaan ini adalah segi pelayanan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pelayanan masyarakat dalam hal ini bukanlah semata-mata menuruti apa saja yang dikehendaki orang banyak, melainkan menjalankan program beserta kegiatan-kegiatannya yang di satu sisi bersifat menyenangkan dan nyaman, tetapi sekaligus juga bersifat meningkatkan pemahaman dan atau apresiasi, serta menyuburkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang berada dalam cakupan harapan sebuah kebudayaan nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat itu para perancang dan pengelola program perlu selalu arif akan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam masyarakat. Dalam rangka itu ia harus mampu membuat identifikasi dari kesenjangan-kesenjangan yang ada, yang dengan demikian



perlu dijumpai; begitu pula perlu dikenali kekosongan-kekosongan yang ada, yang memerlukan pengisian; dan kiranya perlu pula dikenali adanya 'luka-luka' yang harus diobati.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna tetapi sekaligus juga menyenangkan itu diperlukan daya imajinasi dari para pengelolanya. Ini berarti bahwa para pengelola tersebut harus bersedia untuk belajar sepanjang masa. Yang dimaksud dengan belajar dalam hal ini bukanlah semata-mata belajar yang menghasilkan gelar, melainkan segala bentuk belajar, baik yang bersertifikat maupun yang tidak, baik yang didapat melalui program belajar formal maupun yang didapat melalui "alam takambang", yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam, di masyarakat, yang apabila disimak dengan seksama dan dengan hati sanubari yang peduli seringkali dapat memberikan penglihatan, atau bahkan kearifan yang berharga.

Setelah menemukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat budaya, maka para perancang dan pengelola perlu pula memperlengkapi diri dengan pengetahuan mengenai berbagai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan atau bahkan dikembangkan untuk memenuhi apa yang disebut 'kebutuhan masyarakat' itu. Di sisi ini lah teknologi dapat banyak diberi peranan. Teknologi tata ruang, teknologi tata suara dan teknologi komputer, adalah contoh teknologi yang perlu dikuasai dalam rangka upaya melayani, atau mendekatkan diri dengan khalayak.

Museum, pada khususnya, adalah suatu badan pembina budaya yang fungsi pelayanannya masyarakatnya amat menonjol. Institusi museum tugas utamanya adalah menyimpan, merawat, dan memamerkan benda-benda warisan budaya. Oleh karena itu maka sarana pelayanan masyarakatnya yang utama adalah sistem pengelolaan yang baik, dengan pusat perhatian pada: pertama, registrasi koleksi yang sistematis serta mudah ditelusur dan dirujuk silang; kedua, teknik dan metode perawatan yang dapat diandalkan; dan ketiga, program pameran yang terarah sesuai dengan tujuan-tujuan yang harus ditetapkan untuk kurun-kurun waktu tertentu.

Masyarakat yang dilayani oleh museum itu dapat dipilah antara yang berupa kelompok khusus, yaitu para peneliti, dan yang dapat digolongkan sebagai "umum", yang dapat dipilah pula ke dalam "murid sekolah", "wisatawan", "nyonya-nyonya pejabat", serta umum yang benar-benar umum. Hanya kelompok khusus yang disebutkan pertama lah yang pada dasarnya

dapat memperoleh akses ke dalam data koleksi yang ada di dalam kantor, sedangkan kelompok umum hanya dapat menikmati apa yang secara sengaja disajikan untuk kalangan luas dalam bentuk pameran-pameran. Oleh karena itu, maka pameran lah yang merupakan "jendela budaya" yang dibuat oleh museum untuk khalayak ramai.

Apa yang disebut "pameran tetap" pada Museum Nasional maupun Museum-museum Negeri di propinsi adalah suatu pameran dasar yang pada intinya menggambarkan Sejarah Kebudayaan Indonesia, dengan sorotan khusus pula kepada keanekaragaman budaya etnik. Di samping itu museum pun perlu secara terencana 'memanggil pemirsanya' melalui pameran-pameran khusus serta kegiatan-kegiatan pendamping dan penunjang yang menyertainya. Suatu pameran khusus bisa merupakan cuplikan dari pameran dasar yang lalu dikembangkan dan diperdalam, dapat pula menampilkan tema-tema khusus yang berancangan perbandingan, baik dalam cakupan nasional, regional, maupun antara bangsa, serta dapat pula justru menampilkan budaya bangsa lain.

Layanan kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk informasi yang senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya, serta dalam bentuk peluang-peluang yang memungkinkan partisipasi pengunjung dalam kegiatan-kegiatan museum yang bersangkutan. Informasi pun dapat dikelompokkan antara yang statis dan yang interaktif. Teknologi media yang maju dengan pesatnya dewasa ini telah cukup membuat alasan bagi para pekerja museum untuk selalu harus menyimak perkembangan, dan mengambil manfaat atau ilham darinya untuk menciptakan berbagai kemasan informasi interaktif, yang pada gilirannya akan dapat lebih dalam memikat perhatian para pengunjung museum.

Selain dari itu, sudahlah merupakan tuntutan yang tak dapat ditunda lagi bahwa museum pun kini harus melakukan evaluasi mengenai efektifitas kegiatan-kegiatannya. (Ini boleh diterima sebagai instruksi kepada seluruh jajaran Direktorat Permuseuman). Suatu program pengkajian terintegrasi kiranya sudah waktunya untuk dimulai. Dari pokok-pokok bahasan yang dikemukakan dalam pertemuan kepala-kepala museum kali ini tersirat bahwa sekarang ini pun Saudara-saudara sudah setengah siap untuk melaksanakan pengkajian itu. Saya yakin bahwa selesai pertemuan ini Saudara-saudara akan dapat mengambil langkah awal untuk betul-betul menyiapkan kajian

tersebut. Suatu tugas berat yang harus mengawali kajian tersebut adalah penentuan format dan pembuatan instrumen. Dalam hal ini, saya anjurkan Saudara-saudara untuk memanfaatkan pula kepakaran yang ada di sekitar. Kita semua tentu dapat melihat bahwa hasil kajian-kajian tersebut akan bermanfaat untuk mengarahkan tindakan-tindakan selanjutnya, dan di sisi lain, hasil-hasil kajian itu berlaku juga sebagai umpan balik yang sebenarnya dapat pula memberikan ganjaran kepuasan akan jerih payah pembinaan yang telah dilakukan.

Semoga semangat kerja untuk senantiasa meraih kualitas selalu menyertai Saudara sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi jalan untuk cita-cita kita bersama.

Palu, 18 Juli 1996

## **PELAYANAN MASYARAKAT, PELESTARIAN DAN PENCIPTAAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN \*)**

Tugas pembinaan kebudayaan yang diemban oleh berbagai pihak dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam usaha-usaha yang menurut sifatnya dapat dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu:

- (1) pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran;
- (2) penggalian dan pengkajian;
- (3) pengemasan informasi budaya dan penyebar-luasannya;
- (4) perangsangan inovasi dan kreasi;
- (5) perumusan nilai-nilai ideal bangsa dan sosialisasinya.

Usaha-usaha yang lima jenis itu dapat dilakukan dalam kaitannya baik dengan warisan budaya yang kita peroleh melalui proses sejarah, maupun dengan karya-karya aktual yang lebih bersifat menjawab tantangan-tantangan masa kini. Di samping itu, usaha-usaha pembinaan budaya dapat berkenaan dengan karya-karya budaya yang "tangible" (wadag, dapat diraba) maupun yang "intangible" (tak dapat diraba, berupa wujud-wujud yang berlalu dalam waktu, ataupun yang sama sekali bersifat non-material, berupa konsep dan gagasan). Para pengarah dan pengelola pembinaan kebudayaan diharapkan mempunyai ketrampilan pikir yang memadai dalam mengamati dan mengelola dinamika hubungan ulang-alik antara hal-hal yang abstrak dan hal-hal yang konkret. Para pembina budaya pada umumnya bertugas mensosialisasikan nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu, namun dapat merancang seribu satu macam kegiatan yang sebenarnya mengarah kepada satu tujuan besar yang sama.

Tujuan-tujuan besar seperti yang dirumuskan sebagai "memperkokuh jatidiri budaya bangsa", "memperkuat ketahanan budaya bangsa", "melestarikan warisan budaya bangsa", "meningkatkan kesadaran budaya",

---

\*) Pengarahan tentang kebijaksanaan Kebudayaan. Disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian. Diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian di Villa Mas, Jalan Raya Puncak, 22-25 Juli 1996

"meningkatkan kesadaran sejarah", serta "memperlancar dialog budaya" pada dasarnya adalah tujuan-tujuan payung yang harus di jabarkan ke dalam berbagai program kegiatan. Dalam penerjemahan tujuan-tujuan besar itu lah diperlukan daya cipta pada pihak pengarah dan pengelola pembinaan kebudayaan. Semakin luas dan mendalam pengetahuan kita tentang berbagai permasalahan budaya, diharapkan dapat semakin efektif pula program kegiatan yang kita ajukan. Efektifitas itu diukur dari dangkal atau dalamnya kesan mental-spiritual yang dapat ditumbuhkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan tersebut. Lebih jauh lagi, efektivitas itu dapat dianggap lebih besar lagi apabila pihak-pihak yang mendapatkan kesan mendalam jumlahnya dapat diperbesar pula.

Pembangunan di bidang kebudayaan dapat dikatakan berhasil apabila dapat diperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan mutu dan jumlah, baik pada karya-karya budaya yang tumbuh dalam masyarakat, maupun pada aparat (Pemerintah ataupun swasta) yang mempunyai peranan langsung dalam pembinaan kebudayaan. Demikian pula keberhasilan itu harus terlihat pada semakin meluasnya kesadaran budaya dan kesadaran sejarah dalam masyarakat. Dilihat dari rumusan indikator keberhasilan itu, maka nyata bahwa spektrum permasalahannya amat luas, dan tidak dapat hanya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Suatu wawasan lintas sektoral diperlukan untuk itu, yang pada gilirannya harus diimplementasikan melalui berbagai kerjasama lintas sektoral pula. Kita semua sebagai pekerja di bidang pembinaan dan pembangunan kebudayaan perlu senantiasa menyadari hal itu.

Salah satu segi yang amat penting namun sering dilupakan dalam rangka tugas pembinaan kebudayaan ini adalah segi pelayanan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pelayanan masyarakat dalam hal ini bukanlah semata-mata menuruti apa saja yang dikehendaki orang banyak, melainkan menjalankan program beserta kegiatan-kegiatannya yang di satu sisi bersifat menyenangkan dan nyaman, tetapi sekaligus juga bersifat meningkatkan pemahaman dan atau apresiasi, serta menyuburkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang berada dalam cakupan harapan sebuah kebudayaan nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat itu para perancang dan pengelola program perlu selalu arif akan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam masyarakat. Dalam rangka itu ia harus mampu membuat identifikasi dari kesenjangan-kesenjangan yang ada, yang dengan demikian perlu dijembatani; begitu pula perlu dikenali kekosongan-kekosongan yang

ada, yang memerlukan pengisian; dan kiranya perlu pula dikenali adanya 'luka-luka' yang harus diobati.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna tetapi sekaligus juga menyenangkan itu diperlukan daya imajinasi dari para pengelolanya. Ini berarti bahwa para pengelola tersebut harus bersedia untuk belajar sepanjang masa. Yang dimaksud dengan belajar dalam hal ini bukanlah semata-mata belajar yang menghasilkan gelar, melainkan segala bentuk belajar, baik yang bersertifikat maupun yang tidak, baik yang didapat melalui program belajar formal maupun yang didapat melalui "alam takambang", yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam, di masyarakat, yang apabila disimak dengan seksama dan dengan hati sanubari yang peduli seringkali dapat memberikan penglihatan, atau bahkan kearifan yang berharga.

Setelah menemukenali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat budaya, maka para perancang dan pengelola perlu pula memperlengkapi diri dengan pengetahuan mengenai berbagai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan atau bahkan dikembangkan untuk memenuhi apa yang disebut 'kebutuhan masyarakat' itu. Di sisi ini lah teknologi dapat banyak diberi peranan. Teknologi tata ruang, teknologi tata suara dan teknologi komputer, adalah contoh teknologi yang perlu dikuasai dalam rangka upaya melayani, atau mendekatkan diri dengan khalayak.

Dalam pembinaan kesenian khususnya, dua hal yang amat penting untuk dijadikan pusat perhatian adalah di satu sisi *penggalan dan pengkajian*, dan di sisi lain *peningkatan dan perangsangan kreativitas*. Keduanya memerlukan profesionalitas dalam menanganinya, dengan pengkhususannya masing-masing. Usaha-usaha penggalan dan pengkajian bertujuan melestarikan warisan budaya dan memperdalam pemahaman, sedangkan usaha-usaha peningkatan dan perangsangan kreativitas bertujuan memperluas khasanah budaya dan membudayakan penghargaan terhadap karya cipta.

Dalam hubungan ini perlu kita sadari bahwa pemisahan antara "menggali" dan "mencipta" itu tidak sejajar atau identik dengan dikotomi antara "tradisional" dan "modern". Banyak karya-karya yang diberi label "modern" sebenarnya merupakan penerus saja dari suatu 'gaya baru' yang diciptakan di dunia barat, dan sebaliknya banyak karya baru yang inovatif tetap berada dalam lingkup seni tradisional. Mengenai yang disebut terakhir ini khususnya saya sebagai wakil Indonesia dalam Komisi Kebudayaan pada

Sidang Umum UNESCO di Paris pada Oktober 1995 telah melontarkan isu "*creativity within tradition*". Permasalahan ini perlu dicuatkan dalam wacana pembinaan kesenian kita. Adapun contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan tema "kreativitas dalam tradisi" itu adalah antara lain pertunjukan dan pameran yang mendemonstrasikan adanya kreativitas dalam suatu tradisi seni, atau peragaan disertai penjelasan, atau berbagai bentuk pertemuan pembahasan, dan juga perekaman dan pengkajian.

Berbagai hasil kerja dari sisi perekaman dan pengkajian selanjutnya dapat dikemas menjadi informasi yang dapat disebarluaskan untuk berbagai tujuan: memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, meningkatkan apresiasi, dan merangsang daya kritik. Format dari kemasan-kemasan tersebut perlu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sisi ini dari kegiatan pembinaan kesenian kiranya kini perlu ditata ulang untuk memperoleh efektifitas yang lebih tinggi.

Di balik itu, pengumpulan data kesenian itu sendiri perlu senantiasa ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi ketepatan, kelengkapan, maupun cara pengambilannya yang tepat. Salah satu jenis data kesenian adalah perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi kesenian. Para pengasuh seni kiranya perlu selalu mengetahui potret keadaan organisasi-organisasi kesenian dari waktu ke waktu, agar pembinaan yang dilakukan betul-betul dapat berlandaskan data yang dapat diandalkan.

Sisi yang lain pun, yaitu pengembangan kreativitas, perlu pula mendapat peningkatan. Lokakarya, dialog seni, di samping berbagai macam pertunjukan dan pameran, kiranya perlu senantiasa dibuat lebih semarak dengan melibatkan lebih banyak pihak. Kerjasama dengan radio dan televisi pun, baik di pusat maupun di daerah, perlu mendapat perhatian yang serius. Demikian pula, jika selama ini hasil binaan kesenian kita di berbagai daerah telah ternyata bermanfaat bagi penyelenggaraan Panggung Rakyat oleh Direktorat Jenderal Penerangan Umum dari Departemen Penerangan, maka selanjutnya penilaian dapat dilaksanakan bersama instansi terkait mengenai mutu dan kiat pengemasan dari pesan-pesan yang dititipkan.

Secara umum, wawasan para pembina kesenian pun senantiasa perlu diperluas, dengan memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan kerjasama lintas sektor. Semoga dengan demikian hasil kerja Saudara-saudara pun dapat memberikan kepuasan batin yang lebih besar.

Villa Mas, 22 Juli 1996

## STYLE AND COMPOSITION \*)

Style in dance is symbolic of its growth through time. Dance styles developed with the agency of a tradition. Dance movements were once created, and repeated, and shared, and spread wider within a community, or even within a society. The creation of the kinds of dance movements had first been directed by a specific taste and preference of a group of people; on the other hand, in subsequent periods, the specific kind of dance movements becomes the trait of that group of people. If it is shared by the whole society, it becomes then an element of the people's cultural identity.

Meanwhile, the notion of composition in dance has two levels of meaning. The first one is that of composition within the boundary of a tradition, and the second one is composition as a means of sheer individual freedom, unbound by any tradition whatsoever. However, there has been a false belief that creativity is only possible within a condition of freedom from any traditions. On the contrary, historical facts, at least within the Indonesian context, have given many instances of the existence of creativity within traditions. There have been new dance compositions created from time to time, like the many *bedayas*, *serimpis*, and *wirengs* within the Javanese dance tradition, the many *legongs* within the Balinese dance tradition, and the many *jogets* of the Melayu dance tradition. Even going further than just making new compositions, Indonesian dance artists did make greater leaps by creating new genres. As an example can be mentioned the creation of the kebyar dances by the Balinese dancer-choreographer I Maria, and the *golek Menak* dances created by the late Sultan Hamengkubuwana IX, assisted by a team of court dance masters.

### To Compose in Dance

The term "choreographer" was coined in the western world, in societies where creation in art has been mostly considered as an individual responsibility. In the 'eastern' world, individual masters in art do emerge

---

\*) Keynote Speech for *Indonesian Dance Festival - Conference*, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 26--31 July 1996



from time to time, but they work mostly in a more collaborative atmosphere. Copying from his work is not regarded as a crime, but as a proof of an acknowledgement of his excellence by his fellow artists. Sharing of ideas became the general rule, and yet the master's lustre will glow naturally. That, constitutes the traditional situation.

A traditional system of art is constructed anonymously, as an accumulation of findings and creations that are brought forth from time to time, fitted into the existing system through a maintenance of the accepted range of values within the society concerned. These "accepted range of values" are translated into a specific set of norms and technique for each branch of art, among others music and dance. Criteria of beauty are symbolic manifestations representing the basic mental attitudes regarded as correct within a society.

A contradicting stance against tradition is, on the contrary, the typical attitude of modernism. To find things outside the normal path becomes the rule, both in modern and contemporary art. The thrive to find new forms of expressions, new principles of composition, and even new sources of sound and movement, is always there at the center of the creative field, within which the contemporary artists work to find their freedom.

It is worth noting at this point that in countries like Indonesia where traditions abound and have been instrumental in forming a nation's identity, cultural life, including art, has two sources of vitality, namely the values brought forth through traditional channels, and the values of progress and modernization. On the other hand, in countries like the United States of America, where explorativeness has been the main value and no indigenous tradition prevails, it is indeed natural that no esteem towards tradition is promoted. However, having our view expanded beyond the boundaries of nations, we have to admit that we are living in a world with a multitude of nations, each with their own cultural particularity.

### **On Cultural Boundaries,**

In human life in this world there has always been the dynamics between multifariousness and universalness. It has been the preoccupation of students of culture to seek empirical knowledge, and henceforth to establish concepts and build theories, with the ultimate goal of among others explaining that

very dynamics in cultural development. The sheer fact of variousness of cultures in the world, however, does not hamper the adherents of one culture or another to pursue the claim that his particular culture is the bearer of universal values. Viewed from a scientific angle, it is widely acknowledged that such a claim is at odds with empirical facts. Nevertheless, historical facts have shown to us too that those kinds of a claim, from era to era, have yielded an appearance of being true, due to ideologies that were (and are) promoted through forceful and determined political endeavours.

Let us reflect for a while on the meaning of culture in human life. Culture, the core of which comprises the value system and the conglomerate of basic concepts within it, is an integrated set of ideas to which members of the respective society orient their behaviour. As such, culture should be considered as a grace of God, by which man is given the chance to direct his own deeds and give a meaning to his own life. Culture is the property, as well as the boundary, of a society. Albeit, the boundaries of cultures are flexibly shifting within the course of the history of societies.

The most explicit unit of bearers of a specific culture is the ethnic group. The very term "ethnic" (from Greek *ethnikos*, meaning "foreign, of a national group"), implies a distancing from, and also suggesting a lower scale than, one's own culture. It happened to be used initially in European discourse. Hence, the science of Ethnography and Ethnology used to deal with 'foreign', non-European societies. The change of name into Anthropology indicated the change of attitude of the scientists: they began to regard different societies with specific cultures within Europe itself, even the mainstream 'general' European culture, as ethnic too.

A cultural unity may also center around a religion which from the very onset was meant to be followed by all people of the world, irrespective of their ethnicity or nationality. The core of these great religions consists of the dogma, or a set of doctrines, the actualizational rules of which form the characteristics of the respective religion. However, the further implementations of those doctrines may partly be adapted in a special manner within each different society. Thus, varieties of expressions of the same doctrines may be observed from place to place.

Since peoples of the world are moving spatially, and interact mentally and physically, either in a faster or a slower pace, the lines of boundary

between cultures may shift, or overlap. There are even many examples of largescale migrations or colonizations into lands that are already inhabited. Those migrations or colonizations had often brought forth a superimposition of one culture upon another. The resulting amalgamated social unity out of those migrational and colonizational processes became then multicultural. However, multiculturalism is not only present as the outcome of such processes. There are other conditions, other processes of state formation that can also bring about a multicultural society

### **Addressing Multiculturalism**

Social and cultural situations are empirical facts, which can however, be either analyzed scientifically, or addressed to in a political perspective. The present political perspectives regarding multiculturalism vary from country to country, and even from group to group within a society. Advocacy is often given to the "indigenous", the "ethnic", or the "minorities", which are mostly identified with each other. However, the advocate often use the paradigm of the majority, and thus giving the impression of a patronizing agent. Contrary to advocacy, there are sometimes pressures directed towards those "ethnic minorities" that are considered as not willing to conform to the so-called "general norm".

What is considered as the general norm within a multistate unity is determined by the holder of hegemony. It is the hegemonic voices that construct the set of basic norms and its derivatives. Even the rules regarding its procedure of implementation are often set up by the hegemony holder, and thus often claimed to be universal. A historical fact that could be made an illustration for this thesis is the mental structures and related rules of behaviour that have been implanted in colonized societies through the colonists' western education system. It goes without saying that some parts of those constructions introduced by colonizers have been adopted by the colonized people and incorporated within their culture. Some other parts of the constructions are, however, modified to meet the specific needs, taste and feelings of the receiving people.

Within a multicultural social entity, when the different cultures interact in a mutually beneficial mode, pluralism is very likely to exist. That social entity as a whole contain several cultural units, each of which offering values,

sets of norms and concepts, that can be referred to, even chosen, by members of the whole social entity. Put in another way, there is a multiple sources of values, norms, and concepts within that social entity. That multitude of sources makes a man either be able to jump from one source to another, from time to time, depending on the demand of a certain situation, or he can be a bi-cultural, or even tri-cultural man permanently.

### **The Choreographer's Choice**

When a contemporary choreographer is attracted by, or feels intrigued by a certain artistic tradition, there are three possible levels of interaction with the tradition concerned that he will likely be involved, namely on the levels of philosophical concepts, of aesthetic concepts, and of techniques referring to the specific style of the tradition.

Confronting another culture, or dealing with more than one culture of one's own, an artist is assigned a free choice among a multitude of modes of operation. The involvement with another culture in the process of creative work can either be deep or shallow, either all-pervading or segmental, depending both on the intention or scheme of the work, and the familiarity with the 'guest' culture. On the whole, people keep on fulfilling their needs to express and to interpret, using any possible opportunity. It is these problems of inter-cultural dialogue in artistic creation that is to be discussed as one among the topics of this conference.

### **Research in Dance**

Another topic is research in dance. Methodologies, approaches, and theories are needed as it is in other fields of study. They are either to be applied or developed. Problem areas in the study of dance can be categorized into: firstly, structural and or functional studies; secondly, historical studies; and thirdly, comparative studies.

Within the first category approaches can be made from either an anthropological, social, psychological, as well as philosophical perspectives. Historical studies need an historical perspective and the relevant methodologies. However, as dance is an element of culture, as it is also a platform for behaviour, a researcher of dance history is also required to have

a deep understanding of social as well as cultural processes. Still other problems are solved by comparative studies: it can be problems related to cultural boundaries (to be solved by mono-disciplined comparative study), or problems related to co-relationships between different elements of culture (to be solved by multidisciplined comparative study).

Conferences like the present one is supposed to bring together the fruits of both creative works of dance and scientific works on dance. Both sides have their own, specific, methods of reaching their respective goals. Experience in aesthetic explorations and subjectivity comprise the basis for the artist's work, while the dance researcher has to be objective and responsible for every scientific step he is making. I do hope that mutual appreciation between the artist and the researcher will enhance the atmosphere of this Indonesian Dance Festival.

Jakarta, 26 July 1996

## **KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN<sup>\*)</sup>**

Adalah suatu kebetulan yang tepat bahwa program studi S2 Kajian Budaya yang pertama di Indonesia, yang dipelopori oleh Universitas Udayana ini, dimulai pada tahun akademik 1996/1997, karena pada tahun 1997 direncanakan oleh UNESCO untuk menyelenggarakan sebuah "World Summit" mengenai "Culture and Development", suatu tema yang menunjukkan betapa perhatian khusus terhadap kebudayaan dianggap sesuatu yang amat penting dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan berbagai usaha "pembangunan" ini.

Sebagai sebuah program studi strata dua, program studi Kajian Budaya ini sudah tentu dituntut untuk menguak batas-batas disiplin yang pada program strata satu biasanya sudah diberikan secara amat ketat, sehingga masing-masing disiplin amat tegas membatasi dirinya, khususnya dalam metodologi. Kadang-kadang keketatan dalam menjalankan ilmu yang pertama kali dipelajari itu dapat mengakibatkan apa yang disebut "trained incapacity", yaitu ketidak-mampuan untuk melihat alternatif kebenaran ilmiah karena justru telah amat terlatih dengan ketat dalam sebuah disiplin ilmu saja. Harapan saya adalah bahwa program studi Kajian Budaya ini dapat berfungsi sebagai jendela yang lebih besar bagi para pesertanya, dan tidak justru hanya membuat sebuah kotak baru yang 'kedap air', yang tidak siap untuk memperhitungkan keanekaragaman teori dan metodologi yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam mempelajari kebudayaan.

### **Aneka Teori**

Kata "keanekaragaman" mungkin dapat digunakan sebagai kata kunci dalam kajian budaya. Hal itu berkenaan baik dengan perangkat ilmiah untuk mengkaji, maupun dengan substansi kebudayaan yang hendak dikaji itu sendiri. Ke dalam perangkat ilmiah termasuk konsep, teori, dan metodologi. Teori-teori kebudayaan, meskipun oleh penyusun dan pembelanya masing-masing wajar apabila dianggap yang paling tepat dan dinyatakan sebagai

---

\*) Makalah disampaikan pada kuliah perdana Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, 2 September 1996.

berlaku universal, namun dalam pandangan umum sebuah 'bazaar' ilmu seperti universitas ini, mestilah ditempatkan sebagai alternatif dalam pemecahan permasalahan ilmu-ilmu budaya. Sudah tentu, konsep-konsep yang menyangga teori-teori itu dapat atau harus bermakna universal, karena posisi itulah yang sesungguhnya memungkinkan ilmu untuk dapat bergulir terus sebagai suatu proses dialog, baik dialektis maupun akumulatif, dalam mencari kebenaran-kebenaran ilmiah.

Sebagai contoh mengenai hubungan antara konsep dan teori dapat diambil fakta dari khasanah pemikiran keagamaan yang kiranya akrab bagi masyarakat Bali. Contoh ini menunjukkan bahwa konsep adalah pengertian-pengertian dasar yang berlaku umum, tetapi dapat didudukkan secara khusus dalam situasi relasional ataupun struktural di dalam teori yang berbeda, yang pada akhirnya juga menuntut metode penalaran yang berbeda pula. Contoh yang saya maksudkan saya ambil dari masa pertumbuhan pemikiran Upanisad dan ajaran awal agama Buddha. Konsep *ātman*, *māyā* dan *samsara* dipakai dalam pengertian dasar yang sama dalam kedua ajaran keagamaan tersebut. Namun teori yang membingkai konsep-konsep tersebut berbeda pada kedua ajaran itu. Upanisad, khususnya pada jalur pemikiran Vedānta, mengajarkan bahwa *ātman* yang diartikan sebagai "jiwa dalam diri manusia" itu sebenarnya tidaklah berbeda, melainkan identik belaka dengan kebenaran mutlak, yaitu "jiwa semesta" yang disebut Brahman. Keterpisahan antara keduanya adalah semu belaka, dan sebagaimana seluruh wujud fisik yang seolah-olah menampakkan diri di dunia ini, sebenarnya adalah *māyā*, atau tipuan belaka. Apabila manusia masih terjerat di dalam alam tipuan itu maka ia akan tetap berada dalam rantai kelahiran yang disebut *samsara*. Ajaran Buddha memberikan 'teori' yang berbeda. Alam fisik dan alam jiwa (*ātma*) keduanya adalah *māyā*, seolah-olah ada tetapi sebenarnya tidak ada. Kebenaran mutlak, yang ada di luar keduanya, adalah *nirvana*, yaitu ketiadaan yang mutlak: tidak fisik tidak ruh, tidak positif tidak negatif, tidak ada dan tidak tak ada. Selama manusia tidak sadar akan kebenaran itu ia berada di dalam jeratan *samsara*, sedangkan cara untuk melepaskan diri dari jeratan tersebut adalah dengan menjalani langkah-langkah penyadaran melalui metode yang telah dirumuskan secara khusus dalam ajaran yang bersangkutan.

Contoh dari wacana ilmiah dapat diberikan dengan menunjuk kepada konsep-konsep "kebudayaan", "perubahan budaya", dan "inti budaya". Pengertian "kebudayaan" dipahami sebagai berada di sekitar rumusan sebagai

berikut, yaitu: "keseluruhan hasil pemikiran manusia (baik berwujud pengertian, pola tingkah laku, maupun benda hasil karya manusia) yang diterima sebagai milik bersama dalam suatu masyarakat". Adapun "perubahan budaya" adalah perubahan-perubahan yang terjadi atas kebudayaan, yang dapat dilihat sebagai akibat dari berbagai 'kejadian' atau proses pada suatu bangsa, di mana terkait pula berbagai konsep lain, dalam rangka teori yang berbeda-beda, untuk menjelaskan perubahan tersebut. Mengenai pengertian "inti budaya" terdapat pengertian pokok, yaitu "unsur atau unsur-unsur terpenting dalam kebudayaan yang dianggap merupakan penentu identitas budaya, atau dianggap juga yang merupakan pendorong bagi terbentuk, bertahan, maupun berubahnya kebudayaan". Namun, meskipun pengertian-pengertian dasar tersebut dipahami secara sama oleh banyak sarjana, penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa kebudayaan berubah, maupun apa yang dilihat sebagai "inti budaya" ternyata dapat berbeda-beda, bergantung kepada teori yang disusun dan dipakai sebagai landasan penjelasan atas pokok-pokok bahasan tersebut.

Secara ekstrem teori-teori kebudayaan bergerak antara dua kutub, yaitu kutub idealistik dan kutub materialistik. Teori pada kutub idealistik menjelaskan bahwa inti budaya terdiri atas konsep-konsep dan nilai-nilai yang merupakan penanda budaya suatu bangsa dan melandasi kehidupan bangsa tersebut, dan selanjutnya, terjadinya perubahan-perubahan yang berarti dalam kebudayaan tersebut digerakkan oleh rangsangan-rangsangan yang bersifat mengubah konsep-konsep dasar dan nilai-nilai tersebut. Menurut penalaran teori ini, maka perubahan masyarakat prasejarah di Jawa menjadi masyarakat Hindu-Buddha pada waktu yang lalu, misalnya, disebabkan oleh daya tarik ajaran keagamaan, yang sarat dengan konsep-konsep dan nilai-nilai baru. Dengan mantapnya penerimaan perangkat konsep dan nilai baru itu barulah masyarakat yang bersangkutan siap untuk melaksanakan pola-pola tindakan dan membuat benda-benda budaya yang bercitra Hindu-Buddha, namun sekaligus merupakan bagian dari wujud budaya dari masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Berbeda dengan itu, pada kutub teori yang bersifat materialistik, yang dianggap "inti budaya" adalah hal-hal yang segera harus dilakukan manusia (secara kurang lebih mekanistik) untuk menanggapi kondisi fisik-material di mana ia hidup. Dengan demikian maka teknologi dan pola-pola tindakan ekonomik adalah inti budaya, dan ini lah yang selanjutnya dianggap



membentuk pemikiran-pemikiran yang sesuai untuk itu. Kalau teori semacam ini yang diikuti, maka kejadian sejarah kebudayaan yang sama, yaitu berubahnya masyarakat Jawa prasejarah menjadi masyarakat Jawa yang bercitra Hindu-Buddha, haruslah dengan susah payah dibuktikan bahwa yang menyebabkan berkembangnya konsep-konsep dan nilai-nilai Hindu-Buddha adalah karena pada mulanya orang Jawa terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonomiknya melalui perdagangan dengan bangsa-bangsa yang membawa serta agama Hindu dan Buddha ke Jawa. Apabila penalaran tersebut hendak diikuti, agak sulit lah kiranya untuk menjelaskan mengapa orang Jawa prasejarah tidak berubah menjadi bercitra Cina, padahal pada masa yang sama jalinan perdagangan dilakukan baik dengan orang Cina maupun India.

Berkaitan dengan alur penafsiran yang dapat berangkat dari dua kutub teori ini, kita dapat bedakan pula dua penjelasan mengenai proses perubahan kebudayaan. Di satu sisi perubahan kebudayaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang terjadi secara mekanistik, di mana dapat dicari rumus-rumus mengenai hal-hal apa yang mengakibatkan proses-proses apa. Arah penelitian seperti ini umumnya dianut oleh mereka yang cenderung kepada teori-teori materialistik. Mereka cenderung pula untuk mencari hukum-hukum yang berlaku umum. Sebaliknya, di sisi lain, perubahan kebudayaan dapat pula dilihat sebagai suatu proses historik, yang terjadi karena dalam situasi-situasi yang unik manusia membangun cita-cita dan menentukan kemauannya untuk menuju ke arah tertentu yang ia pilih. Dalam pandangan ini, adalah absurd untuk mencari 'hukum-hukum' bagi pemahaman sejarah. Sistematisasi dan kategorisasi paling jauh yang dapat dilakukan adalah identifikasi pola-pola atau tipe-tipe.

### **Aneka Budaya**

Wawasan multikultural dalam dasawarsa terakhir ini banyak sekali ditampilkan dan dianjurkan dalam berbagai forum. Namun sebenarnya perlu disadari bahwa situasi aneka budaya itu tidak sama di semua negara, meskipun sama-sama mempunyai keanekaragaman budaya. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengulang apa yang pada tahun yang lalu telah saya sampaikan mengenai multikulturalisme dalam dua pertemuan internasional, yaitu dalam kesempatan Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok dan pada kesempatan "Art Summit Indonesia 1995:

Music and Dance". Masalah ini kiranya relevan sebagai sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk dijadikan subyek kajian bagi tesis Kajian Budaya ini.

Hal pertama yang perlu dibahas adalah "batas-batas kebudayaan". Dalam kehidupan manusia di dunia ini selalu terdapat dinamika antara keanekaragaman dan keuniversalan. Para sarjana Ilmu-ilmu Budaya senantiasa menghimpun pengetahuan empiris, dan di atas itu menetapkan konsep-konsep dan membangun teori-teori, dengan tujuan utama antara lain untuk memberikan penjelasan mengenai dinamika tersebut. Namun juga, meski terdapat kenyataan bahwa di dunia ini terdapat aneka warna kebudayaan, orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu tidak merasa terhalang untuk menuntut pengakuan bahwa kebudayaannya sendiri jua lah yang merupakan pendukung dari nilai-nilai yang universal. Dilihat dari sudut kenyataan-kenyataan ilmiah, tuntutan seperti itu sudah jelas tidak berdasar. Walaupun demikian, kejadian-kejadian sejarah menunjukkan pula bahwa tuntutan-tuntutan seperti itu dari masa ke masa berhasil menumbuhkan kesan seolah-olah benar, sebagai akibat dari ideologi yang ditanamkan melalui upaya-upaya politik yang kuat, dan tidak jarang pula keras, baik bersarana senjata maupun media massa.

Kebudayaan mempunyai makna tertentu dalam kehidupan manusia. Inti budaya yang berupa sistem nilai dan perangkat konsep-konsep dasar, adalah suatu gugusan pemikiran yang terintegrasi, yang menjadi pengaruh bagi perilaku manusia dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengikuti penalaran ini, kebudayaan haruslah dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan apa manusia diberi peluang untuk mengarahkan tindakannya dan memberi makna kepada hidupnya. Kebudayaan adalah isi dan juga batas-batas dari suatu masyarakat. Batas-batas ini lah, yang sepanjang perjalanan sejarah masyarakat-masyarakat, dapat senantiasa berpindah dan bergeser dengan lenturnya. Karena manusia-manusia, atau bangsa-bangsa, di dunia ini bergerak melintasi ruang, dan berinteraksi satu sama lain secara fisik dan mental, dalam irama yang lebih cepat atau lebih lambat, maka garis-garis batas antara budaya itu dapat bergeser dan bahkan bertumpang tindih. Dalam sejarah manusia terdapat juga contoh migrasi besar-besaran, yang disertai kolonisasi, di kawasan-kawasan yang sudah berpenghuni. Hal itu kadang-kadang berakibat penindihan budaya oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Hal kedua yang perlu dikemukakan adalah mengenai adanya tiga tipe negara dalam hubungannya dengan keanekaragaman budaya yang dikelolanya. Penggolongan ini menggunakan perspektif sejarah. Tipe **pertama** adalah yang bermula dari upaya pembangunan *imperium*. Imperium itu terdiri dari sejumlah negara, umumnya kerajaan-kerajaan, yang mula-mula masing-masing merupakan negara bebas. Negara-negara tersebut, yang berada di bawah kekuasaan dan pemantauan dari kaisar dan pemerintahannya, tetap dapat merupakan kelompok-kelompok etnik yang terpisah satu sama lain, atau dengan kata lain, mereka mempunyai kebudayaannya masing-masing, yang dapat amat berbeda dengan kebudayaan yang dianut kaisar. Dengan mengambil kekaisaran Roma sebagai contoh, dapat dilihat bahwa di dalam cakupannya yang luas itu terdapat berbagai macam bangsa dengan kekhasan budayanya, namun demikian dapat pula diamati adanya suatu ciri Romawi yang kentara pada berbagai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di seantero wilayah kekuasaannya. Ketundukan terhadap ke-Romawian rupanya merupakan suatu pernyataan penghormatan kepada sang penguasa besar. Kebudayaan 'lokal' yang banyak itu seakan-akan dipinggirkan untuk memberi tempat kepada kebesaran kekaisaran Romawi. Dengan demikian, meskipun kebudayaan-kebudayaan lokal itu sebenarnya ada, mereka tidak diberi pengakuan yang nyata.

Tipe **kedua** adalah negara yang terjadi melalui suatu proses kolonisasi dan pendudukan. Tanah-tanah yang amat luas diduduki oleh gelombang demi gelombang para migran, dan ini mengakibatkan berbagai konfrontasi, besar ataupun kecil, dengan penduduk asli di tempat-tempat yang mereka duduki tersebut. Sesudah suatu jangka waktu panjang dari kolonisasi yang semakin meluas, dan jika kemudian dibentuk sebuah negara dengan para kolonialis sebagai mayoritas dan pemegang kekuasaan, maka situasi budaya di negara seperti itu pun terbentuk dengan tegas: para kolonialis didudukkan sebagai pendukung kebudayaan arus atas (*mainstream*) dalam negara tersebut, sedangkan penduduk asli bersama kebudayaannya digeser ke bawah dan ke tepi.

Dalam negara tipe kedua ini keanekaragaman budaya dapat berkembang secara rumit. Kadang-kadang pertikaian budaya tidak hanya terjadi antara pendatang dan penduduk asli, melainkan juga di antara sesama pendatang. Contoh negara tipe kedua ini adalah The United States of America, Canada, dan Australia, di mana diskusi mengenai pertikaian-pertikaian tersebut

banyak dilakukan. Bahkan, isu *multiculturalism* itu sendiri berasal dari negara-negara tersebut, yang rupanya sangat menyadari akan problematik yang ditimbulkannya.

Tipe terakhir, **ketiga**, adalah negara di mana keanekaan budaya itu terdapat berlandaskan prinsip penyatuan dan persatuan. Dalam tipe negara ini, sejumlah kelompok etnik bergabung dan menyatukan diri untuk membentuk satu negara, dan sejalan dengan itu membentuk suatu bangsa baru, bangsa kesatuan. Keputusan tersebut dilandasi oleh pengakuan akan adanya cita-cita bersama untuk masa depan, kesamaan latar belakang sejarah, serta kedekatan budaya. Sebagai contoh dapat disebutkan negara-negara Indonesia, India, dan Thailand. Dalam kasus Indonesian, lebih dari 300 kelompok etnik, besar dan kecil, dihimpun ke dalam sebuah bangsa baru dalam sebuah negara baru. Di dalam negara baru ini, masing-masing kelompok etnik mempunyai status yang sama di dalam kesatuan. Ini berarti bahwa bangsa baru ini tidak mengenal dikotomi mayoritas-minoritas.

Kenyataan itu berbeda dengan apa yang terdapat di negara-negara tipe kedua, di mana yang diberi label "minoritas" adalah kelompok-kelompok etnik, yang dibedakan dari kelompok terbesar yang berkuasa. Berkaitan dengan itu, maka antara negara tipe kedua dan tipe ketiga terdapat pula perbedaan makna yang diberikan terhadap etnisitas. Perbedaan itu tampak pada penggunaan istilah "primordialisme" pada negara tipe kedua. Di negara-negara itu primordialisme dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyiratkan keengganan untuk dengan sepenuh hati bergabung dalam negara baru itu. Istilah itu diasosiasikan pula dengan sifat terbelakang dan tak mampu mengikuti tuntutan zaman modern. Berbeda dengan itu, dalam negara-negara tipe ketiga yang didasari oleh gagasan persatuan, penghargaan terhadap ikatan-ikatan primordial dianggap sebagai sesuatu yang perlu dan positif, karena ikatan itu memberikan rasa berakar dalam kebudayaannya sendiri, yang pada gilirannya dirasakan juga sebagai akar budaya bersama dalam cakupan bangsa persatuan yang baru. Perbedaan pemaknaan mengenai primordialisme ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam negara-negara tipe kedua tanah asal dari masing-masing kelompok etnik pendatang itu berada di luar negaranya yang sekarang, sedangkan pada negara-negara tipe ketiga tanah asal dari masing-masing kelompok etnik tetap berada dalam cakupan wilayah negaranya yang baru.

## **Kebudayaan dan Pembangunan**

Program UNESCO, Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (*World Decade for Cultural Development*) yang berlangsung tahun 1988-1997 ini mengamanatkan pesan kepada dunia bahwa tujuan pembangunan apapun hendaklah demi kesejahteraan manusia, dan pembangunan di manapun hendaknya berwawasan budaya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pesan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Pesan tersebut ditujukan kepada para eksekutif, baik yang memegang kendali pemerintahan maupun mereka yang menjalankan kehidupan perekonomian. Adapun yang semestinya tersirat di sana adalah bahwa untuk membubuhkan 'wawasan budaya' itu seringkali masih lebih dahulu diperlukan penelitian. Dalam hal ini lah kiranya program studi Kajian Budaya dapat memberikan sumbangannya.

Kajian-kajian monodisiplin yang mempelajari suatu aspek budaya khusus secara amat mendalam dapat bermanfaat untuk mengingatkan bahwa ada kedalaman di dalam kenyataan budaya, bahwa senantiasa ada alasan untuk setiap tindak budaya. Analisis teks, analisis artefak, analisis tingkah laku, adalah wilayah-wilayah garapan yang dapat diberi perhatian khusus. Satuan-satuan analisis yang khusus itu dapat pula dilihat secara lintas budaya, direntang dalam kajian bandingan. Beberapa pertanyaan yang dapat dijawab melalui kajian bandingan lintas budaya itu adalah antara lain mengenai batas-batas antara budaya, mengenai tipologi dalam keanekaragaman budaya, serta mengenai keterkaitan antar budaya. Kearifan mengenai hubungan-hubungan budaya ini pada gilirannya dapat menunjang pengambil keputusan untuk menentukan strategi dalam pelaksanaan program-program kependudukan, misalnya.

Di samping itu suatu pemahaman total mengenai suatu satuan kebudayaan seharusnya juga amat dibutuhkan untuk menunjang program pembangunan pada kelompok yang bersangkutan, agar kelompok tersebut dapat membangun sambil benar-benar tumbuh dari dalam. Untuk pemahaman yang demikian itu, yaitu yang hendak melihat masyarakat atau suku bangsa dalam keseluruhannya dan dalam suatu keutuhan yang terintegrasi, seringkali dibutuhkan penelitian yang bersifat multidisiplin dan atau interdisiplin. Pengambil keputusan dalam rangka program pelestarian budaya seharusnya amat memerlukan hasil kajian-kajian semacam ini.

Apabila pembangunan memang ditujukan ke arah kekuatan bangsa, yang berarti tidak hanya kesejahteraan fisiknya yang terjamin, melainkan juga, dan lebih-lebih kesejahteraan batinnya, dan itu berarti kekuatan agama dan budayanya, maka kiranya cukup banyak tantangan yang dapat dijawab oleh program studi Kajian Budaya universitas Udayana ini!

## **BAHASA DAN SASTRA JAWA : MENYONGSONG MASA DEPAN DAN MENYIKAPI HARI INI \*)**

Permasalahan yang dihadapi bahasa Jawa dewasa ini sudah tentu tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi bahasa-bahasa suku bangsa lain di dalam tubuh bangsa Indonesia ini. Di satu sisi eksistensinya perlu dipertahankan walau dalam konteks persatuan bangsa baru, bangsa Indonesia, yaitu sebagai wujud kebinekaan dari semboyan *bhinneka tunggal ika*, namun di sisi lain perubahan-perubahan kemasyarakatan yang terjadi dari waktu ke waktu mengharuskan bahasa-bahasa 'daerah' itu senantiasa menyesuaikan diri dan menata ulang posisinya di dalam masyarakat yang berubah itu.

Perubahan masyarakat itu sendiri dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang didorong oleh dua macam penggerak, yaitu gerakan politik dan mekanisme pasar. Sebuah gerakan politik yang besar dalam sejarah Indonesia, yang merupakan momentum bagi perubahan kemasyarakatan yang besar pula, adalah gerakan kebangkitan nasional yang mencapai puncaknya pada pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia dari semua bekas penjajahnya, serta kemudian disusul oleh berbagai program kebangsaan untuk memperkuat kedaulatannya di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Program-program untuk memperkuat diri sebagai satu bangsa yang berdaulat itu, dalam wadah sebuah negara-bangsa, pada dasarnya mempunyai dua aspek yang sama pentingnya, dan saling menunjang, yaitu aspek kejiwaan dan aspek kebendaan.

Segi kebendaan yang telah dibangun bangsa Indonesia dengan berhasil selama ini, 'khususnya pada periode Orde Baru, meliputi berbagai sarana dan prasarana yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Di sisi lain, segi kejiwaan yang telah dibangun atas bangsa Indonesia meliputi perasaan kebangsaan yang di masa lalu telah berhasil membangkitkan semangat perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, dan pada masa-masa selanjutnya untuk mengatasi berbagai macam ancaman perpecahan. Termasuk ke dalam segi kejiwaan dalam pembangunan bangsa dan usaha bina negara itu adalah juga kesadaran sejarah dan kesadaran berjatidiri budaya. Bangsa Indonesia perlu senantiasa

---

\*) Makalah Kunci Kongres Bahasa Jawa, Malang/Batu, 22-26 Oktober 1996.

menguatkan niat dan mencegah kelengahan dalam menginternalisasikan penghargaan yang tinggi dan kecintaan kepada budaya bangsanya sendiri. Ke dalam pengertian "budaya bangsa" ini termasuk bahasa nasional, bahasa Indonesia, beserta semua bahasa suku-suku bangsa yang juga merupakan kekayaan warisan bangsa secara keseluruhan. Di antara khasanah warisan bangsa itu lah terdapat pula bahasa dan sastra Jawa yang akan kita bahas dalam kongres ini. Dalam perkembangan kebudayaan nasional Indonesia bahasa-bahasa 'daerah', yang telah terbentuk melalui proses berabad-abad itu, mempunyai peranan baik sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia maupun sebagai pemberi rasa berakar bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bahasa Jawa, di antara bahasa-bahasa suku bangsa lain di Indonesia, tergolong yang terbanyak penuturnya dan terpanjang masa perkembangannya yang terliput oleh data tertulis. Abad ke-8 Masehi telah memberikan data tertulis tertua mengenai bahasa Jawa Kuna, yaitu pendahulu dari bahasa Jawa yang kita kenal sekarang. Hubungan keterkaitan yang tepat antara Bahasa Jawa Kuna dan Bahasa Jawa yang kita kenal sekarang ini merupakan sebuah masalah akademis yang masih memberikan peluang untuk dikaji lebih jauh. Kiranya berbagai faktor sosial-politik mempunyai peran yang menentukan dalam proses tersebut. Hal itu insya'Allah akan kami bahas dalam kesempatan lain. Satu hal yang sudah dapat dipastikan adalah bahwa khasanah sastra Jawa Kuna pada umumnya diwarisi oleh para pendukung sastra Jawa yang kemudian, sampai hari ini. Kosakata bahasa Jawa Kuna pun, untuk sebagian terbawa serta ke dalam bahasa Jawa kini, walau seringkali telah mengalami pergeseran dalam bunyi maupun arti.

Adapun penutur bahasa Jawa ini telah meluas ke luar dari daerah asalnya. Berbagai program migrasi suku bangsa Jawa, sejak zaman kolonial, telah membuat terjadinya kelompok-kelompok orang Jawa di luar pulau Jawa dan bahkan di luar Indonesia seperti di Suriname dan Nieuw Caledonie. Orang-orang Jawa itu, apabila pergi bermigrasi beserta keluarganya dan dalam kelompok-kelompok yang cukup besar, dapat dipastikan akan membawa serta budayanya, termasuk bahasanya. Pada dasarnya, manusia merasa lebih aman hidup batinnya apabila ia berpeluang mempunyai jatidiri budaya. Dalam hal bangsa Indonesia, jatidiri budaya itu pada umumnya ganda, yaitu budaya suku bangsa dan budaya nasional Indonesia. Kondisi kegandaan ini bervariasi dan bergradasi. Untuk kasus orang Jawa, khususnya



akan dilihat bagaimana gambaran umum mengenai pendukung dan penggunaan bahasanya.

### **Pendukung Bahasa Jawa**

Kalau disimak komponen masyarakat Jawa, artinya himpunan manusia yang mengaku berbudaya Jawa, maka akan dapat selanjutnya dilihat bahwa keterlibatan mereka dari masing-masing komponen itu terhadap pelestarian bahasa Jawa tidaklah sama. Dengan mengambil asumsi bahwa semua orang Jawa di Indonesia dapat berbahasa Indonesia, maka seluruh populasi orang Jawa tersebut dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pertama, mereka yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama, dalam arti mereka mulai belajar bicara dalam bahasa Jawa dan dalam pergaulan sehari-harinya lebih banyak menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia; dan kedua, mereka yang mulai belajar bicara dalam bahasa Indonesia dan sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa, walaupun mereka adalah bagian dari keluarga Jawa. Golongan yang disebut terakhir ini banyak diisi oleh generasi muda keluarga Jawa yang tinggal di kota-kota besar, khususnya di luar Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kalaupun mereka kemudian belajar bahasa Jawa, perolehannya adalah sebagai bahasa kedua.

Adapun golongan penutur bahasa Jawa sebagai bahasa pertama murni dapat pula dibedakan ke dalam beberapa kategori yang berkaitan dengan kedudukan sosial masing-masing. Pertama adalah para pemangku adat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Jawa lama. Mereka ini adalah para raja beserta keluarga dan semua pejabat di istana-istana para raja tersebut. Mereka menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan upacara-upacara. Bahasa Jawa dalam kelompok ini dikenal dalam tata tingkat tutur yang selengkap-lengkapnyanya. Kelompok kedua adalah kaum terdidik yang dalam masa belajarnya pernah diberi pelajaran mengenai bahasa dan aksara Jawa sehingga mereka mengetahui berbagai kaidah tata bahasa, gaya bahasa, dan penggunaan tingkat tutur, walaupun dalam kehidupannya sehari-hari mungkin tidak menggunakannya secara penuh. Mereka ini sebenarnya mempunyai potensi untuk berperan sebagai pembina bahasa Jawa. Adapun kelompok terakhir adalah bagian terbesar kaum tani dan mereka yang tinggal di pedesaan. Pengetahuan bahasa Jawa mereka pada umumnya terbatas, penggunaan kaidah tingkat tuturnya

tidak pas. Namun karena mereka adalah pengguna intensif dari bahasa Jawa, maka mereka sebenarnya adalah juga komponen strategis untuk melestarikan bahasa Jawa, khususnya apabila pengetahuan bahasanya ditingkatkan.

Golongan kedua pendukung bahasa Jawa, yaitu yang hidup dalam keluarga Jawa tetapi perolehan bahasa Jawanya adalah sebagai bahasa kedua, adalah golongan yang secara umum memperlihatkan potensi mengurangi populasi penutur aktif bahasa Jawa, walaupun mungkin lebih dalam skala proporsi daripada bilangan. Golongan ini pada umumnya merasa bahwa untuk keperluan sehari-hari bahasa Indonesia sudah mencukupi kebutuhannya, dan dalam pengembangan pemikiran pun bahasa Indonesia telah memberikan pemuasan. Dengan demikian apabila mereka toh merasakan kebutuhan untuk memahami bahasa Jawa dalam keseluruhan kecanggihannya, itu adalah untuk peningkatan perkembangan pribadinya sebagai seorang yang memperhatikan budaya, sebagai suatu bonus di atas keperluan kesehariannya. Pertanyaannya adalah, perlukah diadakan perangsangan untuk meningkatkan jumlah para 'pencari bonus' itu?

### **Penggunaan Bahasa Jawa**

Dari segi penggunaannya dapat dibedakan antara penggunaan bahasa Jawa untuk percakapan sehari-hari, sebagai bahasa resmi, dalam kesusasteraan, dan dalam seni pertunjukan. Peluang untuk pelestarian bahasa Jawa dapat ditinjau dari sudut aneka macam penggunaan tersebut.

Penggunaan untuk keperluan percakapan sehari-hari dewasa ini telah banyak mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Hal ini tentulah memerlukan penyikapan yang jelas dari para pembina bahasa. Di satu sisi, pengaruh dari luar terhadap suatu bahasa adalah wajar. Batas kewajaran itu adalah pada penyerapan kosa kata dan pengambil-alihan konsep ketatabahasa dan gaya bahasa yang bersifat memperkaya, tetapi tidak bertentangan dengan atau mengacaukan kaidah-kaidah bahasa penerima. Apabila terjadi pengacauan kaidah, yang memang tidak jarang terjadi, maka usaha-usaha 'pelurusan' harus segera diambil. Di sinilah program-program "pelajaran bahasa Jawa" perlu mengambil peranan, baik melalui lembaga formal kependidikan maupun melalui media massa.

Penggunaan bahasa di media massa ini sendiri tergolong penggunaan resmi dari bahasa Jawa. Di samping itu penggunaan resmi terdapat pula

dalam pembicaraan resmi (rapat, perundingan, pelamaran, dll.), maupun forum-forum seperti sarasehan, seminar, ceramah, dll. Dewasa ini penggunaan resmi seperti itu cenderung terbatas pada hal-hal yang bersifat kekeluargaan (seperti misalnya pelamaran dan pidato-pidato dalam pesta) dan yang bersifat pembahasan khusus substansi budaya Jawa, seperti sarasehan tosan aji, sarasehan kebatinan, dan macapatan.

Penggunaan jenis ketiga adalah di dalam kesusasteraan. Ungkapan seni sastra ini mempunyai berbagai perwujudan, yang masing-masing mempunyai kecenderungan berbeda dalam hal peminatannya oleh khalayak ramai. Karya sastra murni, baik dalam bentuk prosa maupun puisi, hidupnya sangat bergantung kepada medianya, baik itu surat kabar, majalah, ataupun terbitan lepas. Studi mengenai tiras media tersebut kiranya dapat memberikan gambaran mengenai mengembang atau menyusutnya pendukung aktif dari sastra Jawa. Dapat diperkirakan bahwa kehidupan media berbahasa Jawa sangat bergantung kepada pangsa pasar yang amat khusus.

Keadaan yang lebih baik mungkin dimiliki oleh bahasa dan sastra Jawa yang digunakan dalam berbagai bentuk seni pertunjukan Jawa seperti wayang kulit, wayang golek, wayang wong, langendriyan, ketoprak, dan lain-lain. Daya tarik bentuk-bentuk seni pertunjukan tertentu kiranya masih cukup besar, bahkan di kalangan generasi muda. Di situ lah terdapat peluang yang amat baik untuk pelestarian bahasa dan sastra Jawa, yang di samping dapat berkembang sesuai tuntutan aktualitas, sekaligus dapat menjadi ajang pembinaan "bahasa Jawa yang baik dan benar" serta pembinaan pendalaman pemahaman susastra.

### **Strategi Pembinaan Bahasa dan Sastra Jawa**

Dengan menyimak situasi bahasa dan sastra Jawa seperti yang telah terpapar di muka itu, maka kiranya kongres ini dapat menyarankan strategi yang tepat untuk melestarikan bahasa dan sastra Jawa. Melestarikan dalam hal ini harus difahami dalam pengertian yang dinamis. Nilai-nilai unggul yang sudah ada di dalamnya perlu dipertahankan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan situasi, aktual pun perlu mendapat ruang pengembangan.

Dari segi pendidikan formal kiranya perlu dipertegas pembedaan dua pendekatan metodologis yang kedua-duanya diperlukan, yaitu pengajaran

bahasa Jawa sebagai bahasa pertama dan pengajaran bahasa Jawa sebagai bahasa kedua. Sudah tentu perangkat pendukung, berupa paket bahan-bahan ajar, akan harus dikhususkan untuk masing-masing. Metode pengajaran dan penyediaan bahan ajar ini merupakan pokok garapan tersendiri yang perlu ditangani secara semakin profesional.

Pemberdayaan penutur bahasa Jawa di pedesaan dalam penguasaan kecanggihan bahasa pun dapat merupakan arah kegiatan yang strategis. Dalam hal ini pun diperlukan kepakaran untuk mengemas paket-paket ajar dalam rangka pemberdayaan itu. Ada kemungkinan pula bahwa paket yang sama akan dapat digunakan untuk para remaja kota yang cenderung terasing dari wacana Jawa yang utuh.

Langkah-langkah strategis lain yang perlu dijalani demi pelestarian kehidupan bahasa dan sastra Jawa adalah pendukung terhadap media massa berbahasa daerah, serta perawatan minat terhadap bentuk-bentuk teater berbahasa Jawa. Dalam hal ini produksi kemasan-kemasan apresiatif dan edukatif mengenai substansi tersebut kiranya merupakan suatu keharusan, di samping di sumbernya masing-masing seni pertunjukan itu tetap harus dipelihara vitalitasnya.

Demikianlah sejumlah penglihatan dan harapan yang dapat saya sumbangkan untuk Kongres Bahasa Jawa II ini.

Malang/Batu, 22 Oktober 1996

## **TRANSFORMASI BUDAYA JAWA DALAM KERANGKA DINAMIKA ANTAR PUSAT \*)**

Makalah ini hanyalah suatu usaha untuk menampilkan sebuah permasalahan, dengan sejumlah pertanyaan yang masih harus dijawab dengan pencarian dan peramuan data baru. Daerah permasalahannya ada di dalam sejarah kebudayaan Jawa. Namun, yang hendak diajukan di sini adalah mengenai bagaimana apa yang kini disebut kebudayaan Jawa itu terbentuk, serta faktor-faktor geografik dan politik apa yang kiranya berperan dalam pembentukan variabilitas maupun homogenitas di dalam kebudayaan Jawa itu. Di samping dinamika internal di dalam masyarakat Jawa sendiri, pergaulan dengan pihak-pihak luar, baik dalam kaitan dengan hubungan resmi antar negara maupun dalam skala antar komunitas dan antar manusia, pun diperhitungkan peranannya dalam proses-proses transformasi budaya.

Dilihat dari sudut sejarah kebudayaan, dalam rentang waktu yang amat panjang tampak dengan jelas sekali perubahan dari suatu masyarakat Jawa prasejarah, yang perihwal budayanya pengetahuan kita masih agak samar-samar, melalui perkembangan selanjutnya yang dipimpin oleh orientasi keagamaan Hindu dan Buddha, yang tampak spektakuler berkat data yang cukup banyak dan beragam, selanjutnya menuju ke masyarakat Jawa yang lebih berorientasi kepada agama Islam. Perkembangan terakhir dalam kebudayaan Jawa adalah ketika masyarakat Jawa masuk sebagai sebuah komponen, ke dalam sebuah kesatuan bangsa yang lebih besar, bangsa Indonesia. Sebelum itu, dalam apa yang dapat disebut sebagai sebuah prelude yang cukup panjang, adalah masa ketika pemerintahan kerajaan Jawa dibayang-bayangi oleh kekuasaan kolonial, yang dalam sektor ekonomi secara berangsur-angsur semakin sangat 'mengatur' peri kehidupan orang Jawa, namun secara budaya pengaruhnya sebenarnya hanya bersifat perifer.

Sebelum lebih jauh menimbulkan salah paham, maka dalam pembahasan ini perlu pula ditegaskan adanya dua pandangan mengenai apa yang disebut sebagai "inti budaya". Dalam pandangan materialistik, yang berawal dari teori Karl Marx, maka sejarah perkembangan masyarakat

---

\*) Tema Sidang Kelompok "Indonesia dalam Dinamika Regional". Kongres Nasional Sejarah, Jakarta, 12-15 November 1996.

manusia dianggap dikendalikan oleh kondisi-kondisi fisik-material yang ada di kitaran manusia tersebut. Dengan demikian maka inti budaya, artinya yang dianggap penggerak perkembangan budaya adalah tindakan manusia dalam teknologi dan ekonomi sebagai jawaban langsung atas peluang-peluang lingkungan fisik-materialnya. Berbeda dengan itu, pada kubu yang berseberangan, manusia lebih dilihat kapasitas konseptualisasi dan penalarannya, khususnya dalam menafsirkan dunia dan lingkungannya. Manusia tidak dianggap menanggapi lingkungannya secara mekanistik, melainkan ia berfikir dahulu, dan menyusun konsep-konsep. Dengan demikian, dalam pandangan idealistik ini, inti budaya adalah perangkat konseptual beserta nilai-nilai yang terkait dengannya, yang sebenarnya merupakan pengarah dari segala keputusan tindaknya dan pandangan dunianya. Maka, kalau saya katakan bahwa pengaruh budaya dari kehadiran yang memaksa dari orang-orang Belanda dalam kehidupan orang Jawa itu hanya bersifat perifer, maka artinya keperiferan itu adalah dalam hal sistem konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pembentukan budaya Jawa yang terjadi selama masa Hindu-Buddha dan Islam, dengan menyerap banyak nilai-nilai kebatinan darinya, telah menghasilkan suatu sosok kebudayaan yang mantap, sedemikian rupa sehingga kehadiran bangsa Belanda tidak mampu menggoyahkan fundamennya.

Masalah peralihan-peralihan orientasi yang telah terjadi, dari prasejarah ke Hindu-Buddha dan dari Hindu-Buddha ke Islam itu, maupun keanekaragaman dasarnya, sebenarnya cukup kompleks, karena terjadinya adalah di dalam suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Jawa di masa lalu, yang tergolong-golong ke dalam sejumlah satuan kemasyarakatan yang mungkin bahkan dapat disebut sebagai sub-bangsa. Masing-masing sub-bangsa ini, baik yang dibedakan satu sama lain atas dasar wilayah maupun atas dasar jenis mata pencaharian pokok, mempunyai ciri-ciri khasnya, baik dalam bahasa maupun adat-istiadat. Di atas perbedaan-perbedaan ini, kemudian mengemuka pula perbedaan atas dasar keyakinan keagamaan. Dalam makalah ini sorotan utama akan diarahkan kepada transformasi budaya dalam rangka peralihan orientasi dari Hindu-Buddha ke Islam.

Suatu hipotesis yang hendak saya ajukan adalah bahwa sejak awal di daerah hunian pokok' orang Jawa, yaitu apa yang sekarang kita namakan Jawa Tengah dan Jawa Timur, telah terdapat keanekaragaman budaya. Dalam

kesempatan lain telah saya ajukan pula alasan untuk kepadatan penduduk pulau Jawa dewasa ini, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia, yaitu karena kepalindirian dari awal kehidupan manusianya, seperti sementara ini dibuktikan oleh temuan fosil-fosil manusia purba di Ngandong, Sangiran dan Wajak. Mengenai luas jelajah kehidupan manusia-manusia purba tersebut, serta kemungkinan migrasi dari tempat-tempat lain merupakan masalah-masalah yang masih menunggu pemecahan, dan berada di luar permasalahan yang sekarang dibicarakan. Walau kita lewatkan saja dahulu permasalahan sejarah yang panjang dari manusia prasejarah Jawa itu, kita sedikitnya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tahap akhir dari masa prasejarah tersebut, sebelum persentuhan dengan kebudayaan dari India yang membawa serta unsur dominannya, yaitu agama Hindu dan Buddha serta bahasa dan sastra Sanskerta beserta sistem tulisannya, Siddhamātrka dan Pallava.

Mengikuti pengkajian Van Naerssen dan De Casparis atas prasasti-prasasti terkuna di Jawa Tengah, kiranya dapat dibenarkan kesimpulan bahwa masyarakat Jawa pra-Hindu telah terorganisasi ke dalam satuan-satuan yang terdiri dari sejumlah desa. Manusia pada tahap akhir masa prasejarah itu pun telah dapat membuat alat-alat dari logam dan telah mengenal pembagian tugas berdasarkan keahlian khusus. Oleh R.P. Soejono masa itu disebut masa perundagian (awal). Desa itu sendiri disebut dengan istilah *wanua* di Jawa Tengah dan *thāni* di Jawa Timur. Kesatuan-kesatuan antar desa itu mempunyai pusat yang disebut dengan istilah *kaḍatwan*. Pusat tersebut merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus pusat kebudayaan, setidaknya untuk wilayah yang diasuhnya. Menurut dugaan saya, pusat-pusat ini lah yang menjemput kebudayaan India, demi partisipasinya di dalam pergaulan intelektual 'internasional' pada waktu itu, yang disemangati oleh pemikiran keagamaan Hindu dan Buddha. Proses 'penjemputan bola' ini lah yang menjelaskan mengapa bukti-bukti terkuat adanya akulturasi budaya Jawa dan India terlihat di daerah-daerah pusat kekuasaan tersebut yang terletak di pedalaman, dan bukan lebih dahulu tampak di daerah-daerah pantai yang sebenarnya lebih mudah dicapai oleh orang asing. Hipotesis lain yang dapat diajukan, sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Wuryantoro mengenai kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, adalah bahwa pada awalnya telah berkembang pula beberapa varian kebudayaan Jawa yang dapat

dibedakan satu sama lain. Varian-varian tersebut adalah penanda dari masing-masing sub-bangsa Jawa pada masa lalu. Perbedaan yang mencolok mengenai istilah untuk menamakan desa tersebut di atas (*wanua* di Jawa Tengah dan *thāni* di Jawa Timur) kiranya perlu diperkuat dengan perbandingan kosa kata pra Jawa Kuna dari sumber-sumber tertulis dari kedua daerah. Dua buah prasasti masa Airlangga setidaknya-tidaknya menyebutkan sejumlah besar kata-kata yang asing apabila dibandingkan dengan kosa kata Jawa Kuna yang lazim dikenal. Penjelasan linguistik mengenai ini belum ada, untuk menunjukkan mana yang lebih mungkin: apakah kata-kata tersebut menunjukkan keaslian bahasa lokal Jawa Timur, ataukah menunjukkan pengaruh dari daerah tertentu di India Selatan. Di samping bukti-bukti kebahasaan yang mungkin digali, perbedaan gaya seni arca dan seni bangunan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur pun tak dapat dilihat semata-mata sebagai perbedaan perkembangan, melainkan lebih jauh, walaupun itu memang dapat memperlihatkan kesan semacam demonstrasi perkembangan, namun sebab dari arah perkembangan itu harus lebih dalam dilihat kemungkinannya sebagai berasal dari sumber atau titik awal citarasa dan mungkin bekal teknologi yang dari awal memang sudah membedakan kebudayaan sub-bangsa Jawa di Jawa Tengah dengan sub-bangsa Jawa di Jawa Timur.

Perbedaan-perbedaan budaya sub-bangsa ini dari waktu ke waktu dilintasi oleh usaha-usaha penanaman dan penyebaran "kebudayaan nasional" Jawa, manakala muncul penguasa pusat yang kuat dan berwawasan budaya. Usaha-usaha semacam ini, antara lain berupa pembinaan dan penyebar-luasan susastra Jawa Kuna, yang meluas pula sampai ke wilayah Bali, yang sekurang-kurangnya sejak abad-X memang telah mempunyai keterkaitan dinastik dengan Jawa Timur. Dalam perkembangan usaha bina negara di Jawa telah terlihat suatu perkembangan bahwa semakin lama semakin kuat dilakukan koordinasi kewilayahan oleh pemerintahan kerajaan. Dapat dibandingkan dalam hal itu organisasi kewilayahan dua tingkat di seluruh 'masa Jawa Tengah' dan masa Isanawangsa sampai dengan Airlangga di Jawa Timur, meningkat ke organisasi kewilayahan tiga tingkat di masa Kadiri, selanjutnya ke pembentukan imperium pertama, dengan tata wilayah empat tingkat, di masa Singhasari, dan terakhir di masa Majapahit, ketika pada struktur imperium yang sama dibubuhkan suatu jaringan ikatan kemitraan tertentu dengan apa yang disebut *nuṣāntarā*, yaitu "tempat-tempat lain di tanah lautan". Pengertian terakhir ini didapat dari pembacaan konteks



penyebutan nama-nama *nusa* pada prasasti-prasasti zaman Majapahit. Dari pembacaan kontekstual itu ternyata bahwa di samping arti dasarnya, yaitu "pulau", istilah *nusa* juga berarti tempat-tempat (hunian, pelabuhan) di tepi laut.

Walaupun dari waktu ke waktu usaha pemersatuan yang semakin meluas dilakukan, namun demikian, tetap diluankan suatu alokasi bagi pemeliharaan adat-istiadat setempat di dalam suatu kesatuan negara. Pada masa Kadiri misalnya, pada waktu koordinasi pemerintahan lebih ketat daripada sebelumnya, dan telah diciptakan pula penataan wilayah ke dalam tiga jenjang (*thāni* - *wiṣaya* - *bhūmi*), secara eksplisit dikatakan bahwa bagi (tiap) *wiṣaya* tetap dapat diikuti *sukhaduhkha*! (hukum adat) masing-masing. Kaidah kenegaraan Jawa yang rupanya berusia panjang, berupa diakuiinya kemungkinan otonomi adat dari satuan-satuan wilayah pedesaan ini, dihadapkan pada keharusan pula untuk mengakui kewenangan tata aturan pemerintahan kerajaan di pusat. Kaidah ini masih tersimpan dalam ungkapan yang sekarang pun masih dikenal, yaitu "*desa mawa cara, negara mawa tata*." Tersirat di sini dinamika budaya antara pusat (*rājya, nagara*) dan daerah (*wanua, thāni; wisaya*). Contoh kajian yang menunjukkan betapa bertahannya pola hubungan yang longgar namun diikat oleh loyalitas dan perlindungan antara pusat dan daerah itu dapat disimak dalam kajian Van Groenendaal mengenai genealogi dalang-dalang Jawa beserta jalinan-jalinan hubungannya dengan keraton pada bagian awal abad-XX ini.

Sebuah komponen dalam susunan masyarakat Jawa yang amat penting karena terbukti bahwa setelah berkembang ternyata mampu tetap mempertahankan fungsinya walau telah mengalami pergeseran-pergeseran orientasi, adalah lembaga keagamaan yang mandiri dan terletak di daerah pedesaan. Berbagai istilah yang dikenal dari masa Hindu-Buddha menunjukkan keanekaragaman yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tujuan (misalnya antara tekanan pada pendidikan, pengembangan pustaka, dan tekanan pada pertapaan), maupun oleh perbedaan-perbedaan aliran kepercayaan yang dianut. Berbagai tipe pusat keagamaan pada masa Hindu-Buddha itu lah yang dapat diperkirakan berlanjut ke dalam institusi-institusi yang pada masa Jawa ke-Islam-an dikenal sebagai *pesantren* (dalam wujud yang paling besar, membentuk komunitas tersendiri) hingga ke *paguron pedalangan* di desa yang hanya menerapkan metode magang untuk satu dua orang aspiran saja.

Di atas kondisi awal masyarakat Jawa masa Hindu-Buddha itu lah kemudian terjadi perkembangan masuknya Islam ke dalam kebudayaan Jawa. Pusat-pusat kekuasaan di daerah pantai utara pulau Jawa, yang sekaligus juga pusat-pusat perdagangan, merupakan pusat-pusat yang lebih awal, dan mungkin juga semula lebih total, di dalam penganutan agama Islam, dibandingkan dengan pusat-pusat peradaban Jawa di pedalaman. Namun proses 'peng-Islaman' kerajaan Jawa tetap terjadi, dalam modus yang amat tidak mencolok karena sekaligus terpadu dengan tindakan pelestarian budaya lama yang sudah terbentuk sebelumnya. Terjadinya masyarakat "Jawa baru" yang secara keagamaan berorientasi ke Islam itu melibatkan sejumlah 'kiat', yang dapat ditafsirkan sebagai "kebijakan kebudayaan" (*cultural policy*) dari pemimpin masyarakat, ataupun sebagai mekanisme penyesuaian yang terjadi secara alamiah. Bahasa, sebagai alat budaya yang utama, pun mungkin sekali dikembangkan mengikuti arah tuntutan konsolidasi-konsolidasi sosial dan politik.

Dalam hal ini, apabila kita membicarakan "perkembangan kebudayaan", perlu lebih dahulu ditegaskan bahwa kita harus membedakan dua ranah wacana yang tidak dapat dikacaukan antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah di satu sisi ranah pembahasan ilmiah dan di sisi lain ranah penentuan sikap dan pengarahannya. Pembahasan ilmiah berlandaskan pada pencarian fakta-fakta ilmiah, dan dari sana dilakukan interpretasi untuk memperoleh kebenaran-kebenaran ilmiah, di mana perlu berdasarkan teori-teori yang dianggap tepat. Wacana ilmiah bersifat terbuka, dalam arti semua prosedur kerja dan pembuktiannya harus dapat diikuti oleh semua pihak, dan senantiasa terbuka pula untuk mendapat kritik.

Berbeda dengan itu, ranah wacana "penentuan sikap" menghimpun fakta yang diangkat dari kenyataan-kenyataan empiris, tidak memerlukan metode ilmiah yang ketat, dan interpretasinya diarahkan untuk memperoleh kebenaran yang hendak dipercaya (dan dipegang teguh). Penafsiran dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam rangkaancangan seperti ini seringkali didasarkan pada seperangkat konsep dan strategi yang telah ditentukan lebih dahulu, sesuai dengan tujuan-tujuan yang bersifat politis. Fakta-fakta yang diangkat dari kenyataan empiris itu tak jarang kemudian diakui sebagai kebenaran yang dianggap mutlak setelah melalui berbagai upaya intensifikasi. Pada masa lalu, suatu kebenaran bahkan bukan hanya diangkat dari fakta empiris, melainkan dapat juga dari pemikiran ideal semata,

atau juga katakan saja, dari alam gaib yang masuk ke dalam pikiran manusia, sehingga dengan demikian yang terjadi adalah pembentukan mitos. Pembahasan kita sekarang ini adalah suatu usaha penyorotan secara ilmiah atas sejumlah fakta "penentuan sikap", yang secara disadari sepenuhnya atau tidak, telah diambil oleh manusia-manusia 'pemimpin' masa lalu, baik pemimpin di bidang politik, budaya, maupun keduanya.

Sebagai contoh dari sejarah kebudayaan Jawa dapat disebutkan beberapa fakta berupa adanya anggapan yang mantap mengenai beberapa hal, yang secara historis ilmiah, amat sulit dibuktikan. Contoh yang pertama adalah mengenai asal-usul raja-raja Mataram besar, yang dikatakan mempunyai jalur pangiwa dan panengen, yang berpangkal pada dewa-dewa kehinduan di satu sisi dan nabi-nabi keislaman di sisi lain. Contoh lain adalah mengenai pertemuan Senapati, raja Mataram pertama, dengan Ratu Kidul, yang untuk selanjutnya menjadi pasangan gaib dari semua raja Jawa. Kedua contoh ini mempunyai persamaan dalam hal keduanya merupakan salah satu sarana bina negara, khususnya sebagai upaya pembentukan mitos demi tegak dan lestarnya kewibawaan raja.

Suatu contoh lain yang lebih bersangkutan dengan kebijakan kebudayaan pada masa lalu adalah "perekrasan fakta historis" untuk memberikan peranan kepada para wali perintis agama Islam di Jawa sebagai kelompok tokoh pembentuk budaya juga, di samping peranan utamanya sebagai pembaharu keagamaan. Dalam hal ini, contoh yang dimaksud adalah anggapan yang mantap di kalangan orang Jawa bahwa para wali lah yang menciptakan wayang dan topeng. Dalam pada itu data sastra lama dan kepurbakalaan jelas-jelas menunjukkan bahwa pertunjukan wayang maupun topeng telah dikenal di Jawa beberapa abad sebelum masa hidup para wali tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pembentukan mitos tentang peranan budaya dari para wali tersebut tentulah diarahkan oleh suatu kebijakan kebudayaan (*cultural policy*) tertentu. Dapat diajukan hipotesis bahwa mitos itu sengaja dibuat karena para pemimpin yang arif pada waktu itu melihat bahwa kesenian wayang dan topeng ketika itu sudah sedemikian menyatu dengan kehidupan dan alam pikiran orang Jawa sehingga tidak mungkin mencabutnya tanpa orang Jawa kehilangan salah satu bagian terpenting dari jatidiriya. Oleh karena itu maka diputuskan bahwa Islam sebagai agama baru harus dapat 'masuk dari dalam', hal mana diwujudkan melalui pengakuan 'post-scriptum' bahwa unsur budaya tercinta itu, wayang

dan topeng, adalah berasal dari para wali juga, sehingga adalah sah adanya untuk (tetap) berkembang di alam ke-Islaman di tanah Jawa. Dengan demikian maka wayang dan topeng adalah "legitimate" dalam kehidupan orang Jawa untuk selanjutnya.

Suatu hipotesis lain yang dapat diajukan adalah mengenai perkembangan sastra Jawa sesudah Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pilihan pada bentuk puisi *macapat*, dengan meninggalkan *kakawin* yang marak perkembangannya di zaman Hindu-Buddha yang mendahuluinya, pun bukanlah suatu perkembangan alamiah belaka, namun juga diarahkan oleh suatu kebijakan kebudayaan. Dapat dikemukakan pandangan hipotetis bahwa puisi *macapat*/kidung sebenarnya sudah sejak lama sebelum akhir masa Hindu-Buddha hidup berdampingan dengan *kakawin*, tetapi di kalangan 'pinggiran', bukan di pusat-pusat kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh teks Sudamala yang berbentuk *macapat* dan berasal dari daerah paling timur dari Jawa Timur. Demikian pula kidung-kidung seperti *Kidung Ranggalawe* dan *Kidung Sundayana* yang semuanya ditulis dalam *macapat* dan sekaligus juga mengandung kesalahan-kesalahan informasi historis, menunjukkan bahwa karya-karya tersebut dibuat dan beredar jauh dari pusat informasi dan kekuasaan masa Hindu-Buddha. Maka, justru bentuk puisi inilah, yang semula lebih bercitra kerakyatan, dipilih sebagai wahana sastra Jawa baru yang berorientasi kepada agama Islam. Demikianlah alih bentuk dari karya-karya 'klasik' berbentuk *kakawin* dalam khasanah kesusasteraan Jawa Kuna ke dalam versi baru berbentuk *macapat*, bukanlah semata-mata karena alasan "renaissance" seperti dikemukakan Th. Pigeaud, ataupun karena berkurangnya pemahaman akan karya-karya Jawa Kuna seperti dikemukakan oleh M.C. Ricklefs, tetapi juga secara sengaja dialihkan ke dalam bentuk baru, *macapat*, yang telah dijadikan wahana sastra "zaman Islam", sambil di sana-sini mengubah isinya agar lebih sesuai dengan alam pikiran keagamaan baru yang lebih Islami.

Demikianlah contoh-contoh telah diberikan mengenai interpretasi orang Jawa di zaman yang silam mengenai masa lalunya, yang diarahkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan dilandasi oleh sikap-sikap budaya tertentu pula. Kini tinggallah orang Jawa harus menentukan untuk dirinya sendiri, apakah mereka selalu hanya akan berkonsep dan bertindak secara intuitif, ataukah juga akan memanfaatkan keilmiahannya untuk memandu langkah-langkah dan sikap-sikapnya di masa kini. Sebagai anggota dari

masyarakat baru Indonesia yang modern sudah tentu orang Jawa pun dapat diharapkan untuk mengantisipasi transformasi budaya lagi; kali ini tidak dilandasi oleh pergeseran orientasi keagamaan, melainkan oleh peralihan ke arah sikap yang lebih terbuka dan ilmiah.

Pada masa silam dalam kebudayaan Jawa telah terjadi proses-proses akulturasi. Segi terpenting dari pengertian "akulturasi" adalah bertemunya dua kebudayaan, di mana salah satu pihak mempunyai kekuatan yang dominan, sehingga unsur-unsur dari kebudayaan yang dominan itu tetap dapat dikenali di dalam kebudayaan penerima pengaruhnya, walau mungkin saja sudah merupakan hasil modifikasi oleh pihak penerima tersebut. Di Jawa khususnya, sepanjang sejarah kebudayaannya, proses akulturasi itu sudah terjadi tiga kali. Akulturasi pertama adalah dengan kebudayaan India yang membawa serta inti budayanya yang berupa agama Hindu dan Buddha. Pengaruh yang besar sekali tampak dalam berbagai segi kehidupan sekaligus: bukan hanya dalam agama, melainkan juga dalam tata masyarakat, bahasa dan tulisan, serta dalam berbagai bidang kesenian, seperti seni bangunan, seni arca, seni sastra, seni tari dan seni drama.

Akulturasi yang kedua adalah dengan agama Islam beserta berbagai implikasi budaya yang dibawanya serta dari tempat-tempat yang dilalui dan bangsa-bangsa yang menyebar-luaskan Islam sampai ke Indonesia, Jawa khususnya. Di samping itu, fakta yang amat penting dalam proses peng-Islaman Jawa adalah terbentuknya pusat-pusat kekuasaan politik dan perdagangan di pantai utara Jawa, dengan komuniti-komuniti yang khas, yang mungkin dari awalnya sudah bersifat multi-etnik, sebagai tempat persemaian yang subur bagi ajaran Islam. Para penguasa baru di pedalaman Jawa Tengah, pada masa Pajang dan awal Mataram, amat menganggap penting afiliasi dan bahkan restu dari para ulama-penguasa dari pusat-pusat Islam itu. Proses itu pun secara berangsur membawakan perubahan besar, baik dalam hal ajaran agama itu sendiri, maupun penjabarannya dalam tata kemasyarakatan, sastra, seni bangunan dan seni hias pada orang Jawa. Sejumlah tokoh besar penyebar Islam di dalam masyarakat Jawa, yang disebut Wali Sanga, dimuliakan sebagai kelompok orang-orang suci, yang pada akhirnya di dalam wacana kesastraan Jawa memang dapat menggeser tokoh-tokoh panutan keagamaan yang lama seperti Citragotra dan Tambrapetra.

Adapun proses akulturasi ketiga terjadi ketika orang Jawa berhadapan dengan orang Eropa. Proses ini boleh dikatakan masih berlanjut hingga kini.

Sebenarnya, masih dapat dipertanyakan apakah akulturasi dengan kebudayaan Eropa itu memang sudah terjadi pada masa kolonial. Pengaruh kebudayaan Eropa pada waktu itu terlalu kecil pada kebudayaan Jawa, dan sifatnya perifer, tidak menyangkut inti pokok pandangan hidup orang Jawa. Pengaruh akulturasi dengan kebudayaan 'barat' itu baru terasa setelah ada 'seretan' dari perkembangan nasionalitas baru, Indonesia, yang mengambil citra "modern" bagi peri kehidupan masa kininya.

Pada setiap zaman bangsa Jawa membentuk suatu masyarakat yang terintegrasi (sudah tentu dalam skala yang bervariasi), dan ditandai oleh suatu kesatuan kebudayaan. Kesatuan kebudayaan ini ditunjukkan oleh ketunggalan dalam sistem tulisan, dan juga sistem bahasa yang dalam perkembangan terakhirnya mempunyai beberapa tingkat tutur; kesatuan kebudayaan Jawa juga ditandai oleh satu sistem sosial, sistem tata cara keupacaraan, sistem kesenian, dan lain-lain, yang semuanya secara konsekuen mengikuti keberadaan tata masyarakat pada zamannya. Namun juga, di setiap zaman pun, di dalam masyarakat Jawa terdapat penggolongan-penggolongan. Masing-masing golongan itu dapat mempunyai sebuah sub-kultur tersendiri, yang kadang-kadang lebih ditandai oleh kekhasan kebahasaannya, bentuk-bentuk keseniannya, juga versi-versi khusus dalam tata keupacaraannya, dan lain-lain.

Sebuah hipotesis khusus kiranya perlu pula diajukan berkenaan dengan perkembangan kebahasaan di dalam masyarakat Jawa itu. Seperti masih tersirat dalam fakta kebahasaan masa kini, dan seperti terbaca dari kenyataan bahwa bahasa Jawa Kuna yang digunakan dalam sastra pra-Mataram itu tidak mengenal tingkat tutur (*speech levels*), maka dapat disimpulkan bahwa strukturisasi sistem bahasa Jawa ke dalam tingkat-tingkat tutur seperti yang dikenal sekarang ini baru terjadi dalam masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Jawa Tengah baru, yaitu Demak-Pajang-Mataram. Hanya, pada periode mana tata tingkat tutur itu membaku masih merupakan pertanyaan yang belum terjawab. Dugaan yang hendak saya kemukakan adalah bahwa pembentukan sistem tingkat tutur yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Jawa itu terjadi pada zaman Mataram, khususnya bersamaan atau agak lebih kemudian, dari usaha-usaha yang intensif dan cukup keras dari raja-raja Mataram untuk membangun imperium baru, dengan menundukkan pula kerajaan-kerajaan di daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hipotesisnya adalah bahwa semula ragam-ragam bahasa Jawa yang pokok,

yang sekarang diberi label krama, madya, dan ngoko itu, yang didudukkan di dalam penjenjangan tingkat tutur, dan dengan demikian dapat dinamakan register juga, pada mulanya adalah bahasa-bahasa tersendiri, meskipun mungkin tetap dapat dikatakan sebagai varian-varian bahasa Jawa, yang masing-masing digunakan oleh golongan yang khusus dalam masyarakat Jawa. Ngoko adalah semula bahasanya kaum tani di desa, sedangkan krama adalah bahasanya kaum bangsawan yang mewarisi sastra Jawa Kuna melalui jalur 'pewarisan' dari Majapahit. Dugaan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam ragam ngoko lebih banyak dijumpai kata-kata asli Jawa, dalam arti bukan pinjaman dari Sanskerta melalui Jawa Kuna, sedangkan sebaliknya dalam ragam krama banyak dijumpai kosa kata yang berasal dari Jawa Kuna. Orang desa pada umumnya tidak mahir menggunakan ragam bahasa krama, karena ragam itu tidak banyak digunakan di antara sesamanya. Sebaliknya orang-orang dari kalangan atas, yang juga dipandang berbudaya, pada umumnya menguasai semua tingkat tutur dan dapat menggunakannya dengan tepat sesuai dengan situasi. Adapun ragam bahasa madya pada mulanya adalah mungkin bahasanya orang dari daerah-daerah pantai yang kemudian dimasukkan ke dalam struktur masyarakat "Mataram Besar". Dalam kenyataannya sekarang, ragam ini banyak digunakan oleh golongan orang "'kauman" dan atau pedagang, sesuatu yang cocok dengan deskripsi penduduk pusat-pusat dagang dan penyebaran Islam di pantai utara. Bahwa bahasanya disebut madya, artinya "tengah", tentunya karena pemiliknya dianggap "golongan menengah" yang berstatus di antara kaum bangsawan dan rakyat desa. Penamaan itu tentunya tidak diberikan oleh mereka sendiri, melainkan oleh golongan yang 'membina' bahasa dan kebudayaan, yaitu para bangsawan dan pemimpin kerajaan. Bahasa tinggi yang tepat bagi golongan kelas atas sendiri disebut dengan istilah krama, yang artinya "perilaku (yang baik)" atau "(sesuai dengan) aturan". Istilah ngoko bermakna "menggunakan (panggilan) 'ko', sedangkan "ko" adalah bentuk panggilan yang paling kasar, yang sudah dikenal pula dalam bahasa Jawa Kuna.

## ACUAN

de Casparis, J.G.

1981 "Pour une Histoire Sociale de l'Ancienne Java  
Principalement au Xeme Siecle". Archipel 21:125-51

van Groenandael, Victoria Maria Clara

198- Er Zit Een Dalang Achter De Wayang. Disertasi, Universitas  
Amsterdam

van Naerssen, F.H. den R.C. de iongh

1977 The Economic and Administrative History of Early Indonesia.  
Leiden/Koln: E.J. Brill

Wuryantoro, Edhie

1983 "Sanjaya-, Sailendra-, dan Kelingwangsa". Pertemuan Ilmiah  
Arkeologi III, Ciloto.

Jakarta, 14 November 1996

81



## BAHASA BALI DALAM TINJAUAN SEJARAH \*)

Dalam makalah ini akan saya coba untuk melihat bahasa Bali dalam tinjauan sejarah. Artinya, akan dilihat apa makna dari segala yang telah terjadi di masa-masa lalu, dengan melihat pula apa yang sedang terjadi di masa kini dan mungkin akan terjadi di masa-masa mendatang. Untuk itu terlebih dahulu izinkan saya mengutip, dengan perubahan seperlunya, beberapa alinea dari makalah saya pada Kongres Bahasa Jawa II di Batu pada tanggal 22 Oktober 1996 yang lalu, berkenaan dengan posisi bahasa-bahasa daerah di tengah perkembangan kebudayaan nasional Indonesia.

### Bahasa Daerah dan Kebudayaan Nasional

Permasalahan yang dihadapi bahasa Bali dewasa ini sudah tentu tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi bahasa-bahasa suku bangsa lain di dalam tubuh bangsa Indonesia ini. Di satu sisi eksistensinya perlu dipertahankan walau dalam konteks persatuan bangsa baru, bangsa Indonesia, yaitu sebagai wujud kebinekaan dari semboyan *bhinneka tunggal ika*, namun di sisi lain perubahan-perubahan kemasyarakatan yang terjadi dari waktu ke waktu mengharuskan bahasa-bahasa 'daerah' itu senantiasa menyesuaikan diri dan menata ulang posisinya di dalam masyarakat yang berubah itu.

Perubahan masyarakat itu sendiri dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang didorong oleh dua macam penggerak, yaitu gerakan politik dan mekanisme pasar. Sebuah gerakan politik yang besar dalam sejarah Indonesia, yang merupakan momentum bagi perubahan kemasyarakatan yang besar pula, adalah gerakan kebangkitan nasional yang mencapai puncaknya pada pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia dari semua bekas penjajahnya, serta kemudian disusul oleh berbagai program kebangsaan untuk memperkuat kedaulatannya di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Program-program untuk memperkuat diri sebagai satu bangsa yang berdaulat itu, dalam wadah sebuah negara-bangsa, pada dasarnya mempunyai dua aspek yang sama pentingnya, dan saling menunjang, yaitu aspek kejiwaan dan aspek kebendaan.

---

\*) Makalah Kunci Sidang Pleno I Kongres Bahasa Bali II Pesamuhan Agung Bahasa Bali IV, Denpasar, 7-9 November 1996.

Segi kebendaan yang telah dibangun bangsa Indonesia dengan berhasil selama ini, khususnya pada periode Orde Baru, meliputi berbagai sarana dan prasarana yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Di sisi lain, segi kejiwaan yang telah dibangun atas bangsa Indonesia meliputi perasaan kebangsaan yang di masa lalu telah berhasil membangkitkan semangat perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, dan pada masa-masa selanjutnya untuk mengatasi berbagai macam ancaman perpecahan. Termasuk ke dalam segi kejiwaan dalam pembangunan bangsa dan usaha bina negara itu adalah juga kesadaran sejarah dan kesadaran berjatidiri budaya. Bangsa Indonesia perlu senantiasa menguatkan niat dan mencegah kelengahan dalam menginternalisasikan penghargaan yang tinggi dan kecintaan kepada budaya bangsanya sendiri. Ke dalam pengertian "budaya bangsa" ini termasuk bahasa nasional, bahasa Indonesia, beserta semua bahasa suku-suku bangsa yang juga merupakan kekayaan warisan bangsa secara keseluruhan. Di antara khasanah warisan bangsa itu lah terdapat pula bahasa dan sastra Bali yang akan dibahas dalam kongres ini. Dalam perkembangan kebudayaan nasional Indonesia bahasa-bahasa 'daerah', atau lebih tepat bahasa-bahasa suku bangsa, yang telah terbentuk melalui proses berabad-abad itu, mempunyai peranan, baik sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, maupun sebagai pemberi rasa berakar bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini izinkan saya mengoreksi apa yang tersurat dalam panduan Kongres ini, yang menyiratkan bahwa "bahasa-bahasa daerah" maupun "kebudayaan Bali" **adalah** "bagian dari Kebudayaan Nasional" Kiranya konsepsi mengenai kebudayaan nasional Indonesia itu perlu dijernihkan. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaannya sebuah bangsa yang baru terbentuk dalam abad ke-XX ini, suatu bangsa baru yang terbentuk dari kesatuan sejumlah besar kelompok etnik, yang kemudian masing-masing kita sebut sebagai "suku bangsa" di dalam kesatuan bangsa Indonesia itu. Inti budaya bangsa baru ini terdiri dari paduan sejumlah nilai budaya modern dan sejumlah budaya tradisional yang diangkat dari perbendaharaan budaya suku-suku bangsa yang tergabung di dalamnya. Ini tidak berarti bahwa keseluruhan budaya suku-suku bangsa itu serta-merta menjadi bagian dari kebudayaan nasional, melainkan hanya apa yang di dalam penjelasan konstitusi Republik Indonesia disebut sebagai "puncak-puncak kebudayaan". Berbagai interpretasi dapat diberikan mengenai apa yang diberi

kualifikasi "puncak kebudayaan" itu. Dalam berbagai kesempatan saya telah mengajukan saran untuk tidak menafsirkan "puncak" itu dengan ukuran teknik dan mutu substantif berdasarkan model tertentu, karena itu pasti akan mengandung unsur prasangka dan subyektif, melainkan, yang hendaknya dilihat sebagai "puncak" itu adalah unsur apapun dari suatu kebudayaan suku bangsa yang ternyata telah dapat diterima di luar suku asalnya di dalam interaksi budaya di dalam negara Indonesia ini, di antara seluruh warga masyarakat Indonesia yang hidup di dalamnya. Unsur-unsur budaya suku bangsa yang 'meng-Indonesia' itu dapat berasal dari aneka ragam kegiatan manusia: bisa suatu teknik pengolahan bahan, bisa suatu teknik pembentukan benda tertentu, seperti tempa keris berpamor, tenun ikat, batik, songket, dan lain-lain, dapat pula berupa kosa kata dan ungkapan-ungkapan tertentu, dapat juga resep-resep makanan tertentu, ataupun bentuk-bentuk kesenian tertentu. Sementara unsur-unsur tertentu dari budaya suku bangsa terserap ke dalam khasanah kebudayaan nasional Indonesia, masing-masing kebudayaan suku bangsa itu tetap mempunyai kemandiriannya sebagai sebuah kebudayaan yang terintegrasi, walaupun sudah tentu senantiasa dapat berada di dalam proses perubahan internal.

### **Bahasa Bali Dewasa Ini**

Penutur bahasa Bali, sebagaimana juga penutur bahasa Jawa, telah meluas ke luar dari daerah asalnya. Program transmigrasi telah membuat terjadinya komuniti-komuniti orang Bali di luar pulau Bali. Orang-orang Bali itu, apabila pergi bermigrasi beserta keluarganya dan dalam kelompok-kelompok yang cukup besar, dapat dipastikan akan membawa serta budayanya, termasuk bahasanya. Pada dasarnya, manusia merasa lebih aman hidup batinnya apabila ia berpeluang mempunyai jatidiri budaya. Dalam hal bangsa Indonesia, jatidiri budaya itu pada umumnya ganda, yaitu budaya suku bangsa dan budaya nasional Indonesia. Kondisi kegandaan ini bervariasi dan bergradasi.

Dari segi penggunaannya dapat dibedakan antara penggunaan bahasa Bali untuk percakapan sehari-hari, sebagai bahasa resmi, dalam kesusasteraan, dan dalam seni pertunjukan. Peluang untuk pelestarian bahasa Bali dapat ditinjau dari sudut aneka macam penggunaan tersebut.

Penggunaan untuk keperluan percakapan sehari-hari dewasa ini sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Hal ini tentulah memerlukan penyikapan yang jelas dari para pembina bahasa. Di satu sisi, pengaruh dari luar terhadap suatu bahasa adalah wajar. Batas kewajaran itu adalah pada penyerapan kosa kata dan pengambil-alihan konsep ketatabahasaan dan gaya bahasa yang bersifat memperkaya, tetapi tidak bertentangan dengan atau mengacaukan kaidah-kaidah bahasa penerima. Apabila terjadi pengacauan kaidah, maka usaha-usaha 'pelurusan' harus segera diambil. Di sinilah program-program "pelajaran bahasa Bali yang baik dan benar" perlu mengambil peranan, baik melalui lembaga formal kependidikan maupun melalui media massa. Dalam hubungan ini peluang kemajuan teknologi komunikasi dan informatika kiranya perlu dimanfaatkan untuk mengemas paket-paket untuk pengajaran maupun apresiasi.

Penggunaan bahasa di media massa ini sendiri tergolong penggunaan resmi dari bahasa Bali. Di samping itu penggunaan resmi terdapat pula dalam pembicaraan resmi (pembahasan keagamaan, rapat, perundingan, upacara kekeluargaan, dll.), maupun forum-forum terbuka seperti sarasehan, *pesamuhan*, *mebasan*, dll. Dewasa ini penggunaan resmi seperti itu cenderung mempunyai tempat yang kokoh dalam masyarakat Bali, berkat kekukuhan posisi agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

Penggunaan jenis lain adalah di dalam kesusasteraan. Ungkapan seni sastra ini mempunyai berbagai perwujudan, yang masing-masing mempunyai kecenderungan berbeda dalam hal peminatannya oleh khalayak ramai. Karya sastra murni, baik dalam bentuk prosa maupun puisi, hidupnya sangat bergantung kepada medianya, baik itu surat kabar, majalah, ataupun terbitan lepas. Studi mengenai tiras media tersebut kiranya dapat memberikan gambaran mengenai mengembang atau menyusutnya pendukung aktif dari sastra Bali. Dapat diperkirakan bahwa kehidupan media berbahasa Bali sangat bergantung kepada pangsa pasar yang amat khusus. Dalam hal ini, sesuatu yang amat khas terdapat pada masyarakat Bali adalah bahwa medium dan alat tradisional untuk penulisan karya sastra, yaitu daun lontar dan *pengutik*, masih sangat vital dalam kehidupan sastranya. Kegiatan dengan medium ini memang kebanyakan adalah untuk penyalinan, namun dari waktu ke waktu selalu juga ada penciptaan karya baru ditulis dengan teknik tradisional itu. Kenyataan ini merupakan suatu kekuatan yang memberikan ketahanan hidup bagi sastra Bali.

Keadaan yang lebih baik mungkin dimiliki oleh bahasa dan sastra Bali yang digunakan dalam berbagai bentuk seni pertunjukan dan seni narasi (sastra lisan) Bali seperti *wayang kulit*, *wayang wong*, *prembon*, *gambuh*, *drama gong*, *mebasan*, dan lain-lain. Daya tarik bentuk-bentuk seni pertunjukan tertentu kiranya masih cukup besar, bahkan di kalangan generasi muda. Di situ lah terdapat peluang yang amat baik untuk pelestarian bahasa dan sastra Bali, yang di samping dapat berkembang sesuai tuntutan aktualitas, sekaligus dapat menjadi ajang pembinaan "bahasa Bali yang baik dan benar" maupun forum "apresiasi sastra Bali", serta pembinaan pendalaman pemahaman agama dan susastra.

### **Strategi Pembinaan untuk Masa Depan**

Dengan menyimak situasi bahasa dan sastra Bali seperti yang telah terpapar di muka itu, maka kiranya kongres ini dapat menyarankan strategi yang tepat untuk melestarikan bahasa dan sastra Bali. Melestarikan dalam hal ini harus dipahami dalam pengertian yang dinamis. Nilai-nilai unggul yang sudah ada di dalamnya perlu dipertahankan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan situasi aktual pun perlu mendapat ruang pengembangan.

Dari segi pendidikan formal kiranya perlu dipertegas pembedaan dua pendekatan metodologis yang kedua-duanya diperlukan, yaitu pengajaran bahasa Bali sebagai bahasa pertama dan pengajaran bahasa Bali sebagai bahasa kedua. Sudah tentu perangkat pendukung, berupa paket bahan-bahan ajar, akan harus dikhususkan untuk masing-masing. Metode pengajaran dan penyediaan bahan ajar ini merupakan pokok garapan tersendiri yang perlu ditangani secara semakin profesional.

Langkah-langkah strategis lain yang perlu dijalani demi pelestarian kehidupan bahasa dan sastra Bali adalah pendukungan terhadap media massa berbahasa daerah, serta perawatan dan perluasan minat terhadap bentuk-bentuk teater berbahasa Bali. Dalam hal ini produksi kemasan-kemasan apresiatif dan edukatif mengenai substansi tersebut kiranya merupakan suatu keharusan, di samping di sumbernya masing-masing seni pertunjukan itu tetap harus dipelihara vitalitasnya.

Semua upaya yang hendaknya mengarah kepada pengemasan itu tak lain adalah juga untuk menjawab tantangan era industrialisasi dewasa ini.

Para pemilik bahasa dan sastra Bali perlu 'mempromosikan' miliknya itu, 'menjajakannya' dengan kemasan yang semenarik mungkin sebagai sesuatu yang perlu dan dapat memperkaya kehidupan batin 'konsumen sasarannya'. Tinggallah kini menentukan siapa konsumen sasaran itu. Saya sarankan: generasi muda Bali sendiri, generasi muda Indonesia dari suku-suku bangsa lain, serta orang asing dari berbagai negara yang sudah cenderung gandrung kepada berbagai bentuk seni Bali. Berikan kepada mereka lebih banyak bentuk-bentuk seni yang memerlukan pemahaman bahasa dan sastra, dan kemaslah bahan-bahan ajar yang menarik dan efektif untuk memahami dan dengan demikian dapat meningkatkan penikmatan karya-karya seni yang bersangkutan. Itulah tantangan yang perlu dihadapi untuk lebih merebut pasar pada abad ke XXI yang segera akan tiba ini.

### **Kesadaran Sejarah dan Semangat Persatuan**

Di samping bahasa Jawa, bahasa Bali di antara bahasa-bahasa suku bangsa lain di Indonesia, tergolong yang terpanjang masa perkembangannya yang terliput oleh data tertulis. Abad ke-8 Masehi telah memberikan data tertulis tertua mengenai bahasa Jawa Kuna, yaitu bahasa yang merupakan warisan bersama dari para penutur bahasa Jawa dan Bali dewasa ini. Khasanah sastra Jawa Kuna boleh dikatakan bahkan masih hidup dalam kegiatan kebahasaan orang Bali sekarang, yaitu khususnya dalam penggunaannya pada upacara-upacara keagamaan dan dalam kegiatan pembahasan sastra yang disebut *mabasan*. Hubungan keterkaitan yang tepat antara Bahasa Jawa Kuna dengan Bahasa Bali dan Bahasa Jawa yang kita kenal sekarang ini merupakan sebuah masalah akademis yang masih memberikan peluang untuk dikaji lebih jauh. Kiranya berbagai faktor sosial-politik mempunyai peran yang menentukan dalam proses tersebut. Fakta yang tampil adalah bahwa sebagian khasanah sastra Jawa Kuna masih punya kelanjutan sejarahnya dalam berbagai bentuk, asli maupun saduran, di dalam sastra Jawa maupun Bali masa kini. Kosakata bahasa Jawa Kuna pun, untuk sebagian terbawa serta ke dalam bahasa Jawa dan Bali yang digunakan di masa kini, walau seringkali telah mengalami pergeseran dalam bunyi maupun arti.

Suatu fakta lain yang perlu mendapat telaah lebih lanjut adalah kehadiran bahasa Melayu Kuna, dalam berbagai varian, dalam bukti-bukti tertulis masa lalu, di Jawa maupun Bali. Kehadiran bahasa Melayu kuna

pada prasasti-prasasti di Bali maupun Jawa pada sekitar abad ke-IX Masehi itu tentulah membutuhkan penjelasan tersendiri. Hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa dari waktu ke waktu, sepanjang berabad-abad pergaulan antara bangsa di Nusantara, orang-orang yang berbahasa (dan berbudaya) Melayu, kemungkinan besar demi eksplorasi mata pencahariannya, berkoloni di berbagai daerah pantai pulau-pulau di Nusantara. Asimilasi, ataupun aliansi dan berbagai kesepakatan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dapat terjadi dari waktu ke waktu, dan pada situasi-situasi tertentu memerlukan peneguhan berupa penulisan prasasti.

Pengetahuan umum kita, warga negara Indonesia, mengenai fakta-fakta sejarah itu, baik mengenai pewarisan bersama atas khasanah-khasanah budaya tertentu, maupun landasan yang kuat bagi terjadinya ikatan-ikatan antarkelompok etnik dan antarnegara di masa-masa lalu, kiranya harus kita raih dengan pemahaman yang tepat, sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai peneguh persatuan kita di masa kini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada kita kejernihan hati dan kekuatan daya nalar untuk meningkatkan pengkajian kita terhadap berbagai masalah akademik, serta melapangkan wawasan untuk dapat melaksanakan usaha-usaha pelestarian dan pengembangan terhadap bahasa dan sastra Bali, bahasa dan sastra daerah-daerah lain, sementara pada waktu yang sama berteguh hati untuk membina kekuatan bagi kebudayaan nasional Indonesia.

Denpasar, 7 November 1996

## **COMPOSING MUSIC AND THE TRADITIONAL PERFORMING ARTS OF INDONESIA: A SURVEY \*)**

The committee of this conference gave me the assignment to write on the "roles, place, and concerns of Indonesian traditional performing arts in the context of a modern society". This formulation of the topic may imply an assumption, which is not necessarily true, that traditions should be seen as something contrary to modernity. I would rather see modernity and traditions as two interlocking factors within the dynamics of cultural development, especially in countries where traditions are strong. Both have their own significant roles and strengths in the process of defining a culture's features. Traditions, especially in the arts, should not be underrated, or marginalized by the 'advancing modern era', since most artistic traditions are fruits of a chain of creations that contain the characterizing values of a nation or ethnic group. Allow me to describe the Indonesian situation related to these matters.

### **Creativity Within Traditions**

There are so many programs in the world that aim at 'saving' one or another form of traditional art, either by reconstructing an extinct one, or by documenting a decaying one. The notion behind it is that traditional art tends to become obsolete with the advance of modernity, and it has to be guarded against extinction.

Traditional art is also commonly regarded as something static, always repeating old ways and materials, and thus retaining its existence. However, this portrayal of traditional art is misleading. In the Indonesian case, although retaining its basic consensus on acceptable forms and 'flavours', traditional art do have a dynamic course of life. New creations appear from time to time. Within the karawitan music, either from Java, Bali, Sunda, and Minang, there appeared many new compositions. Many of the new compositions are

---

\*) TUNUGAN '97  
18th Conference and Festival of the ASIAN COMPOSERS LEAGUE Manila, 20-26 January, 1997



not just new melodies within the already known structural frames, but moreover, often concerns experimentations in rhythmic patterns and musical structure. Some went further to enlarge the number of tones to be used, or even added new instruments to the already existing ensemble or orchestra.

For the Balinese karawitan music names like Gede Manik and Wayan Beratha are well known for their compositions. For the Javanese karawitan can be mentioned the names of masters, like Martopangrawit, Narto Sabdo, and Tjokrowasita, who later on, due to his ever ascending career in the art of karawitan, and acknowledged by the court of Yogyakarta, has been awarded ascending noble titles along with changes of names, into R.T. Wasitadipura, and later K.R.T. Wasitadiningrat. This example of K.R.T. Wasitadiningrat gives the evidence that not only mastery, but also creativity is recognized within traditional circles. (\*)

Many of the new karawitan compositions are related to the demands of the theatrical art, be it dance drama, the shadow puppet show, or any other form of stagings. The creation of the Ramayana dance-story performance for the then newly designed open-air theatre of Prambanan in 1961 involved karawitan masters from both traditions: Surakarta and Yogyakarta. It was actually a reconciliation between both traditions that was once one, but then divided by the Dutch colonialists through political stratagems in 1755. The Prambanan Ramayana project was initiated by the central government of The Republic of Indonesia, led by a senior official who was also a prince from the Surakarta court.

Another type of innovation within a tradition is that led by the top leader of the traditional society itself. As an example can be mentioned the creation of a new dance genre led by the king himself, namely H.M. Sri Sultan Hamengkubuwana IX of Yogyakarta, who created, assisted by his team of experts, the Golek Menak dance genre.

The third type of innovation is that 'emerging from the field', without the interverence of political authorities. The phenomena of Narto Sabdo, a dalang (master puppeteer) as well as a karawitan music composer, is an example of this type. This figure composed many popular karawitan compositions, involving inclusions of the many local styles, such as that of Semarang and Banyumas, to his basic Surakarta style. In fact, he developed and popularize some innovations by Tjokrowasito. He also developed new

drumming patterns, using more drums than it is conventionally required. As a dramatist-puppeteer he also innovates new scenes within the known story, to enhance the dramatic effect. Within the same category of innovation can be mentioned the present-day karawitan composers like Karno Kusumo Darmoko and Suwito. Karno is popular for his humorous compositions, stimulating listeners to move in comic movements, while Suwito is the concert master and music arranger and composer for the now very popular dalang Anom Suroto.

### **In Search of Contemporaneity**

Among the many composers starting from a proficiency in karawitan music, two types can be distinguished. The first one is that already mentioned, which are those who choose to stay inside, within the tradition. A second type comprises those who tend to leap out, beyond the tradition. Furthermore, this second type can be sub-divided into those who are well versed in the classical repertory of the Javanese karawitan, thence exploring from the strengths of karawitan music itself, while the other sub-division consists of those with a moderate knowledge of classical karawitan and at the same time having more interest in diatonic music, thence their explorations in combining pentatonic and diatonic elements.

As examples of the first sub-division can be mentioned the contemporary composers based on karawitan, such as Rahayu Supanggah (who will perform and talk in this conference), A. L. Suwardi, and Pande Made Sukerta. Their experimentations in search of a wider range of musical expressions include : explorations into the essentials (regarding structure, function of instrument, dynamics) of the Javanese, Balinese, as well as other borrowed musical traditions; changing the tone-system; combination of systems; and also "preparation" of conventional instruments into 'alternative' sound producing agents.

Among the second sub-division who are more prone to include diatonic elements in their work are among others I Wayan Sadra, Sapto Raharjo, Djaduk Ferianto, Wahyudi Sutrisna, Otok Bima Sidarta, and Suhiryatno. Their works range from computerized processings, trans-instruments transfer of techniques, to the actual use of diatonic instruments along with karawitan instruments. Anyhow, there are still occasions that they do their experiments using only karawitan instruments and whatever sound producing implements.

## **Music and Dance**

Tjokrowasito and Bagong Kussudiardjo.

The demands of many other younger choreographers.

## **The Role of Mass Media**

Appreciation through radio.

Cultural imbalance of radio broadcast.

Cultural imbalance of television broadcast.

## **The Role of Educational Institutions**

Konservatori Karawitan (Kokar) and Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI).

Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), and Institut Seni Indonesia (ISI) as well as Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Teachers Colleges (FKIP, IKIP) and the teaching of art in public schools.

"Out-of-school" education : clubs and private courses.

## **NOTE :**

- (\*) Due to my limitations, for further examples I can only refer to the Javanese cases.

Manila, 20 Januari 1997

## PENGINDAHAN KOTA DARI SUDUT PANDANG NEGARA

PT Citraland Estate secara sengaja telah menetapkan seni sebagai salah satu aspek pembangunan perkotaan. Keputusan itu memerlukan suatu keberanian, dan untuk itu perlu mendapatkan pujian tersendiri. Memang secara ekonomis pilihan tersebut dapat mendatangkan keuntungan pula, karena unsur seni dalam tata perkotaannya itu lah yang merupakan nilai tambah yang dapat meningkatkan peluangnya dalam bersaing. Namun resikonya besar pula, karena modal untuk mewujudkan kota bercitra seni itu pun tentunya lebih besar daripada kota yang biasa-biasa saja, yang semata-mata memenuhi kebutuhan praktis.

Dalam kajian sastra dikenal pembedaan dua sifat yang bisa terdapat dalam suatu karya sastra, yaitu yang disebut *dolce et utile*, artinya "menyenangkan dan berguna". Demikianlah juga kiranya ilmu bangunan dapat dilihat dari sudut itu pula. Kedua sifat itu bisa sekaligus ada dalam satu karya (sastra maupun bangunan), tetapi juga bisa terjadi bahwa salah satu saja dari kedua sifat itu yang dominan dalam suatu karya. Ada jenis-jenis bangunan yang sifat utamanya adalah *utile*: kalau ada aspek *dolce*-nya malah akan mengganggu fungsi pokok bangunan, malah akan *distracting*, menyesatkan. Sebagai misal dapat disebutkan fasilitas pergudangan dan pelayanan jasa angkutan barang. Lain halnya jika yang diangkut itu adalah orang. Orang dalam perjalanannya yang kadang-kadang membosankan dan melelahkan itu perlu dikurangi 'tekanan batinnya' dengan menyajikan yang nyaman-nyaman di sepanjang perjalanannya. Oleh karena itu ada stasiun-stasiun kereta api (juga yang di bawah tanah) yang dirancang dengan unsur keindahan yang dominan. Begitu juga interior wahana-wahana perjalanan apabila di samping efisien juga dibuat menyenangkan buat mata, telinga, ditambah pula dengan unsur ergonomics yang diperhatikan benar, pasti membuat orang betah dan memilih wahana yang demikian itu dari pada yang biasa-biasa saja.

Ada juga bangunan utilitas yang unsur efisiensinya harus nomor satu, tetapi jasa yang ditawarkan berkaitan dengan manusia yang harus dibesarkan

---

\*) Makalah Diskusi Panel "Aplikasi Karya-karya Seni pada Pembangunan Proyek Berskala Kota" dan Konperensi Pers Lomba Rancangan Patung Lingkungan Anugerah Adirupa Citra Raya 1997. Diselenggarakan oleh PT Citraland Estate di Hotel Ciputra, Jakarta. 24 Juni 1997.

hatinya, seperti misalnya bangunan rumah sakit. Tidak sedikit kini pengelola rumah sakit yang mengatur tata ruangnya selain efisien juga dibuat bernuansa keindahan. Suasana indah itu, ditambah pertimbangan pengaruh-pengaruh psikis tertentu yang dapat datang dari tata ruang dan tata warna, dilihat sebagai sangat penting untuk mendukung proses perawatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian penambahan sifat *dolce* pada bangunan yang pada dasarnya bersifat *utile* itu dapat meningkatkan fungsi kegunaannya itu sendiri.

Ada pula jenis-jenis bangunan yang perimbangan antara *dolce* dan *utile* betul-betul harus 50-50. Tergolong ke dalam kelompok ini adalah perumahan dan tempat-tempat umum seperti jalanan, taman, arena pertokoan, dan lain-lain. Di sinilah manusia berinteraksi dalam situasi 'pergaulan' yang tidak didesak oleh tujuan-tujuan spesifik yang harus dilakukan dengan batas waktu atau dengan persyaratan keahlian tertentu. Oleh karena itu tempat-tempat seperti itu sangat memerlukan suasana binaan. Sebagian terbesar unsur pembina suasana ini datangnya dari sentuhan-sentuhan seni. Berbeda pula dengan itu adalah tempat-tempat rekreasi, yang porsi *dolcenya* lebih daripada *utile*.

Acuan rencana pembangunan perkotaan oleh negara (bukan hanya Pemerintah!) dapat dibaca dalam GBHN 1993 yang a.l. mengamanatkan:

"pembangunan perkotaan perlu dilaksanakan secara berencana dengan memperhatikan keharmonisan hubungan antara kota dengan lingkungannya dan antara kota dengan pedesaan di sekitarnya serta keharmonisan kota itu sendiri".

Adapun khusus mengenai tujuan pengembangan tata ruang DKI Jakarta (cf. *Jakarta 2005*, mengenai Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang) dicantumkan a.l.:

"memberikan kesempatan untuk *pengembangan kebudayaan* [cetak miring dari kami] dan lapangan-lapangan kerja produktif tanpa mengganggu kelestarian ekologi dan keseimbangan lingkungan dengan daerah sekitarnya".

Kedua kutipan itu menyebutkan masing-masing "keharmonisan" dan "pengembangan kebudayaan". Ini artinya tentu luas, menyangkut unsur-unsur kenyamanan 'batiniah' dari warga kota, baik untuk diri pribadi sebagai perorangan yang berhadapan dengan lingkungannya, maupun untuk fasilitasi komunikasi antar manusia di dalam suatu komunitas. Suatu obyek seni, katakan patung, yang di pasang di ruang umum, dapat dinikmati oleh orang yang

lewat secara sendiri-sendiri, tetapi juga bisa dijadikan titik temu komunikasi bagi sejumlah orang yang sedang membicarakannya. Pengertian "keharmonisan" dan "kebudayaan" tentulah tidak hanya dikaitkan dengan seni, melainkan juga dengan nilai-nilai budaya secara lebih luas.

Citra Raya - Kota Nuansa Seni adalah wujud dari kebebasan berusaha dan berkreasi yang telah disediakan oleh negara Republik Indonesia bagi warga negaranya. Nuansa seninya adalah fungsi dari sensitifitas para perancang dan pengelolanya untuk memanfaatkan kebebasan tersebut. Selanjutnya, rasa dan perasaan apakah kiranya yang ditimbulkan pada orang-orang yang berada di tempat itu, adalah sesuatu yang harus disimak dan dicatat. Pertanyaan yang paling menentukan adalah: adakah kita merasa berada di negeri sendiri, di Nusantara tercinta ini, atautkah serasa kita berada di jantung perkotaan Eropa, atautkah di suatu dunia fantasi yang merangsang imajinasi? Konsep "nuansa seni" tersebut mesti membawa kepada suatu 'pemihakan' yang jelas. Kalaupun ada beberapa, dan bukan hanya satu, rasa atau konotasi yang dituju, tetap perlu jelas bagaimana struktur hierarkinya dalam suatu keseluruhan.

Citra Raya sebagai kota modern di sebuah negara yang menganut asas demokratis tentulah masuk ke dalam golongan ketiga dalam klasifikasi model kota seperti tersebut ini.

Model-model kota dapat kita bagi tiga:

- (1) hunian dan pertahanan: bersifat tertutup, berbenteng dan berparit; dalam model ini pengindahan hanya dibuat di dalam bagian tengah, di tempat yang paling aman;
- (2) hunian dalam masyarakat berpelapisan dengan hirarki sosial yang ketat, di mana mobilitas sosial hanya dapat terjadi sebagai suatu hal yang istimewa; dalam model ini pengindahan kota hanya dibuat di pusat kekuasaan, biasanya istana.
- (3) hunian dalam masyarakat demokratis, di mana hirarki berada dalam kaitan dengan perbedaan-perbedaan peranan dan tanggung jawab, serta di sini terdapat mobilitas sosial yang terbuka lebar; dalam model seperti ini pengindahan dapat dilakukan di mana-mana, dan melayani semua golongan.

Jakarta, 24 Juni 1997

## **KEDUDUKAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DITINJAU DARI PERMASALAHAN POKOK KEBUDAYAAN INDONESIA DEWASA INI \*)**

Pokok-pokok yang patut kita perhatikan dalam melanjutkan pembangunan di bidang kebudayaan semestinya adalah berdasarkan permasalahan pokok kebudayaan Indonesia yang ada dewasa ini, baik yang merupakan kelanjutan dari permasalahan dasar dari masa lalu berkenaan dengan upaya pembinaan bangsa secara umum, maupun yang merupakan permasalahan baru yang timbul karena perkembangan mutakhir pada tingkat nasional maupun global.

Di bawah ini dikemukakan 4 permasalahan kebudayaan mendasar beserta arah yang sebaiknya diambil sebagai upaya pemecahannya:

### **(1) Perkembangan Kebudayaan Nasional**

Sampai saat ini masih ada warga negara Indonesia yang merasa ragu-ragu, dan bahkan menyanggah, bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu ada. Mungkin hal itu disebabkan oleh pemahaman yang berbeda-beda mengenai apa yang didefinisikan sebagai "kebudayaan" itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah penanda suatu bangsa (nasion), sekaligus suatu masyarakat, yang membedakannya dari bangsa lain. Penanda budaya itu terdiri dari perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Yang Adi Kodrati (Tuhan), dengan sesamanya, dan dengan alam, yang terjabar ke dalam sejumlah sarana, seperti : bahasa sebagai alat konseptualisasi, komunikasi, dan ekspresi seni; struktur sosial yang menata kedudukan anggota masyarakat satu terhadap yang lainnya; teknologi yang senantiasa berkembang untuk membuat alat-alat untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia; bentuk-bentuk kesenian yang memiliki gaya dan teknik yang khas, dan lain-lain.

Dari keempat sarana yang disebutkan di atas, yang pertama dan terakhir merupakan penanda yang paling membedakan antara satu bangsa dengan

---

\*) Makalah ini disampaikan pada Temu Budaya Daerah, Bulan Apresiasi Budaya NTB, Mataram, 22 Juli 1997

bangsa lainnya, sedangkan sebaliknya, yang ketiga justru cenderung untuk secara cepat 'dimiliki' bersama oleh banyak bangsa, karena sifat pencapaiannya yang sebagian terbesar melalui jalur ilmiah yang bersifat amat terbuka. Adapun yang kedua, yaitu struktur masyarakat, masih dapat membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain namun pada segi-segi tertentu terdapat kecenderungan menyeragam di antara semua bangsa, khususnya pada segi-segi yang memang terkait dengan tata organisasi internasional.

Arah pemecahan masalah dalam hal ini adalah: pendalaman penghayatan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa, dan penumbuhan rasa bangga sebagai bangsa mempunyai pedoman kebangsaan ini; pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus semakin mampu berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu dan seni; pendorongan munculnya karya-karya unggul di bidang ilmu dan seni oleh warga negara Indonesia; penataan sistem pendidikan dan sistem media massa agar berfungsi penuh sebagai sarana pembudayaan dalam arti luas, dan terarah kepada nilai-nilai budaya bangsa yang positif dan konstruktif; pembinaan penghayatan rasa kesatuan dan persatuan pada seluruh bangsa; pembinaan kesadaran sejarah, khususnya dalam kaitannya dengan keilmiahan dan pemahaman akan permasalahan kebangsaan dari masa ke masa.

## **(2) Budaya Suku Bangsa dalam Konteks Negara-Bangsa Republik Indonesia**

Posisi masing-masing suku bangsa di dalam wadah negara Republik Indonesia adalah setara dalam kedudukan sebagai warga negara, sehingga dengan demikian tidaklah dapat diperbedakan satu sama lain atas "golongan bangsa pokok" dan "golongan minoritas", juga tidak antara "golongan pribumi (indigenous people)" dan "golongan pendatang (yang dalam contoh berbagai negara lain adalah juga golongan yang berkuasa)". Dalam negara Indonesia, semua suku bangsa adalah pribumi. Jika ada pendatang-pendatang dari luar yang kemudian bermukim, beranak-keturunan dan menjadi warga negara Indonesia, maka mereka tidak menjadi golongan yang secara budaya terpisah dan tersendiri, melainkan mereka membaur ke dalam suku bangsa yang merupakan penghuni asli di tempat mereka tinggal. Situasi multi-



kultural Indonesia yang berbeda dengan kemultibudayaan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dll. (di mana bangsa pendatang menjadi penguasa dan bangsa pribuminya tergusur), maupun Cina, Vietnam, dll. (di mana sebuah 'bangsa pokok' pribumi merupakan mayoritas yang berkuasa, sedangkan sejumlah suku bangsa pribumi lain berada di periferi) seringkali masih kurang disadari, dan ketidaksadaran ini membuat masih banyak orang menggunakan terminologi dan pemaknaan kata-kata seperti "minorities", "primordialism", dan "indigenous people" dalam kesesuaiannya dengan konteks negara lain, dan bukan dalam konteks negara kita sendiri.

Kesenjangan-kesenjangan pengertian dan penyikapan yang terjadi karena tidak kritis dalam mengambil alih jargon dari negara-negara kuat yang mendominasi wacana politik dunia dewasa ini, apabila tidak segera dikoreksi akan dapat menumbuhkan bibit-bibit perpecahan yang merugikan bagi persatuan bangsa dan kesatuan negara.

Arah pemecahan yang harus ditempuh adalah a.1. dengan meneruskan usaha-usaha penggalian, pelestarian dan pengembangan khasanah budaya suku-suku bangsa, dengan dua sasaran sekaligus, yaitu **pertama** demi kontinuitas identitas suku bangsa sebagai sesuatu yang berakar dalam melalui perkembangan berabad-abad, dan **kedua** adalah untuk diperkenalkan antar suku bangsa secara lebih intensif. Usaha yang disebut kedua itu perlu memanfaatkan segala kiat dan hasil perkembangan mutakhir dalam pengemasan informasi. Dalam proses ini, seperti yang telah terjadi di masa-masa sebelum ini, diharapkan terus akan ada aspek-aspek atau perbendaharaan khusus dari suku-suku bangsa itu yang menjadi begitu tersebar luas di antara seluruh warga negara Republik Indonesia sehingga telah dapat dirasakan sebagai miliknya juga. Ini lah yang hendaknya kita tafsirkan sebagai "puncak-puncak kebudayaan lama dan daerah yang terhitung sebagai kebudayaan nasional" seperti yang dirumuskan dalam Penjelasan UUD-1945. Ke dalam pengertian 'puncak' yang terbawa masuk ke khasanah 'nasional' itu, di samping hal-hal yang hidup dewasa ini (contoh: batik, ikat, sulam Gorontalo, songket Pandai Sikek, masakan Padang, tari Bali, Serampang Duabelas, ukiran Asmat, seni patung Bali dll.) termasuk pula khasanah warisan budaya dari masa silam yang telah menjadi "benda purbakala" (contoh: candi Barabudur, candi Prambanan, peninggalan megalit di Bada, Sulawesi Tengah, dll) yang keseluruhannya itu dapat diterima sebagai **warisan budaya dari seluruh bangsa Indonesia** meski munculnya dari salah satu suku bangsa.

Khusus mengenai bidang kesenian, apabila kebudayaan nasional Indonesia bertumpu pada ciptaan-ciptaan baru, di samping juga 'mengambil alih' warisan seni dari suku-suku bangsa yang telah mampu melintasi batas kesuku-bangsaannya untuk meng-Indonesia, maka "kesenian daerah", atau kesenian dari suku-suku bangsa itu sendiri terlalu sering dianggap semata-mata sebagai warisan yang 'statis', dan perlu dilestarikan. Dalam hal ini kiranya perlu disadari bahwa sesungguhnya di dalam tradisi itu masing-masing terdapat pula kreativitas, yang memang berfungsi dalam kecepatan yang berbeda-beda dari satu suku bangsa ke yang lain. Pengertian mengenai "kreativitas di dalam tradisi" ini lah yang kiranya lebih perlu segera ditemui-kenali, dan difungsikan pada tempatnya sebagai salah satu sarana pelestarian.

Di samping itu semua, momentum perkembangan teknologi informatika audio-visual yang ada dewasa ini perlu dimanfaatkan untuk mengemas informasi kebudayaan daerah, baik itu berupa pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang kesenian, maupun berbagai aspek lain budaya daerah. Kemasan bahan ajar mengenai "bahasa daerah sebagai bahasa kedua" kiranya perlu didorong munculnya, dengan menggunakan media cetak maupun audio-visual. Bahan-bahan itu akan sangat bermanfaat untuk mengajarkan bahasa yang bersangkutan di kota-kota di daerahnya sendiri (yang penduduknya semakin heterogen), maupun untuk dimanfaatkan di daerah lain, yang jika ini terjadi maka proses kesaling kenalan budaya yang mendalam antara suku bangsa menjadi semakin mudah terlaksana.

### **(3) Kecepatan Perkembangan Teknologi dan Sistem dan Komunikasi**

Fakta mengenai cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, yang secara mencolok dikuasai oleh negara-negara kuat, membuat banyak negara berkembang seperti kowalahan. Limpahan informasi beserta nilai-nilai asing yang menyertai kemasan-kemasan luar negeri untuk tayangan televisi kini telah merasuk dan mewarnai pula kehidupan sehari-hari manusia Indonesia. Keberadaan televisi itu sendiri, di rumah masing-masing, atau pun di suatu tempat umum di lingkungan rukun tetangga, telah membuat orang, dan lebih-lebih anak-anak, baik di kota maupun di desa, tidak lagi cukup banyak bergaul atau main bersama dengan tetangganya, atau setidaknya-tidaknya, kalaulah mereka masih nonton bersama, mereka menjadi penonton belaka, tanpa kegiatan yang kreatif.

Arah pemecahan yang harus dicari adalah untuk menanggulangi dua persoalan itu, yaitu **pertama**, ketidakseimbangan informasi dari negara luar yang kuat dengan dari negara sendiri, dan **kedua**, kedudukan penonton televisi sebagai pihak yang pasif menerima siaran. Untuk persoalan pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi industri budaya audio-visual dalam negeri yang memuat pula nilai-nilai budaya bangsa yang luhur, dan bukan justru mengambil alih nilai-nilai asing yang tidak luhur tetapi mengenakan. Peningkatan produksi itu memerlukan suatu pengerahan modal, serta juga, dan inilah yang justru sangat menentukan mutu, peningkatan tenaga-tenaga ahli dan sarana untuk itu. Untuk membuat kemasan audio-visual yang baik diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam berbagai aspek dari pekerjaan itu: dari pengembangan gagasan, riset, penulisan skenario, hingga ke pengambilan gambar, penyutradaraan, permainan, tata visual, tata suara, dan editing. Untuk itu semua perlu pendidikan dan pelatihan, sedangkan untuk evaluasi pasca-produksi diperlukan hidupnya lembaga kritik dan dialog.

Mengenai kaitannya dengan pasar, maka jelas diperlukan keunggulan kompetitif berkenaan dengan kemampuan teknis dan profesional secara umum, namun, perlu pula dipertahankan pemanfaatan keunggulan komparatif dari kemasan-kemasan industri budaya itu yang disebabkan oleh kekhasan isi substansi budaya yang disajikan di dalamnya.

Adapun untuk menjawab persoalan kedua ada dua jalan yang perlu ditempuh, yaitu pertama, mendayagunakan media, atau kemasan media yang lebih bersifat interaktif, dan kedua, menyelenggarakan lebih banyak kegiatan yang bersifat tatap muka, yang lebih memungkinkan pergaulan antara manusia yang hangat dan menumbuhkan kepekaan untuk saling mengerti.

#### (4) **Keterasingan Sebagian Generasi Muda dari Akar/Warisan Budaya Bangsa**

Kenyataan bahwa peri kehidupan bermasyarakat kita, dibandingkan dengan misalnya setengah abad yang lalu, telah banyak berubah karena perkembangan sarana-sarana kehidupan dan pertumbuhan ekonomi, merupakan suatu kenyataan yang memerlukan suatu perhitungan mengenai apa yang bertambah dan apa yang berkurang karena perubahan-perubahan tersebut. Di satu sisi, ketrampilan generasi muda kita umumnya meningkat

dalam menggunakan peralatan elektronika. Ketrampilan tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi yang semakin luas jangkauannya, tetapi dapat juga digunakan semata-mata untuk kesenangan. Kemerdekaan bangsa dan mungkin juga keliberalan pendidikan di rumah telah membuat pemuda kita lebih berani berungkap. Keberanian ini menjadi positif apabila disertai ilmu, namun apabila tidak disertai juga dengan nilai-nilai etika tertentu dapat mengarah kepada kecongkakan dan bahkan kekurang-ajaran.

Hilangnya kehidupan tatap muka yang hangat di lingkungan tetangga atau keluarga besar, dan diganti dengan pola kegiatan sehari-hari yang semakin individual dan profesional, telah pula membuat saluran penerusan nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda menjadi terputus. Sebagai gantinya generasi muda pada umumnya, berkat mediasi media massa, lebih berorientasi kepada budaya-budaya luar yang pancaran informasinya kuat ketimbang berorientasi kepada budaya bangsanya sendiri, yang memang pancaran informasinya semakin melemah.

Arah pemecahan untuk mengatasi permasalahan ini adalah, *pertama*, mempertahankan dan bahkan meningkatkan program-program yang membawa para pemuda mengenal kehidupan bersama manusia-manusia lain, seperti program "kuliah kerja nyata", "sarjana penggerak pembangunan pedesaan", "pertukaran pemuda", dan lain-lain yang mungkin masih harus diciptakan. Arah *kedua* untuk memecahkan masalah itu adalah memperkuat pancaran informasi mengenai budaya bangsa sendiri, yang khususnya ditujukan kepada generasi muda bangsa. Karena salah satu penanda bangsa yang paling kentara adalah kesenian, maka pelibatan yang intensif dari generasi muda di dalam kegiatan seni dari bangsa sendiri dapat merupakan upaya pemecahan yang *ketiga*.

#### **(5) Eksistensi Budaya Indonesia di Tengah Perkembangan Global**

Beberapa isu budaya kiranya perlu diperhatikan dalam menjalani pergaulan antara bangsa dalam bidang kebudayaan. Isu pertama adalah mengenai "pengaruh globalisasi terhadap kelestarian budaya etnik/nasional". Beberapa futuris meramalkan bahwa dengan semakin luasnya rambahan teknologi komunikasi sampai ke seluruh pelosok dunia, maka dunia ini akan semakin dipersatukan dalam komunikasi, dan pada akhirnya juga akan dipersatukan dalam suatu budaya bersama. Gagasan dasar itu lah yang kiranya

harus dipertanyakan. Apabila runutan alur pikir para futuris itu diikuti, maka sebagai konsekuensinya segala budaya nasional atau etnik di seluruh dunia ini akan dipinggirkan untuk memberi tempat kepada apa yang diharapkan menjadi "budaya mainstream" yang dibentuk oleh pihak-pihak yang paling kuat menguasai tempat di jalur-jalur utama komunikasi tersebut. Apabila ini terjadi, maka negara 'terpinggirkan' itu akan menjadi sasaran penjajahan baru, yaitu penjajahan budaya, penjajahan terhadap jatidiri masing-masing. Maka, sebagai 'perlawanan antisipatif', suatu gerakan budaya adalah amat strategis. Dalam relevansi ini lah gagasan-gagasan kerjasama budaya antar negara perlu ditempatkan. Dengan bekerjasama, kita secara bersama-sama saling mendukung usaha untuk melestarikan budaya masing-masing bangsa.

Isu kedua yang terkait dengan yang pertama adalah mengenai "pelestarian dalam modus yang dinamis". Pada umumnya apabila orang bicara tentang pelestarian budaya, maka yang dikaitkannya dengan pengertian itu adalah 'pengawetan' dalam arti hanya "mempertahankan apa yang telah ada". Berbeda dengan itu, yang hendaknya kita dukung adalah makna pelestarian yang dinamis, di mana kuncinya ada pada pengertian "berkelanjutan", dan dalam pengertian ini tercakup makna pembaruan. Diterapkan khusus mengenai budaya, ini berarti kita harus melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang hidup, yang senantiasa terbuka untuk perkembangan, namun sekaligus juga tidak kehilangan jatidirinya. Sejarah budaya berbagai bangsa telah menunjukkan bahwa pelestarian jatidiri budaya sambil berkembang dinamis itu adalah sesuatu hal yang amat mungkin. Namun dalam hal ini kita perlu memperhitungkan perbedaan situasi dunia antara masa lalu dan masa kini. Masa kini ditandai oleh perkembangan teknologi komunikasi yang teramat cepat dan dapat digunakan dengan cara teramat intensif, sehingga dampak-dampak interaksi antara budaya melalui sarana tersebut pun akan dapat lebih cepat dan lebih meluas. Oleh karena ituantisipasi 'pertahanan budaya' harus dilakukan secara lebih sadar dan tidak dilepas saja kepada 'pertumbuhan alamiah'.

Isu ketiga, yang terkait pula dengan kedua isu terdahulu adalah pemahaman dan pengertian yang tepat mengenai adanya, serta berarti dan berfungsinya "kreativitas dalam tradisi". Orang awam kebanyakan menganggap bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah membeku. Kenyataan sejarah kebudayaan pun menunjukkan bahwa tradisi itu bertahan sambil dari waktu ke waktu memberikan peluang bagi kreativitas. Apabila kita hendak

meningkatkan kerjasama budaya antara bangsa, maka sebagai salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah menanamkan saling pengertian yang mendalam mengenai kebudayaan satu sama lain. Ini berarti, saling pengertian itu harus ditumbuhkan tidak hanya mengenai apa yang tampak di permukaan, melainkan beserta segala nilai, dinamika, serta sejarah perkembangannya.

Arah pemecahan untuk menghadapi isu-isu tersebut dengan arif adalah dengan meningkatkan kesadaran budaya dan kesadaran sejarah di berbagai lapisan masyarakat, serta dengan meningkatkan kerjasama antara bangsa, baik dalam hal pengkajian, pembahasan kebijakan, serta eksposisi aspek-aspek budaya beserta permasalahannya secara mendalam.

Dalam rangka kelima permasalahan pokok tersebut, dapat dirangkum persoalan yang terkait dengan kedudukan kebudayaan 'daerah', atau lebih tepat disebut suku bangsa, dalam sistem kebudayaan nasional. Kiranya sudah menjadi jelas bahwa kebudayaan suku-suku bangsa yang telah terbentuk oleh sejarah masa silam dan masih berlangsung di masa kini dengan peluang untuk mengalami proses-proses perubahan yang lebih cepat, mempunyai kedudukan tertentu di hadapan kebudayaan nasional Indonesia yang eksistensinya belum cukup seabad. Keseluruhannya menumbuhkan sistem budaya baru, di mana kebudayaan 'daerah' bagi seluruh bangsa Indonesia berfungsi sebagai pemberi rasa berakar, sedangkan bagi pertumbuhan kebudayaan nasional berfungsi sebagai sumber khasanah.

Mataram, 22 Juli 1997

# KONSEP DAN STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA\*)

## I. KONSEP

Dua konsep yang harus disepakatkan lebih dahulu pengertiannya adalah (1) "warisan budaya", dan (2) "pelestarian".

"Warisan budaya" mempunyai cakupan pengertian yang luas, meliputi yang bersifat kebendaan yang dapat diraba (*tangible*), maupun yang tak dapat diraba (*intangible*). Yang disebut terakhir ini pun dapat dibedakan antara yang tertangkap oleh panca indera yang lain di luar perabaan, dan yang sama sekali bersifat abstrak. Yang tertangkap panca indera lain di luar perabaan itu dapat dicontohkan oleh yang dapat didengar (seperti musik, pembacaan sastra, bahasa lisan), yang dapat dicium (seperti wewangian), yang dapat dilihat (seperti wujud-wujud seni pertunjukan --musik, teater, tari--, dan adat berperilaku), dan yang dapat dicicip (seperti hasil masakan).

Adapun contoh warisan budaya yang dapat diraba adalah berbagai benda kongkret hasil budaya manusia, baik yang dapat dipindah-pindahkan maupun berbagai macam bangunan yang lekat pada tanah tempatnya berdiri. Di antara benda-benda hasil budaya tersebut ada yang dilindungi oleh undang-undang, dan oleh karena itu disebut "benda cagar budaya" (BCB).

Kemudian harus disebutkan pula warisan budaya yang tak dapat diraba dan juga tak tertangkap langsung oleh panca indera yang lain. Termasuk ke dalam warisan budaya yang abstrak ini adalah konsep-konsep budaya dan nilai-nilai budaya. Termasuk ke dalam konsep-konsep yang khas bagi suatu budaya adalah bahasa dan sistem pengetahuan. Bahasa, di samping sebagai sarana komunikasi dan konseptualisasi, digunakan pula dalam kemasan-kemasan indah disertai rambu-rambu teknik-estetiknya yang khas yang menjadikannya kesusasteraan. Adapun sistem pengetahuan yang terikat budaya, yang tidak perlu bersaing dengan ilmu pengetahuan modern, bahkan dapat berkedudukan komplementer, dapat dicontohkan oleh subsistemnya yang berkenaan dengan klasifikasi dan penamaan. Kita kenal adanya variasi budaya misalnya dalam penggolongan dan penamaan unsur-unsur fauna dan

---

\*) Makalah disampaikan pada "International Workshop On Balinese Cultural Heritage", Denpasar, 29 Juli 1997.

flora, dalam penggolongan warna, dalam pembagian alam, dalam penggolongan perasaan-perasaan, rasa sakit, dan lain-lain.

Nilai-nilai pun dikembangkan di dalam kebudayaan. Ada yang telah menggolongkan nilai-nilai budaya ini ke dalam lima aspek, yaitu yang menyangkut masing-masing: hubungan manusia dengan yang adi-kodrati, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan kerja. Berkenaan dengan kelima jenis hubungan itu masing-masing kebudayaan mempunyai kecenderungannya yang khas.

Konsep selanjutnya yang harus dijelaskan adalah "pelestarian". Dalam banyak wacana yang beredar, kata pelestarian berkonotasi merawat sesuatu sedemikian rupa sehingga tidak berubah. Pengertian perubahan ini dijelaskan lagi dengan "kerusakan", "kemerosotan", "pelunturan", "pencemaran", "dekadensi" dan sebangsanya. Dengan demikian tersirat pemahaman bahwa perubahan adalah keburukan.

Apabila kita bicara tentang BCB (benda cagar budaya), maka memang lah benar bahwa konservasi harus dilakukan terhadapnya. Pengertian dasarnya adalah mempertahankan keberadaannya. Tetapi hal ini pun tidak berarti tanpa tindakan-tindakan intervensi. Apabila BCB yang bersangkutan telah bersifat rapuh atau labil, maka usaha-usaha penguatan dan perlindungan diperlukan. Aplikasi bahan-bahan penguat dan struktur-struktur penyangga mengakibatkan adanya perubahan, tetapi perubahan itu lah justru yang memungkinkan BCB tersebut lestari, dapat bertahan untuk waktu selama mungkin.

Untuk benda-benda *tangible* yang bukan BCB, maka usaha pelestarian berarti usaha untuk membuat orang tetap dapat memproduksi benda-benda tersebut, dan membuat benda-benda tersebut tetap berfungsi dalam kehidupan masyarakat yang memilikinya. Pendekatan yang lain pun perlu diambil untuk melestarikan warisan budaya yang *intangible*. Sosialisasi konsep-konsep, kaidah-kaidah, pola-pola, dan nilai-nilai harus dilakukan terus-menerus, dari generasi ke generasi, agar itu semua dapat lestari. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pelestarian itu tidak harus berarti pembekuan. Inovasi dan kreativitas perlu didampingkan dalam proses sosialisasi tersebut. "Kreativitas di dalam tradisi" harus tetap diberi ruang gerak. Hanya dengan membuka peluang untuk kreativitas dan inovasi itu lah kebudayaan dapat



tumbuh semakin kaya dan canggih, dan sekaligus lestari oleh sebab daya hidupnya.

## II. STRATEGI

Strategi pelestarian warisan budaya berkenaan dengan dua aspeknya, yaitu (1) kelembagaan dan (2) sumber daya manusia. Di samping itu harus pula ditetapkan lebih dahulu, apa tujuan dari pelestarian warisan budaya itu. Pada bagian karangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelestarian mempunyai makna bahwa di dalamnya terdapat dua aspek sekaligus, yaitu *pemertahanan* dan *dinamika*. Juga telah ditunjukkan perbedaan penanganan yang harus dilakukan atas BCB dan non-BCB. Itu dalam hal warisan budaya yang *tangible*. Untuk yang BCB Indonesia telah mempunyai produk perundang-undangan yang memberikan arahan, yaitu **Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya** beserta dua Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan kemudian, masing-masing tentang pendaftaran dan tentang penyimpanan. Namun sebaliknya, mengenai warisan budaya yang *intangible* kita belum mempunyai undang-undang ataupun peraturan yang dapat dipakai sebagai dasar tindakan. Oleh karena itu, maka dewasa ini pelestarian warisan budaya yang *intangible* terpulang sepenuhnya kepada program-program Pemerintah maupun prakarsa-prakarsa swasta. Demikian pula belum ada ketentuan dan kesepakatan mengenai kriteria pembatasan untuk menentukan apa saja warisan budaya *intangible* itu yang kiranya dapat digolongkan "cagar budaya" dan mana yang bukan.

Ada pula perbedaan dimensi yang perlu diperhatikan antara pelestarian warisan budaya dan pelestarian budaya. Apabila kita bicara tentang *pelestarian warisan budaya*, maka yang diacu adalah hasil-hasil budaya tertentu secara terpisah, sebagai unsur, komponen, item, atau bagian dari suatu kebudayaan secara keseluruhan. Berbeda dengan itu, apabila kita bicara tentang *pelestarian budaya* maka yang dipersoalkan adalah jatidiri dan keberlanjutan suatu kebudayaan secara keseluruhan.

Strategi pelestarian warisan budaya tentulah terkait dengan strategi pelestarian budaya. Kebijakan kebudayaan negara Republik Indonesia adalah di satu sisi membentuk kebudayaan nasional yang kuat, yang antara lain ditopang oleh budaya-budaya daerah sebagai sumber, dan di sisi lain melestarikan kehidupan budaya-budaya daerah itu sendiri sebagai warisan

sejarah dan sebagai komponen dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dalam situasi "**bhinneka tunggal ika**". Kebudayaan nasional maupun kebudayaan suku bangsa ( 'daerah' ) selalu berada di dalam proses, di dalam kancah hubungan antar budaya yang selalu terjadi. Yang selalu harus di jaga oleh masyarakat pemilik kebudayaan tersebut, termasuk di dalamnya unsur Pemerintah, adalah agar keseimbangan senantiasa dipertahankan: antara keberlanjutan dan perubahan, sedemikian rupa agar jatidiri bangsa atau suku bangsa senantiasa tampil dengan jelas dan tidak ditenggelamkan oleh pengaruh(pengaruh) asing tertentu. Salah satu kiat untuk sambil berubah mempertahankan jatidiri itu adalah dengan memilih di antara sejumlah warisan budaya yang merupakan penanda budaya untuk dijaga dan dikembangkan dengan lebih intensif daripada warisan-warisan budaya yang lain.

Untuk masyarakat Bali misalnya, kunci pemertahanan budayanya ada di kekuatan institusi keagamaannya: Itu untuk integrasi internalnya, dengan mempertahankan keberadaan institusi-institusi tradisionalnya. Di luar itu ada pula sejumlah institusi modern, seperti pendidikan formal dan organisasi-organisasi kesenian lintas banjar, yang dapat berperan sebagai dinamisator, sebagai 'penantang' . Kedua jenis institusi itu lah yang harus dilihat sebagai kekuatan kelembagaan inti, sedangkan institusi-institusi ekonomik, termasuk di dalamnya kepariwisataan dan industri budaya, adalah institusi-institusi 'pinggir', dalam arti yang mengambil manfaat dalam upaya-upaya 'pemasaran'. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, institusi-institusi ekonomik itu sangatlah penting, namun tidak pernah boleh dilupakan bahwa sumber inti kreatifnya di seberang sana harus tetap dijaga kekuatannya. Bahkan, pemeliharaan sumber itu seharusnya menjadi satu komponen yang terpadu di dalam sistem ekonomik dalam arti luas, seperti halnya "Research & Development" merupakan bagian integral dari suatu sistem industri.

Aspek strategi yang kedua menyangkut sumber daya manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah anggota masyarakat dalam berbagai perannya. Mereka yang merupakan pelaku dalam penerusan nilai-nilai (pemimpin, pendidik formal dan nonformal), sumber keahlian, dan contoh-contoh kemahiran dalam aspek-aspek budaya khusus, adalah mereka yang harus dijaga kemandirian dan keberdayaannya. Untuk sebagian perawatan dan pengembangan keahlian-keahlian tersebut dapat dilakukan melalui institusi-institusi pendidikan formal. Namun itu perlu diimbangi melalui jalur media

umum. Ini berarti tantangan bagi mereka yang bergerak di media massa, untuk mengembangkan pengetahuan budaya yang memadai agar peran pemberdayaan itu dapat dijalankannya.

Di samping mereka yang berperan sebagai pelaku dalam penerusan warisan budaya, terdapat pula mereka yang berkedudukan sebagai penerima, yaitu khalayak ramai. Melalui jalur-jalur pendidikan dan media massa pula lah masyarakat luas dapat dilayani untuk membuat dirinya menjadi masyarakat yang sadar budaya dan sadar sejarah. Warga masyarakat yang demikianlah, yang pada gilirannya mampu menjadikan bangsanya bangsa yang kuat juga dalam segi budaya.

**speech by**  
**THE INDONESIAN DELEGATE \*)**

The Indonesian delegation supports the basic idea that the cultures of all nations should be equally respected, despite the inequality in political and economical powers among the countries in the world. It also supports the idea that the cultural identity of each nation should be maintained, despite the tendency towards uniformity in certain aspects of life due to influences brought through trans-national networkings in several fields, such as in communications and commerce.

We should address only those socio-cultural problems that are *commonly* relevant in *all* NAM countries, and leave out others that are divergent in their significance for different countries. The Indonesian delegation identify seven problem areas that are likely to be seen as significant in each member country, namely:

- (1) Images and Perceptions of Nations :  
Biases and How to Transcend Them
- (2) The Role of The Media in Cultural Development:
  - (a) the mass media
  - (b) informatics
- (3) The Cultural Heritage in The Present Context
- (4) Cultural and Historical Awareness  
within The Educational System
- (5) Cultural Property Rights of Nations
- (6) National Identity in the "Era of Globalization"
- (7) Conservation of Traditions and Fostering Creativity in the Arts

**( 1 ) *Images and Perceptions of Nations***

Encounters between peoples of different races, different cultures, has from time immemorial up to more recent times made their imprints in the

---

\*) draft by EDS as chief delegate to Meeting of Minister of Culture of The Non-Aligned Movement to be held in Medellin, Columbia, September 4-5, 1997.

form of perceptions of one people on another, mostly, in a lesser or greater degree, biased by the perceptor's own concepts and cultural values. These imprints are sometimes surprisingly obstinate, despite the claims that nations in the world of today is more and more linked in communication systems that are both 'democratic' and 'free'. In reality, some strong developed countries do impose their subjectivity upon developing countries.

When two peoples meet, biases may come from basically two types of condition, namely :

- (1) frapant difference between the two, either in their physical appearance or their cultural values, or both;
- (2) the existence of an a-symmetrical relation, in which one side is dominating and the other is dominated.

We have the conviction that the first source of biases can be overcome by an intensification of a balanced communication between nations, in which the aim is to form or deepen a real *understanding* between one another, based on the method of "active listening" or "emphatic listening" at the one end, and true and sincere exposure of one's self at the other end.

However, the second source of biases can only be neutralized by breaking the very chains of dominance, by empowering the once dominated nations. In relation to this the NAM countries should strengthen their powers in fields that are most competed for dominance, such as technology, commerce and information. Cooperation in those fields should rather be developed through partnership, either between South and North, or between South and South. It should moreover be considered, that the advance of science and all its applications, should not contradict, but on the other hand, should be in harmony with endeavours to intensify religiosity in one people's life.

## **2. *The Role of the Media in Cultural Development***

As we are much aware of, that the broadening of linkages in the mass media systems, as well as the fast development of informatics concepts and technology, have made drastic changes in the scope and speed of information communications, transsecting national borders. Most of the 'South' countries are lagging behind in this matter. As a consequence, through those channels peoples of the 'South' are in some way being dominated by other more

advanced nations of the 'North' through the messages put into those mass media and information systems.

The mass media, being a media targetting on the population as a whole, has an enculturation role to play. Beyond straight information for scientific and educational aims, the broadcasts or disseminations through the mass media have chances also to change cultural values and life styles of their respective audiences.

In this case, the NAM countries should resolutely put the NANAP and BONAC into more action, among others by planning media pools among member countries with contents to be agreed upon.

### **3. *The Cultural Heritage in the Present Context***

Cultural heritages, be it tangible and intangible, can be further categorized into those that are completely constituting the past, and those that still fully function in their present respective societies. Heritages that have lost their original functions, however, can still be conserved to fill another function in its present context, namely that of giving an understanding on the historical depth to the nations to which they belong. Those heritages serve as a means to give the feeling of having a cultural root to their people.

### **4. *Cultural & Historical Awareness***

To maintain a nation's identity, its people should be nurtured in cultural and historical awareness, both in relation to the nation's own culture and history, and with respect to that of the whole world. This awareness would enable a person to be proud of his nation's own culture without being chauvinistic, and be aware of differences of perspectives in relation to the many events in history, but at the same time being able to maintain the respect and understanding on the nation's own history. As these awareness can only be developed by means of reliable knowledge, so the best channel is through the nation's educational system.

### **5. *Cultural Property Right of Nations***

Each of the NAM countries should be involved in programs to safeguard its cultural property rights. Each nation's cultural heritage should be of benefit

mainly for its owner. In keeping with the more and more dominating free market of the world, the NAM countries should also swiften its pace in cultural industry, to the effect that it could compete in the market and at the same time safeguarding its copyright of any national cultural substance produced for the market.

In the case of cultural industry it is, however, very important to keep the quality (especially of its cultural substance) well-controlled, and not giving an absolute free rein to the devolepment of low-quality mass culture to capture the majority of the population.

#### **(6) *National Identity in the "Era of Globalization"***

One among the problems at hand is that of the influence of the so-called globalization on the conservation or maintenance of ethnic or national cultures. Some writers from the developed world have made speculative predictions that with the advance and encompassing influence of communications technology the whole world will be more and more unified, entangled within one system of communications, and at the end developed into having one culture for the whole world. It is this very position that should be questioned, because in consequence of that prediction, all national or ethnic culture in the world shall be marginalized to give the space in the whole world to that expected "mainstream culture", that is formed by those who dominate the strongest channels of communications.

The NAM countries should anticipate, and counteract this tendency by launching a movement of cultural conservation. In close cooperation, the NAM countries should support each other in maintaining and promoting their respective identities.

Maintenance of cultural identity, however, should be understood in its dynamic sense. Cultural histories have given the evidence that changes in culture, be it through influences from outside, could happen from time to time while cultural identity was all the way maintained. The difference between our present condition and that of the past is nevertheles to be considered. With the present existing technology, communication becomes faster and more far reaching than it was in the past. Hence, cultural effects are as fast and far reaching. It is therefore that a deliberate action for cultural

maintenance should be taken, and not to leave everything to the 'natural' mechanism of the market.

**(7) *Conservation of Traditions and Fostering Creativity in the Arts***

One among the endeavours to maintain the cultural identity of a nation is by conserving its traditions. However, the culture of a nation also constitutes all the newly created works made within the nation, be it in the field of art, science and technology, or system design.

It is understood that even within traditions, there has always been a creativity at work from time to time, hence the development of tradition, especially artistic tradition. Contemporary art, on the other hand, besides from being totally free from any traditions, may also gain its strength from the explorations on ideas and concept from traditional cultures.

It is to be noted that periodical forum for the arts of the NAM countries is worth maintaining or establishing. The Film Festival for the NAM countries organized by the Popular Democratic Republic of Korea is to be maintained, while the Exhibition of Contemporary Art of the Non-Aligned Countries such as that organized by the Republic of Indonesia in 1995, should be considered to be repeated for another time. Moreover, other activities that can be proposed include Poetry Reading. All-those art activities are expected to generate a feeling of more closeness among peoples of the NAM.

Jakarta, August 25th 1997.



## CULTURAL DIVERSITY AND ITS PRESENTATION IN INDONESIAN MUSEUMS \*)

### Indonesia's Multicultural Setup

The Indonesian nation comprises the many sub-nations originating in many different areas within the country. Before the deliberate formation of the Indonesian nation (since the pre-independence nationalist movement), originally there were many independent ethnic groups, some of them may even claim as being nations in their own rights. There had flourished many kingdoms in different regions of the presentday Indonesia, coming into dominance at different times of history. The oldest recorded kingdoms known were that from the fifth century A.D., namely that found in the present East Kalimantan, and another in West Java.

After Indonesia's independence on the 17th of August 1945, its government issued a Constitution, in which the existence of the many cultures in the provinces is legally acknowledged. Thence, there is the motto in Indonesia's coat of arms that reads *bhinneka tunggal ika* ("diverse, and yet united"). Aspects of Indonesia's ancient cultures as well as the highlights of the local or sub-national cultures are regarded as parts of the newly formed national culture of Indonesia. This means, that with the advance of nationalism the original traditional cultures are not disregarded, neglected or pushed aside to be eliminated. On the contrary, they are, together with the newly formed aspects of culture, regarded as sources for the nation's cultural identity.

A recent, 1995 publication by the anthropologist M. Junus Melalatoa titled *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Encyclopaedia of Ethnic Groups in Indonesia) counts a number of 499 names of ethnic groups, some identifications being based on language specificity, while others are based on regionality. In fact, there are several large-scale ethnic groups that actually have further subdivisions, based on cultural varieties, mainly that of the language. Since this 1995 encyclopaedia has not treated the whole system of identification and subdivision thoroughly, the number 499 should be

---

\*) Speech For Seminar "Unlocking Museums", Darwin, September 7-13, 1997  
General theme : *Cultural Diversity in Museum and Art Gallery Programs, and How Museums Are Accomodating This*

regarded as tentative. Moreover, the listing of existing languages in Indonesia, done by several scientific institutions, has come to about 700 in numbers. However, this number has not gone through a thorough scrutiny on linguistic affinities.

The Indonesian "Youth Pledge" in 1928 contain among others the pledge to have but one language, the Bahasa Indonesia, as a means for communication among the unified nation. It was indeed already used by the nation's founding fathers for their speeches and writings. After independence, and the more so after the "development era", the use of Bahasa Indonesia becomes more and more widespread. It is used as official language in offices, it is used as instructional language in all educational institutions, and it is also the language used by the mass media. In fact, it already becomes a factual national language. There remains about 13% Indonesians in 1996, living mostly in remote areas, that do not have a command of Bahasa Indonesia.

Among the many sub-nations there have developed a feeling of unity and brotherhood, despite some unconnectednesses, or even feuds in the past. The present unity is indeed the fruits of the many deliberate endeavours to generate and enhance the new, Indonesian nationalism. Ethnic groups in Indonesia have become more acquainted with each other. People from one ethnic group even learn and adopt certain cultural elements from different ethnic groups. Publications, exhibitions, and artistic performances are media by which the knowledge about each other are channeled. At present, even marriages between peoples of different ethnic groups occur and regarded as something normal., not to be much disputed. The problem arises, however, on the education of the younger generation, especially in urban areas. These cities, in comparison to the villages, have a population that are more heterogenous in relation to their ethnic origins. Thus, it becomes a need, for instance, to provide school children with the teaching of local ethnic languages not as a mother tongue, but as a second language. In a wider context, the existence of a national program for learning ethnic languages as a second language could be deemed a strategic means to enhance our national integration. In this way the ethnic, sub-national cultures, are exposed in a platform for interchange, each allotted an equal status.

The multicultural situation in Indonesia is to be differentiated with that of countries like the United States of America and Australia. All the various

cultures within the country of Indonesia are indigenous, and every ethnic group is regarded as having equal rights. Colonization in Indonesia did not bring about the existence of permanent occupation by colonizers. There are no layer of population, neither a pocket of, colonizing foreigners that became the dominant inhabitants in the country. Common migrants from overseas, such as the Chinese, Arabs and Indians, as a matter of fact, were assimilated into the ethnic society within which they live. It is therefore that the government of the Republic of Indonesia does not entertain the concept of minority-majority dichotomy with reference to the Indonesian population.

### **Types of Cultural Diversity**

Although science has generated the belief that scientific truths are universal, there is still the fact at hand, that some knowledge systems are culture-bound. Knowledge systems of the many cultures of the world can be differentiated into (1) those owned by small-scale societies, and (2) those owned by large-scale societies having a "great tradition" within it. These two are again, regarded as different from (3) the knowledge system based on scientific methodology, that is claimed to be universally valid and globally accepted. Thus, the problem of cultural diversity is only relevant to the first two categories of knowledge systems.

As it is found in the Indonesian context, the motto "unity in diversity" (*bhinneka tunggal ika*) may as well apply to the many cultures in the world, all of which aspiring for a peaceful life. It may refer to the cultural diversity of the many ethnic groups within a state, as well as the many nasional cultures in the whole world. Each ethnic group or nation has had its own specific historical journey. Within those histories there were acculturation processes, whenever a strong foreign culture is interfering, or pushing hard into the respective society. In the Southeast-Asian example, there were acculturation processes in different places when the Hindu and Buddhist religions from India came to be known and adopted. There were also such processes when Islam came to be adopted in some countries. Later acculturation processes that happened in almost all parts of Southeast Asia were that with the European culture, although in different intensities.

The basis for differences among cultures may be sought in two factors, namely that which evolved since prehistoric times, due to initial isolation of

the respective peoples within specific environments, and the other factor being that of specific historical experiences. Diversity, moreover, might also be seen from different perspectives, namely that of environment, social structure, and symbolic system.

Typical ecological factors may give impetus to certain kinds of technological responses, even innovations. There are ethnic groups which are characteristically sea faring, others are forest-clearing farmers, or even forest dwelling hunterers and gatherers, still others are lowland farmers, some of which developed irrigation systems. These environmental and the related technological factors must to a certain extent had been instrumental in forming the ethnical differences.

With a social structural perspective ethnic cultures could be differentiated into those having no stratum differentiation, through those having social strata. These strata being either two, three or four, up to those societies which besides having social strata also have a governmental system, from village-based ones up to the most hierarchical and centralized ones. The existence of centers of political power within a society had been instrumental for the enhancement of standardization processes of language, customs and artistic norms.

A linguistic-symbolic perspective may also be used to classify cultures. Sentence structure, morphology, and vocabulary are variables that differentiate ethnic cultures. These variables may also, on the other hand, indicate whether one culture is more closely or distantly related to one another. Differentiation of speech levels is especially indicative of social structure.

### **The Problem of Change and Continuity**

It is on purpose that I reverse Claire Holt's title of her book *Art of Indonesia: Continuities and Change*. My observation of traditions, especially artistic traditions, gives me an insight that it is change that is at the center of actuality. From time to time, people behind the traditions make interpretations, alterations, modifications, and sometimes even great leaps of change. Departure from the original, common way of doing things, may happen. But after a while, a long while, tendencies towards the regaining of old ways, old values, and old motives come to the fore again. Examples

within the Javanese artistic traditions can be mentioned. After reformations had taken place during the early 1970-ies, which was led by the Central Javanese Art Center in Surakarta, almost immediately, as if in reaction to it, Javanese artists in Jakarta refer strongly to the old ways of doing dance, eventhough presenting new compositions. Underlying this fact there was a tendency to re-enact or recapture the old aesthetic values of serenity and contemplativeness. The reformations initiated in Surakarta, meanwhile, had promoted an artistic attitude that put great value on dynamic movements, quick changes of dance motifs, and asymmetrical compositions. Another phenomenon which recently appears in dance is a set of exercises and performances which is motivated by the intention to actuate rituality. It is geared by the motivation to regain unity with the supernatural world.

By presenting these facts I would like to suppose that change has always been on the move, whether in a slow or a fast speed, and it is only afterwards that people are taking steps, often unconsciously, to recapture the old thread of continuity. The speed of change and the vastness or range of outlying elements included in the changing process often implies the problem of boundary between local and national culture, also between national, regional, and universal cultures.

Another point related to this problem of cultural change is the culture universals. Supposing that cultural universals comprise a certain number of elements distinguished from each other, then it might be expected that the rates of change within each element are not the same. Five elements of culture can at least be distinguished from each other, namely religious system, social system, system of art, system of language, and economic system. History is included within the social system, as it is basically a tool of self image related to societies, whether taken as a whole or only parts of it.

The situation in most Southeast Asian countries at the moment is that traditional cultures are, to a certain degree, undergoing a process of disintegration. It means, linkages between those elements of culture are changing. Old functions are shifted, disturbed, or even extinguished. Most drastic changes can be found within the economic system, where technology, the cognitive subsystem, science, and the professional subsystem are part of it. On the other hand, the most persistent element of those traditional cultures seems to be art. Art gives an immediate, direct impression of the

differentiating traits of a culture. Through art one can often feel into a people's values and preferences. This fact explains why people often think of art when they speak of culture.

In some cases in cultural history it was just the influences of western art that had been instrumental for the integration of some newly formed nations in Asia, which are originally multicultural. These artistic factors, along with the adoption of newly introduced concepts such as *political freedom*, *scientific method*, and *individuality* had brought about modernity in Asian countries.

### **The Museum Presentations: Present and Future**

A multicultural setup in museum presentation is found in a category of museums that is called "general museums". It is differentiated with "specific museums". The main museums in the provinces are the "state museums" organized by the government. In addition, some provinces have specific museums, either owned by the (central or provincial) government, or private. The Special Province of Jakarta does not have a state museum, because it already has a higher level National Museum. In addition, Jakarta has a multitude of specific museums, both government owned and private.

The general museums managed by the government basically represent two major themes, namely: (1) the cultural history of Indonesia; and (2) the cultural variety of Indonesia. The National Museum in Jakarta featured the first theme most adequately compared to all the state museums in the provinces, because it is the oldest general museum in Indonesia, founded by the Dutch colonial government. The National Museum also present an overview of the groups of ethnic cultures found in Indonesia. The State Museums of the provinces, on the other hand, are at present focussing on making a collection and presentation of the variety of local cultures found in the respective provinces. Thus, a more detailed subdivision of cultures can be seen on display in State Museums.

As planned for the future, those State Museums is to be developed to broaden its scope for collection and display. This scheme is based on the expected condition, namely, that State Museums are not to be regarded only as a display media for outsiders to know about the respective culture(s) of the province, or as well an instrument of education for local people to know

about themselves, but they should also be developed into a window to the broader scope of Indonesian culture, both horizontally and in time depths. At present, meanwhile, some State Museums are being developed or prepared to have special relations with another museum from another country. The inauguration of a Thai Room in the State Museum of North Sumatra, Medan, was a step in that direction.

Darwin, September 7th, 1997

## SENI MINANG UNTUK MUATAN LOKAL \*)

### Tentang Muatan Lokal

Kurikulum untuk sekolah-sekolah umum yang berlaku dewasa ini, baik untuk sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan tingkat atas, mengandung di dalamnya sekitar 20 persen alokasi untuk apa yang dinamakan "muatan lokal", di samping pelajaran-pelajaran pokok yang standar dan berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Muatan lokal terdiri dari pelajaran-pelajaran yang dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah, dan bahkan oleh masing-masing sekolah, yang mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan khusus ataupun kekhasan yang terdapat di daerah masing-masing.

Di antara kebutuhan-kebutuhan khusus yang dapat dicontohkan adalah yang berkenaan dengan mata pencaharian pokok dari penduduk setempat. Suatu daerah di mana sebagian terbesar penduduknya adalah nelayan, misalnya, dapat memasukkan ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolahnya pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan perkapalan, perikanan, dan pengetahuan kelautan. Demikian pula misalnya jika di suatu daerah mata pencaharian yang menonjol adalah membuat produk kerajinan tertentu, seperti sulaman, keramik, ukiran kayu, dan lain-lain, maka pelajaran-pelajaran di bidang teknik dan seni kerajinan yang bersangkutan dapat diberikan sebagai muatan lokal. Contoh-contoh dapat diperluas dengan jenis-jenis mata pencaharian lain, seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat, agro-industri, industri berat, dan lain-lain.

Di samping dikaitkan dengan mata pencaharian hidup, muatan lokal juga dapat dikaitkan dengan kekhasan suatu daerah, baik berkenaan dengan lingkungan alamiahnya maupun dengan warisan sosial-budayanya. Lingkungan alamiah itu dapat dilihat pada berbagai hal, seperti keadaan geografis, serta fauna dan floranya. Adapun warisan sosial-budaya di suatu daerah yang merupakan tempat asal suku bangsa tertentu dapat dipilah pula ke dalam berbagai seginya, seperti adat-istiadat, struktur sosial (termasuk di dalamnya pola hubungan keluarga), arsitektur, seni pertunjukan, seni rupa,

---

\*) Makalah Seminar "Tari Minang untuk Pendidikan" dalam rangka Galanggang Tari Sumatera '97. Diselenggarakan oleh Nan Jombang group di Taman Budaya Padang, 8-10. 1997



seni sastra, bahasa, serta teknik-teknik khas pembuatan benda-benda dari bahan-bahan yang khas terdapat atau digunakan di daerah tersebut.

Demikianlah prinsip-prinsip untuk pemberian muatan lokal dalam program pendidikan umum di Indonesia, yang sudah tentu membutuhkan program pembinaannya tersendiri agar dapat diterapkan dengan semestinya. Program pembinaan muatan lokal itu secara garis besar mempunyai dua aspek, yaitu di satu sisi pengadaan bahan-bahan ajar, sedangkan di sisi lain pengadaan atau penataran tenaga-tenaga pengajar yang kompeten untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang termasuk muatan lokal tersebut. Aspek-aspek itu akan dibahas berikut ini, dengan mengkhususkan perhatian pada bahasa dan seni.

### **Masalah Substansi**

Pembahasan mengenai pelajaran bahasa dan seni dalam pembicaraan ini disatukan karena dalam beberapa hal keduanya terkait erat, meskipun masing-masing pun punya kemandiriannya sebagai suatu bidang ilmu. Bahasa adalah wadah dari konsep-konsep yang ada dan dikembangkan dalam kebudayaan yang bersangkutan. Fungsi pertama dari bahasa adalah memang sebagai sarana konseptualisasi, dengan fungsi-fungsi lanjutan sebagai sarana komunikasi dan sarana ekspresi seni. Bentuk-bentuk seni yang secara langsung menggunakan bahasa sebagai medianya adalah seni sastra dan seni teater. Oleh karena itu maka pemahaman seni sastra dan seni teater tak mungkin lengkap tanpa pemahaman bahasa yang memadai.

Pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal, dengan demikian, boleh diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat, para siswa khususnya, terhadap khasanah budaya setempat. Masalah yang harus diatasi adalah bagaimana mengadakan bahan-bahan ajar yang baik dan tepat. Untuk pengajaran bahasa yang diperlukan adalah kemasakan khusus sesuai jenjang masing-masing, yang terdiri dari kamus dua arah, uraian tata bahasa, serta bahan-bahan latihan dan bacaan. Penyusunan bahan-bahan tersebut memerlukan keahlian di bidang linguistik terapan.

Pengajaran seni pun memerlukan perpaduan antara ahli seni yang bersangkutan dan ahli pendidikan. Dalam hal memilih materi untuk daerah Minangkabau, atau Sumatera Barat dewasa ini, perlu dibuat ketentuan yang jelas mengenai prinsip apa yang digunakan. Kemungkinan pertama adalah

bahwa untuk sekolah tertentu dipilih khasanah seni yang khas milik dari sebuah *negari* atau negara-negara yang terdekat. Kemungkinan kedua adalah menghimpun lebih dahulu keseluruhan khasanah seni Minang dari seluruh negari serta *luhak* yang ada, lalu kemudian menyeleksi keseluruhannya itu ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kesulitan serta kompleksitas unsur-unsur tehnik-estetiknya. Selanjutnya atas dasar pengelompokan itu ditentukan penjenjanganannya untuk diberikan di sekolah-sekolah.

Kemungkinan pertama dan kedua yang telah disebutkan di atas itu menyangkut hanya khasanah budaya yang telah terbukti merupakan "warisan budaya", artinya yang kurang-lebih telah berkembang selama tiga generasi, atau lebih. Kemungkinan ketiga dalam menentukan materi seni untuk diajarkan di sekolah itu adalah, di samping apa yang telah disebutkan dalam kemungkinan kedua tersebut, juga dimasukkan karya-karya baru yang diciptakan oleh seniman-seniman secara individual, seperti oleh Syofyani Yusaf, Huriyah Adam, Gusmiati Suid, dan lain-lain. Persoalannya adalah untuk menentukan kriteria yang membatasi antara karya-karya seni yang jelas betul sifat keMinangannya dengan karya-karya baru yang menggunakan keMinangan hanya sebagai referensi saja dan selanjutnya karya-karya tersebut diciptakan dengan anjakan kebebasan tanpa pembatasan gaya dan tehnik.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka tampaklah bahwa pengadaan materi ajar untuk sekolah-sekolah itu memerlukan upaya yang terencana dan jelas arahnya. Permasalahan itu pun perlu dilihat secara integral: dari segi cakupan subyek yang diajarkan, dari segi penjenjangan materi agar sesuai dengan tingkat-tingkat pendidikan umum yang ada, maupun dari segi kualifikasi guru serta metode evaluasinya.

### **Guru dan Evaluasi**

Guru yang dapat mengajarkan bahasa dan seni daerah haruslah seseorang yang telah mengetahui betul subyek yang diajarkannya itu. Idealnya, penguasaan guru tersebut tidaklah sebatas bahan ajar yang sesuai untuk kelas yang dipegangnya saja, melainkan perlu lebih komprehensif daripada itu. Bagi seorang pengajar bahasa, semestinyalah ia itu juga penutur yang baik dari bahasa tersebut. Bukan hanya penguasaan tata bahasa, melainkan juga cara ucapannya yang benar serta contoh-contoh penggunaannya yang luas (lebih luas dari pada bahan-bahan latihan yang tersaji di buku

pelajaran) perlu dikuasainya juga untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan apapun dari para murid.

Demikian pula lebih-lebih bagi pengajar seni. Sang guru perlu mengantongi penguasaan khasanah yang jauh lebih luas dari pada sasaran kelasnya saja, karena sewaktu-waktu ia harus dapat memberikan contoh-contoh untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan para murid. Berbeda dengan pengajar bahasa daerah yang dapat dipersiapkan dari seorang guru mata pelajaran lain yang kebetulan juga penutur asli, dan ini dapat dilakukan melalui penataran, maka pengajar untuk pelajaran-pelajaran seni pada umumnya memerlukan suatu keterlatihan yang cukup mantap untuk *melandasi* penguasaannya terhadap materi-materi ajar sesuai dengan sasaran kelas. Pada dasarnya penyediaan guru yang sedemikian ini tak dapat dipenuhi hanya melalui penataran singkat, karena penguasaan materi yang diharapkan tidak semata-mata menyangkut pengertian kognitif, melainkan memerlukan kemahiran-kemahiran psikomotorik yang memerlukan pelatihan yang intensif dan lama. Hal itu diperlukan karena efektifitas pelajaran seni hanya akan ada jika sang guru mampu memberikan contoh-contoh dengan cara sebagus-bagusnya.

Masalah berikut yang perlu ditangani terlebih dahulu sebelum memberikan pelajaran seni adalah berkenaan dengan metode evaluasinya. Skoring untuk mendapatkan nilai prestasi seorang murid harus dilakukan melalui penyiapan instrumen yang dapat diandalkan. Dengan demikian maka usaha terawal dalam hal ini adalah untuk lebih dahulu menyusun suatu panduan untuk memindahkan nilai-nilai kualitatif hasil pengamatan ke dalam nilai-nilai kuantitatif agar skoring dapat dilakukan. Kemahiran untuk mengamati nilai-nilai kualitatif itu lah yang sungguh-sungguh memerlukan keahlian dan pengalaman dari seorang guru di bidang seni tertentu yang diajarkannya. Memang sebuah sekolah dapat saja mengundang seorang seniman profesional untuk mengajar, tetapi dalam hal evaluasi maka guru tetap atau kepala sekolah yang bersangkutan lah yang sebenarnya harus mempertanggung-jawabkannya, melalui metodologi pendidikan dan pengajaran yang menjadi bidang keahliannya.

### **Tari Minang untuk Pendidikan Pada Umumnya**

Tari Minang, sebagaimana juga tari-tari daerah lain di Indonesia, mempunyai peluang untuk menjadi sarana pendidikan dalam rangka

membentuk pribadi manusia Indonesia yang 'utuh', dalam arti hidup daya nalarnya, hidup rasa seninya, serta hidup rasa agamanya. Tari dapat memberikan latihan untuk menghidupkan potensi rasa seni dalam diri manusia, serta di samping itu juga menumbuhkan percaya diri melalui penguasaan gerak tubuh di hadapan umum.

Suatu gaya tari tertentu juga mencetakkan suatu sikap tertentu dalam diri seseorang yang mempelajarinya. Sifat cekatan dan dinamis adalah watak tari yang diajarkan oleh tari Minang. Tari dari daerah-daerah lain mempunyai pula sifat-sifatnya yang khas. Pada lingkup pergaulan nasional kekhasan dari masing-masing gaya tari itu dapat saling dipelajari, untuk selanjutnya saling dihargai dan dicintai, sehingga dengan demikian integrasi nasional dapat turut diperkokoh oleh interaksi di bidang tari tersebut.

Tari Minang dengan demikian mempunyai fungsi untuk penguatan jatidiri Minang bagi orang Minang sendiri, tetapi di samping itu juga dapat mempunyai fungsi memperkuat integrasi nasional apabila dilihat pada pergaulannya dalam forum seni nasional. Perluasan jangkauan pergaulan ini lah yang senantiasa diharapkan pada para seniman tari Minang. Pada waktu ini posisi tari Minang dalam lembaga-lembaga pendidikan formal sudah baik, karena semua perguruan tinggi seni (negeri dan IKJ) telah mencantumkan tari dan atau musik Minang di dalam kurikulumnya. Di dalam masyarakat luas pun terdapat grup-grup seni pertunjukan Minang, dengan mutu yang bervariasi. Khalayak pemirsa Indonesia pada umumnya mengharapakan tampilan grup-grup seni pertunjukan Minang ini dari hari ke hari semakin bermutu. Grup Nan Jombang diharapkan selalu menjadi teladan dalam penciptaan keunggulan itu.

Jakarta, 7 Oktober 1997

# KEBIJAKAN PEMBINAAN SENI BUDAYA DI INDONESIA \*)

## Latar

Pembinaan seni budaya di Indonesia sudah tentu disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Karena kata "pembinaan" itu sendiri mengandung makna 'dari atas ke bawah', maka pihak yang dianggap harus atau perlu melakukan pembinaan itu adalah pihak yang mempunyai peranan menjalankan pemerintahan, atau paling sedikit mempunyai peranan melakukan pengaturan-pengaturan. Dari zaman ke zaman fungsi pembinaan seni budaya itu dijalankan, namun selalu berbeda-beda sasaran dan caranya, karena fungsi sosial dari seni budaya itu pun selalu berbeda mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang ada di zamannya masing-masing.

Di samping mengikuti perbedaan zaman, pembinaan kesenian juga dapat berbeda-beda menurut luas cakupan masyarakat atau golongan masyarakat yang menghajatkan dan memiliki kesenian tersebut. Dalam suatu negara besar bisa terdapat berbagai golongan etnik dengan kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing itu menempatkan kesenian pada fungsi dan kedudukan yang bervariasi pula. Keanekaragaman fungsi kesenian itu dapat dicontohkan oleh fungsi-fungsi sebagai : sarana penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib, sarana peneguh status pemimpin masyarakat, sarana intensifikasi mitos-mitos, sarana pergaulan pemuda-pemudi, sarana hiburan umum, sarana pengembangan konsep-konsep estetik, dan bahkan juga sarana katarsis.

Perkembangan kesenian bergantung pula pada besar kecilnya kalangan yang memiliki suatu bentuk kesenian tersebut. Pengertian memiliki di sini tidak selalu harus berarti pemilikan langsung, dalam arti kelompok manusia yang bersangkutan dapat menikmati bentuk-bentuk kesenian yang 'dimilikinya' itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam masyarakat yang berpelapisan, dan adanya lapisan-lapisan masyarakat tersebut senantiasa dibina melalui usaha-usaha intensifikasi yang sistematis. Seringkali terdapat bentuk-bentuk kesenian yang khusus hanya boleh digiati di kalangan raja dan lingkungan terdekatnya. Namun demikian, meski pemilikan langsung

---

\*) Makalah disampaikan dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara IX. Pertemuan Sastrawan Indonesia 1997, Sumatera Barat. 6-11 Desember 1997.

seolah-olah hanya terbatas pada kalangan raja saja, gema dari kehadiran bentuk-bentuk kesenian tersebut sampai juga ke kalangan yang lebih luas di bawah kewenangan raja yang bersangkutan, dan dengan demikian kalangan luas tersebut dianggap memilikinya pula secara tidak langsung. Sampainya gema tersebut adalah melalui kehadiran para pejabat tinggi dari pusat maupun daerah, yang pada kesempatan-kesempatan tertentu hadir pada saat penyajian bentuk-bentuk seni pertunjukan tertentu, atau diperbolehkan menyalin karya-karya seni rupa atau seni sastra tertentu. Perembesan informasi seni dari atas ke bawah itu juga dapat terjadi melalui mobilitas ulang-alik dari para seniman dari daerah/desa yang pada kasus-kasus atau kesempatan-kesempatan tertentu memperoleh peluang untuk berkarya di istana-istana. Dalam kasus hubungan ulang-alik ini terjadilah juga arus informasi seni dari bawah ke atas.

Sebaliknya daripada itu, ada bentuk-bentuk seni yang dikenal hanya pada kelompok-kelompok kedaerahan tertentu dalam suatu masyarakat kebangsaan, dan kelompok-kelompok lain tidak berminat untuk meniru atau mengikutinya. Kondisi seperti ini membuat kepemilikannya pun berada dalam kalangan yang relatif sempit.

Melintasi kondisi-kondisi dasar seperti itu, sejarah bergulir dari masa ke masa, membawa serta perubahan-perubahan dalam dimensi maupun struktur dari masyarakat (-masyarakat) yang bersangkutan. Batas-batas kenegaraan berubah-ubah dalam perjalanan sejarah, aliansi-aliansi antar negara pun mengalami dinamikanya tersendiri. Dengan latar sejarah yang demikian itu lah kemudian lahir bangsa Indonesia, suatu bangsa baru yang melahirkan diri didorong oleh niat untuk bersatu dan melepaskan diri dari penjajahan oleh bangsa asing.

### **Kebijakan Pembinaan Seni di Indonesia**

Kebijakan pembinaan seni di Indonesia mengikuti amanat dasar dari Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, khususnya yang berkenaan dengan kebudayaan. Sari dari amanat itu adalah bahwa Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional, sedangkan pengertian dari "kebudayaan nasional" itu sendiri mencakupi keseluruhan hasil akal-budinya bangsa Indonesia, termasuk yang berasal dari luar tetapi dianggap dapat

memperkaya kebudayaan bangsa, serta juga yang berasal dari kebudayaan lama dan asli yang merupakan puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Dalam konteks itu lah dapat diperbedakan dimensi dan cakupan kebudayaan di Indonesia, yaitu antara yang "nasional" dan yang "sub-nasional". Yang disebutkan terakhir itu secara mudahnya disebut "kebudayaan daerah" karena asalnya memang berpusat di daerah-daerah tertentu dari keseluruhan cakupan wilayah Republik Indonesia dewasa ini. Adanya kelompok-kelompok suku bangsa yang bermigrasi ke luar dari daerah asalnya dengan tetap membawa serta kebudayaannya menyebabkan penggunaan istilah "kebudayaan daerah" itu harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas bahwa yang dimaksud dengan "daerah" adalah daerah asal mula jadinya.

Dalam bidang kesenian, secara kategoris dapat diperbedakan antara "kesenian nasional" dan "kesenian daerah", dengan catatan bahwa dalam kenyataan perbatasan antara keduanya kadang-kadang kabur atau berimpitan. Secara pembatasan dalam pemikiran, yang dimaksud dengan kesenian nasional adalah kesenian yang diterima *secara umum* oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai miliknya.

Kebijakan pembinaan kesenian oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sudah-sudah adalah untuk meletakkan tiga sisi upaya pembinaan pada tempat dan proporsinya yang seimbang. Ketiga sisi pembinaan seni itu adalah: (1) pelestarian; (2) penciptaan; dan (3) pendidikan, baik formal maupun nonformal. Di samping ketiga aspek itu, untuk masa kini dan yang akan datang diperlukan pula penanganan aspek yang ke-4, yaitu upaya yang terarah dan sistematis untuk mengembangkan industri seni. Keempat aspek tersebut akan dijelaskan berikut ini.

Yang pertama adalah pelestarian. Hal ini perlu dilakukan karena khasanah seni di Indonesia yang sudah ada adalah merupakan warisan budaya bangsa yang telah terbukti memberikan sumbangan tersendiri bagi jatidiri bangsa. Khasanah yang terbukti mempunyai makna budaya, baik dilihat dari segi teknik, gaya, maupun konsep-konsep seni, perlu diusahakan agar dapat lestari, artinya tetap hidup terus. Bentuk-bentuk seni yang terbukti bertahan adalah yang berhasil membangun tradisi. Dalam hal ini perlu dikemukakan juga, bahwa tradisi seni yang mampu berkembang adalah tradisi seni yang memberi peluang bagi kreativitas para senimannya. Usaha pelestarian terdiri

dari berbagai kegiatan seperti pengajaran, pengkajian, serta pendokumentasian.

Aspek kedua dalam pembinaan seni adalah perangsangan penciptaan dalam arti luas. Di sini termasuk segala jenis penciptaan, baik yang masih dalam lingkup suasana tradisi, maupun yang keluar, bahkan menentang tradisi-tradisi seni yang ada. Penciptaan juga dapat bermodus penggabungan dari hal-hal yang asalnya saling terpisah, sudah tentu dalam suatu kesatuan baru yang terintegrasi.

Aspek pembinaan seni yang ketiga adalah pendidikan. Sudah sejak tahun 1950-an Pemerintah Republik Indonesia mendirikan perguruan-perguruan formal di bidang seni, baik pada tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Contoh awal dari perguruan-perguruan tersebut adalah Konservatori Karawitan, Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) yang mula-mula ada di Yogya, kelak kemudian disusul oleh Denpasar dan Bandung, dan Akademi Musik Indonesia (AMI). Menyusul pada tahapan waktu yang lebih kemudian adalah sejumlah Akademi Seni Karawitan Indonesia (di Surakarta dan Padang Panjang), Konservatori Tari, dan kemudian Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) yang melahirkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), serta penggabungan sejumlah akademi di Yogyakarta menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Di samping perguruan-perguruan yang khusus memberikan kesenian itu terdapat pula jurusan, kemudian fakultas seni rupa di dalam Institut Teknologi Bandung. Di samping itu pula terdapat sejumlah jurusan di dalam IKIP atau FKIP yang ditujukan untuk mencetak tenaga pengajar seni, seperti untuk Bahasa dan Sastra, Seni Rupa, Musik, serta belakangan muncul Sendratasik (seni drama, tari dan musik).

Adapun aspek pembinaan yang masih harus dimulai adalah pengembangan industri budaya untuk bidang kesenian. Kenyataan yang ada adalah bahwa industri tersebut telah berkembang luas di kalangan swasta, meski yang mampu bertahan masih didominasi oleh jenis seni hiburan. Ke dalam industri seni ini termasuk industri buku, industri film, industri rekaman musik dan industri sinetron. Situasi ini lah yang mengharuskan suatu intervensi yang sedemikian rupa sehingga bentuk-bentuk seni serius pun dapat berkembang sebagai subyek industri budaya. Apabila ini dapat terlaksana, artinya imbalan antara industri yang cenderung ke hiburan dan



yang cenderung ke peningkatan apresiasi seni yang serius, maka itu berarti penyebar-luasan karya-karya seni unggul pun akan dapat lebih merata, dan dengan kata lain "the right to culture" (hak untuk partisipasi dalam budaya) yang merupakan salah satu ayat yang diamanatkan oleh Declaration of Human Rights pun dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Padang, 6 Desember 1997

# **DINAMIKA BUDAYA DI ASIA TENGGARA**

## **MASA HINDU-BUDDHA :**

### **SEBUAH KERANGKA ANALISA \*)**

#### **Warisan Dari Masa Sebelumnya**

Asia Tenggara pada "masa Hindu-Buddha" (yaitu ketika agama Hindu dan atau Buddha menjadi agama utama atau terkemuka di dalam masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara) telah berkembang dengan di satu sisi, memberlanjutkan warisan budaya dari masa sebelumnya, dan di sisi lain menyerap dan mengolah masukan-masukan baru yang bersumber di India tersebut. Pada kebanyakan negara di Asia Tenggara masa awal pengaruh Hindu-Buddha tersebut sekaligus juga merupakan awal masa sejarah, karena pada masa itu lah baru digunakan dan dikembangkan tulisan-tulisan bersumber pada aksara-aksara yang berasal dari India, yang diperkenalkannya ke daerah-daerah tersebut adalah melalui pengajaran dan penyebar-luasan agama Hindu dan Buddha. Kecualian untuk ini hanyalah di negara-negara tertentu di masa lalu, seperti yang terdapat di sebagian wilayah yang sekarang bernama Vietnam, di mana mungkin pada masa yang lebih dini telah dikenal dan digunakan aksara Cina.

Pada masa prasejarah telah berkembang bangsa-bangsa dengan kebudayaannya masing-masing di Asia Tenggara, dan di antara bangsa-bangsa itu pun telah berlangsung komunikasi dengan berbagai taraf intensitas. Adanya saling hubungan itu disiratkan oleh persebaran temuan artefak-artefak sejenis (menunjukkan kesamaan teknik dan bentuk akhir) dalam cakupan wilayah yang luas, seperti keramik dengan ciri-ciri tertentu, maupun benda-benda perunggu seperti nekara dengan ciri-ciri yang terkait pula satu sama lain. Jenis benda-benda temuan yang berjelajah luas itu merujuk pada tahapan masa prasejarah "neolitik", di mana manusia sudah hidup menetap, dan "zaman logam" yang menyusulnya, ketika masyarakat telah mengenal pembagian tugas berdasar keahlian. Pada zaman-zaman yang telah disebutkan itu manusia dalam kelompok-kelompok yang semula berdasarkan kesatuan asal keturunan sudah tinggal menetap di desa, kecil ataupun besar. Mereka tidak lagi harus terus-menerus menghabiskan waktu untuk berpindah-pindah.

---

\*) Makalah Diskusi Ilmiah Arkeologi X, Bandung, 15-16 Desember 1997

Dengan tinggal menetap itu maka kebutuhan untuk berhubungan dengan kelompok manusia lain, baik itu penghuni desa lain ataupun masyarakat lain dengan kebudayaannya yang sama sekali berbeda, menjadi muncul karena, *pertama*, mereka menghasilkan surplus hasil pertanian maupun benda-benda buah teknologi yang mereka kembangkan, dan surplus itu memerlukan sasaran pelemparan, dan *kedua*, pengetahuan awal mengenai adanya masyarakat-masyarakat lain yang memiliki hal-hal yang berbeda, baik produk maupun adat-istiadat, merangsang keinginan lebih jauh untuk memiliki ataupun mengetahui. Dapat pula terjadi bahwa alasan kedua (keinginan memiliki hasil luar negeri) menyebabkan, atau lebih tepat memacu orang, untuk menumbuhkan alasan pertama (surplus). Pengembangan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain, beserta penyerapan unsur-unsur tertentu dari luar itu, berproses sebagai pengkayaan budaya.

Berbagai masyarakat di Asia Tenggara ini, pada masa lalu khususnya, memperlihatkan perbedaan yang besar antara satu dan lainnya berdasarkan kadar keterisolasian dan keterbukaan terhadap lingkungan di luarnya. Pihak-pihak yang lebih terbuka terhadap lingkungan luar seringkali mendapatkan diri berperan sebagai pusat-pusat perkembangan untuk daerah kitarannya, dan dengan demikian merupakan mediator antara kelompok-kelompok yang lebih terisolasi dengan dunia di luar mereka.

Eksplorasi, penemuan, dan penguasaan teknologi untuk memenuhi berbagai hajat hidup telah membawa manusia prasejarah di Asia Tenggara ke dalam berbagai pencapaian, yang terpenting di antaranya adalah teknologi untuk memproduksi benda-benda budaya yang berarti untuk dipertukarkan, dan teknologi pelayaran yang tentunya mendorong terciptanya sistem hubungan maritim di antara berbagai kawasan. Sistem yang disebut terakhir ini tidak hanya terdiri dari jaringan hubungan maritim, melainkan juga adat tatacara serta pembagian peranan yang semakin diintensifkan melalui peningkatan pengalaman dan pengembangan berbagai pengetahuan yang spesifik.

Mungkin sekali pada masa prasejarah menjelang masa sejarah atau proto-sejarah sudah terdapat perbedaan-perbedaan budaya antara satuan kebangsaan yang satu dengan satuan kebangsaan yang lain. Perbedaan ini kiranya bukan hanya berdasarkan corak budaya yang sebagian disebabkan oleh lingkungan alam yang berbeda-beda, tetapi juga perbedaan terdapat

pada taraf perkembangan pengetahuan dan taraf keterbukaannya terhadap bangsa lain. Pada bangsa-bangsa yang telah mengembangkan pola hidup menetap dikenal satuan wilayah hunian bersama terkecil setaraf dusun atau desa, yang diberbagai daerah di Asia Tenggara ini, pada berbagai bangsa, dikenal dengan berbagai istilahnya masing-masing, yang otentik, non-Sanskrit dan non-Cina. Bahkan di berbagai daerah telah dikenal federasi sejumlah desa yang mempunyai pimpinannya tersendiri, seperti halnya di Jawa. Pada taraf perkembangan itu, suatu pengertian rudimenter mengenai kesatuan bersistem yang mempunyai pusat dan pinggiran dapat diasumsikan telah ada. Pada bentangan masyarakat dan budaya prasejarah yang demikian itu lah kemudian bertumbuh di berbagai tempat pusat-pusat peradaban baru yang dirangsang oleh perkenalan dengan agama Hindu dan Buddha.

### **Dampak Pertemuan dengan Agama Hindu dan Buddha**

Pengenalan konsep-konsep keagamaan baru, yang mengandung pula di dalamnya pemikiran tentang tatanan alam semesta dan tata kemasyarakatan manusia, yang diperkenalkan oleh agama Buddha dan Hindu (yang keduanya bersumber pangkal di India), pada suatu masa, khususnya di abad ke-7 Masehi dan sekitarnya, menjadi suatu momentum yang menggerakkan perubahan-perubahan besar dalam berbagai masyarakat di Asia Tenggara, yang berkulminasi pada pembentukan negara-negara yang mengambil model kerajaan Hindu sebagai acuannya. Momentum ini tidak lagi hanya menumbuhkan kerajaan-kerajaan kecil yang sporadis, melainkan kerajaan-kerajaan yang mungkin lebih besar, dan yang jelas membawakan perubahan-perubahan yang lebih menyeluruh meliputi berbagai sektor kehidupan dan mempengaruhi kalangan penduduk yang lebih luas. Ini lah zaman ketika konsep-konsep keagamaan baru itu meninggalkan wujudnya dalam bangunan-bangunan keagamaan yang tentunya memerlukan keterlibatan kalangan luas dari penduduk dalam proses perancangan, pembangunan, perawatan dan penggunaannya.

Masa ini juga menandai awal dari masa sejarah, berkat pengenalan dan penggunaan sistem-sistem aksara yang berasal dari india seperti Siddhamatrka dan Pallava, sekaligus bersama dengan pengenalan dan penguasaan bahasa Sanskerta yang cangguh, yang telah disusun dengan terencana beserta segala peristilahan tata bahasanya. Bahasa itu lah yang

menjadi wahana bagi penuangan ajaran-ajaran keagamaan beserta seluruh pengetahuan yang terkait dengannya, secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kata lain, untuk pertama kali dalam pengalaman sejarah sebagian besar orang Asia Tenggara, pada masa Hindu-Buddha ini diperkenalkan suatu sistem kepercayaan yang terformulasikan dalam sastra tertulis yang mantap, serta relatif utuh terintegrasi pula dengan berbagai segi kehidupan lain, seperti sistem organisasi sosial, sistem kesenian, sistem pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi peranan-peranan baru pun terjadi bersamaan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha itu, yang memang memperkenalkan tata masyarakat baru beserta kebutuhan-kebutuhan akan berbagai jenis tenaga ahli baru yang diperlukan untuk menjalankan kedua agama yang telah mendunia tersebut dalam keseluruhannya yang utuh. Dinamika sosial tentunya diguncang dalam percepatan ketika proses penyerapan terjadi pada awalnya.

### **Dinamika Budaya**

Masuknya agama Hindu dan Buddha beserta segala kelengkapan konseptualnya, yang menurunkan pula kemahiran-kemahiran tertentu dalam teknologi, seni dan laku peribadatan, tidaklah menjadikan kebudayaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara tenggelam di bawah pengaruh tersebut. Kenyataan sejarah kebudayaan di kawasan ini menunjukkan bahwa penyerapan substansi baru tersebut menghasilkan ekspresi budaya yang memperlihatkan karakter masing-masing bangsa, meskipun ajaran-ajaran keagamaannya, baik itu Hindu atau Buddha dalam berbagai alirannya, tetap dipegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Keanekaragaman ekspresi budaya tersebut merupakan fungsi dari bertahan kuatnya warisan budaya dari masa-masa sebelumnya. Bahasa Sanskerta, meskipun menjadi bahasa sumber utama tidak pernah menggusur bahasa asli dari bangsa-bangsa tersebut. Di samping keberadaan sastra berbahasa Sanskerta terdapat pula sastra berbahasa asli. Bahasa-bahasa asli tersebut, khususnya yang digunakan dalam sastra tertulis, diperkaya dengan kata-kata Sanskerta yang mewakili konsep-konsep baru, serta kata-kata biasa yang patut diserap demi pemenuhan kebutuhan penulisan karya-karya sastra kelas tinggi dalam metrum yang diambil alih atau mengambil contoh sastra kavya. Sastra 'berkelas' ini dikembangkan di kalangan golongan atas masyarakat, sedangkan rakyat kebanyakan tetap

mengembangkan sastra setempat, khususnya yang lisan, sambil dari waktu ke waktu mengacu atau meniru sastra tinggi tersebut.

Seperti telah disebutkan terdahulu, tidak semua satuan kebangsaan di Asia Tenggara mengambil alih citra kehinduan secara serempak dan sama rata. Ada di antaranya yang tetap berpegang pada struktur masyarakat aslinya yang lebih egaliter. Di samping itu, dalam berbagai konfigurasi kewenangan dan kedaulatan terbentuklah kerajaan-kerajaan, yang berpusat di suatu ibukota kerajaan yang juga merupakan pusat dari pengembangan kecanggihan hidup. Maka perlu senantiasa diperhitungkan dinamika antara pusat dan pinggiran di dalam masing-masing kerajaan tersebut. Di samping itu, dari waktu ke waktu dapat muncul suatu pusat yang terkuat di antara yang lain dalam kawasan yang lebih luas.

Suatu wilayah kajian yang masih memerlukan perhatian lebih besar adalah yang berkenaan dengan hubungan antara pusat yang satu dengan pusat lain yang sezaman, katakan misalnya antara Ayuthya dan Majapahit. Merupakan pertanyaan tersendiri, apakah perubahan-perubahan budaya yang memperlihatkan adanya pengaruh dari suatu bangsa terhadap yang lain, atau saling pengaruh antara keduanya, lebih ditentukan oleh hubungan antara pemerintahan pusat kedua bangsa, ataukah lebih disebabkan oleh pertemuan-pertemuan informal di kalangan rakyat, baik di lapangan perdagangan, pelayaran, keagamaan, ataupun kesenian. Tradisi mengenai adanya hubungan-hubungan langsung ini pun bukannya tidak ada.

Suatu hal lain yang mungkin mempunyai fungsinya tersendiri dalam dinamika kebudayaan di Asia Tenggara adalah para perantara. Di kawasan Asia Tenggara dikenal adanya bangsa-bangsa tertentu yang kiranya amat cocok untuk menjadi perantara budaya. Mereka itu adalah para pelayar dan para penghuni daerah pantai, seperti misalnya orang Bugis dan Melayu. Di samping itu tentunya berperan pula orang-orang asing yang secara mengelompok berdiam di negeri-negeri yang berbeda-beda dapat berpeluang memperkenalkan unsur-unsur ekspresi budaya dari tanah asalnya.

Bandung, 15 Desember 1997

## **"PERAN GANDA WANITA" DALAM TINJAUAN KEBUDAYAAN \*)**

Ungkapan "peran ganda wanita" mengandung pengertian bahwa dalam keadaan normal wanita itu mempunyai satu peran tertentu yang khusus baginya, namun dalam 'keadaan tertentu' ia diberi peranan lain sehingga perannya menjadi ganda. Pada umumnya yang dimaksud dengan peran ganda tersebut adalah satu peran di sisi domestik ditambah dengan satu peran lagi di sisi publik. Pemberian atau pengalokasian peran ganda tersebut umumnya dikaitkan dengan "kemajuan zaman", di mana dianggap bahwa wanita tidak lagi harus 'dikungkung' dalam peran 'tradisional' di sisi domestik saja, melainkan harus juga 'maju' dan berperan di sisi publik, dan hal ini dikaitkan dengan kemajuan pendidikan yang sekarang ini dapat diraih oleh wanita.

Asumsi-asumsi di sekitar pemikiran mengenai peran ganda wanita tersebut kiranya perlu dipertanyakan dengan meninjaunya dari sudut sejarah dan keanekaragaman budaya. Di samping itu, apabila kini dicanangkan begitu keras tuntutan akan peran ganda wanita dalam arti ia harus dapat berperan sebagai "mitra sejajar" pria di sisi publik, maka terkait dengan itu adalah tuntutan agar pria pun dapat berperan ganda sebagai 'mitra sejajar' wanita di sisi domestik.

Sebenarnya, gambaran bahwa wanita tempatnya di dalam rumah dan pria adalah pencari nafkah yang harus ke luar rumah adalah tidak bersifat universal. Demikian pula lah gambaran bahwa wanita adalah mahluk lemah lembut yang selalu harus dilindungi oleh pria yang bersifat satria dan gagah perkasa. Citra semacam itu adalah hasil perkembangan tata cara hidup di kalangan bangsawan dalam berbagai masyarakat berpelapisan. Di Eropa, pencitraan wanita dalam kedudukan seperti itu konon mencapai puncaknya di zaman ratu Victoria di Inggris. Berkembanglah etiket yang mengatur tata pergaulan yang membedakan betul sikap yang harus diambil masing-masing oleh wanita dan pria. Wanita harus "be a lady" dan pria harus "be a gentleman" yang sebaik-baiknya, mengikuti pola-pola perilaku yang sudah dibakukan.

---

\*) Makalah disampaikan pada Semiloka "Retrospeksi Peran Ganda Wanita untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI." Diselenggarakan oleh YASIKA (Yayasan Sosial untuk Ibu dan Kesejahteraan Anak). Surakarta. 19-20 Desember 1997.

Pada beberapa suku bangsa di Indonesia sebenarnya terdapat pandangan mengenai peran wanita yang tidak selalu mengacu kepada pola pembagian peran yang dianggap konvensional itu. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kepada wanita diberikan alokasi tugas seperti yang biasa diberikan kepada pria. Pada suku bangsa tertentu di Irian Jaya, misalnya, dikenal folklore di mana sang ibu lah yang memberikan pelajaran berburu kepada anaknya. Wanita suku bangsa Dayak Kenyah pun melaksanakan tugas-tugas menugal di ladang yang jauh (berkilometer jaraknya dari rumah), serta mengangkut padi dalam wadah-wadah yang besar. Wanita pada suku bangsa Minang menentukan garis keturunan dalam keluarga besar. Mereka pun, sebagaimana juga wanita-wanita dari berbagai suku bangsa lain di Indonesia (Batak, Jawa, Bali dll) lazim melakukan aktivitas perdagangan dan industri secara mandiri.

Namun, memang harus diakui juga bahwa preferensi kepada anak laki-laki terdapat juga dalam banyak kebudayaan suku bangsa kita, termasuk pada suku-suku bangsa yang meletakkan wanita pada peran-peran yang penting seperti pada contoh-contoh tersebut di atas. Preferensi kepada pria pada umumnya terkait dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah utama. Dalam masyarakat yang menganut tata nilai demikian itu, seorang suami dianggap harus 'lebih unggul' daripada isteri. Kelebihan itu, sayangnya, seringkali tidaklah ditekankan pada kewibawaan dan tanggungjawabnya saja, melainkan juga dikaitkan dengan skala yang dipancarkan untuk menempatkan jenis-jenis pekerjaan dalam urutan berjenjang. Di samping itu, apabila sang isteri bekerja juga dan berpenghasilan lebih besar daripada sang suami, maka hal itu dipandang tidak mengikuti 'pola umum', dan bahkan dapat membuat sang suami merasa kecut. Pandangan masyarakat yang demikian ini lah yang seringkali menghambat langkah wanita untuk menjalankan karir dalam berbagai lapangan kerja.

Namun, meski ada kendala-kendala seperti itu, kita pun perlu dengan optimis melihat kenyataan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia yang menguntungkan bagi peningkatan peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Kemajuan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, yang keduanya bebas dimasuki oleh kaum perempuan, dapat pula menghasilkan banyak tenaga terdidik dan tenaga ilmuwan wanita. Demikian pula kaidah "anak laki-laki dan perempuan sama saja", yang sasarannya semula adalah berhasilnya program Keluarga Berencana (agar



pasangan-pasangan suami-isteri tidak menambah anak terus untuk mendapat anak laki-laki), pada akhirnya juga berhasil meningkatkan nilai anak perempuan dan selanjutnya juga membuka peluang pengambilan peran yang sama antara pria dan wanita dalam berbagai bidang pekerjaan.

Maka, kembali pada masalah peran ganda, maka nilai budaya yang selanjutnya perlu ditumbuhkan dan diintensifkan adalah bahwa peran ganda harus disadari sebagai tuntutan zaman di masa kini, dan bahwa yang perlu berperan ganda adalah baik isteri maupun suami. Di samping itu, sebenarnya masih ada berbagai jenis peran ganda yang lain dalam masyarakat Indonesia yang perlu dikaji, yaitu peran dalam lebih dari satu bidang pekerjaan. Sebaliknya daripada itu, peluang untuk berperan ganda bagi wanita ini pun hendaknya tidak menjadi kaidah pengungkung yang baru, yaitu yang menganggap bahwa wanita yang berperan tunggal (sebagai ibu rumah tangga saja, atau sebagai orang berkarir saja) sebagai sesuatu yang dianggap "kurang maju" atau "kurang berperan". Dengan kata lain, yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari apapun yang dikerjakannya, dan bukan kuantitasnya.

Jakarta, 18 Desember 1997

